RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2018-2023

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018-2023



TERWUJUDNYA MASYARAKAT BARITO UTARA
YANG RELIGIUS, MANDIRI DAN SEJAHTERA
MELALUI PERCEPATAN PENINGKATAN
PEMBANGUNAN DIBIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,
INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI KERAKYATAN













PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2019

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguna Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

DAN

BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
13. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
14. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya daerah secara terencana untuk mewujudkan visi daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

21. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluar (Output), dalam bentuk barang dan jasa.

Pasal 2

Maksud disusunnya RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam:

a. penyusunan RKPD;
b. penyusunan Renstra PD;
c. penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
d. penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musrenbang secara berjenjang.

Pasal 3

Tujuan disusunnya RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu :

a. sebagai satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
c. memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;

d. sebagai penjabaran gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati; dan

e. sebagai satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah.

BAB II

PENYUSUNAN

Pasal 4

(1) Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 berpedoman pada :

a. RPJMN 2015-2019;

b. Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024;

c. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021;

d. RPJPD Kabupaten Barito Utara 2005-2025;

e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039; dan

f. RPJMD Kabupaten sekitar.

(2) RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menggambarkan :

a. visi dan misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan

b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(3) RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB III

SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 5

(1) Sistematika RPJMD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;

b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;

d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;

e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

f. BAB VI : Strategis, Arah kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;

g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;

h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

i. BAB IX : Penutup

(2) Isi dan uraian lebih lanjut sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati melalui perangkat daerah yang tugas pokoknya dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. kebijakan perencanaan RPJMD Tahun 2018-2023; dan

b. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebijakan perencanaan RPJMD Tahun 2018-2023;
b. pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023; dan
c. hasil RPJMD Tahun 2018-2023.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023

Pasal 7

(1) Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Bupati dapat menyempurnakan RPJMD.

(2) Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 hanya dapat dilakukan apabila:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, perubahan perangkat daerah, perubahan kebijakan nasional, atau perubahan kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah; dan/atau
d. bertentangan dengan kebijakan nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah.

(3) Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

(1) Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 target sasaran kinerja yang ditetapkan telah tercapai, maka dirumuskan kembali besaran target sasaran kinerja baru.
(2) Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 target sasaran kinerja yang ditetapkan sulit tercapai, maka dirumuskan penyesuaian kembali besaran target sasaran kinerja baru.
(3) Target sasaran kinerja baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Bupati wajib menyiapkan rancangan RPJMD periode berikutnya dan menyusun RKPD tahun pertama RPJMD periode berikutnya.
(2) Penyusunan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun periode pemerintahan berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018-2023.
(3) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018-2023 sebelum RPJMD periode berikutnya tersusun.
(4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih berikutnya.
(5) RPJMD dijadikan sebagai dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 22 Maret 2019

BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 22 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

JAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01,35/2019

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 5 ayat (2), RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJM Nasional. Selain daripada itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMN. Mekanisme penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip : keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, serta keterukuran. Disamping itu secara terpadu juga menerapkan pendekatan-pendekatan : partisipatif *(bottom up), top down,* teknokratik, politis, dan inovatif

yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dan digunakan sebagai arahan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 1



BUPATI BARITO UTARA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018-2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

2019



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Kami Panjatkan Puji syukur kepada ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karuniaNya, sehingga dapat terselesaikannya dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 65 ayat 1, mengamanatkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 ini, memperhatikan Peraturan Presiden No 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 – 2019 dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025. Kemudian diselaraskan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2016-2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039.

Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang bermuara pada penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dengan tersusunnya RPJMD ini, diharapankan dapat mempercepat proses pembangunan menuju masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Muara Teweh, 22 Maret 2019

BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR xviii

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-7
1.4. Maksud dan Tujuan I-8
1.5. Sistematika Penyusunan I-9

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1 Aspek Geografis II-1
2.1.2 Aspek Demografi II-5
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-7
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .. II-7
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial II-17
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah raga II-19
2.3 Aspek Pelayanan Umum II-22
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintaha Wajib II-22
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dangan Pelayanan Dasar II-37
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan II-62
2.3.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan II-71
2.4 Aspek Daya Saing Daerah II-82
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-82
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-88
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi II-92
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia II-96

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD III-2
3.1.2 Neraca Daerah III-7
3.1.3 Rasio Likuiditas III-13
3.1.4 Rasio Solvabilitas III-14
3.1.5 Rasio Kewajiban Terhadap Aset III-15
3.1.6 Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset III-15
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-15
3.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah III-16
3.2.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah III-19
3.2.3 Proporsi Penggunaan Anggaran III-23
3.2.4 Analisa Pembiayaan III-27
3.3. Kerangka Pendanaan III-33
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah III-33
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan III-36

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan IV-1
4.1.1 Infrastruktur Wilayah IV-2
4.1.2 Pendidikan IV-7
4.1.3 Kebudayaan IV-12
4.1.4 Kesehatan IV-13
4.1.5 Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi IV-21
4.1.6 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat IV-33
4.1.7 Lingkungan Hidup IV-35
4.1.8 Tata Kelola Pemerintahan IV-38
4.2. Isu Strategis IV-43
4.2.1 Isu Strategis Internasional IV-43
4.2.2 Isu Strategis Nasional IV-46
4.2.3 Isu Strategis Regional IV-54
4.2.4 Isu Strategis Lokal IV-67

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-1
5.1 Visi V-2
5.2 Misi V-8
5.2.1 Misi 1 Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi V-8
5.2.2 Misi 2 Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan V-9
5.2.3 Misi 3 Peningkatan Ekonomi Masyarakat V-10
5.2.4 Misi 4 Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup V-10
5.2.5 Misi 5 Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*) V-12
5.3 Tujuan dan Sasaran V-13
5.3.1 Tujuan V-13
5.3.2 Sasaran V-13
5.4 Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Barito Utara, RPJPD Kalimantan Tengah dan RPJMN V-20
5.4.1 Keselarasan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 ..... V-20
5.4.2 Keselarasan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 ..... V-22
5.4.3 Keselarasan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dengan RPJMN Tahun 2015-2019 ..... V-26

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-1
6.1 Strategi VI-1
6.1.1 Misi Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi V1-1

6.1.2 Misi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan VI-2
6.1.3 Misi Peningkatan Ekonomi Masyarakat VI-2
6.1.4 Misi Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya Pariwisata dan Lingkungan Hidup VI-3
6.1.5 Misi Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Goverance*) VI-3
6.2 Arah Kebijakan VI-6
6.2.1 Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Umum Misi 1 ..... VI-6
6.2.2 Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Umum Misi 2 ..... VI-7
6.2.3 Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Umum Misi 3 ..... VI-8
6.2.4 Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Umum Misi 4 ..... VI-9
6.2.5 Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Umum ..... Misi 5 ..... VI-10

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1
7.1 Belanja Tidak Langsung VII-1
7.2 Belanja Langsung VII-4

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-1

BAB IX PENUTUP IX-1
9.1 Pedoman Transisi IX-1
9.2 Kaidah Pelaksanaan IX-2

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Daerah Per Kecamatan Kabupaten Barito Utara.....	II-2
Tabel II.2	Jumlah Luas Tanah yang Telah Dilakukan Pemberian Hak Atas Tanah Menurut jenisnya di Kabupaten Barito Utara (Persil) 2013-2017	II-5
Tabel II.3	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2012-2017	II-6
Tabel II.4	Persentase Penduduk menurut Karakteristik dan Kelompok Umur Tahun 2017.....	II-7
Tabel II.5	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barito Utara	II-8
Tabel II.6	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Barito Utara.....	II-11
Tabel II.7	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d. 2017 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Barito Utara	II-12
Tabel II.8	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2013 s.d.2017 Provinsi Kalimantan Tengah	II-13
Tabel II.9	Inflasi Kota Palangkaraya dan Sampit Tahun 2013-2017	II-14
Tabel II.10	PDRB Per Kapita Kabupaten Barito Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2013-2017.....	II-15
Tabel II.11	Indeks Gini Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017.....	II-16
Tabel II.12	Angka Kemiskinan Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017	II-16
Tabel II.13	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017.....	II-17
Tabel II.14	Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017.....	II-17
Tabel II.15	Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017.....	II-18

Tabel II.16 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-18
Tabel II.17 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-19
Tabel II.18 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-19
Tabel II.19 Sanggar Seni dan Budaya di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-20
Tabel II.20 Sanggar Seni dan Budaya di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 ..... II-20
Tabel II.21 Organisasi Olah Raga di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 ..... II-21
Tabel II.22 Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Olah raga di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017..... II-21
Tabel II.23 Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-22
Tabel II.24 Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-23
Tabel II.25 Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2013-2017..... II-23
Tabel II.26 Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-24
Tabel II.27 Angka Melanjutkan (AM) di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-24
Tabel II.28 Ketersediaan Sarana Prasarana Pendidikan Kabupaten Barito Utara..... II-25
Tabel II.29 Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-26
Tabel II.30 Guru dengan Kualifikasi S1/DIV di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-26
Tabel II.31 Jumlah Guru PNS sesuai Kualifikasi Pendidikan Tahun 2017 ..... II-26

Tabel II.32 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-27
Tabel II.33 Cakupan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-27
Tabel II.34 Jumlah Posyandu di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-27
Tabel II.35 Jumlah Puskesmas di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-28
Tabel II.36 Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-28
Tabel II.37 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-28
Tabel II.38 Rasio Tenaga Paramedis per satuan penduduk di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-29
Tabel II.39 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-29
Tabel II.40 Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Children Immunization* di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-30
Tabel II.41 Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-30
Tabel II.42 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-31
Tabel II.43 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-31
Tabel II.44 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 Berdasarkan Kewenangan Jalan (Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten) II-32
Tabel II.45 Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-32
Tabel II.46 Panjang Jalan yang memiliki Drainase/Saluran di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-33

Tabel II.47 Panjang Jalan Dilalui Roda Empat di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-33
Tabel II.48 Panjang Jaringan Irigasi di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-33
Tabel II.49 Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2017 ..... II-34
Tabel II.50 Banyaknya Bencana Alam di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-34
Tabel II.51 Banyaknya Korban Bencana Alam di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-35
Tabel II.52 Banyaknya Perkara dan Narapidana/Tahanan dan Mendapat Keputusan sidang Pengadilan Negeri Tahun 2017 ..... II-35
Tabel II.53 Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017..... II-35
Tabel II.54 Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017..... II-36
Tabel II.55 Jumlah KUBE yang menerima pemberdayaan fakir miskin di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017..... II-36
Tabel II.56 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2014-2017 (jiwa) II-37
Tabel II.57 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang termasuk Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2017 ..... II-38
Tabel II.58 Perentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017..... II-38
Tabel II.59 Rasio KDRT di Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2017 ... II-38
Tabel II.60 Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017..... II-39
Tabel II.61 Ketersediaan Pangan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017..... II-39

Tabel II.62 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-40
Tabel II.63 Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-40
Tabel II.64 Daya Dukung Lahan Pertanian Terhadap Konsumsi Beras di Kabupaten Barito Utara II-41
Tabel II.65 Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang II-42
Tabel II.66 Ketersediaan Air di Kabupaten Barito Utara II-43
Tabel II.67 Kebutuhan Air Kabupaten Barito Utara Tahun 2017, 2023, 2030 ..... II-43
Tabel II.68 Kelas Daya Dukung Lahan Barito Utara II-44
Tabel II.69 Indeks Kualitas Air (IKA) pada Sungai Barito, Sungai Lahei, Sungai Teweh dan Sungai Montallat Tahun 2013-2016..... II-45
Tabel II.70 Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 .. II-46
Tabel II.71 Penanganan Pelayanan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017..... II-46
Tabel II.72 Jumlah Titik Api (*Hotspot*) di Kabupaten Barito Utara Tahun 2014-2017 ..... II-47
Tabel II.73 Penduduk yang Memiliki KTP elektronik Berdasarkan Kecamatan tahun 2013-2017 ..... II-48
Tabel II.74 Penduduk yang Memiliki Akta kelahiran Berdasarkan Kecamatan tahun 2013-2017 ..... II-48
Tabel II.75 Penduduk yang Memiliki Akta Nikah di Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2017 ..... II-49
Tabel II.76 Dana Desa Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2017..... II-49
Tabel II.77 ADD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017..... II-49
Tabel II.78 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 ..... II-50
Tabel II.79 Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 ..... II-52

Tabel II.80 Sarana dan Prasarana Transportasi di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-3017 ..... II-53
Tabel II.81 Kapasitas Sentral dan Jumlah Pemegang Surat Ijin Penerima Pesawat Telepon, 2013-2017 ..... II-54
Tabel II.82 Daftar Menara Telekomunikasi yang Beroperasional di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 ..... II-54
Tabel II.83 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-56
Tabel II.84 Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-56
Tabel II.85 Jumlah Investor PMDN dan PMA di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-57
Tabel II.86 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-57
Tabel II.87 Pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan Daerah tahun 2013-2017..... II-61
Tabel II.88 Arsip pada Perpustakaan Daerah tahun 2013-2017 ..... II-62
Tabel II.89 Produksi Perikanan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017..... II-62
Tabel II.90 Data objek wisata di Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 ..... II-63
Tabel II.91 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017..... II-65
Tabel II.92 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017..... II-65
Tabel II.93 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017..... II-66
Tabel II.94 Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Barito Utara Menurut Kecamatan Tahun 2012-2017..... II-66
Tabel II.95 Data Luas Lahan Kritis di Wilayah Kerja BPDAS Barito di Kabupaten Barito Utara Menurut Kecamatan II-67

Tabel II.96 Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB di Kabupaten Barito Utara Tahun 2012-2016 ..... II-68
Tabel II.97 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-68
Tabel II.98 Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB di Kabupaten Barito Utara Tahun 2012-2016 ..... II-69
Tabel II.99 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Barito Utara Tahun 2012-2016 ..... II-69
Tabel II.100 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB di Kabupaten Barito Utara Tahun 2012-2016 ..... II-69
Tabel II.101 Persentase Pertumbuhan Industri di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-70
Tabel II.102 Desa Unit Pemukiman Transmigrasi di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 ..... II-70
Tabel II.103 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 ..... II-72
Tabel II.104 Jumlah dan Jumlah Target PNS di Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2017 ..... II-81
Tabel II.105 Jumlah Pejabat Struktural yang Lulus Diklatpim di Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2017 ..... II-82
Tabel II.106 Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 ..... II-83
Tabel II.107 Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 .... II-84
Tabel II.108 Persentase Penduduk Menurut Wilayah dan Golongan Pengeluaran per kapita Sebulan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 ..... II-85
Tabel II.109 Persentase Konsumsi Non Pangan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2014-2017 ..... II-86
Tabel II.110 NTP dan NTUP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2017 ..... II-86

Tabel II.111 Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-89
Tabel II.112 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 ..... II-90
Tabel II.113 Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum..... II-92
Tabel II.114 Data Tindak Pidana / Kejahatan dan Kerugian Yang Dilaporkan Tahun 2013-2017 ..... II-94
Tabel II.115 Data Keamanan di Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2017 ..... II-94
Tabel II.116 Jumlah Unjuk Rasa di Kabupaten Barito Utara Tahun 2014-2018 ..... II-95
Tabel II.117 Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-97
Tabel II.118 Penduduk Menurut Kelompok Umum dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-98
Tabel II.119 Gambaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-99
Tabel III.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Barito Utara..... III-4
Tabel III.2 Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Barito Utara..... III-6
Tabel III.3 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... III-9
Tabel III.4 Rasio Likuiditas Neraca Keuangan Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... III-13
Tabel III.5 Rasio Solvabilitas Neraca Keuangan Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... III-14
Tabel III.6 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2017 ..... III-25
Tabel III.7 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2017 ..... III-26

Tabel III.8 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2017 ..... III-27
Tabel III.9 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... III-29
Tabel III.10 Defisit Rill Anggaran Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... III-31
Tabel III.11 Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... III-31
Tabel III.12 Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... III-32
Tabel III.13 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2018-2023 Kabupaten Barito Utara III-34
Tabel III.14 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 ..... III-36
Tabel III.15 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 ..... III-37
Tabel III.16 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 ..... III-39
Tabel III.17 Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 ..... III-40
Tabel IV.1 Analisis Permasalahan Infrastruktur Wilayah IV-6
Tabel IV.2 Analisis Permasalahan Pendidikan IV-12
Tabel IV.3 Analisis Permasalahan Kebudayaan IV-13
Tabel IV.4 Analisis Permasalahan Kesehatan IV-20
Tabel IV.5 Analisis Permasalahan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi IV-32
Tabel IV.6 Analisis Permasalahan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat IV-35
Tabel IV.7 Analisis Permasalahan Lingkungan Hidup IV-37

Tabel IV.8 Analisis Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan IV-42
Tabel IV.9 Indikasi Program dan Kegiatan Rencana Struktur Ruang Wilayah..... IV-82
Tabel IV.10 Peruntukan Ruang dan Luasan Rencana Pola Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2038 ..... IV-85
Tabel IV.11 Capaian Indikator TPB di Kabupaten Barito Utara IV-90
Tabel V.1 Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018-2023 ..... V-2
Tabel V.2 Kesesuaian dan Konsistensi Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Barito Utara terhadap Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah V-7
Tabel V.3 Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran V-14
Tabel V.4 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Rencana Jangka Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023..... V-17
Tabel VI.1 Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Strategi Kabupaten Barito Utara..... VI-4
Tabel VI.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Barito Utara..... VI-11
Tabel VI.3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Barito Utara..... VI-16
Tabel VII.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 ..... VII-5
Tabel VII.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Barito Utara VII-9
Tabel VII.3 Usulan Program Bantuan Keuangan dari Pemda Provinsi Kalimantan Tengah..... VII-62
Tabel VII.4 Rencana Program Dana Alokasi Khusus VII-66
Tabel VIII.1 Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 ..... VIII-2

Tabel VIII.2 Indikator Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 ..... VIII-3
Tabel VIII.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 ..... VIII-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Keterkaitan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..... I-7
Gambar II.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Barito Utara II-2
Gambar II.2 Inflasi Kota Palangkaraya dan Sampit Tahun 2013-2017 .. II-15
Gambar II.3 Realisasi PAD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 II-77
Gambar II.4 Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-78
Gambar II.5 Realisasi Pendapatan Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-78
Gambar II.6 Desentralisasi Fiskal Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-79
Gambar II.7 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-79
Gambar II.8 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 ..... II-80
Gambar IV.1 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Barito Utara IV-81
Gambar IV.2 Proporsi Capaian TPB Kabupaten Barito Utara IV-90
Gambar IV.3 Analisis Isu Strategis yang Menghasilkan Permasalahan Utama Daerah IV-98
Gambar V.1 Keterkaitan Misi RPJPD Kab. Barito Utara dan Misi RPJMD 2018-2023 ..... V-21
Gambar V.2 Keterkaitan Misi RPJMD 2018-2023 dan Misi RPJPD Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025..... V-24
Gambar V.3 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Barito Utara dan Misi RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021 ..... V-26
Gambar V.4 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Barito Utara dan Misi RPJMN 2015-2019 ..... V-28
Gambar VI.1 Indikasi Prioritas Tema Perencanaan Tahunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2023 ..... VI-24

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah (PD), lintas PD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah ini selanjutnya menjadi acuan kepala daerah beserta jajarannya dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Barito Utara pada periode 2018-2023. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) paling lama enam bulan setelah kepala daerah dilantik.

Meskipun terbagi berdasarkan jangka waktu, namun pada prinsipnya perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang harmonis yang mana RPJP menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM kemudian RPJM

menjadi acuan untuk dokumen lainnya. Kesatuan tersebut tidak hanya antara dokumen perencanaan pembangunan daerah saja, tetapi juga satu kesatuan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Kesatuan ini akan membuat target pembangunan nasional, target pembangunan provinsi dan target pembangunan kabupaten/kota dapat dicapai secara sinergis.

RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 merupakan tahap keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025. RPJMD tahap keempat disusun dengan berlandaskan realisasi pelaksanaan dan pencapaian sebagai keberlanjutan RPJMD tahap ketiga.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Barito Utara dilakukan dengan berbagai tahapan yang memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis dan *top-down* serta *bottom-up*, dengan melibatkan para pakar/ narasumber yang berkompeten dibidangnya, penjaringan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat melalui proses konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan, pembahasan dengan Perangkat Daerah sebagai pelaksana pembangunan dan pembahasan dengan DPRD Kabupaten Barito Utara kemudian dilakukan juga konsultasi dan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya, RPJMD Kabupaten Barito Utara juga disusun untuk menjawab isu-isu strategis yang muncul. Terdapat enam isu strategis bersama dengan permasalahan daerah lainnya dan perwujudan janji-janji politik Kepala Daerah, menjadi bagian dari pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Barito Utara selama lima tahun mendatang. Dokumen RPJMD merupakan instrumen untuk mengoptimalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki, dengan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada secara lebih efektif dan efisien, dalam rangka menjawab berbagai tantangan pembangunan tersebut.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018-2023, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguna Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hierarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional, yang bertujuan untuk mendukung harmonisasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan. RPJMD Kabupaten Barito Utara harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Berikut diagram alur yang memperlihatkan keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya.

Gambar I.1.
Keterkaitan antara Dokumen RPJMD
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

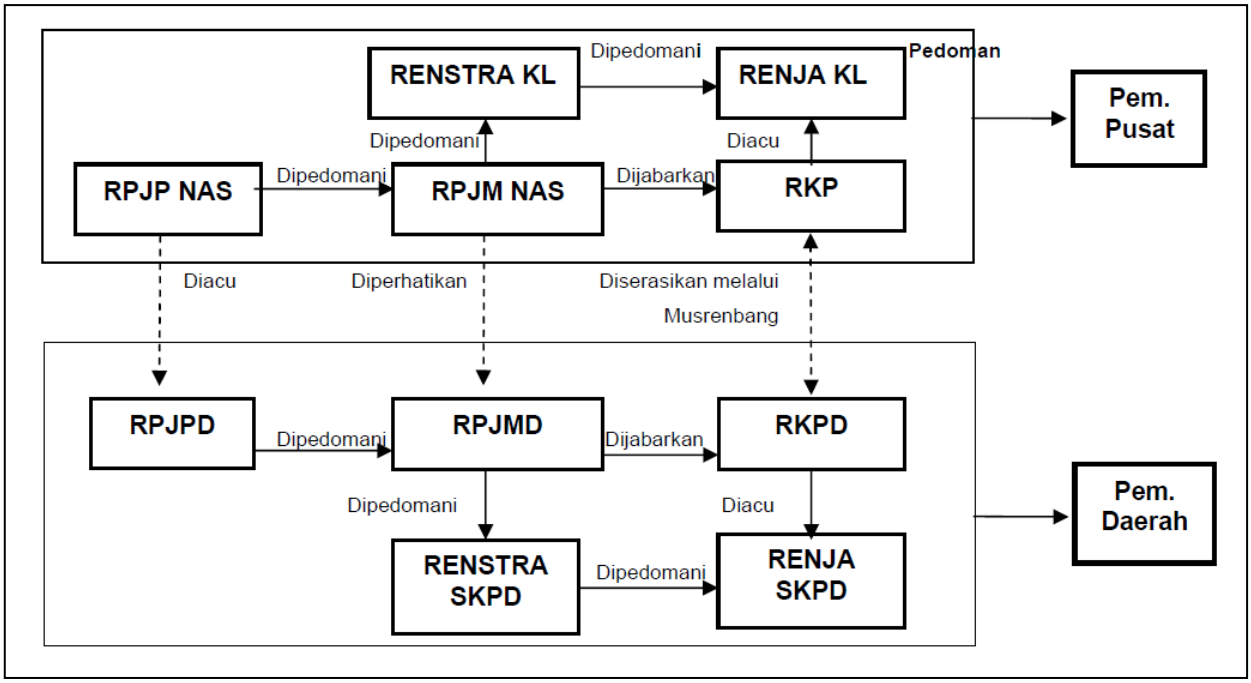

RPJMD Kabupaten Barito Utara diterjemahkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2018-2023 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024.

Rancangan awal RPJMD akan disusun bersamaan dengan rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Barito Utara digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kemudian RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan KUA PPAS serta RAPBD.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2018-2023 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. RPJMD dilaksanakan dengan penajaman sasaran, strategi dan program dan penetapan prioritas dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah.

1.4.2. Tujuan

Selanjutnya tujuan penyusunan RPJM Daerah sebagai berikut :

a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran pembangunan tahun 2018-2023, dengan berpedoman pada dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Barito Utara;
b. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah;

c. Merumuskan rencana pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan daerah;
d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan target kinerja dan pagu anggaran indikatif yang akan dilaksanakan tahun 2018-2023.

RPJMD ini digunakan sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan dengan tolok ukur evaluasi kinerja dan keuangan tahunan setiap Perangkat Daerah (PD).

Dokumen ini menjadi pedoman dalam menyusun RKPD, Renstra PD, Renja PD sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Di samping itu RPJMD juga merupakan acuan bagi semua pihak, baik pemerintah, DPRD, masyarakat maupun dunia usaha.

1.5. Sistematika Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD yang berisikan pengertian ringkas RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan seluruh aspek kehidupan daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu lima tahun.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan aspek kinerja keuangan dimasa lalu dan melakukan proyeksi kerangka pendanaan di masa depan .

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis internal dan eksternal wilayah untuk mendukung penyusunan visi dan misi pembangunan Kabupaten Barito Utara.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menguraikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023. Visi dan misi tersebut dijabarkan secara lebih terperinci ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat strategi dan kebijakan yang dilaksanakan untuk melaksanakan visi misi pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif dan target.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama daerah, indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja program perangkat daerah.

BAB IX PENUTUP

Bab ini memuat penjelasan tentang pedoman transisi dan metode pelaksanaan tahunan atas RPJMD.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi Kabupaten Barito Utara perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi pada aspek demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.

2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1. Letak Geografis

Kabupaten Barito Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di tengah-tengah pulau Kalimantan dan terletak di daerah khatulistiwa yaitu pada posisi 1140 20'3,32''– 115050'47'' Bujur Timur dan 0049'00'' Lintang Utara –10 27'00'' Lintang Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas dan Murung Raya.

2.1.1.2. Luas Wilayah

Kabupaten Barito Utara memliliki luas wilayah 8.300 km^2 atau 5,4% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Barito Utara terbagi menjadi 9 (sembilan) kecamatan, 93 desa dan 10 kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Lahei dengan luas wilayah 1.655,00 km^2 atau 19,94% terhadap luas Kabupaten Barito Utara, kemudian Kecamatan Gunung Purei seluas

1.468,00 km² atau 17,69% dari luas Kabupaten Barito Utara, sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Teweh Selatan yaitu hanya 485,64 km² atau 5,85 % dari luas Kabupaten Barito Utara.

Gambar II.1
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Barito Utara

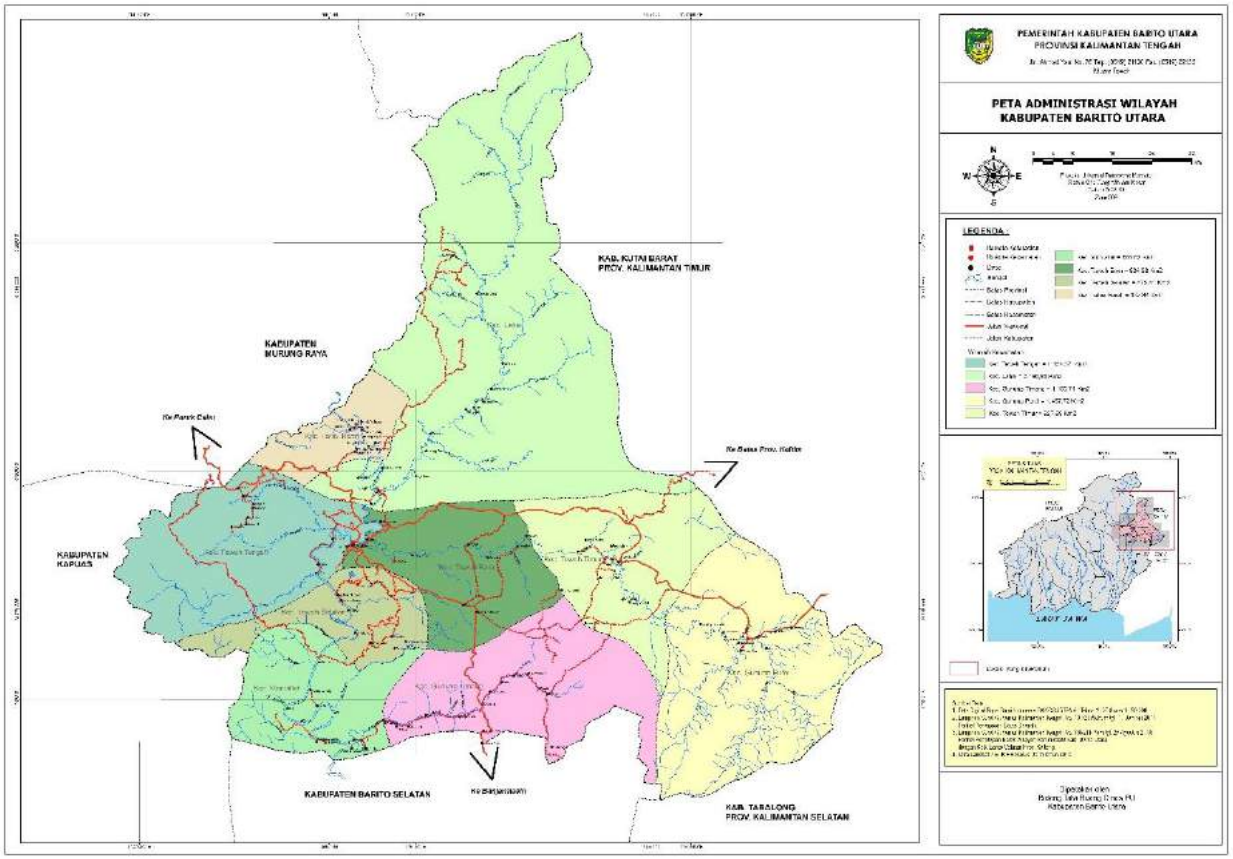

Sedangkan Secara terperinci luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel II.1
Luas Daerah Perkecamatan Kabupaten Barito Utara

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (km²)	Persentase Luas (%)
1	Montallat	Tumpung Laung	6/4	553,0	6,66
2	Gunung Timang	Kandui	16	890,00	10,72
3	Gunung Purei	Lampeong	11	1.468,00	17,69
4	Teweh Timur	Benangin	12	494,84	5,96
5	Teweh Tengah	Muara Teweh	8/2	634,14	7,64

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (km²)	Persentase Luas (%)
6	Lahei	Lahei	11/2	1.655,00	19,94
7	Teweh Baru	Hajak	8/2	861,38	10,38
8	Teweh Selatan	Trahean	10	485,64	5,85
9	Lahei Barat	Benao	11	1.258,00	15,16
Barito Utara			**103**	**8.300,00**	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

2.1.1.3. Topografi

Topografi dan morfologi daerah Kabupaten Barito Utara terdiri dari sebelah Selatan ke Timur merupakan dataran agak rendah sedangkan ke arah Utara dengan bentuk daerah lipatan, patahan yang dijajari oleh pegunungan Muller/Schwaner. Bagian wilayah dengan kelerengan 0-2% terletak dibagian selatan tepi Sungai Barito yaitu kecamatan Montallat dan Teweh Tengah seluas 165 km2 (29,2%). Bagian wilayah dengan kemiringan 2-15% tersebar di semua kecamatan seluas 4.785 km2 (21,5%). Kemiringan 15-40% tersebar di semua kecamatan seluas 4.275 km2 (51,5%) dan bagian wilayah dengan kemiringan di atas 40% seluas 2.075 km2 (25%).

2.1.1.4. Jenis Tanah

Berdasarkan keadaan tanah yang ada, maka jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Barito Utara yaitu Aluvial terdapat di aliran sungai, regosol terdapat menyebar di bagian selatan wilayah kabupaten Barito Utara, podsolik merah kuning dengan induk batu-batuan dan batuan beku terdapat di wilayah perbukitan, kambisol dan okisol (laterit) terdapat di wilayah bagian atas dan paling luas, keadaan bergelombang dan berbukit.

2.1.1.5. Klimatologi

Iklim di Kabupaten Barito Utara termasuk iklim basah, dengan suhu udara berkisar antara 23,4˚C sampai dengan 33,5˚C. Rata-rata curah hujan tercatat 291 mm^3 dan rata-rata hari hujan sebanyak 20 hari setiap bulan. Kelembaban udara rata-rata 84 persen.

Berdasarkan data pengamatan Station Meteorologi Beringin Muara

Teweh pada tahun 2017, keadaan temperatur udara rata-rata maximum lebih kurang 33,1°C dan minimum kurang lebih 31,8°C (keadaan bulan Januari sampai dengan Desember 2017) dengan kelembaban nisbi rata-rata 84,8 persen. Sedangkan curah hujan dan hari hujan pada tahun 2017, curah hujan terendah terjadi pada bulan Februari dan September 2017 yaitu 80 dan 55 mm^3dengan hari hujan 15 dan 12 hari. Sedangkan curah hujan tertinggi pada tahun 2017 yaitu bulan November yaitu 631 mm^3 dengan jumlah hari hujan 28 hari.

2.1.1.5. Hidrologi

Sungai utama yang ada di Kabupaten Barito Utara adalah Sungai Barito. Sungai Barito mengalir dari daerah hulu di Kabupaten Murung Raya melewati Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, hingga ke Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Sungai ini tercatat mempunyai panjang lebih kurang 900 km (dapat dilayari 780 Km), lebar rata-rata 650 meter dengan kedalaman 8 meter dan bermuara ke Laut Jawa. Selain itu sungai yang cukup berperan dalam sistem hidrologi di Kabupaten Barito Utara adalah sungai Montallat, sungai Teweh dan sungai Lahei yang merupakan anak sungai Barito.

2.1.1.6. Penguasaan Tanah

Salah satu wujud peran pemerintah sebagai fasilitator untuk tumbuh dan berkembangnya prakarsa masyarakat di sektor perumahan dan pemukiman, antara lain dengan diterbitkannya surat-surat keputusan pemerintah mengenai hak-hak atas tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan hak-hak lainnya melalui institusi pemerintah yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berdasarkan data sampai tahun 2017 banyaknya surat keputusan/ pengesahan mengenai hak-hak atas tanah, nampaknya status kepemilikan tanah ini harus menjadi perhatian utama pada masa-masa mendatang, karena tercatat hampir hanya di kawasan perkotaan saja yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yaitu di Kecamatan Teweh Tengah dengan 2.547 hak atas tanah yang diberikan, sedangkan kecamatan lainnya seperti di Kecamatan Montallat hanya terdapat 3

sertifikat hak milik, Kecamatan Gunung Timang terdapat 1 sertifikat hak milik, Kecamatan Teweh Timur tercatat 1 sertifikat hak milik dan 1 sertifikat hak pakai, Kecamatan Teweh Selatan terdapat 1 sertifikat hak milik dan Kecamatan Teweh Baru terdapat 7 sertifikat hak milik. Untuk Kecamatan Gunung Purei, Kecamatan Lahei dan Kecamatan Lahei Barat belum tercatat adanya sertifikat hak milik. Hal ini berarti kawasan perdesaan masih banyak yang belum memiliki status penguasan lahan/tanah yang jelas. Kedepan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai program pemerintah pusat di Kabupaten Barito Utara. Penyelenggaraan pendaftaran tanah ini sebagai upaya dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah.

Tabel II.2
Jumlah Luas Tanah yang Telah Dilakukan Pemberian Hak Atas Tanah Menurut Jenisnya di Kabupaten Barito Utara (Persil) 2013-2017

No	Hak Atas Tanah	2013	2014	2015	2016	2017
1	Hak Milik	488	1.296	1.339	915	2.555
2	Hak Guna Bangunan	3	8	1	3	1
3	Pemegang Hak Milik	-	-	-	-	-
4	Hal Pakai	6	11	31	13	4
5	Hak Milik Transmigrasi	-	-	-	-	-
6	Waqaf	-	-	-	-	1
	Jumlah	**497**	**1.315**	**1.371**	**931**	**2.561**

Sumber : BPS Kabupaten Barito Utara (asal data Kantor Pertanahan Kab. Barito Utara), 2018

2.1.2 Aspek Demografi

Kondisi demografis suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Jumlah penduduk Barito Utara pada tahun 2017 berjumlah 129.287 jiwa. Dengan luas wilayah 8.300 km^2, kepadatan penduduk pada tahun 2017 tergolong jarang yaitu 16 jiwa/km^2. Hal ini berarti setiap wilayah seluas 1 km^2 dihuni sekitar 16 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Teweh Tengah, yaitu sebesar 77 jiwa/km^2. Penyebabnya adalah pusat ekonomi masyarakat di Kabupaten Barito Utara berada di Kota Muara Teweh yang terletak di Kecamatan Teweh Tengah.

Tabel II.3
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2012-2017

KECAMATAN	PENDUDUK (jiwa)						LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012-2017	2016-2017
Montallat	10.798	10.940	11.035	11.121	11.202	11.280	4,52	0,70
Gunung Timang	10.192	10.315	10.395	10.467	10.531	10.594	3,94	0,60
Gunung Purei	2.465	2.495	2.514	2.531	2.547	2.562	3,93	0,59
Teweh Timur	7.338	7.427	6.006	6.047	6.085	6.121	**	0,59
Teweh Tengah	71.289	72.263	43.812	44.176	44.519	44.849	**	0,74
Lahei	*	*	17.468	17.613	17.750	17.882	**	0,74
Teweh Baru	*	*	13.134	13.243	13.346	13.445	**	0,74
Teweh Selatan	21.699	21.960	12.222	12.305	12.382	12.456	**	0,60
Lahei Barat	*	*	9.908	9.976	10.038	10.098	**	0,60
Total	**123.781**	**125.400**	**126.494**	**127.479**	**128.400**	**129.287**	**4,45**	**0,69**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018
*Keterangan : *)Data masih Tergabung dengan Kecamatan induk*
***)Terjadi pemekaran wilayah sehingga laju pertumbuhan penduduk 2012-2017 tidak dapat dihitung*

Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara mencapai 129.287 jiwa yang terdiri dari 67.179 penduduk laki-laki atau 51,96 persen dan 62.108 penduduk perempuan atau 48,04 persen, mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2016 berjumlah 128.400 jiwa (66.715 laki-laki dan 61.685 perempuan). Secara umum, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan dari angka sex ratio yang nilainya lebih besar dari 100. Sex ratio pada tahun 2017 sebesar 108 yang berarti bahwa terdapat sekitar 108 penduduk laki-laki pada setiap 100 penduduk perempuan.

Pada tahun 2017 terjadi bonus demografi, dimana persentase penduduk usia produktif lebih tinggi dibanding kategori yang lain. Akibatnya sumber daya manusia usia 15-64 tahun akan melimpah di Kabupaten Barito Utara. Sehingga berdasarkan komposisi penduduk menurut kelompok umur, persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif yaitu

sekitar 68,01 persen dari jumlah seluruh penduduk. Apabila penduduk usia produktif dapat diberdayakan secara maksimal, maka akan berdampak pada semakin baiknya pembangunan ekonomi maupun sosial di Kabupaten Barito Utara.

Tabel II.4
Persentase Penduduk menurut Karakteristik dan Kelompok Umur Tahun 2017

Karakteristik	Kelompok Umur			Jumlah
	0-14	15-64	65+	
Jenis Kelamin				
Laki-laki	28,31	68,49	3,2	100
Perempuan	29,24	67,49	3,27	100
Pendidikan Tertinggi				
Tidak pernah sekolah/Tidak tamat SD	76,74	18,43	4,84	100
SD dan Sederajat	11,52	84,67	3,81	100
SMP dan sederajat	NA	98,11	NA	100
SMA keatas	-	98,65	NA	100
Barito Utara	**28,76**	**68,01**	**3,23**	**100**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Utara dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat.

Nilai PDRB Barito Utara atas dasar dasar harga berlaku pada tahun 2017 mencapai 8,3 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 0,9 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 7,4 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan dari 6,0 triliun rupiah di tahun 2016 menjadi 6,4 triliun rupiah di tahun 2017. Hal ini menunjukkan selama tahun 2017, Barito Utara mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 6,01 persen, lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni

disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2013-2017) struktur perekonomian Barito Utara didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Barito Utara.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Barito Utara pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, yaitu mencapai 43,51 persen (angka ini menurun dari 50,63 persen di tahun 2013). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,51 persen (naik dari 10,92 persen di tahun 2013), disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 8,20 persen (naik dari 6,87 persen di tahun 2013). Berikutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil sebesar 6,14 persen (naik dari 4,68 persen ditahun 2013) dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,71 persen (naik dari 4,95 persen ditahun 2013).

Tabel II.5
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barito Utara

SEKTOR	Tahun									
	2013		2014		2015		2016*		2017**	
	juta rupiah	%	juta rupiah	%	juta rupiah	%	juta rupiah	%	juta rupiah	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	656.115,7	10,92	742.420,5	11,79	833.540,1	12,43	896.906,2	12,19	951.365,3	11,51
Pertambangan dan Penggalian	3.043.332,9	50,63	2.923.510,1	46,42	2.811.331,7	41,91	3.091.374,5	42,01	3.597.111,44	43,51

SEKTOR	Tahun									
	2013		2014		2015		2016*		2017**	
	juta rupiah	%	juta rupiah	%	juta rupiah	%	juta rupiah	%	juta rupiah	%
Industri Pengolahan	413.019,9	6,87	487.596,3	7,74	569.015,2	8,48	625.176,0	8,50	677.509,5	8,20
Pengadaan Listrik dan Gas	880,3	0,01	1.266,1	0,02	2.031,8	0,03	2.317,1	0,03	2.859,5	0,03
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.202,0	0,12	8.598,8	0,14	10.152,7	0,15	11.124,5	0,15	11.998,4	0,15
Konstruksi	281.693,9	4,69	316.839,6	5,03	373.755,0	5,57	399.558,8	5,43	432.052,3	5,23
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	281.373,3	4,68	332.147,7	5,27	386.262,7	5,76	444.551,0	6,04	507.514,2	6,14
Transportasi dan Pergudangan	297.347,8	4,95	334.623,1	5,31	387.921,2	5,78	424.146,1	5,76	472.086,8	5,71
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	73.849,1	1,23	84.500,3	1,34	99.545,0	1,48	115.630,6	1,57	128.070,6	1,55
Informasi dan Komunikasi	59.472,0	0,99	64.956,5	1,03	72.331,2	1,08	79.112,8	1,76	86.609,4	1,70
Jasa Keuangan dan Asuransi	100.920,3	1,68	112.109,3	1,78	121.032,6	1,80	129.619,0	1,76	140.697,1	1,70
Real Estate	86.784,1	1,44	96.096,1	1,53	109.435,4	1,63	119.568,2	1,62	131.985,8	1,60
Jasa Perusahaan	674,2	0,01	746,9	0,01	836,5	0,01	929,7	0,01	1.020,0	0,01
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	280.352,1	4,66	312.267,1	4,96	373.916,0	5,57	389.060,6	5,29	429.267,3	5,19
Jasa Pendidikan	246.661,6	4,14	275.135,8	4,37	318.911,8	4,75	359.606,2	4,89	395.532,7	4,78
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108.005,7	1,80	125.009,8	1,98	146.911,9	2,19	164.881,0	2,24	183.006,4	2,21
Jasa lainnya	71.238,4	1,19	80.807,8	1,28	91.156,1	1,36	105.130,7	1,43	117.757,4	1,42
PDRB	**6.010.923,4**	**100**	**6.298.631,7**	**100**	**6.708.086,8**	**100**	**7.358.692,9**	**100**	**8.266.444,0**	**100**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018
*Keterangan : *Angka Sementara*
***Angka Sangat Sementara*

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Barito Utara pada tahun 2017 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Barito Utara atas dasar harga konstan2010, mencapai 6,4 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 6,0 triliun rupiah pada tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,01 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,48 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha

Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 12,07 persen. Salah satu penyebabnya adalah listrik masuk desa seperti di Kecamatan Gunung Timang khususnya Desa Ketapang, Walur, Rarawa, Baliti, Majangkan dan Kandui kini telah menikmati listrik dari PLN secara 24 jam. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Sembilan lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar enam hingga sepuluh persen. Sedangkan tujuh lapangan usaha lainnya berturut turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari enam persen.

Sembilan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar enam hingga sepuluh persen tersebut antara lain: lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,56 persen, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,54 persen, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,36 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 7,06 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,94 persen, lapangan usaha Real Estate sebesar 6,78 persen, lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 6,72 persen, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,40 persen, serta lapangan Jasa Perusahaan sebesar 6,40 persen.

Sementara itu, tujuh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 6 (enam) persen adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 5,83 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,52 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 5,44 persen, lapangan usaha Industri Pengolahan tercatat sebesar 5,14 persen, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 4,56 persen, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,36 persen, serta lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,16 persen.

Tabel II.6
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Barito Utara

SEKTOR	Tahun									
	2013		2014		2015		2016*		2017**	
	juta rupiah	%	juta rupiah	%	juta rupiah	%	juta rupiah	%	juta rupiah	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	542.486,0	2,45	571.550,3	5,36	603.763,9	5,64	624.365,1	3,41	645.353,6	3,36
Pertambangan dan Penggalian	2.723.290,9	9,13	2.765.326,5	1,54	2.867.876,8	3,71	3.044.901,2	6,17	3.239.925,4	6,40
Industri Pengolahan	352.187,0	4,14	379.467,8	7,75	403.760,6	6,40	417.553,8	3,42	439.032,2	5,14
Pengadaan Listrik dan Gas	1.572,4	38,90	1.699,2	8,06	1.911,9	12,52	2.169,3	13,46	2.431,1	12,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.658,6	5,51	6.888,4	3,45	7.426,2	7,81	7.892,5	6,28	8.142,2	3,16
Konstruksi	233.462,5	5,64	245.787,9	5,28	264.078,6	7,44	276.358,2	4,65	291.395,5	5,44
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	251.169,0	5,51	275.118,6	3,45	292.768,2	7,81	312.158,7	6,28	333.830,6	3,16
Transportasi dan Pergudangan	251.863,4	4,07	268.738,3	6,70	087.081,5	6,83	304.548,5	6,08	327.515,5	7,54
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	60.180,5	5,23	65.098,2	8,17	70.702,6	8,61	76.288,1	7,90	82.817,6	8,56
Informasi dan Komunikasi	58.658,6	9,32	62.218,5	6,07	67.362,8	8,27	71.647,1	6,36	75.825,9	5,83
Jasa Keuangan dan Asuransi	77.669,1	10,32	84.661,4	9,00	88.439,7	4,46	93.758,9	6,01	98.933,9	5,52
Real Estate	69.582,9	6,36	74.396,1	6,92	79.074,1	6,29	83.790,5	5,96	89.470,9	6,78
Jasa Perusahaan	551,6	8,03	580,2	5,18	620,7	6,97	658,7	6,13	700,9	6,40
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	220.309,2	6,07	237.850,0	7,96	262.837,6	10,51	267.809,3	1,89	280.033,9	4,56
Jasa Pendidikan	195.456,4	4,40	213.904,7	9,44	228.454,6	6,80	242.641,7	6,21	258.940,7	6,72
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	90.319,3	6,71	94.871,2	5,04	102.862,3	8,42	109.620,4	6,57	117.692,5	7,36
Jasa lainnya	57.133,7	5,08	62.221,2	8,90	67.512,6	8,50	72.407,2	7,25	77.519,0	7,06
PDRB	**5.192.551,0**	**7,04**	**5.410.378,5**	**4,20**	**5.696.534,6**	**5,29**	**6.008.569,3**	**5,48**	**6.369.561,2**	**6,01**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018
*Keterangan : *Angka Sementara*
***Angka Sangat Sementara*

Pertumbuhan ekonomi selama 2017 dipercepat oleh adanya investasi dan perbaikan kinerja ekspor luar daerah. Investasi yang dimaksud utamanya adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan yang berdampak pada peningkatan transportasi. Selain

itu, ada juga pembangunan jembatan seperti pembangunan jembatan Sei Benao dan jembatan penyeberangan Muara Teweh-Jingah, Pembangunan Islamic Center serta pembangunan fasilitas penunjang perekonomian lainnya seperti Pasar Dermaga, RSUD Muara Teweh serta Rumah Jabatan Bupati. Ekspor luar daerah yang dimaksud utamanya ekspor ke luar kabupaten yang didominasi oleh pertambangan batubara serta hasil pertanian seperti getah karet, sawit serta jagung.

Naik turunnya PDRB biasa juga disebut pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari penyajian PDRB atas dasar harga konstan karena pengaruh naik turunnya harga telah dihilangkan atau dengan kata lain dengan mempergunakan harga konstan, pengaruh inflasi telah ditiadakan. Semakin tinggi kenaikan PDRB, maka makin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Barito Utara selama periode 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.7
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2017
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Kabupaten Barito Utara

SEKTOR	Tahun									
	2013		2014		2015		2016*		2017**	
	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,92	2,45	11,79	5,36	12,43	5,64	12,19	3,41	11,51	3,36
Pertambangan dan Penggalian	50,63	9,13	46,42	1,54	41,91	3,71	42,01	6,17	43,51	6,40
Industri Pengolahan	6,87	4,14	7,74	7,75	8,48	6,40	8,50	3,42	8,20	5,14
Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	38,90	0,02	8,06	0,03	12,52	0,03	13,46	0,03	12,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	5,51	0,14	3,45	0,15	7,81	0,15	6,28	0,15	3,16
Konstruksi	4,69	5,64	5,03	5,28	5,57	7,44	5,43	4,65	5,23	5,44
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,68	5,51	5,27	3,45	5,76	7,81	6,04	6,28	6,14	3,16
Transportasi dan Pergudangan	4,95	4,07	5,31	6,70	5,78	6,83	5,76	6,08	5,71	7,54
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,23	5,23	1,34	8,17	1,48	8,61	1,57	7,90	1,55	8,56
Informasi dan Komunikasi	0,99	9,32	1,03	6,07	1,08	8,27	1,76	6,36	1,70	5,83

SEKTOR	Tahun									
	2013		2014		2015		2016*		2017**	
	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,68	10,32	1,78	9,00	1,80	4,46	1,76	6,01	1,70	5,52
Real Estate	1,44	6,36	1,53	6,92	1,63	6,29	1,62	5,96	1,60	6,78
Jasa Perusahaan	0,01	8,03	0,01	5,18	0,01	6,97	0,01	6,13	0,01	6,40
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,66	6,07	4,96	7,96	5,57	10,51	5,29	1,89	5,19	4,56
Jasa Pendidikan	4,14	4,40	4,37	9,44	4,75	6,80	4,89	6,21	4,78	6,72
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,80	6,71	1,98	5,04	2,19	8,42	2,24	6,57	2,21	7,36
Jasa lainnya	1,19	5,08	1,28	8,90	1,36	8,50	1,43	7,25	1,42	7,06
PDRB	**100**	**7,04**	**100**	**4,20**	**100**	**5,29**	**100**	**5,48**	**100**	**6,01**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

Sedangkan jika dibandingkan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Utara dengan kabupaten/kota se Kalimantan Tengah, dan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata Kalimantan Tengah serta dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.8
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota Tahun 2013 s.d 2017
Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Eknomi (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kotawaringin Barat	6,99	6,90	7,32	5,85	6,88
2	Kotawaringin Timur	7,79	7,37	7,66	7,93	7,99
3	Kapuas	6,81	7,00	7,27	7,29	7,62
4	Barito Selatan	5,24	5,31	5,54	5,62	5,84
5	Barito Utara	7,04	4,20	5,29	5,48	6,01
6	Sukamara	6,44	6,05	6,01	6,18	6,27
7	Lamandau	7,00	6,98	6,76	6,70	6,68
8	Seruyan	6,28	5,31	5,17	5,02	5,15
9	Katingan	6,33	6,55	6,53	6,54	6,56
10	Pulang Pisau	6,79	7,23	7,71	6,06	5,86
11	Gunung Mas	6,87	6,41	6,96	7,00	6,93
12	Barito Timur	6,73	5,25	5,16	5,50	5,98
13	Murung Raya	6,49	5,85	6,88	5,71	5,82
14	Palangka Raya	7,53	6,96	7,19	6,92	6,96
	Kalimantan Tengah	**7,37**	**6,21**	**7,01**	**6,36**	**6,74**
	Nasional	**5,56**	**5,01**	**4,88**	**5,03**	**5,07**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2018

2.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga – harga secara umum dan terus menerus. Inflasi ini akan menggambarkan besarnya perubahan harga barang – barang dan jasa yang beredar di pasaran. Inflasi sering dihitung dengan mempergunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer Price Index (CPI).* Inflasi merupakan hasil perbandingan indeks harga akibat dari kenaikan harga. Besarnya inflasi dapat digambarkan dengan perkembangan PDRB (perbandingan harga berlaku dengan harga konstan) tiap tahun dan IHK. Inflasi sendiri terbagi menjadi dua yaitu inflasi konsumen (inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga – harga yang dikonsumsi masyarakat secara langsung sebagai kebutuhan akhir) dan inflasi produsen (inflasi yang terjadi pada barang dan jasa yang dibutuhkan dalam proses produksi sampai jadinya barang/jasa yang siap dipasarkan).

Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah adalah angka inflasi gabungan kota Palangkaraya dan kota Sampit berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Inflasi yang terjadi di Kota Palangkaraya dalam kurun waktu 2013-2017 mengalami peningkatan dan juga penurunan, dimana pada tahun 2013-2016 terus mengalami penurunan. Pada Tahun 2017 meningkat kembali menjadi 3,11 atau meningkat sebesar 1,2. Sedangkan inflasi Kota Sampit juga mengalami peningkatan dan juga penurunan di periode tahun 2013-2017. Pada tahun 2017 inflasi Kota Sampit Sebesar 3,29 yang meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 2,46 pada tahun 2016.

Tabel II.9
Inflasi Kota Palangkaraya dan Sampit Tahun 2013-2017

Uraian	Indeks dan IHK				
	2013	2014	2015	2016	2017
Inflasi Kota Palangkaraya	6,45	6,63	4,20	1,91	3,11
Inflasi Kota Sampit	7,25	7,90	5,72	2,46	3,29

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2018

Gambar II.2
Inflasi Kota Palangkaraya dan Sampit Tahun 2013-2017

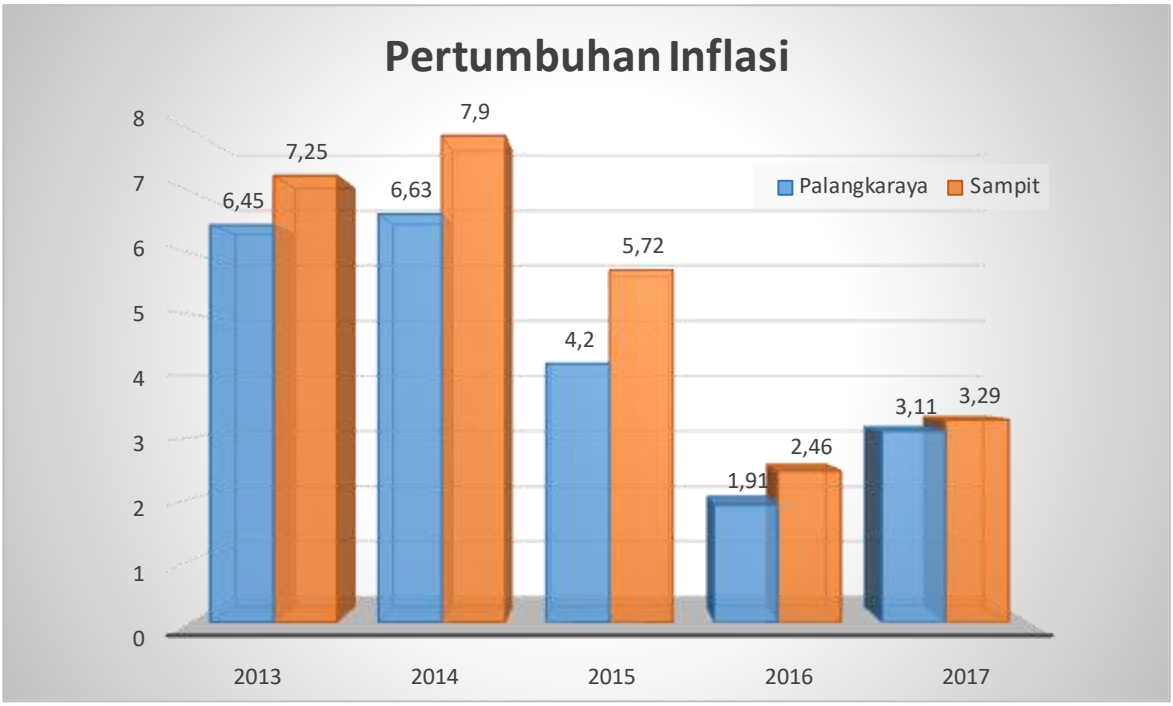

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2018

2.2.1.3. PDRB Perkapita

Dalam kurun waktu 2013-2016 PDRB Perkapita Kabupaten Barito Utara baik dengan ADHB atau ADHK mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 sebesar 47,921 juta dan 41,397 juta, tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 49,785 juta dan 42,792 juta, tahun 2015 meningkat menjadi 52,806 juta dan 44,669 juta dan di tahun 2016 meningkat kembali menjadi 57,312 juta dan 46,797 juta.

Tabel II.10
PDRB Per Kapita Kabupaten Barito Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2013-2017

No	PDRB Perkapita	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	ADHB (juta Rp.)	47.921,4	49.793,9	52.621,1	57.310,7	63.938,7
2	ADHK (ribu Rp.)	41.397	42.771,7	44.686,1	46.795,7	49.266,8

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

2.2.1.4. Indeks Gini

Gini Ratio Kabupaten Barito Utara masuk kategori ketimpangan rendah karena berada pada kisaran 0,29 sampai 0,31 yaitu di tahun 2013 sebesar 0,29, di tahun 2014 sebesar 0,33, di tahun 2015 sebesar 0,34, dan tahun 2017 sebesar 0,317.

Tabel II.11
Indeks Gini Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Uraian	Indeks Gini				
	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Gini	0,289	0,333	0,340	0,314	0,317

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

2.2.1.5. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 mencapai 7.500 jiwa dengan garis kemiskinan 355.065 dan persentase penduduk miskin sebesar 5,98 persen, pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin bertahan di angka 7.500 jiwa dengan garis kemiskinan yang mengalami peningkatan menjadi 385.348 dan persentase penduduk miskin sebesar 5,88 persen. Sama halnya dengan tahun 2014, pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin bertahan di angka 7.500 dan garis kemiskinan mengalami peningkatan menjadi 408,241 dan persentase penduduk miskin 5,93. Di tahun 2016 dan 2017 jumlah penduduk miskin terus berkurang menjadi 6.700 jiwa dengan garis kemiskinan yang meningkat menjadi 446.807 dan persentase penduduk miskin menurun menjadi 5,21 persen (turun 0,17 persen).

Tabel II.12
Angka Kemiskinan Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Angka Kemiskinan (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	7,5	7,5	7,5	6,9	6,7
2	Garis Kemiskinan (rupiah)	355.065	385.348	408.241	420.100	446.807
3	Persentase Penduduk Miskin	5,98	5,88	5,93	5,38	5,21
4	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	94,02	94,12	94,07	94,62	94,79

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 IPM sebesar 65,12 dan Pada Tahun 2017 berada pada titik 69,07. Hal ini menggambarkan dari sisi pendidikan kesehatan dan daya beli masyarakat Kabupaten Barito Utara mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

Tabel II.13
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Utara

Uraian	IPM				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Barito Utara	65,12	66,30	67,38	68,28	69,07

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Angka Melek Huruf (AMH)

Pada tahun 2013 Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Barito Utara adalah 98,72 persen kemudian tahun 2014 turun menjadi 98,39 persen kemudian turun lagi menjadi 98,23 persen di tahun 2015, pada tahun 2016 kembali naik menjadi 98,37 persen, namun pada tahun 2017 Angka Melek Huruf Kabupaten Barito Utara kembali turun sebanyak 1,07 persen menjadi 97,30 persen, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus terus menggalakkan pemberantasan buta huruf di seluruh wilayah. Lebih khusus lagi, pemerintah harus lebih fokus terhadap usia muda, jangan sampai buta huruf baru di usia muda bermunculan dan akan menjadi beban pemerintah di masa mendatang.

Tabel II.14
Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Melek Huruf penduduk usia > 15 tahun	98,72	98,39	98,23	98,37	97,30

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

2.2.2.2. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata – Rata Lama Sekolah

Angka Harapan lama sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Barito Utara periode tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel II.15
Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,01	11,15	11,50	11,96	12,38
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7.97	8	8.33	8.34	8.38

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

2.2.2.3. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Utara dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2017 semakin lama semakin meningkat, pada tahun 2012 Angka Usia Harapan Hidup mencapai 70,73 terus meningkat sampai tahun 2017 yaitu 71,27. Angka ini berarti bahwa setiap bayi yang lahir pada tahun 2017 memiliki harapan untuk hidup hingga usia mencapai 71 atau 72 tahun.

Tabel II.16
Angka Harapan Hidup Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2012–2017

INDIKATOR	TAHUN					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup (tahun)	70,73	70,81	70,91	71,01	71,26	71,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

2.2.2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Barito Utara tahun 2013 sebesar 75,94 persen, di tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami penurunan menjadi 65,65 persen, 64,10 persen, 63 persen dan 62,48 persen.

Tabel II.17
Tingkat Parstisipasi Angkatan Kerja
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	75,94	65,65	64,10	63	62,48

Sumber : Dinas Nakertranskop Kabupaten Barito Utara, 2018

2.2.2.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Barito Utara antara tahun 2013 sampai 2015, cenderung menurun. TPAK pada tahun 2015 sebesar 74,29 persen. Hal ini berarti dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Barito Utara, sebesar 74,29 persen penduduk usia 15 tahun keatas termasuk dalam angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari orang yang bekerja dan pengangguran terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2015 sebesar 4,78 persen atau sebanyak 3.199 orang dari total angkatankerja sebanyak 66.973 orang.

Tabel II.18
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kab. Barito Utara Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	3,01	3,34	4,78	-	5,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

2.2.3.1. Seni Budaya

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Sanggar seni dan budaya yang dibina pemerintah daerah dalam kurun waktu 2013-2017 sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.19
Sanggar Seni dan Budaya di Kab. Barito Utara Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Sanggar Seni dan Budaya (Kelompok)	4	16	16	16	16

Sumber : Dinas Budparpora Kab. Barito Utara, 2018

Tabel II.20
Sanggar Seni dan Budaya di Kab. Barito Utara Tahun 2017

No.	Nama Sanggar	Alamat
1	Belanga Karuhei Tatau	Jl.Pendreh Muara Teweh
2	Batung Mira Putut	Jl.Panti Ajar Muara Teweh
3	Supak Padaringan Huma Betang	Jl.Pendreh Muara Teweh
4	Hagatang Tarung	Jl.Ronggo Lawe Muara Teweh
5	Satalar Putang Dohoi	Jl.A.Yani Kandui
6	Sulik Tingang Jue SMA-3 Muara Teweh	Desa Trahean
7	Sanggar Mona Dalung	Benangin I
8	Sanggar Langkar Bulau	Tumpung Laung I
9	Sanggar “Melio Olo”	Benangin I
10	Sanggar Tiung Gomba	Desa Lemo
11	Sanggar Ruang Tali	Desa Benao Hilir
12	Sanggar Bahana Batara	Teweh Tengah
13	Bintar Langit	Gunung Purei
14	Pahet Belah	Teweh Tengah
15	Al-Hidayah	Jl.Manggis Muara Teweh
16	Sanggar Ngurai Tangkai SMAN-2	Desa Batu Raya Gunung Timang

Sumber : Dinas Budparpora Kab. Barito Utara, 2018

2.2.3.2. Olah Raga

Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 sebanyak 24 organisasi pada tahun 2017 meningkat menjadi 27 organisasi, dengan dukungan komitmen pemerintah daerah untuk peningkatan kesehatan dan prestasi olah raga melalui pembinaan kepada organisasi olah raga di Barito Utara. Diantaranya dengan melakukan pembenahan terhadap sarana prasarana olah raga, meskipun kondisi sarana dan prasarana yang tersedia saat ini sudah cukup memadai namun belum memenuhi kebutuhan masyarakat dari jumlahnya yang masih kurang jika dilihat persentase desa/kelurahan yang memiliki sarana prasarana olah raga.

Tabel II.21
Organisasi Olah Raga di Kab. Barito Utara Tahun 2017

No.	Nama Organisasi	Cabang Olah Raga
1	PELTI	Tenis Lapangan
2	PERCASI	Catur
3	PERSANI	Senam
4	PSTI	Takraw
5	PERBAKIN	Menembak
6	PERBASASI	Softball
7	FPTI	Panjat Tebing
8	PODSI	Dayung
9	PERTINA	Tinju
10	AFD FUTSAL	Futsal
11	PBVSI	Bola Volly
12	PBSI	Bulu Tangkis
13	IPSI	Silat
14	PERBASI	Basket
15	PERPANI	Panahan
16	PSSI	Sepak Bola
17	IMI	Motor Grasstrack
18	PRSI	Renang
19	PTMSI	Tenis Meja
20	FORKI	Karate
21	BRIDGE	Kartu
22	PASI	Atletik
23	PABBSI	Angkat Besi
24	PDBI	Drumb Band
25	PERSEROSI	Sepatu Roda
26	ISSI	Sepeda
27	POBSI	Bilyard

Sumber : Dinas Budparpora Kab. Barito Utara, 2018

Tabel II.22
Persentase Desa/Kelurahan yang Memilik Sarana Olah Raga di Kab. Barito Utara Tahun 2017 (desa/kel.)

Uraian	Lapangan Sepak Bola	Lapangan Bola Volly	Gelanggang Renang	Lapangan Bulu Tangkis	Lapangan Tenis	Lapangan Bola Basket	Gedung Olah Raga
Desa/ Kel.	9	45	1	19	4	9	5
Persentase (%)	8,74	43,69	0,97	18,45	3,88	8,74	4,85

Sumber : Dinas Budparpora Kab. Barito Utara, 2018

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

2.3.1.1.1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Barito Utara dapat dilihat perjenjang usia sekolah yaitu usia PAUD, usia SD/MI, usia SMP/MTs, dan usia SMA/MA/SMK. Di Kabupaten Barito Utara angka partisipasi kasar yang paling tinggi yaitu pada usia SD/MI 7-12 tahun, dengan rata-rata APK diatas 99 persen, sedangkan angka partisipasi kasar yang paling rendah di Kabupaten Barito Utara yaitu usia 4-6 tahun atau PAUD. APK SD/MI pada tahun 2013-2015 terus meningkat hingga mencapai angka 125,06 persen, di tahun 2016 dan 2017 terjadi penurunan bertahap hingga mencapai angka 87,91 persen pada tahun 2017.

Tabel II.23
Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
APK PAUD (%)	68,60	49,93	90,66	69,35	81,43
APK SD/MI (%)	110,07	123,94	125,06	113,80	87,91
APK SMP/MTs (%)	92,17	91,98	94,04	86,58	85,47
APK SMA/MA/SMK (%)	71,97	127,25	90,07	112,56	77,31

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.1.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Barito Utara dapat dilihat perjenjang usia sekolah yaitu usia SD/MI, usia SMP/MTs, dan usia SMA/MA/SMK. Di Kabupaten Barito Utara angka partisipasi murni yang paling tinggi yaitu pada usia SD/MI 7-12 tahun, dengan APM rata-rata di atas 89 persen, sedangkan angka partisipasi murni yang paling rendah di Kabupaten Barito Utara yaitu usia 16 – 18 tahun atau SMA/MA/SMK.

Tabel II.24
Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
APM SD/MI (%)	90,81	93,61	99,15	93,67	73,35
APM SMP/MTs (%)	87,56	88,88	85,64	65,60	56,66
APM SMA/MA/SMK (%)	78,00	76,05	80,71	86,95	55,44

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.1.3. Angka Partisipasi Sekolah

Di Kabupaten Barito Utara angka partisipasi sekolah yang paling tinggi yaitu pada usia SD 7-12 tahun, dengan rata-rata APS diatas 99 persen, artinya hampir semua penduduk usia sekolah SD atau yang berusia 7-12 tahun sedang mengenyam pendidikan di SD. Sedangkan angka partisipasi sekolah yang paling rendah di Kabupaten Barito Utara yaitu usia 16-19 tahun atau SMA/SMK/MA. Pada tahun 2017 adalah APS terendah dengan hanya 55,44 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2017 jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan SMA/SMK/MA di Kabupaten Barito Utara secara persentase mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel II.25
Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sekolah Dasar (SD/MI)	90.81	93.61	99.15	96.2	73.35
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	87.56	88.88	85.64	65.6	56.66
3	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	78	76.05	80.71	86.95	55.44

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.1.4. Angka Kelulusan

Di Kabupaten Barito Utara angka kelulusan yang paling tinggi yaitu pada usia SD/MI 7-12 tahun, dengan rasio diatas 95 persen, sedangkan angka kelulusan yang paling rendah di Kabupaten Barito Utara yaitu usia 16 – 18 tahun atau SMA/MA/SMK. Angka kelulusan SD/MI pada tahun 2013 sebesar 98 persen dan meningkat di tahun 2014-2016 menjadi 100 persen. Angka kelulusan SMP/MTs pada tahun 2013

sebesar 97,89 persen, di tahun 2014 meningkat menjadi 99,95 persen dan di tahun 2015 dan 2016 menjadi 100 persen. Angka kelulusan SMA/MA/SMK pada tahun 2013 sebesar 97,45 persen dan terus meningkat dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2017 kembali menurun menjadi 97,80 persen.

Tabel II.26
Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	98	100	100	100	97.63
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	97.89	99.95	100	100	98.30
3	Angka Kelulusan (AL) SD/SMA/SMK/MA (%)	97.45	98.05	99.36	100	97.80

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.1.5. Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan (AM) di Kabupaten Barito Utara dapat dilihat dari Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dan Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA. Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Di Kabupaten Barito Utara tahun 2013 sebesar 85,52 persen, di tahun 2014 meningkat menjadi 100 persen, dan di tahun 2015-2016 mengalami penurunan bertahap menjadi 88,41 persen dan 78,75 persen, dan di tahun 2017 kembali naik menjadi 94,46. Sedangkan untuk Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA pada tahun 2013 sebesar 70,24 persen, di tahun 2014 meningkat menjadi 100 persen dan di tahun 2017 menurun menjadi 97,17 persen.

Tabel II.27
Angka Melanjutkan (AM) Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	85.52	100	88.41	78.75	94.46
2	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA (%)	70.24	100	93.05	95.12	97.17

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.1.6. Ketersediaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara terus berupaya meningkatkan Ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan tenaga pendidik melalui berbagai upaya sehingga memperoleh hasil yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel II.28
Ketersediaan Sarana Prasarana Pendidikan Kabupaten Barito Utara

Ketersediaan Bangunan Sekolah					
Uraian	**Kondisi baik**	**%**	**Kondisi rusak**	**%**	**Keterangan**
SD	146	83,91	28	16,09	Jumlah Total SD = 174
SMP	31	79,49	8	20,51	Jumlah total SMP = 39
Keterssediaan Ruang Perpustakaan					
Uraian	**Ada**	**%**	**Tidak ada**	**%**	**Keterangan**
SD	140	80,46	34	19,54	Jumlah Total SD = 174
SMP	31	79,49	8	20,51	Jumlah total SMP = 39
Ketersediaan Ruang Laboratorium SMP					
Uraian	**Ada**	**%**	**Tidak ada**	**%**	**Keterangan**
Lab. IPA	25	64,10	14	35,90	Jumlah total SMP = 39
Lab. Bahasa	3	7,69	36	92,31	
Lab. Komputer	10	25,64	26	66,67	

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.1.7. Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menegah

Di Kabupaten Barito Utara rasio guru terhadap murid yang paling tinggi yaitu pada usia SMP 13-15 tahun, dengan rasio diatas 10 persen, sedangkan rasio guru terhadap murid yang paling rendah di Kabupaten Barito Utara yaitu usia 16 – 18 tahun atau SMA/MA/SMK. Rasio guru terhadap murid SD/MI pada tahun 2013-2017 setiap tahunnya mengalami kenaikan, sedangkan untuk usia 13-15 tahun atau SMP/MTS pada tahun 2012 sebesar 11 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 10,2. Sedangkan pada usia SMA/SMK/MA pada Tahun 2015 hanya mencapai 4,29 persen.

Tabel II.29
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar	9	9,3	9,14	9,6	10
2	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Pertama	11	10,2	10,36	10,5	14
3	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Atas	8	8,3	4,29	8,4	14

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.1.8. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV

Angka guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dari tahun 2013-2016 terus mengalami penurunan hingga pada titik terendah sebesar 76,58 persen pada tahun 2016, pada tahun 2017 kembali naik menjadi 88,17 persen.

Tabel II.30
Guru dengan Kualifikasi S1/DIV
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	82	81.88	81.44	76.58	88.17

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2018

Tabel II.31
Jumlah Guru PNS sesuai Kualifikasi Pendidikan Tahun 2017

Jumlah Guru PNS sesuai Kualifikasi Pendidikan					
Jenjang	> S1	%	< D3	%	Keterangan
SD	1.191	88,55%	154	11,45%	Jumlah total Guru PNS SD = 1.345
SMP	344	98,57%	5	1,43%	Jumlah total Guru PNS SMP = 349
Total guru PNS SD + SMP	1.535	90,61%	159	9,39%	Jumlah total Guru PNS SD + SMP = 1.694

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.2. Kesehatan

2.3.1.2.1. Angka Kelahiran dan Kematian Bayi

AKB tahun 2017 adalah 3 per 1.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian neonatal bayi masing-masing sebesar 7 orang dan lahir hidup 2.333 orang, dan untuk Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak berumur dibawah 5 (lima) tahun disuatu wilayah tertentu selama satu tahun per 1.000 kelahiran hidup.

Tabel II.32
Angka Kematian Bayi Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2017

No	Tahun	Jumlah Bayi Lahir	Jumlah Kematian Bayi	Angka Kematian Bayi (AKB)	Target Nasional
1	2013	2.310	13	6/1000 KH	23/100.000 KH
2	2014	2.443	15	6/1000 KH	23/100.000 KH
3	2015	2.461	12	5/1000 KH	24/1000 KH
4	2016	2.333	11	5/1000 KH	24/1000 KH
5	2017	2.339	7	3/1000 KH	24/1000 KH

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.2.2. Angka Kematian Ibu

AKI tahun 2017 adalah 256 per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian ibu sebesar 1 orang dan melahirkan hidup 2345 orang jumlah tersebut sudah memenuhi target nasional.

Tabel II.33
Cakupan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah Ibu yang Melahirkan	Jumlah Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI)	Target Nasional
1	2013	2260	3	132/100.000 KH	228/100.000 KH
2	2014	2253	5	221/100.000 KH	228/100.000 KH
3	2015	2466	1	41/100.000 KH	306/100.000 KH
4	2016	2365	6	253/100.000 KH	306/100.000 KH
5	2017	2345	6	256/100.000 KH	306/100.000 KH

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.2.3. Jumlah Pos Pelayaan Terpadu (Posyandu)

Posyandu yang ada di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 dan 2014 sebanyak 161 posyandu, bertambah 5 posyandu pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 dan 2017 menjadi 170 posyandu.

Tabel II.34
Jumlah Posyandu di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Posyandu	161	161	169	170	170

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.2.4. Jumlah Puskesmas dan Pustu

Puskesmas di Kabupaten Barito Utara mulai tahun 2013 sampai dengan 2015 berjumlah 16 puskesmas, di tahun 2016 bertambah menjadi 17 puskesmas, sedangkan jumlah puskesmas pembantu pada tahun 2013-2017 tidak mengalami penambahan sehingga berjumlah 84 puskesmas pembantu.

Tabel II.35
Jumlah Puskesmas di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Puskesmas	16	16	16	16	16
2	Puskesmas Pembantu	84	84	84	84	84

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.2.5. Jumlah Rumah Sakit

Jumlah fasilitas rumah sakit yang ada di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 berjumah 1 (satu) rumah sakit.

Tabel II.36
Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rumah Sakit	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.2.6. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk yang ada di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2013, 2014 dan 2015 dari tahun ke tahun terus menurun dan di tahun 2016 kembali meningkat menjadi 2,02 persen.

Tabel II.37
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio dokter per satuan penduduk (jumlah dokter + dokter gigi)	1.35	1.34	1.17	2.02	2.01

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.2.7. Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga paramedis persatuan penduduk di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2013-2015 terus menurun hingga yang terendah pada tahun 2015 berada di angka 21,88 persen, dan kembali naik di tahun 2016 menjadi 35,35 persen, kembali turun menjadi 35,11 persen di tahun 2017.

Tabel II.38
Rasio Tenaga Paramedis per satuan penduduk di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk (jumlah Perawat + Bidan + Apoteker)	23.36	23.16	21.88	35.35	35.11

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.2.8. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaaten Barito Utara pada tahun 2013 sebesar 34,73 persen, meningkat di tahun 2014 dan 2015 menjadi 36,02 persen dan 52,40 persen, menurun di tahun 2016 dan 2017 menjadi 42,81 persen dan 41,77 persen.

Tabel II.39
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	34,73	36,02	52,40	42,81	41,77

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.2.9. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Children Immunization*

Cakupan desa/kelurahan *universal children immunization* di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2013-2017 mengalami turun naik hingga pada 2017 mencapai nilai 105,57 persen yang juga menjadi angka tertinggi pada 5 tahun terakhir.

Tabel II.40
Cakupan desa/kelurahan *universal children immunization*
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Thn	sasaran	BCG	%	DPT/ HB 3	%	Polio 4	%	Campak	%	Capaian jlh % BCG+DPT+ POLIO+CA MPAK /4	Target Nasional (%)	(-) / (+)
2013	2478	2357	95.1	2362	95.3	2417	97.5	2347	94.7	95.65	90	5.65
2014	2434	2308	94.9	2129	92.3	2176	89.4	2191	90.1	91.67	90.5	1.17
2015	2347	2394	102.5	2348	100.6	2390	102.4	1390	99.2	101.17	91	10.17
2016	2478	2495	100	2389	96.4	2255	91	2333	94.2	95.4	91.5	3.9
2017	2337	2666	103	2478	106	2459	105.2	2526	108.1	105.57	92	13.57

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.2.10. Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan dan atau di rumah oleh tenaga kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk. Pada Tahun 2013 ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 1 kasus, pada tahun 2014 dan 2015 kasus balita gizi buruk meningkat menjadi 2 orang dan 4 orang. Dalam rentang 5 tahun terakhir persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Barito Utara sudah mencapai target nasional yaitu sebesar 100%, Sebagian besar kasus gizi buruk yang terjadi pada balita di Kabupaten Barito Utara disebabkan oleh penyakit bawaan seperti kelainan katup jantung dan sebagainya. Pemantauan secara berkala terhadap anak balita melalui kegiatan rutin di posyandu sangat penting dalam pemantauan pertumbuhan anak balita.

Tabel II.41
Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

INDIKATOR	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Balita Gizi Buruk yang Ditemukan	1	2	4	1	2
Balita gizi buruk yang mendapat perawatan	1	2	4	1	2

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.2.11. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di tahun 2013 sebesar 199 kasus, terus meningkat hingga tahun 2016 menjadi 240 kasus, di tahun 2017 kembali turun menjadi 211 kasus.

Tabel II.42
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

No	Tahun	Target (Kemenkes RI)	Penemuan Kasus TB Paru			Jlh	% (BTA & Rontgen)
			Suspek	BTA (+)	Rontgen (+)		
1	2013	254	732	108 (43%)	91 (36%)	199	78%
2	2014	269	269	122 (45%)	83 (31%)	205	76%
3	2015	269	269	123 (46%)	102 (38%)	225	84%
4	2016	269	269	99 (37%)	141 (52%)	240	89%
5	2017	224	1392	126 (60%)	85 (40%)	211	94%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.2.12. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di tahun 2013 sebanyak 15 kasus, meningkat drastis pada tahun 2014-2016 hingga mencapai 276 kasus, dan menurun pada tahun 2017 menjadi 118 kasus.

Tabel II.43
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	15	78	125	276	118

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.3.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Berdasarkan data tahun 2017 panjang jaringan jalan di Kabupaten Barito Utara dengan status Jalan Nasional sepanjang 270,24 km, Jalan Provinsi sepanjang 10,58 km dan Jalan Kabupaten sepanjang 758,14 km. Sedangkan panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Barito Utara sampai dengan tahun 2017 adalah 604,18 km yang terdiri dari

245,90 km Jalan Nasional, 9,98 km Jalan Provinsi serta 348,30 km Jalan Kabupaten.

Tabel II.44
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017
Berdasarkan Kewenangan Jalan
(Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten)

NO.	KEADAAN JALAN	2013	2014	2015	2016	2017
I.	**JALAN NASIONAL**					
	Panjang Jalan (km)	408,17	408,17	408,17	294,00	270,24
	Panjang Jalan Kondisi Baik (km)	399,80	399,80	399,80	288,00	245,90
	Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	**97,95**	**97,95**	**97,95**	**97,96**	**90,99**
II.	**JALAN PROVINSI**					
	Panjang Jalan (km)	34,10	34,10	34,10	18,00	10,58
	Panjang Jalan Kondisi Baik (km)	18,80	18,80	18,80	17,00	9,98
	Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	**55,13**	**55,13**	**55,13**	**94,44**	**94,33**
III.	**JALAN KABUPATEN**					
	Panjang Jalan (km)	608,34	625,74	625,74	758,14	758,14
	Panjang Jalan Kondisi Baik (km)	362,54	367,59	420,34	347,76	348,30
	Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	**59,59**	**58,74**	**67,17**	**45,87**	**45,94**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.3.2. Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar

Panjang jalan yang memiliki trotoar di Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2017 sepanjang 9,09 km, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.45
Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

INDIKATOR	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Panjang Jalan yang memiliki trotoar (Km)	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.3.3. Panjang Jalan Yang Memiliki Drainase/Saluran

Panjang jalan yang memiliki drainase/saluran terus meningkat selama periode tahun 2013-2017 dengan panjang 9.902 meter di tahun 2013 menjadi 13.711 meter pada tahun 2017.

Tabel II.46
Panjang Jalan Yang Memiliki Drainase/Saluran
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

INDIKATOR	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Panjang Jalan yang memiliki drainase /saluran (m)	9.902	10.275	11.659	12.450	13.711

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.3.4. Panjang Jalan Dilalui Roda Empat

Panjang jalan yang dilalui roda empat di Kabupaten Barito Utara yang berupa permukaan aspal dari tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan, sedangkan panjang jalan yang berupa tanah dari tahun 2013-2017 terus menurun.

Tabel II.47
Panjang Jalan Dilalui Roda Empat
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Permukaan Aspal (km)	147,32	152,45	163,04	176,34	202,93
2	Permukaan Tanah (km)	387,64	375,49	365,49	364,94	306,69

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.3.5. Jaringan Irigasi

Panjang Jaringan Irigasi keseluruhan di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2017 adalah 125.869 meter, jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi peningkatan pada tahun 2014, namun terjadi penurunan pada tahun 2016 karena kurang terkelola.

Tabel II.48
Panjang Jaringan irigasi
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Panjang Jaringan Irigasi (meter)	125.869	125.961	125.869	122.369	125.869

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

2.3.1.4.1. Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni di kabupaten Barito Utara pada tahun 2015 dan 2016 berada di angka 3,59 persen dan meningkat 0,1 persen pada tahun 2017 menjadi 3,60 persen.

Tabel II.49
Rasio Permukiman Layak Huni
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2017

INDIKATOR	Tahun		
	2015	2016	2017
Rasio Permukiman Layak Huni	3,59	3,59	3,60

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.3.1.5.1. Banyaknya Bencana Alam

Banyaknya Bencana alam di Kabupaten Barito Utara selama periode tahun 2013-2017 didominasi bencana kebakaran yang pada puncaknya terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah 171 kasus kebakaran.

Tabel II.50
Banyaknya Bencana Alam Di Kabupaten Barito Utara

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Perahu Tenggelam	-	-	-	-	-
Kebakaran	10	9	171	14	17
Banjir	2	1	-	3	5
Tanah Longsor	1	-	-	-	2
Angin Puyuh	-	-	-	-	-
Paceklik	-	-	-	-	-
Disambar Petir	-	-	-	-	-
	14	**10**	**171**	**17**	**24**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.5.2. Banyaknya Korban Bencana Alam

Puncak banyaknya korban bencana alam di Kabupaten Barito Utara selama periode tahun 2013-2017 terjadi pada tahun 2017 dengan korban meninggal sebanyak 4 orang dan menderita sebanyak 24.349 orang, sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 adalah

tahun dengan korban meninggal dan menderita paling sedikit dengan 0 korban meninggal dan 60 orang korban menderita.

Tabel II.51
Banyaknya Korban Bencana Alam
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Meninggal (orang)	0	0	1	0	4
Menderita (orang)	1.700	3.050	171	60	24.349

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.5.3. Banyaknya Perkara dan Narapidana/Tahanan dan Mendapat Keputusan Sidang Pengadilan Negeri

Pada tahun 2017 terdapat 239 perkara yang dilakukan sidang di Pengadilan Negeri, yang didominasi oleh laki-laki dengan kasus 244 perkara, sedangkan perempuan 17 perkara dan anak-anak 27 perkara.

Tabel II.52
Banyaknya Perkara dan Narapidana/Tahanan dan mendapat
Keputusan sidang Pengadilan Negeri Tahun 2017

Perkara	Laki-laki	Perempuan	Anak-anak
239	244	17	27

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara (asal data PN Barito Utara), 2018

2.3.1.6. Sosial

2.3.1.6.1. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2017 mengalami turun naik hingga pada tahun 2017 mencapai nilai 7,02 persen.

Tabel II.53
Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sossial (%)	8,51	4,84	6,36	3,72	7,02

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.6.2. Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan

Tahun 2013 sampai 2017 secara umum terlihat bahwa jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Barito Utara berjumlah rata-rata di atas 300 orang pertahun, dan yang terbanyak ada di tahun 2017 sebanyak 14.888 orang.

Tabel II.54
Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberi bantuan (Orang)	425	566	300	566	14.888
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilatih (KK)	N/A	N/A	N/A	N/A	1

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.1.6.3. Jumlah KUBE yang Menerima Program Pemberdayaan Fakir Miskin

Kelompok Usaha bersama di Kabupaten Barito Utara yang menerima Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial pada tahun 2013 dan 2014 sebanyak 20 kelompok, dan pada tahun 2015 menurun menjadi 5 kelompok. Di tahun 2016 dan 2017 KUBE di Barito Utara tidak lagi menerima Program Pemberdayaan Fakir Miskin.

Tabel II.55
Jumlah KUBE yang menerima program pemberdayaan fakir miskin
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
KUBE Penerima Manfaat	20	20	5	0	0

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas pada tahun 2014 berjumlah 88.988 jiwa, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 67.216 jiwa dan 21.772 jiwa bukan angkatan kerja (75.53 persen penduduk yang bekerja). Pada tahun 2015 jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas berjumlah 90.148 jiwa, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 66.973 jiwa dan 28.554 jiwa bukan angkatan kerja (74.29 persen penduduk yang bekerja). Dan pada tahun 2017 jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas berjumlah 92.258 jiwa, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 63.704 jiwa dan 28.554 jiwa bukan angkatan kerja (69.04 persen penduduk yang bekerja).

Tabel II.56
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2014-2017 (jiwa)

No.	Jenis Kegiatan	2014	2015	2016	2017
A.	Angkatan Kerja	67.216	66.973	-	63.704
1	Bekerja	64.974	63.774	-	60.400
2	Pengangguran Terbuka	2.242	3.199	-	3.304
B.	Bukan Angkatan Kerja	21.772	23.175	-	28.554
1	Sekolah	5.738	7.012	-	7.120
2	Mengurus rumahtangga	13.549	14.193	-	18.669
3	Lainnya	2.485	1.970	-	2.765
Jumlah		**88.988**	**90.148**	**-**	**92.258**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018
Data Tahun 2016 tidak tersedia karena survei angkatan kerja nasional 2016 dibatalkan

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja terbanyak adalah laki-laki pada tingkat pendidikan SMA dengan jumlah 10.758 orang, sedangkan untuk perempuan yan terbanyak ada pada tingkat pendidikan SD dengan jumlah 6.799 orang.

Tabel II.57
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang termasuk Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2017

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/Belum Tamat SD	3.960	3.739	7.699
SD	9.521	6.799	16.320
SMP	8.211	3.162	11.373
SMA	10.758	4.846	15.604
SMK	3.209	1.477	4.686
Diploma/Universitas	3.997	4.025	8.022
Jumlah	**39.656**	**24.048**	**63.022**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3.2.2.1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Barito Utara dari Tahun 2013 hingga tahun 2015 terus mengalami kenaikan, namun di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 8,29 persen yang sebelumnya pada tahun 2015 sebesar 9,13 persen. Di tahun 2017 persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kembali mengalami kenaikan sebesar 5,2 persen sehingga menjadi 13,49 persen.

Tabel II.58
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	7,22	7,39	9,13	8,29	13,49

Sumber : DISDALDUKKBP3A Kab. Barut, 2018

2.3.2.2.2. Rasio KDRT

Rasio KDRT di Kabupaten Barito Utara selama 5 tahun terakhir terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, Tahun 2013 sebesar 0,0021 persen, sedangkan tahun 2017 sebesar 0,0027 persen.

Tabel II.59
Rasio KDRT Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio KDRT	0,0021	0,0022	0,0023	0,0024	0,0027

Sumber : DISDALDUKKBP3A Kab. Barut, 2018

2.3.2.2.3. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 hingga tahun 2016 setiap tahunnya terus mengalami kenaikan, namun di tahun 2017 Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan menurun di angka yang hamper sama dengan di tahun 2013 yaitu sebesar 86,89 persen.

Tabel II.60
Partisipasi angkatan kerja perempuan
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Partisipasi angkatan kerja	86,41	88,72	89,01	89,16	86,89

Sumber : DISDALDUKKB, P3A Kab. Barut, 2018

2.3.2.3. Pangan

2.3.2.3.1. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan Beras di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2013-2016 terus mengalami peningkatan, di tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 0,293 menjadi 21,025 ton, sedangkan Ketersediaan Daging di Kabupaten Barito Utara di Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,386 ton menjadi 1,423 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017.

Tabel II.61
Ketersediaan Pangan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Beras (ton)	15,986	19,027	20,187	21,318	21,025
Daging (ton)	1,293	1,445	1,809	1,423	1,494

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Barut, 2018

2.3.2.4. Pertanahan

2.3.2.4.1. Lahan Bersertifikat

Total luas lahan bersertifikat di Kabupaten Barito Utara tahun 2014 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,13 persen, sampai dengan tahun 2015 angka tersebut tidak mengalami perubahan dan pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan menjadi 0,09 persen.

Tabel II.62
Persentase Luas Lahan Bersertifikat
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Luas Lahan Bersertifikat (persen)	0,05	0,13	0,13	0,09	0,09

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Utara, 2018

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

2.3.2.5.1. Penanganan Sampah

Penanganan sampah di Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2017 terus meningkat dikarenakan volume produksi sampah juga terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2017 volume sampah yang ditangani sebesar 69.560 m3/tahun dan volume produksi sampah sebesar 74.000 m3/tahun.

Tabel II.63
Persentase Penanganan Sampah
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Volume sampah yang ditangani (m3)/tahun	55.216	58.387	64.480	66.614	69.560
Volume produksi sampah (m3)/tahun	64.961	67.112	69.333	71.628	74.000
Persentase tempat pembuangan sampah persatuan penduduk (persen)	25,6	23,8	29,5	29,7	38,2
Persentase penanganan sampah (persen)	81,25	81,50	81,70	84,97	89,87

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.2.5.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Konsep daya dukung secara umum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

a. Dari sisi ketersediaan, dengan melihat karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam yang ada disuatu wulayah.

b. Dari sisi kebutuhan, yaitu dengan melihat kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya dan arahan kebijakan prioritas suatu wilayah.

Lingkup Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup pada kajian KLHS RJPMD Kabupaten Barito Utara meliputi Daya Dukung Lahan Pangan, Daya Dukung Sumber Daya Air dan Daya Tampung Beban Pencemaran Lingkungan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap mahluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Hal ini membuat ketersediaan pangan di suatu wilayah merupakan hal yang penting dan harus selalu terjamin ketersediaannya. Dari Tabel II.64 berikut memperlihatkan hubungan produksi padi, beras, jumlah penduduk, dan kebutuhan akan beras serta rasio antara kemampuan produksi beras (P) dan tingkat konsumsi beras (K). Menggunakan rumus Indeks Daya Dukung Lahan untuk pangan (DDL)= P/K dimana P = Jumlah produksi beras per tahun dan K = Jumlah Konsumsi Beras per tahun. Terlihat bahwa kemampuan produksi beras rata-rata 1,5 (satu setengah) kali dari kebutuhan akan pangan. ini berbeda dengan daerah lain yang rata-rata mencapai 6 (enam) kali lipat dari kebutuhan akan pangan. Kondisi ini menunjukan bahwa daya dukung lahan/wilayah masih dalam keadaan surplus namun ada potensi untuk defisit pangan dengan Indeks Daya Dukung Lahan (DDL) untuk pangan 152 persen dari kebutuhan.

Tabel II.64
Daya Dukung Lahan Pertanian Terhadap Konsumsi Beras di Kabupaten Barito Utara

Tahun	Produksi Padi	Produksi Beras	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Beras /Tahun	Rasio P/K
2013	25.480	16.562	125.400	12.289	1,347709
2014	30.326	19.712	126.494	12.295	1,603245
2015	32.175	20.914	127.479	12.492	1,674171
2016	33.979	22.086	128.400	14.586	1,514192
2017	33.512	21.782	129.287	14.816	1,470167

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

Penentuan daya dukung air secara prinsip hampir sama dengan penentuan daya dukung lahan yakni dengan membandingkan

ketersediaan air dan kebutuhan air. Selain bahan pangan hal lain yang juga merupakan kebutuhan utama bagi manusia adalah ketersediaan air bersih. Air bersih juga merupakan salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari ekosistem. Secara alami, air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti sungai dan danau maupun berasal dari air tanah.

Ketersedian air di kabupaten Barito Utara sebagai sumber air baku utama adalah keberadaan air di sungai. Hingga saat ini sungai telah banyak digunakan masyarakat untuk pemenuhan akan kebutuhan air bagi rumah tangga, industri, pertanian, dsb. Selain sungai, sumber air baku lainnya yang dapat dimanfaatkan adalah air hujan dan air tanah. Berdasarkan analisis, potensi air hujan yang dapat dimanfaatkan dapat mencapai 0,5 milyar m3 per tahun. Begitu juga, air tanah cukup potensial keberadaanya untuk dimanfaatkan sebagai sumber air baku. Sekalipun ketersediaan air tanah di beberap kawasan tidak memenuhi baku mutu air minum, tetapi di banyak kawasan kualitasnya memadai.

Mengunakan data curah hujan tahunan, Jumlah stasiun pengamatan curah hujan (di sub Klimatologi), luas lahan , (dan Koefisien limpahan penggunaan lahan (Tabel 9, dalam Permen LH, No 17/2009) diperoleh perhitungan ketersediaan air dengan terlebih dahulu menghitung Koefisien Limpasan Tertimbang yang dimodifikasi dari metode rasional (Tabel 2.17). Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Utara memiliki potensi sumber daya sebesar 897, 489 juta m3 per tahun.

Tabel II.65
Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang

No.	Jenis Kawasan	Luas Ha	Koefisien Limpasan	[Ci x Ai]
I. Kawasan Lindung				
1	Hutan Lindung	32.201,87	0,18	5.796,34
2	Daerah Sempadan	18.647,29	0,35	6.526,55
3	Cagar Alam	5.885,00	0,4	2.354,00
II. Kawasan Budidaya				
4	Hutan Produksi (HP)	326.461,69	0,18	58.763,10
5	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	129.929,17	0,18	23.387,25
6	Pertanian Tanaman Pangan (DI & DR)	8.538,28	0,3	2.561,48

No.	Jenis Kawasan	Luas Ha	Koefisien Limpasan	[Ci x Ai]
7	Perkebunan dan Holtikultura	69.183,28	0,3	20.754,98
8	Pertambangan Mineral dan Batubara	98.802,98	0,7	69.162,09
9	Pertambangan Migas	28.989,49	0,7	20.292,64
10	Kawasan Industri	1.567,19	0,7	1.097,03

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

Tabel II.66
Ketersediaan Air di Kabupaten Barito Utara

Rumus:	Perhitungan Ketersediaan Air:
C = Σ (ci x Ai) / ΣAi R = Σ Ri /m SA= 10 x C x R x A	C = 0,3089934 R = 285/ 1 SA = 10 x 0,3089934x 285 X 1.019.143,29 = **897.489.368,253 m3**

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

Kebutuhan air adalah sejumlah air yang digunakan untuk berbagai peruntukan atau kegiatan masyarakat dalam wilayah tersebut. Dalam kasus ini kebutuhan air yang diperhitungkan adalah kebutuhan air untuk peruntukan kegiatan rumah tangga (domestik), fasilitas umum meliputi perkantoran, pendidikan (non domestik, irigsi, peternakan, industri, serta untuk pemeliharaan/penggelontoran sungai. Kebutuhan air di Kabupaten Barito Utara tahun 2017 adalah Hasil perhitungan Total kebutuhan air (m3/tahun) yaitu DA = 152.308 x 1.600 m3 = 243.692.800,00m3 , dimana separuhnya (121.846.400,00m3) adalah untuk memenuhi kebutuhan domestik dan separuhnya lagi (121.846.400,00m3) adalah untuk menghasilkan pangan.

Tabel II.67
Kebutuhan Air Kabupaten Barito Utara 2017, 2023, dan 2030

Tahun	Penduduk	Air Per Kapita /tahun/m3	Kebutuhan air m3	Ketersediaan m3
2017	152.308	1.600	243.692.800,00	894.340.282,751
2023	157.169	1.600	251.470.334,47	894.340.282,751
2030	164.236	1.600	262.777.662,71	894.340.282,751

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

Status daya dukung air diperoleh dengan membandingkan antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA). Bila SA> DA, daya dukung

air dinyatakan surplus. Sebaliknya, buila SA < DA, daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui. Sesuai perhitungan, diperoleh bahwa 665.610.313,0266 m3 >215.801.600 m3, yang berarti Kabupaten Barito Utara sangat surplus air.

Daya tampung lingkungan hidup adalah kapasitas lingkungan dalam menerima residu, limbah dan juga kemampuan menampung kegiatan pembangunan. Secara fisik daya tampung lahan dilihat pada kemampuan lahan untuk melihat kesesuaian kegiatan pembangunan di atasnya. Sedangkan daya tampung lainnya air dan udara yang ditunjukkan status kualitas badan air dan udara di Barito Utara.

Untuk Daya Tampung Lahan, berdasarkan peta satuan lahan dengan metode kuantitatif empiris maka diketahui kelas daya dukung lingkungan. Hasil analisis yang dilakukan dalam penyusunan daya dukung dan daya tampung lahan Barito Utara maka dapat dibagi dalam empat kelas lahan.

Tabel II.68.
Kelas Daya Dukung Lahan Barito Utara

Kelas	Luas Peta (Ha)	%
I – Sangat Rendah	242.919,55	23,84
II – Rendah	470.171,16	46,13
III – Menengah	71.586,37	7,03
IV – Tinggi	215.891,94	21,18

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

Daya Tampung Beban Pencemaran Sumber Air, berdasarkan Hasil dari pengambilan sampel air yang dilakukan di sungai-sungai yang ada di Kabupaten Barito Utara yaitu Sungai Barito, Sungai Lahei, Sungai Teweh dan Sungai Montallat kemudian dilakukan pengujian dilaboratorium, hasil analisa laboratorium terebut dilakukan perhitungan menggunakan *Metode Poluttan Indeks* dan didapatkan status mutu air.

Semua sampel air Sungai yang dianalisa menggunakan *Metode Poluttan Indeks* berstatus cemar ringan dengan nilai *Pollutan Indeks* (PI) yaitu dengan kisaran 1,17-3,63 yang termasuk dalam kriteria cemar ringan.

2.3.2.5.3. Kualitas Air

Pemantauan kualitas air pada tahun 2013-2018 dilakukan pada 4 (empat) titik yaitu DAS Barito, SubDAS Lahei, Teweh dan Montallat. Dalam kurun waktu 5 tahun terjadi penurunan nilai indeks kualitas air, pada tahun 2013 dan 2014 masuk dalam kategori rata-rata cemar ringan, tahun 2015 nilai kualitas air masuk kategori rata-rata cemar sedang, kemudian tahun 2016 terjadi peningkatan nilai kualitas air masuk pada kategori cemar ringan. Namun pada tahun 2017 dilakukan pemantauan rutin tetapi tidak dilakukan perhitungan/pengujian nilai kualitas air dikarenakan parameter yang di uji tidak memenuhi syarat perhitungan nilai kualitas air.

Tabel II.69
Indeks Kualitas Air (IKA) pada Sungai Barito, Sungai Lahei, Sungai Teweh dan Sungai Montallat Tahun 2013-2016

No	Nama DAS/ SubDAS	Indeks Kualitas Air (IKA)							
		2013		2014		2015		2016	
		Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II
1.	**Sungai Barito**								
	Bagian Hulu	3,1	Tidak di uji	3,4	2,20	6,19	1,10	1,68	Tidak di uji
	Bagian Tengah	2	Tidak di uji	3,3	2,32	6,20	1,10	2,21	Tidak di uji
	Bagian Hilir	2,9	Tidak di uji	2,7	2,22	6,22	1,09	3,63	Tidak di uji
2.	**Sungai Lahei**								
	Bagian Tengah	2,9	Tidak di uji	2,5	2,20	6,18	1,14	1,17	Tidak di uji
	Bagian Hilir	3,2	Tidak di uji	3,0	3,09	6,20	1,14	3,44	Tidak di uji
3.	**Sungai Teweh**								
	Bagian Hulu	6,4	Tidak di uji	3,5	2,49	6,19	1,26	3,43	Tidak di uji
	Bagian Tengah	9,1	Tidak di uji	3,2	4,05	6,22	1,09	1,92	Tidak di uji
	Bagian Hilir	4,1	Tidak di uji	3	2,23	6,20	1,10	2,83	Tidak di uji
4.	**Sungai Montallat**								
	Bagian Hulu	4,2	Tidak di uji	2,8	2,20	6,19	Tidak di uji	2,45	Tidak di uji
	Bagian Tengah	3,4	Tidak di uji	3	2,21	6,21	Tidak di uji	2,78	Tidak di uji
	Bagian Hilir	3,3	Tidak di uji	3,7	2,22	6,24	Tidak di uji	2,08	Tidak di uji

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.2.5.4. Izin Lingkungan

Ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang memiliki izin lingkungan dalam kurun waktu 2013-2017 sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.70
Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Sektor Kegiatan	Jumlah Perusahaan yang Memiliki Izin Lingkungan				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pertambangan	80	100	105	107	108
Perkebunan	10	17	19	19	19
Kehutanan	7	7	7	7	7

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.2.5.5. Sengketa Lingkungan

Meningkatnya sengketa lingkungan hidup antara masyarakat dengan pelaku usaha dan/atau kegiatan akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan lingkungan hidup dari tahun 2013-2017, sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.71
Penanganan Pelayanan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Sektor Kegiatan	Jumlah Perusahaan yang Memiliki Izin Lingkungan				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pertambangan	-	21	6	8	6
Perkebunan	-	-	-	-	-
Kehutanan	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.2.5.6. Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.45/298/2017 tentang Status Siaga Darurat Karhutla, sehingga diperlukan kerjasama multipihak dalam rangka pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Wilayah Kabupaten Barito Utara memiliki jumlah titik api (*hotspot)* yang fluktuatif dari tahun 2014-2017, dimana yang terbanyak pada tahun 2015 yaitu 110 titik api sebagai akibat terjadinya kemarau panjang bahkan dari kejadian

karhutla ini telah menimbulkan kejadian kabut asap sejak Agustus-Oktober 2015. Dengan luas lahan/hutan yang mengalami kebakaran pada tahun 2014 seluas 208,2 Ha dan untuk tahun 2015 sekitar 546,5 Ha. Sementara untuk tahun 2016 dan 2017 bila dibandingkan dengan 2015 terjadi penurunan *hotspot* sekitar 70%, dikarenakan pada tahun 2016-2017 boleh dibilang musim kemarau yang terjadi adalah kemarau basah, sehingga aktivitas pembukaan lahan hanya sedikit. Namun pada tahun 2017 untuk beberapa kecamatan yaitu Teweh Baru, Montallat, Teweh Timur dan Gunung Purei terjadi peningkatan jumlah hotspot dibandingkan dari tahun 2016 yang penyebabnya masih di dominasi oleh kebiasaan masyarakat membuka lahan perkebunan dengan membakar dan membuang puntung rokok sembarangan. Meski demikian pada tahun 2017 tidak terjadi kebakaran yang besar dan *hotspot* masih dapat dikendalikan. Dan sebaliknya di penghujung tahun 2017 terjadi banjir besar pada ketiga anak Sungai Barito yaitu Sungai Lahei, Sungai Montallat dan Sungai Teweh.

Tabel II.72
Jumlah Titik Api (*Hotspot)*
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2014-2017

Kecamatan	Jumlah Titik Api (*Hotspot*)			
	2014	2015	2016	2017
Lahei Barat	-	-	-	-
Lahei	-	2	4	2
Teweh Tengah	8	25	8	3
Teweh Baru	1	5	12	13
Teweh Selatan	3	-	3	1
Montallat	10	23	-	3
Gunung Timang	13	24	5	4
Teweh Timur	6	27	1	4
Gunung Purei	-	4	-	2

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.3.2.6.1. Administrasi Kependudukan

Penduduk yang Memiliki KTP elektronik menurut kecamatan pada tahun 2013-2017, sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.73
Penduduk yang Memiliki KTP elektronik
Berdasarkan kecamatan tahun 2013-2017

Kecamatan	2013		2014		2015		2016		2017	
	Jmlh Penduduk	KTP-E	Jmlh Penduduk	KTP-E	Jmlh Penduduk	KTP-E	Jmlh Penduduk	KTP-E	Jmlh Penduduk	KTP-E
MONTALLAT	13.881	4.380	11.881	6.383	12.806	6.402	10,769	6.432	10971	7.234
GUNUNG TIMANG	12.469	6.080	12.469	7.075	13.807	7.086	12,344	7.118	12588	7.878
GUNUNG PUREI	5.315	1.120	2.805	1.140	2.738	1.147	2,686	1.259	2683	1.736
TEWEH TIMUR	15.920	3.371	6.920	3.369	6.415	3.375	6,655	3.408	6517	4.185
TEWEH TENGAH	55.362	26.811	55.362	37.006	55.063	37.085	56,433	37.559	56384	40.820
LAHEI	19.334	10.194	14.333	10.210	13.945	10.228	14,28	10.280	14701	10.954
TEWEH BARU	19.797	7.202	19.797	7.274	20.069	7.320	20,96	7.630	21439	8.847
TEWEH SELATAN	18.569	5.581	15.569	5.615	15.348	5.656	15,892	5.852	15577	6.602
LAHEI BARAT	16.985	2.261	10.985	2.263	10.704	2.266	11,335	2.301	11448	2.892
Jumlah	**177.632**	**67.000**	**150.121**	**80.335**	**150.895**	**80.565**	**151,354**	**81.839**	**152.308**	**91.148**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Utara, 2018

Sedangkan data kepemilikan akta kelahiran tahun 2013-2017 sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.74
Penduduk yang Memiliki Akta kelahiran
Berdasarkan kecamatan tahun 2013-2017

Kecamatan	2013		2014		2015		2016		2017	
	Jmlh Penduduk	Penduduk memiliki Akta Kelahiran	Jmlh Penduduk	Penduduk memiliki Akta Kelahiran	Jmlh Penduduk	Penduduk memiliki Akta Kelahiran	Jmlh Penduduk	Penduduk memiliki Akta Kelahiran	Jmlh Penduduk	Penduduk memiliki Akta Kelahiran
MONTALLAT	13.881	5.569	11.881	5.835	12.806	6.127	10.769	6.526	10.971	6.823
GUNUNG TIMANG	12.469	6.374	12.469	6.600	13.807	6.896	12.344	7.357	12.588	7.626
GUNUNG PUREI	5.315	1.322	2.805	1.364	2.738	1.437	2.686	1.499	2.683	1.570
TEWEH TIMUR	15.920	3.064	6.920	3.209	6.415	3.365	6.655	3.554	6.517	3.694
TEWEH TENGAH	55.362	28.640	55.362	29.883	55.063	31.079	56.433	32.528	56.384	33.893
LAHEI	19.334	6.404	14.333	6.748	13.945	7.126	14.280	7.510	14.701	7.804
TEWEH BARU	19.797	8.686	19.797	9.117	20.069	9.599	20.960	10.171	21.439	10.572
TEWEH SELATAN	18.569	7.470	15.569	7.805	15.348	8.261	15.892	8.763	15.577	9.083
LAHEI BARAT	16.985	5.153	10.985	5.453	10.704	5.740	11.335	6.017	11.448	6.227
Jumlah	**177.632**	**72.682**	**150.121**	**70.179**	**150.895**	**73.503**	**151.354**	**77.399**	**152.308**	**80.469**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Utara, 2018

Sedangkan penduduk yang memiliki Akta Nikah tahun 2013-2017 sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.75
Penduduk yang Memiliki Akta Nikah
Di Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Pasangan Nikah Ber Akta Nikah			Jumlah Keseluruhan Pasangan Nikah			Rasio
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	jumlah	
2013	4.980	4.488	9.468	6.622	6.533	13.155	0,72
2014	5.042	4.555	9.597	5.122	5.333	10.455	0,92
2015	5.130	4.669	9.799	3.702	5.036	8.738	1,12
2016	5.184	4.745	9.929	3.402	4.136	7.538	1,32
2017	5.219	4.780	9.999	3.223	3.344	6.567	1,52

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Utara, 2018

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang salah satunya dilakukan melalui penyaluran Dana Desa oleh pemerintah pusat kepada Desa telah mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah desa dituntut lebih profesional dalam melaksanakan pembangunan karena pemerintah desa sendiri yang merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya. Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. Selain dana desa sumber pendapatan desa yang diperoleh dari pos bantuan keuangan kepada Desa menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel II.76
Dana Desa Kabupaten Barito Utara tahun 2015-2017

Uraian	2015	2016	2017
Dana Desa (Rupiah)	25.996.772.000	58.303.814.000	74.042.909.000
Realisasi Dana Desa (Rupiah)	25.835.234.000	58.303.814.000	74.042.909.000

Sumber : Dinas Sosial PMD Kabupaten Barito Utara, 2018

Tabel II.77
ADD Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Alokasi Dana Desa (Rupiah)	6.612.289.612	15.295.620.570	51.152.231.100	57.468.125.200	50.331.799.450
Realisasi ADD (Rupiah)	5.824.695.932	15.169.455.246	48.831.036.325	57.289.433.585	50.170.575.750

Sumber : Dinas Sosial PMD Kabupaten Barito Utara, 2018

Pemberdayaan desa tidak terlepas dengan upaya pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat pemerintah desa dalam memperkuat perekonomian desa sesuai dengan Permendesa Nomor 4 tahun 2015. Pada Tahun 2017 dilakukan sosialisasi dan fasilitasi pembentukan BumDes. BumDes yang sudah terbentuk ada di 9 Kecamatan dan terbentuk sebanyak 37 Bumdes.

Tabel II.78
Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
Kabupaten Barito Utara Tahun 2017

No	Kecamatan	Desa	Nama Bumdesa	Dasar Hukum	Tahun Pendirian	Jenis-jenis Usaha Bumdesa
1	Lahei Barat	Nihan Hilir	Bina Karya	PERDES	2016	Jasa Penyeberangan, BBM dan LPG
2	Lahei Barat	Nihan Hulu	Bahara Maju	PERDES	2017	Pengumpul Karet
3	Lahei Barat	Luwe Hilir	Bersatu	PERDES	2016	Pengumpul Hasil PertanianKeramban Ikan, Pengadaan Barang dan Jasa
4	Lahei Barat	Luwe Hulu	Gawi Sasama	PERDES	2016	Pengelolaan Sampah, Jasa Angkut, Air Minum
5	Lahei Barat	Jangkang Baru	Gawi Hadaduhup	PERDES		Simpan Pinjam, PAM Desa
6	Lahei Barat	Jangkang Lama	Gawi Sejahtera	PERDES	2016	Pengumpul Hasil Pertanian, Perbengkelan, Perikanan
7	Lahei Barat	Papar Pujung	Apar Sejahtera	PERDES	2016	Toko Sembako, ATK, Simpan Pinjam,
8	Lahei Barat	Teluk Malewai	Tamak Ayang	PERDES	2016	Penggilingan Padi, Molding, Perdagangan Sembako
9	Lahei Barat	Benao Hilir	Harapan Taka Mandiri	PERDES	2016	Penyedia Barang dan Jasa, Simpan Pinjam
10	Lahei Barat	Benao Hulu	Pukuh Jaya	PERDES	2016	Bengkel Teralis
11	Lahei Barat	Karamuan	Damung Sirang	PERDES	2017	Pasar Desa, PDAM, Listrik desa
12	Teweh Tengah	Pendreh	Japek Bukoi	PERDES	2017	Peternakan, perdagangan
13	Teweh Tengah	Sei Rahayu I	Lestari	PERDES	2017	Pembuatan Pupuk Kompos, Pengelola Pasar Desa
14	Teweh Tengah	Sei Rahayu II	Mitra Rahayu Perkasa	PERDES	2017	Penjualan Gas LPG
15	Teweh Tengah	Lemo I	Lemo Mandiri	PERDES	2015	Jasa Pertambangan, Jasa Keamanan dan Pembebasan Lahan, perkebunan
16	Montallat	Sikan	Makodong Pandran	PERDES	2017	Sembako, Jasa, Simpan Pinjam

No	Kecamatan	Desa	Nama Bumdesa	Dasar Hukum	Tahun Pendirian	Jenis-jenis Usaha Bumdesa
			Jaya			
17	Montallat	Ruji	Siwau Manuk	PERDES	2016	Sembako, Jasa, Simpan Pinjam
18	Montallat	Paring Lahung	Mitra Paring Manau Jaya	PERDES	2016	Penyedia Barang dan Jasa, simpan pinjam
19	Montallat	Pepas	Bahai Mufakat	PERDES	2016	Unit Simpan Pinjam , Unit Pengadaan dan Jasa
20	Montallat	Kamawen	Harapan Bersama	PERDES	2017	Sembako, Jasa, Simpan Pinjam
21	Gunung Timang	Majangkan	Sirau Langit	PERDES	2016	Penggilingan Padi
22	Gunung Timang	Tongka	BUMDesa Tongka Bersatu Mandiri	PERDES	2016	PLTS
23	Gunung Timang	Batu Raya I	Mitra Karya	PERDES	2016	Pengumpul Biji Coklat, Penyaluran LPG/BBM
24	Gunung Timang	Malungai	BUMDesa Malungai	PERDES	2017	
25	Gunung Purei	Muara Mea	Mea Mandiri	PERDES	2016	Pengumpul Anyaman Rotan
26	Gunung Purei	Linon Besi I	Datai Lino Membangun	PERDES	2017	Pengumpul Anyaman Rotan, Pengumpul Biji Coklat
27	Teweh Timur	Liju	Tahamrin Jaya	PERDES	2016	Dagang Sembako
28	Teweh Timur	Mampuak II	Maju Bersama	PERDES	2016	PLTS , Jual Beli Karet , Jual Beli Hasil Pertanian
29	Teweh Timur	Sei Liju	Belang Rumpun	PERDES	2016	Toko Saprodi/Alsintan
30	Teweh Timur	Jamut	Jaya Mulya	PERDES	2017	Penyalur Saprodi , Penyediaan Air Bersih, Penyalur BBM
31	Lahei	Rahaden	Marindu Batu	PERDES		Pengelolaan Pasar Desa , Penjualan Sembako
32	Teweh Baru	Panaen	Harapan Taka	PERDES	2016	Penjualan Sembako
33	Teweh Baru	Gandring	Gandring Mandiri	PERDES	2017	Peternakan
34	Teweh Selatan	Bintang Ninggi II	Sejahtera Bersama	PERDES	2017	Pelabuhan Desa, PAM , Tambatan Kapal, Keramba Ikan
35	Teweh Selatan	Buntok Baru	Sasama Bagawi	PERDES	2017	
36	Teweh Selatan	Bukit Sawit	Bhineka Usaha	PERDES	2017	Jasa (Pulsa Hp) , Penjualan ATK, Pengadaan Bahan Bangunan
37	Teweh Selatan	Tawan Jaya	Jaya Mandiri	PERDES	2017	Pengadaan Bahan Bangunan, Air Minum Isi Ulang

Sumber : Dinas Sosial PMD Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kebijakan Penyelenggaraan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sebagai upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berdampak juga kepada berbagai persoalan yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan kesehatan. Fokus program KKBPK adalah meningkatkan kualitas manusia dan mengendalikan kuantitasnya. Konsentrasi program KKB pada peningkatan kulaitas SDM dan pelayanan KB.

Jumlah Pasangan Usia Subur pada tahun 2017 sebanyak 23.975 pasangan dan Peserta KB Aktif menurut di Kabupaten Barito Utara tahun 2017 sebanyak 18.920 peserta atau 78,92 persen dari PUS. Berdasarkan data tersebut menunjukkan masih terdapat 5.055 atau 21,08 persen pasangan usia subur yang belum menjadi peserta KB aktif.

Tabel II.79
Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif menurut kecamatan di Kabupaten Barito Utara tahun 2017

Kecamatan	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif							
		IUD	MOW	MOP	Kondom	Implan	Suntikan	Pil	Jumlah
Montallat	643	17	-	-	24	67	231	183	522
Gunung Timang	2.287	55	11	3	37	227	876	752	1.961
Gunung Purei	539	8	-	-	5	1	159	215	388
Teweh Timur	1.540	23	3	2	8	70	774	382	1.262
Teweh Tengah	8.521	119	80	15	98	854	2.771	2.991	6.928
Teweh Baru	3.492	23	-	3	28	119	940	942	2.055
Teweh Selatan	2.294	11	10	1	7	240	941	838	2.048
Lahei	2.322	8	11	2	22	57	765	897	1.762
Lahei Barat	2.337	2	-	-	69	60	923	940	1.994
Jumlah	**23.975**	**266**	**115**	**26**	**298**	**1.695**	**8.380**	**8.140**	**18.920**

Sumber : BadanPusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.2.9. Perhubungan

2.3.2.9.1. Sarana dan Prasarana Transportasi

Sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Barito Utara sampai dengan tahun 2017 dari sisi penyediaan terminal dan dermaga sungai masih belum berkembang dengan hanya memiliki 1 (satu) terminal type C yaitu Terminal PBB Muara Teweh dan memiliki 24 (dua puluh empat) buah dermaga sungai yang masih belum sebanding dengan jumlah 93 desa dan 10 kelurahan di Barito Utara. Namun dari sisi penumpang transportasi dari darat jumlah arus penumpang tercatat

sampai tahun 2017 sebanyak 15.166 penumpang, dengan jumlah angkutan umum yang beroperasi sampai tahun 2017 berjumlah 181 unit. Sedangkan jumlah penumpang melalui dermaga sungai tahun 2017 sebanyak 41.908 penumpang datang serta 43.822 penumpang berangkat. Untuk bongkar muat barang tahun 2017 yaitu 598 ton barang masuk dan 369 ton barang keluar.

Data jumlah kendaraan yang melakukan pengujian kendaraan bermotor (PKB) atau Uji KIR pada tahun 2017 sebanyak 1.027 unit kendaraan yang terdiri dari 502 mobil jenis Pick Up, 468 unit truck, 37 minibus dan 20 bus. Sedangkan lama waktu pelaksanaan uji KIR berdasarkan SOP Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu 20 (dua puluh) menit.

Tabel II.80
Sarana dan Prasarana Transportasi di Kabupaten Barito Utara
Tahun 2013-2017

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Transportasi Jalan					
Jumlah Terminal Type C (buah)	1	1	1	1	1
Jumlah arus penumpang melalui terminal (penumpang)	8.844	22.035	15.898	7.667	15.166
Jumlah Angkutan Umum (unit)	234	234	215	183	181
2. Transportasi Sungai					
Jumlah dermaga sungai (buah)	7	12	15	23	24
Jumlah penumpang : - Penumpang datang (orang) - Penumpang berangkat (orang)	 30.684 30.019	 37.498 33.147	 54.000 62.725	 31.658 31.104	 41.908 43.822
Jumlah bongkar muat barang : - Barang masuk (ton) - Barang keluar (ton)	 1.246 1.291	 935 1.127	 2.430 4.344	 645 744	 598 369
3. Uji KIR Angkutan Penumpang/ Barang					
Lama waktu pelaksanaan Uji KIR Mobil sesuai SOP Pengujian Kendaraan Bermotor (menit)	20	20	20	20	20
Jumlah mobil penumpang/barang yang di uji KIR (unit)	949	1.058	1.069	962	1.027

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Layanan komunikasi dan informatika di Barito Utara dalam kurun tahun 2013-2017 terus meningkat jika dilihat dari banyaknya sambungan. Terjadi peningkatan sambungan pada tahun 2017, sejalan dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informatika yaitu dengan tersedianya fasilitas indihome yang memberikan kemudahan pada akses komunikasi dan informatika.

Tabel II.81
Kapasitas Sentral dan Jumlah Pemegang Surat Ijin
Penerima Pesawat Telepon, 2013-2017

Jenis Sambungan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Telepon	3.916	4.120	4.475	4.475	6.656
Speedy	912	1.472	2.125	2.125	-
Indihome	-	-	-	-	6.656

Sumber : BadanPusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

Sedangkan untuk fasilitas menara telekomunikasi sampai tahun 2017 berjumlah 36 menara telekomunikasi yang tersebar diwilayah Kabupaten Barito Utara, sebagaiman tabel berikut :

Tabel II.82
Daftar Menara Telekomunikasi
Yang Beroperasional di Kabupaten Barito Utara tahun 2017

NO	SITE NAME	ALAMAT	Tinggi Menara (meter)	KET.
	PROVIDER : TELKOMSEL			
1	MTW2_PERWIRA	Jl. Sengaji Hilir RT.07 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah	42	Aktif
2	JL_NENAS / MUARA TEWEH 3	Jl. Nenas RT/RW 13/IV Kel. Lanjas Kec. Teweh Tengah	72	Aktif
3	STO HAJAK/HAJAK	Jl. Negara, Ds. Hajak RT.08, Kec. Teweh Baru	92	Aktif
4	PERTIWI	Jl. Pertiwi RT.28 Ds. Melayu Kec. Teweh Tengah	72	Aktif
5	SIDOREJO / WONOREJO	Ds. Wonorejo, Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah	42	Aktif
6	GN_TIMANG	Jl. Negara, RT/RW. III, Ds, Ketapang, Kec. Gunung Timang	72	Aktif
7	GN_PUREI / LAMPEONG	Jl. Negara / Jl. Tujuh Enam RT.4 Ds. Lampeong II, Kec. Gunung Purei	72	Aktif
8	LAHEI	Lahei 2 Seberang, RT. 08 Kel. Lahei Kec. Lahei	72	Aktif
9	TEWEH_TIMUR / BENANGIN	Jl. Negara / Jl. Tujuh Enam RT.4 Ds. Benangin, Kec. Teweh Timur	72	Aktif
10	TUMPUNGLAUNG	Jl. Kihajar Dewantara Kel. Tumpung Laung 2 Kec Montallat	72	Aktif

NO	SITE NAME	ALAMAT	Tinggi Menara (meter)	KET.
11	KANDUI	Jl. A. Yani RT.2, Kel. Kandui, Kec. Gunung Timang	82	Aktif
12	SIKUI	Jl. Lintas Muara Teweh - Kandui KM34 RT.11 Kec. Teweh Tengah	72	Aktif
13	PT BUTONG	Jl. Sawit PT AGU RT. 13 RW.3 Desa Bukit Sawit KM.12 Camp Butong Kec. Teweh Selatan	72	Aktif
	PROVIDER : INDOSAT			
1	MUARA_TEWEH	JL. SEMOGA INDAH GG.II, MUARA TEWEH, KALTENG	70	Aktif
2	PASAR_M_TEWEH	JL. PANGLIMA BATUR RT 19 KEL MELAYU KEC TEWEH TENGAH KAB BARITO UTARA KALIMANTAN TENGAH	40	Aktif
3	LEMO	DESA LEMO II, RT 06, KEC. TEWEH TENGAH, KAB.BARITO UTARA, KALTENG	120	Aktif
4	BUTONG	DESA BUTONG, KEC. TEWEH TENGAH KAB. BARITO UTARA, KAL-TENG	70	Aktif
5	N_HAJAK	JL NEGARA RT 03 NO 40 DESA HAJAK KEC TEWEH BARU KAB BARITO UTARA	100	Aktif
6	LAHEI	JL.UMUM KABUPATEN RT.08, KEL.LAHEI II KEC.LAHEI KAB.BARITO UTARA KALTENG	52	Aktif
7	BENAO	DESA BENAO HILIR RT 02 KEC LAHEI BARAT, BARITO UTARA	120	Aktif
8	MERONG	JL.ARTOMORO KM3 RT. 30 RW.10 Kel. MELAYU, Kec. TEWEH TENGAH, MUARA TEWEH BARITO UTARA KALTENG	52	Aktif
9	KANDUI	DESA KANDUI, RT.04 KEC. GUNUNG TIMANG, KAB. BARITO UTARA, KAL-TENG	80	Aktif
	PROVIDER : XL			
1	Muara Teweh	Jl. Nenas Belakang Stadion, RT.11 RW.04 NO.12, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Kalteng	70	Aktif
2	Butong	Jl.Raya Muara Teweh-Purukcahu, Km.08, RT02 Ds.IPU,kab.Barito Utara	70	Aktif
3	Sikui	Jl. Negara Km. 34 Ds. Sikui, Kec. Teweh Tengah, Kb. Barito Utara	70	Aktif
4	Kandui	Jl. Ahmad Yani No. 83 RT.02, Ds. Kandui, Kec. Gunung Timang, kab.Barito Utara	70	Beralih kepemilikan kepada PT STP
	PROVIDER : TOWER BERSAMA (DAYAMITRA/MITRATEL)			
1	MT_BANDARATEWEH	Jl. PRAMUKA (DEPAN SPBU) RT.16 RW.05 KEL. LANJAS, KEC. TEWEH TENGAH, KAB. MUARA TEWEH, KALTENG	25	Aktif, Pengguna TELKOMSEL
2	MT_MELAYUTEWEH	Jl. IMAM BONJOL RT.26 NO.29 KEL. MELAYU, KEC.TEWEH TENGAH, KAB. MUARA TEWEH, KALTENG	20	Aktif, Pengguna TELKOMSEL
3	MT_PRAMUKATENGAH	Jl. PRAMUKA NO.78 RT.15 RW.05 KEL. LANJAS, KEC. TEWEH TENGAH, KAB. MUARA TEWEH, KALTENG	20	Aktif, Pengguna TELKOMSEL
4	MT_PASARMUARA	Jl. KAPT. PIERE TENDEAN, RT.20, RW.07, KEL. MELAYU, KEC. TEWEH TENGAH, KAB. BARUT, KALTENG	25	Aktif, Pengguna TELKOMSEL
	PROVIDER : TOWER BERSAMA GROUP (TBG)			
1	TB_BENAO EX BENAO	TELUK MELAWAI, RT.02 DESA TELUK MELAWAI, KEC. LAHEI BARAT, KAB. BARITO UTARA	72	Aktif, Pengguna TELKOMSEL
2	TB_RIMBASARI EX RIMBA SARI	DESA RIMBASARI, RT.13, KEC. TEWEH TENGAH, KAB. BARITO UTARA, KALTENG	72	Aktif, Pengguna TELKOMSEL
3	TB_LEMO EX LEMO	Jl. RAYA SIMPANG 3 SMP/PREDEH, RT.12, DESA LEMO, KEC. TEWEH TENGAH, KAB. BARITO UTARA, KALTENG	82	Aktif, Pengguna TELKOMSEL
4	TRINSING	Jl. TRINSING, RT.05, KEL. JINGAH, KEC. TEWEH TENGAH, KAB. BARITO UTARA, KALTENG	42	Aktif, Pengguna TELKOMSEL & INDOSAT

NO	SITE NAME	ALAMAT	Tinggi Menara (meter)	KET.
5	Koperasi Maju Bersama	JL. KEMAWEN, RT.02, DESA KEMAWEN, KEC. MONTALLAT, BARITO UTARA, KALTENG	72	Aktif, Pengguna TELKOMSEL
	PROVIDER : TOWER BERSAMA (STP)			
1	Kandui	Jl. Ahmad Yani No. 83 RT.02, Ds. Kandui, Kec. Gunung Timang, kab.Barito Utara	71	Aktif , Pengguna XL

Sumber : Dinas Komunikasi , Informatika dan Persandian Kab. Barito Utara, 2018

2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

2.3.2.11.1. Persentase koperasi aktif

Persentase koperasi aktif yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2013 sebesar 67,09 persen, di tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 kenaikan persentase koperasi aktif meningkat drastis dikarenakan berkurangnya jumlah koperasi dari 272 koperasi pada tahun 2016 menjadi 219 pada tahun 2017 sedangkan koperasi aktif terus meningkat.

Tabel II.83
Persentase Koperasi Aktif Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Koperasi Aktif	159	186	203	208	212
Jumlah Seluruh Koperasi	237	262	267	272	219
Persentase Koperasi Aktif (persentase)	67,09	70,99	76,03	76,47	96,80

Sumber : Dinas Nakertranskop Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.2.11.2. Usaha Mikro dan Kecil

Jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2016 mengalami lonjakan yang tinggi yaitu 8.488 unit dari Tahun 2013 sebanyak 6.947 unit, pada tahun 2017 usaha mikro dan kecil menurun 0,1 persen menjadi 8.466 unit.

Tabel II.84
Persentase Usaha Mikro dan Kecil
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (unit)	6.947	7.022	7.200	8.488	8.466
Jumlah Seluruh UKM (unit)	75	75	105	285	285
Persentase UKM (persentase)	1	1	1,5	3,2	3,3

Sumber : Dinas Nakertranskop Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.2.12. Penanaman Modal

2.3.2.12.1. Jumlah Investor

Jumlah investor PMDN tahun 2013 sebanyak 228 unit, dan menurun di tahun 2014 menjadi 224 unit, namun pada tahun 2015 kembali naik menjadi 236 unit. Di tahun 2016 dan 2017 jumlah investor PMDN menurun drastis menjadi 113 unit dan 127 unit.

Tabel II.85
Jumlah Investor PMDN dan PMA
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah investor PMDN (unit)	228	224	236	113	127
Jumlah Investor PMA (unit)	7	7	7	5	7

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.2.12.2. Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN

Kenaikan atau Penurunan Nilai Realisasi PMDN adalah Realisasi PMDN tahun berkenaan diambil dengan realisasi PMDN tahun yang lalu berbagi dengan realisasi tahun berkenaan dikalikan 100.

Tabel II.86
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN Di Kabupaten Barito Utara
Tahun 2013-2017 (jutaan)

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Realisasi Tahun berkenaan	565.417,99	1.358.782,00	1.169.231,00	817..504,00	2.068.769,00
2	Realisasi Tahun Yang Lalu	189.552,98	565.417,99	1.358.782,00	1.169.231,00	817.504,00
3	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (persen)	198	140	-14	-30	153

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.2.13. Kepemudaan

Pemuda merupakan aset pembangunan terutama di bidang SDM, sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pembangunan. Peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan sangat dibutuhkan. Pembangunan di bidang kepemudaan mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan

berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Dari sisi pembinaan organisasi kepemudaan, berdasarkan data sampai dengan tahun 2017 tercatat 75 OKP yang ada di Barito Utara. Hal ini merupakan potensi bagi daerah dimasa depan dengan meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan.

Kegiatan kepemudaan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 meliputi :1)Peningkatan peran serta kepemudaan yang terdiri dari; Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan, Lomba Pidato dan vocal grup, Lomba Kreasi, Ikrar Bakti Anak Bangsa/Ikrar Sumpah Pemuda, Pemilihan pemuda pelopor, Lomba Lagu Perjuangan, Wahana Pengembangan Diri bagi Pemuda. 2)Wahana Pengembangan Diribagi Pemuda yang terdiri dari; Seleksi Gita Bahana Nusantara tingkat kabupaten dan provinsi, festival seni budaya pelajar, pembinaan grup paduan suara Bahana Batara, Pelatihan olah vocal dan musik, Pelatihan dasar-dasar tari daerah, Majelis Remaja, lomba karya tulis dikalangan pemuda, temu wicara organisasi pemuda 3). Seleksi Putra-Putri Pariwisata tingkat kabupaten dan provinsi, 4) Saka Parawisata yang terdiri dari ; Krida Penyuluh Wisata Krida Pemandu Wisata dan Krida Kuliner Wisara.

2.3.2.14. Statistik

Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam perumusan kebijakan serta evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pamantauan dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik sudah menjadi kebutuhan publik dalam arti luas, bukan saja untuk kepentingan pemerintah saja tetapi juga menjadi kebutuhan para stakeholders, dunia usaha, akademisi, para pengamat serta masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, khususnya jenis statistik sektoral.

Upaya peningkatan kualitas data Kabupaten Barito Utara menghadapi beberapa permasalahan baik permasalahan internal dan eksternal, diantaranya ialah sebagai berikut:

- Terbatasnya SDM statistik profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya pada perangkat daerah, sehingga berdampak pada kualitas data yang disajikan masih kurang akurat.
- Adanya perbedaan persepsi suatu data yang menjadikan beberapa versi data menurut masing-masing sumbernya.
- Rendahnya kualitas data yang dihasilkan dikarenakan masih kurangnya kesadaran responden, baik rumah tangga, perusahaan, maupun institusi/lembaga dalam memberikan data maupun informasi secara jujur.
- Belum terpenuhinya penyediaan kebutuhan ragam data dan informasi statistik daerah, terutama untuk data base Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Hal tersebut menjadikan terlambatnya penyajian data untuk pembangunan. Data yang dibutuhkan dalam proses perencanaan adalah data sampai dengan n+2, sedangkan data yang tersedia adalah n-1. Hal ini kemudian diantisipasi dengan memproyeksikan suatu data hingga diperoleh proyeksi data untuk acuan perencanaan pembangunan.

Kedepannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan data statistik yang akurat dan berkualitas baik sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan BPS,

Perangkat Daerah terkait, Desa, stakeholder lainnya dan memperkuat forum satu data pembangunan.

2.3.2.15. Persandian

Program Persandian diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengamanan informasi guna mendukung stabilitas keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi persandian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia persandian, penataan persandiandan pemanfaatan tekhnologi persandian.

Permasalahan dalam pengelolaan komunikasi sandi daerah yaitu belum tersedianya pengamanan jaringan informasi baik jenis informasi maupun konten informasidan pengamanan pada fasilitas vital/ruang publik/instalasi penting di Lingkup kabupaten Barito Utara. Upaya kedepan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan persandian adalah dengan meningkatkan pengamanan jaringan informasi baik jenis informasi maupun konten informasi dan peningkatan pengamanan jaringan komunikasi pada fasilitas vital/ ruang publik/ instansi penting di lingkup Kabupaten Barito Utara.

2.3.2.16. Kebudayaan

Pesta adat dan budaya yang terdapat di Barito Utara banyak dan beragam, namun hingga tahun 2017 semua kegiatan adat dan budaya tersebut belumlah terkoordinasi dalam satu agenda/jadwal kegiatan budaya karena pelaksanaan sangat tergantung dengan jadwal upacara adat yang tidak selalu sama setiap tahun Kegiatan tersebut antara lain; Festival Budaya Iya Mulik bengkang Turan (IMBT), Upacara Adat Wara, Acara Ba'Ayun setoiap bulan Maulid, Upacara Tandak Intan Hindu Kaharingan.

Salah satu even yang dilaksanakan yaitu Festival Budaya Iya Mulik Bengkang Turan yang setiap tahun secara rutin diadakan, merupakan sebuah even untuk menggali, memasyarakatkan, mengembangkan, serta melestarikan seni budaya tradisional yang di miliki Kabupaten Barito Utara dengan keanekaragaman suku, adat istiadat, bahasa, dan

budaya daerah. Kekayaan khasanah seni budaya tradisional tersebut dapat menjadi suatu kebanggaan dan potensi yang mendukung pembentukan etika, budaya, dan moral masyarakat Barito Utara.Kebangaan dan kecintaan terhadap seni budaya tradisional akan memupuk dan memelihara sikap nasionalisme yang dilandasi semangat Bhineka Tunggal Ika dalam bingkai NKRI.

Pada tahun 2017 Festival Budaya Iya Mulik Bengkang Turan pertandingkan 13 cabang lomba tersebut yakni tari pesisir pedalaman, vokal lagu daerah Barito Utara putra dan putri, karungut putra dan putri, balogo, bagasing, manyipet putra dan putri, mangaruhi, basei kambe putra dan putri, jukung tradisional putra dan putri, sepak sawut, manetek, maneweng, dan manyila kayu, serta fotografi. Diharapkan ajang festival ini akan melahirkan atlet olahraga tradisional dan seniman yang akan mewakili Kabupaten Barito Utara pada Festival Budaya Isen Mulang tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

2.3.2.17. Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat menuju masyarakat belajar yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah. Peningkatan minta baca masyarakat dapat dilihat salah satunya dengan meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat keperpustakaan.

Tabel II.87
Pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan Daerah tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pengunjung Perpustakaan (orang)	3.032	2.977	4.904	18.688	11.719
Jumlah Koleksi Buku (buah)	15.000	16.876	21.792	24.106	25.253

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Barito Utara, 2018

2.3.2.18. Kearsipan

Pengelolaan arsip statis mencakup kegiatan yang dilakukan guna penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana kearsipan yang ada didalam pengelolaannya. Pendampingan kepada unit kerja dan desa untuk menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan menjadi keharusan, namun keberhasilan dalam pengelolaan arsip di perangkat daerah tidak terlepas dari kesadaran unit kerja dan desa tentang pentingnya pengelolaan kearsipan.

Tabel II.88
Arsip pada Perpustakaan Daerah tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Arsip	52	75	100	100	130

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Barito Utara, 2018

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2013 sebesar 91,04 persen, meningkat di tahun 2014 menjadi 92,11persen. Di tahun 2015 kembali turun menjadi 91,11 dan pada tahun-tahun selanjutnya kembali naik menjadi 103,62 dan 112,00.

Tabel II.89
Produksi Perikanan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Produksi Perikanan (Ton)	4.259,48	4.592,20	8.821,65	5.690,73	6.487,07
Target Daerah (Ton)	4.678,80	4.986,20	5.292,00	5.492,00	5.790,00
Persentase Produksi Perikanan	91,04	92,11	91,11	103,62	112,00

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara, 2018

Pada tahun 2017 melalui kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat pesisir (nelayan dan pembudidaya ikan), dilaksanakan paket budidaya ikan di kolam terpal

yaitu untuk jenis ikan lele, ikan patin, ikan nila dan ikan mas. Sedangkan komoditi unggulan sektor perikanan di Kabupaten Barito Utara adalah Ikan Patin (budidaya) dan ikan saluang (perikanan tangkap).

Wilayah di Kabupaten Barito Utara yang memproduksi perikanan budidaya paling banyak adalah Kecamatan Teweh Tengah (2.559,91 Ton). Jenis produksi perikanan tangkap paling besar adalah keramba 3.048,90 Ton (56,56%), kemudian kolam 2.317,10 Ton (42,99%) dan paling kecil adalah jaring apung 24,27 Ton (0,45%).

2.3.3.2. Pariwisata

Jumlah wisatawan domestik yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2015 setiap tahunnya terus mengalamin kenaikan, namun pada tahun 2016 jumlah wisatawan mengalami penurunan dari 43.773 orang di tahun 2015 menjadi 34.730 orang. di tahun 2017 kembali mengalami kenaikan menjadi 42.199 orang dan diharapkan dapat terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya. Sedangkan jumlah wisatawan Mancanegara setiap tahunnya terus mengalami kenaikan dari tahun 2014 yang berjumlah 245 orang menjadi 92 orang di tahun 2017.

Tabel II.90
Data Obyek Wisata di Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017

No.	Nama Obyek Wisata	Lokasi	Kecamatan	Keterangan
1.	Gunung Bocah	Benangin	Teweh Timur	-
2.	Goa Lambung	Benangin	Teweh Timur	-
3.	Air Terjun Inih	Benangin	Teweh Timur	-
4.	Air Terjun Mansaro	Benangin	Teweh Timur	-
5.	Makam Mangkomot	Benangin	Teweh Timur	-
6.	Jeram Mansaro	Hulu Sungai Lampanan	Teweh Timur	-
7.	Gunung Angah	-	Teweh Timur	-
8.	Goa Gunung Angah	-	Teweh Timur	-
9.	Gunung Paparawen	Lemo	Teweh Tengah	Cagar Alam
10.	Air Terjun Jantur Jelitung	Lemo	Teweh Tengah	-
11.	Situs Pendreh	Pendreh	Teweh Tengah	-
12.	Goa Liang Idai	Bayas	Teweh Tengah	-

No.	Nama Obyek Wisata	Lokasi	Kecamatan	Keterangan
13.	Jeram Pemantu	Pendreh	Teweh Tengah	-
14.	Tugu Pancasila	Muara Teweh	Teweh Tengah	-
15.	Taman Rekreasi Remaja	Muara Teweh	Teweh Tengah	-
16.	Taman Wisata Hutan Pinus	Muara Teweh (Wonorejo)	Teweh Tengah	-
17.	Kerangka Kapal Perang Belanda "Onrust"	Tongtuwur	Teweh Tengah	-
18.	Goa Liang Pandan	Bayas	Teweh Tengah	-
19.	Makam Panglima Sogo	Malawaken	Teweh Baru	-
20.	Makam Panglima Batu Bolot	Malawaken	Teweh Baru	-
21.	Makam Mangkusari	Jambu	Teweh Baru	-
22.	Makam Wali Gandaria	Jambu	Teweh Baru	-
23.	Makam Serdadu Belanda	Jambu	Teweh Baru	-
24.	Benteng Belanda	Jambu	Teweh Baru	-
25.	Makam Tumenggung Surapati	Jambu	Teweh Baru	-
26.	Jeram Balai Warik	Karengan	Teweh Baru	-
27.	Goa Liang Longo	Jingah	Teweh Baru	-
28.	Situs Batu Benawa	Buntok Baru	Teweh Selatan	-
29.	Makam Keluarga Panglima Batur	Buntok Baru	Teweh Selatan	-
30.	Danau Muara	Butong	Teweh Selatan	-
31.	Danau Besar	Butong	Teweh Selatan	-
32.	Danau Dulan	Butong	Teweh Selatan	-
33.	Danau Oge	Butong	Teweh Selatan	-
34.	Danau Butong	Butong	Teweh Selatan	-
35.	DAM Trinsing	Trinsing	Teweh Selatan	-
36.	Danau Trinsing	Trinsing	Teweh Selatan	Komersil
37.	Bumi Perkemahan Panglima Batur	Trahean	Teweh Selatan	Komersil
38.	DAM Trahean	Trahean	Teweh Selatan	-
39.	Pemancingan dan Rumah Makan	Trahean	Teweh Selatan	Komersil
40.	Riam Rahaden	Rahaden	Lahei	-
41.	Air Terjun Jantur Doyam	Nihan	Lahei Barat	Komersil
42.	Air Terjun Hongkong Dalt	Karamuan	Lahei Barat	-
43.	Air Terjun Bonongkong	Karamuan	Lahei Barat	-
44.	Air Terjun Sungai Bajantur	Karamuan	Lahei Barat	-

No.	Nama Obyek Wisata	Lokasi	Kecamatan	Keterangan
45.	Air Terjun Hongkong Tayun	Karamuan	Lahei Barat	-
46.	Air Terjun Santuyun	Luwe Hulu	Lahei Barat	-
47.	Gunung Tangur	Muara Mea	Gunung Purei	-
48.	Batu Surat Uok	-	Gunung Purei	-
49.	Gunung Lumut	-	Gunung Purei	Hutan Lindung
50.	Goa Tengkorang/ Relief	Tongka	Gunung Timang	-
51.	Makam Singa Nginuh	Ketapang	Gunung Timang	-
52.	Janah Gemuntur	Tumpung Laung	Montallat	-

Sumber : Disbudparpora Kab. Barito Utara, 2018

Tabel II.91
Jumlah Wisatawan Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Wisatawan Domestik	30.142	40.460	43.773	34.730	42.199
Jumlah Wisatawan Mancanegara	-	245	164	95	92

Sumber : Disbudparpora Kab. Barito Utara, 2018

Sedangkan kontribusi pariwisata yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2017 dapat dilihat berikut.

Tabel II.92
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	1.088.882.927	2.832.432.817	1.253.150.006	1.253.831.182	2.540.956.273
2	Jumlah total PDRB	-	41.521,43	84.502,3	99.045,0	113.630,6

Sumber : Disbudparpora Kab. Barito Utara, 2018

2.3.3.3. Pertanian

2.3.3.3.1. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar di Kabupaten Barito Utara tahun 2013 sebesar 22,83 Ku/Ha, meningkat di tahun 2015 menjadi 25,43Ku/Ha, dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi 26,97Ku/Ha.

Tabel II.93
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Produksi Tanaman Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar	25.480	30.326	32.175	33.979	33.572
Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha)	10.054	12.011	12.081	11.783	12.427
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar (Ku/ha)	22.83	22.83	25.43	28.99	26.97

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.3.3.2. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2012 sebesar 7,61 persen, pada tahun-tahun selanjutnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB terus mengalami kenaikan, namun pada tahun 2016 turun menjadi 8,17 persen yang sebelumnya pada tahun 2015 yaitu sebesar 8,34 persen.

Tabel II.94
Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2012-2017

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**	2017***
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	7,61	10,91	11,78	12,42	12,18	11,5

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Barito Utara. Komoditas tanaman pangan dengan nilai produksi tertinggi adalah padi. Selain itu terdapat komoditas tanaman pangan lainnya yaitu jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, serta kacang hijau. Produksi padi pada tahun 2016 sebesar 33.979 ton, meningkat dari produksi tahun 2015 sebesar 32.175 ton. Produksi padi di Kabupaten Barito Utara didominasi oleh padi ladang, yaitu sebesar 65,97 persen dari total produksi padi.

Sedangkan komoditas agung saat ini merupakan komoditas yang

didorong oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai komoditas startegis penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya di Kabupaten Barito Utara yang menargetkan 2020 mendatang menjadi sentra atau lumbung jagung di Kalimantan Tengah. Kabupaten Barito Utara juga tercatat sebagai daerah pemasok jagung terbesar di Kalteng dan Kalsel, khususnya untuk kebutuhan bahan baku pakan ternak di PT.Comfeed di Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Pada tahun 2018 ini ada sekitar 1.650 hektar lahan untuk pengembangan jagung yang tersebar di 9 kecamatan dan sekitar 1.200 hektar untuk pengembangan padi gogo pada Musim Tanam (MT) Oktober maret 2018/2019.

2.3.3.4. Kehutanan

2.3.3.4.1. Kerusakan Kawasan Hutan

Di wilayah kerja BPDAS Barito yang meliputi daerah Kabupaten Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara dan Murung Raya jika lihat secara umum maka lahan yang termasuk dalam kriteria “Sangat Kritis” di Kabupaten Barito Utara berdasarkan data pada tahun 2013 seluas 14.972 Ha yang terinci secara lengkap menurut tingkat kekritisan lahan per kecamatan seperti pada tabel II.95 berikut, sedangkan untuk data terakhir sampai tahun 2017 masih belum dirilis secara resmi oleh BPDAS Barito.

Tabel II.95
Data Luas Lahan Kritis di Wilayah Kerja BPDAS Barito di Kabupaten Barito Utara Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)					Jumlah (Ha)
		Tidak Kritis	Potensi Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	
1	Montallat	2.386	25.930	24.547	16.142	324	**69.329**
2	Gunung Timang	-	48.978	35.478	21.291	618	**106.364**
3	Gunung Purei	4.377	78.482	51.542	12.978	-	**147.378**
4	Teweh Timur	1.142	47.961	30.906	11.981	-	**91.989**
5	Teweh Tengah	1.294	56.756	40.991	14.295	876	**114.212**
6	Lahei	24.313	172.482	91.193	30.205	3.664	**321.856**
7	Teweh Baru	575	18.389	48.697	8.631	4.436	**80.729**
8	Teweh Selatan	839	7.351	35.958	1.805	2.130	**48.083**
9	Lahei Barat	699	10.307	15.486	4.609	2.925	**34.026**
Jumlah		**35.626**	**466.636**	**374.797**	**121.935**	**14.972**	**1.013.967**

Sumber : BP-DAS dan HL Barito , 2013

2.3.3.4.2. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2012 sebesar 1,81 persen, menurun di tahun 2013 menjadi 1,77, di tahun-tahun selanjutnya terus mengalami peningkatan.

Tabel II.96
Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,81	1,77	2,09	2,32	2,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

2.3.3.5.1. Rumah yang yang menggunakan listrik

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik tahun 2015 sempat mengalami penurunan sebesar 0,24 persen dari tahun sebelumnya. dan di tahun-tahun seterusnya terus mengalami kenaikan sehingga pada tahun 2017 mencapai 92,41 persen.

Tabel II.97
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik	18.751	20.297	21.044	22.453	25.938
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik (%)	91,61	91,85	91,79	91,84	92,41

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.3.5.2. Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB yang ada di Kabupaten Barito Utaradari tahun ke tahun terus menurun, pada tahun 2012 sebesar 51,06 persen dan di 2016 penurunan yang terjadi cukup signifikan menjadi 42,81 persen.

Tabel II.98
Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	51,06	50,63	46,42	42,85	42,81

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.3.6. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2012 dan 2013 sebesar 4,68 persen, dan terus meningkat di tahun-tahun selanjutnya sampai dengan tahun 2016.

Tabel II.99
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	4,68	4,68	5,27	5,74	6,04

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.3.6. Perindustrian

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2012 sebesar 7,11 persen, menurun di tahun 2013 menjadi 6,87 persen, meningkat kembali di tahun 2014 dan 2015 menjadi 7,74 persen dan 8,16 persen.

Tabel II.100
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	7,11	6,87	7,74	8,16	7,88

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.3.6.1. Persentase Pertumbuhan Industri

Persentase pertumbuhan industri di Kabupaten Barito Utara tahun Tahun 2013 berada di posisi 1,06 persen, pada Tahun 2014-2016

samasekali tidak ada angka pertumbuhan industri di Kabupaten Barito Utara. Namun di tahun 2017 kembali ada kenaikan pertumbuhan industri sebesar 1,79 persen.

Tabel II.101
Persentase Pertumbuhan Industri
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Pertumbuhan Industri per tahun (unit)	379	379	379	379	398
Persentase Pertumbuhan Industri	1,06	0,00	0,00	0,00	1,79

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.3.7. Transmigrasi

Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi, sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Perpindahan penduduk melalui program transmigrasi sejak periode 1999/2000, Kabupaten Barito Utara tidak menerima transmigrasi, kecuali pembinaan terhadap transmigran yang telah ada.

Tabel II.102
Desa Unit Pemukiman Transmigrasi di Kab. Barito Utara tahun 2017

Nama UPT	Nama Desa	Penempatan			Keterangan
		Tahun	KK	JIwa	
01. Muara Teweh II	Sei Rahayu II	85/86	130	455	
02. Muara Teweh I	Sei Rahayu I	85/86	250	1.446	
Muara Teweh I	Sei Rahayu I	2011	80	336	Trans Pengembangan
03. Teweh Timur III/A/A	Baturaya I	86/87	488	2.248	
04. Trinsing	Trahean	90/91	200	819	
05. Transbangdep	Btg Ninggi	90-92	200	743	
06. PIR Butong I	Bukit Sawit	93-95	500	2.068	
07. Muara Teweh	III Rimba Sari	92-94	300	1.189	
08. PIR Butong II	Tawan Jaya	93-95	500	1.985	

Nama UPT	Nama Desa	Penempatan			Keterangan
		Tahun	KK	JIwa	
09. Teweh Timur III/B/A	Mampuak I	93-95	300	1.134	
10. Teweh Timur	Sei Jamut	95-97	300	1.134	
11. Teweh Timur III/C/B	Sei Liju	95-96	350	1.338	
12.Teweh Timur III/A	Baturaya II	96/97	400	1.478	
13. PIR Butong III	Padran Permai	96/97	300	1.169	
14. Muara Teweh IV	Beringin Raya	97/98	250	1.114	
15. PIR Butong IV	Pandran Raya	96/97	300	1.273	
16. Muara Teweh V	Datai Nirui	98/99	250	1.122	
17. Teweh Timur III/B/B	Pantung	98/99	300	1.181	
18. PIR Butong II/TSM	Tawan Jaya	1999	200	821	
JUMLAH			**5 598**	**23.143**	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan

2.3.4.1. Perumusan , Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara berdasarkan pada pedoman OPD sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, saat ini Barito Utara memiliki 36 Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 18 Dinas Daerah, 4 Badan Daerah , 9 Kecamatan serta ditambah 1 Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Tabel II.103
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Utara Tahun 2017

No.	Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	76	43	119
2	Sekretariat DPRD	14	11	25
3	Inspektorat	16	9	25
4	Dinas Pendidikan	856	1091	1947
5	Dinas Kesehatan	192	325	517
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	89	28	117
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	18	11	29
8	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27	18	45
9	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	25	17	42
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27	21	48
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	36	33	69
12	Dinas Lingkungan Hidup	20	16	36
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18	10	28
14	Dinas Perhubungan	39	9	48
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	17	5	22
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	20	9	29
17	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	18	14	32
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8	16	24
19	Dinasa Pertanian	94	50	144
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21	13	34
21	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	39	6	45
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	21	8	29
23	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	25	21	46
24	Badan Pengeloalaan Keuangan Daerah dan Aset	28	23	51
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21	8	29
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10	10	20
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	-	10
28	Kecamatan Teweh Tengah	14	8	22
29	Kecamatan Lahei	17	1	18
30	Kecamatan Gunung Timang	18	2	20

No.	Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
31	Kecamatan Montallat	19	1	20
32	Kecamatan Teweh Timur	14	1	15
33	Kecamatan Gunung Purei	17	2	19
34	Kecamatan Teweh Baru	16	-	16
35	Kecamatan Teweh Selatan	13	1	14
36	Kecamatan Lahei Barat	16	1	17
	Jumlah	**1.929**	**1.842**	**3.771**

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Barito Utara, 2018

2.3.4.2. Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena ia melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menekankan pentingnya pengawasan. Inspektorat Kabupaten mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Barito Utara, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dan desa untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governenance*. Terkait dengan hal tersebut pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten harus dapat menjawab peluang dan tantangan yang muncul.

Berdasarkan identifikasi terhadap beberapa permasalahan terkait fungsi pengawasan, permasalahan utama yang terkait dalam bidang pengawasan yaitu “Lemahnya pengendalian internal di masing-masing organisasi pemerintah daerah”.Pengendalian internal pada setiap unit organisasi merupakan faktor yang mendasar sehingga tugas pokok dan fungsi tiap-tiap organisasi pemerintah daerah dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Efektifnya pengendalian internal sangat tergantung pada komitmen seluruh aparat pemerintah. Terlaksananya pengendalian internal yang baik pada setiap

unit organisasi pemerintah daerah maupun pemerintahan desa sangat besar pengaruhnya terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari KKN.

Hal yang tidak kalah penting yaitu Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu; lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.

Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Dalam rangka efektifnya pelaksanaan SPIP Kabupaten Barito Utara diterbitkanlah Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Namun sampai akhir tahun 2017, SPIP Barito Utara belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana hasil penilaian tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah masih pada tingkat Maturitas Berkembang dengan skor 2.028 (berkembang adalah 2,0≤skor≤3,0). Dengan pengertian Maturitas Berkembang adalah Pemerintah daerah telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi

serta efektivitas pengendalian belum di evaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

Sedangkan berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Repormasi dan Birokrasi bahwa pada tahun 2017 Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kabupaten Barito Utara memperoleh Nilai 49,00/ "C" (berdasarkan enam kelompok nilai, yakni AA (85 – 100), A (75 – 85), B (65 – 75), CC (50-65), C (30 – 50), dan D (0 – 30). Namun demikian mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 43,36. Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah melakukan berbagai upaya demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi selama tahun 2018 terlihat dari adanya dukungan pimpinan dan komitmen yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan serta program untuk memperbaiki kondisi yang ada.

2.3.4.3. Perencanaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari empat tahapan yakni; 1). Penyusunan rencana, 2). Penetapan rencana, 3). Pengendalian pelaksanaan rencana dan 4). Evaluasi pelaksanaan rencana.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan dalam RPJMD 2013-2018 masih tidak sesuai dalam pelaksanaan atas RPJMD Kabupaten Barito Utara 2013-2018

ditenggarai terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan asumsi kerangka prioritas sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Hal ini telah diupayakan dengan diterapkannya *E-Planning* dalam proses perencanaan daerah yaitu dengan dibuatnya aplikasi perencanaan yang diberi nama Batara Plan, namun dalam perkembangannya sejalan dengan tuntutan akan reformasi birokrasi kearah yang lebih baik, yaitu agar terintegrasinya antara *E-Planning* dan *E-Budgeting*. Sedangkan aplikasi Batara Plan belum dapat dilakukan intergrasi dengan Simda Keuangan terkait teknis pelaksanaannya, sehingga kedepannya penggunaan Simda Perencanaan yang sudah terintegrasi dengan Simda Keuangan merupakan keharusan untuk diterapkan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

2.3.4.4. Pendapatan

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah di berikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah di harapkan lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang di limpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara sejauh ini, dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai (yakni sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri pada APBN), daerah tetap

harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial harus digali dan dikembangkan secara maksimal.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, yang diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan tetap memberikan batasan kriteria kriteria yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah, agar tidak menimbulkan dampak ekonomi biaya tinggi yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha.

Realisasi Kabupaten Barito Utara tahun 2013 sebesar Rp.24.500.000.000 mengalami peningkatan selama pembangunan tahun 5 tahun yaitu pada tahun 2017 sejumlah Rp.90.000.490.218,48 sebagaimana ditunjukan pada gambar dibawah ini:

Gambar II.3
Realisasi PAD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

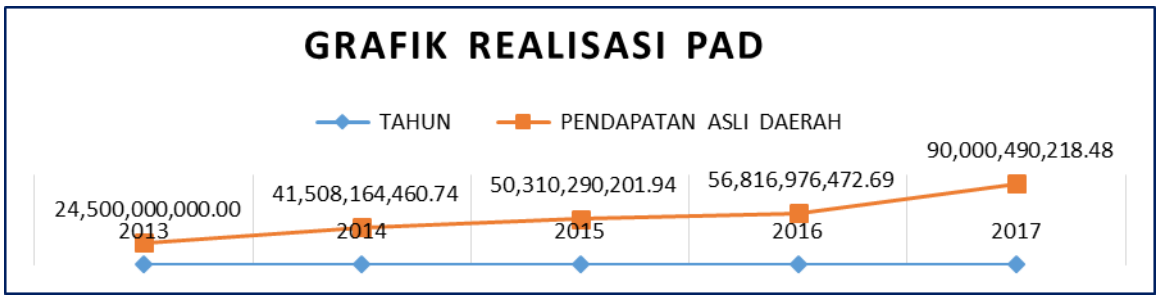

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Barito Utara, 2018

Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Barito Utara pada tahun 2013 sebesar Rp.596.450.802.918 meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp.896.492.588.089 sebagaimana gambar berikut :

Gambar II.4
Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Barito Utara
Tahun 2013-2017



Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Barito Utara, 2018

Gambar II.5
Realisasi Pendapatan Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

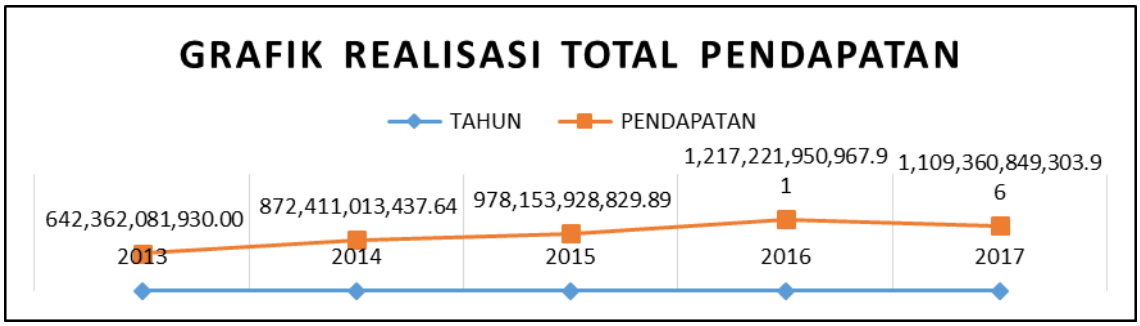

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Barito Utara, 2018

Realisasi Dana Total Pendapatan Kabupaten Barito Utara pada tahun 2013 sebesar Rp. 642.362.081.930 meningkat pada tahun 2017 sebesar Rp.1.109.360.849.303,96.

Jika melihat data grafik diatas terlihat ada peningkatan jumlah PAD, Dana Perimbangan dan Total Pendapatan, namun jika dianalisa lebih lanjut melalui beberapa pengukuran yang berkaitan dengan data penerimaan PAD maka dapat diketahui kemampuan keuangan Daerah Barito utara sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal

   Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut : *Derajat desentralisasi= PAD/TPDx100% (nilai 0-10% ,kategori sangat kurang).* Nilai desentralisasi fiskal kabupaten Barito utara pada tahun 2013

sebesar 3,81 % pada tahun 2017 meningkat menjadi 8,11 %, nilai ini masih pada kategori sangat kurang.

Gambar II.6
Desentralisasi Fiskal Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

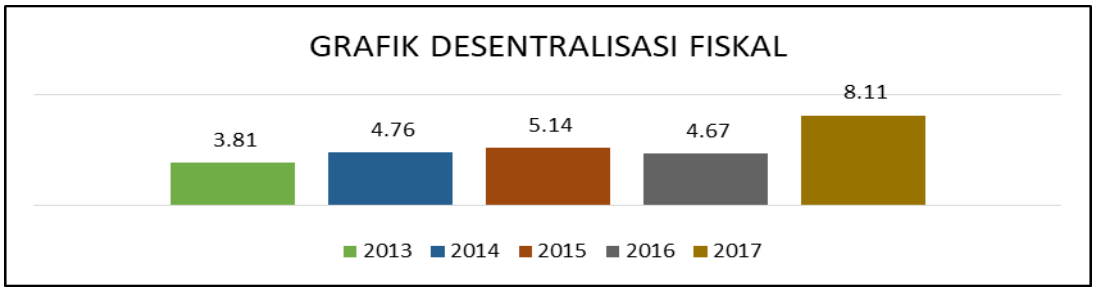

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Barito Utara, 2018

2. Rasio Ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah.Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ketergantungan = pendapatan transfer/Total Pendapatan daerah x 100% (nilai > 50%, kategori sangat tinggi).

   Nilai rasio ketergantungan keuangan daerah pada tahun 2013 96,19 % dapat turun pada tahun 2017 menjadi 91,89 % namun nilai ini masih pada kategori sangat tinggi.

Gambar II.7
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

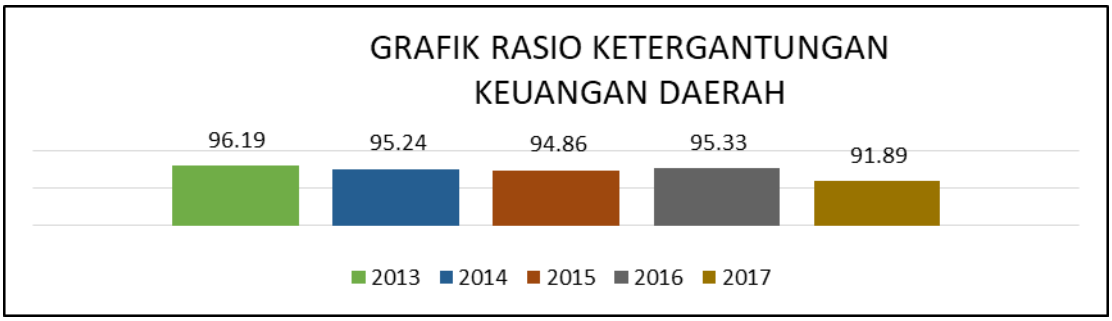

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Barito Utara, 2018

3. Rasio Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan asli Daerah dibagi

dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.Rasio Kemandirian Keuangan Daerah= PAD/Transfer pusat+ provinsi+pinjaman X100% .{nilai 0-25%, kategori kemampuan keuangan rendah sekali, pola hubungan Instruktif yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Nilai Rasio Kemandirian Keuangan daerah pada tahun 2013 3,97 % dapat meningkat pada tahun 2017 sebesar 8,83, nilai ini masuk pada kategori kemampuan keuangan rendah sekali dan masuk pada kategori pola hubungan instruktif.

Gambar II.8
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

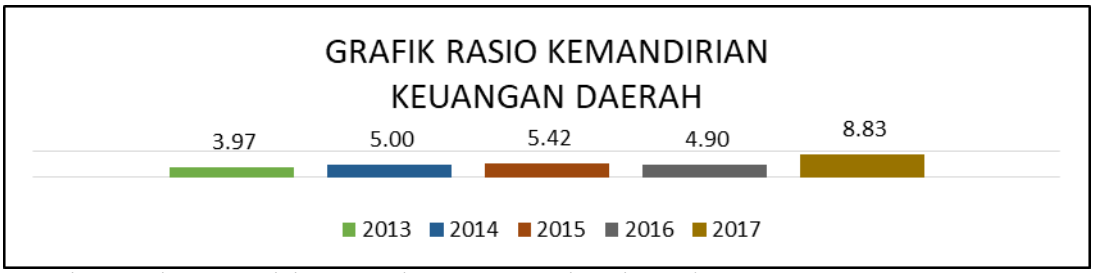

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Barito Utara, 2018

Dari analisa diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa begitu penting dan besarnya pengaruh PAD terhadap kemampuan suatu daerah untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pembangunan secara lebih proporsional, sehingga pemerintah Kabupaten Barito Utara membutuhkan APBD yang kuat, baik besaran maupun strukturnya. Namun mengingat proporsi transfer pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Kabupaten Barito Utara sangat dominan, maka upaya memperkuat APBD harus dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan asli daerah, baik melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah maupun dengan mencari sumber-sumber penerimaan baru.

2.3.4.5. Keuangan

Realisasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pada 2013 Pemerintah Kabupaten Barito Utara baru meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Pada 2014-2017 Pemerintah Kabupaten Barito Utara memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkanpengelolaan keuangan telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan melalui tertib pengelolaan pendapatan, tertib pengelolaan belanja dan tertib pengelolaan asset daerah.

2.3.4.6. Kepegawaian

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberikan tugas dalam suatu jabatan atau diberikan tugas lainnya. Pegawai Negeri berdudukan sebagai unsur aparatur Negara bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur dan adil. Di pemerintahan Kabupaten Barito Utara ini, jumlah pegawai negeri sipil mengalami jumlah yang fluktuasi. Berikut jumlah PNS tahun 2015- 2017 :

Tabel II.104
Jumlah dan Jumlah Target PNS Kab. Barito Utara
Tahun 2015 – 2017

No	Tahun	Jumlah target PNS	Jumlah realisasi PNS	Capaian	Keterangan
1	2015	4813	4743	99%	4743/4813=99
2	2016	4893	4643	95%	4643/4893=95
3	2017	4700	3994	85%	3994/4700=85

Sumber : BKPSDM Kabupaten Barito Utara, 2018

Terlihat bahwa pada tahun 2017 mengalami penurunan jumlah PNS daerah. Hal tersebut karena adanya PNS yang mutasi/pindah keluar atau masuk ke lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara, terdiri dari penambahan CPNS dari pengangkatan honorer 22 orang, 15 PNS yang mutasi masuk dan 77 orang PNS yang mutasi keluar, sedangkan jumlah PNS Daerah yang pensiun tahun 2017 adalah sebanyak 90 orang dan 1

orang Pensiun dini, jumlah PNS Daerah yang meninggal dunia tahun 2017 adalah sebanyak 26 orang, dan jumlah yang paling banyak mempengaruhi pengurangan PNS daerah Kabupaten Barito Utara yaitu pengalihan status pegawai daerah menjadi PNS pusat maupun pegawai Provinsi sebanyak 492 orang. Untuk mengatasi hal di atas, penambahan jumlah PNS daerah yang paling banyak dengan diadakannya seleksi penerimaan CPNS yang telah diusulkan untuk Formasi kebutuhan tahun 2018.

Pegawai Negeri sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Dalam setiap tahun anggaran Pejabat Pembina Kepegawaian merencanakan jumlah PNS dilingkungannya untuk mengikuti diklatpim sesuai kebutuhannya. Dalam perencanaan tersebut diprioritaskan PNS yang telah diangkat dalam jabatan struktural tetapi belum mengikuti diklatpim sesuai dengan persyaratan jabatan yang didudukinya.

Tabel II.105
Jumlah Pejabat Struktural yang Lulus Diklatpim
Kab. Barito UtaraTahun 2015 – 2017

No	Tahun	Jumlah pejabat struktural	Yang telah lulusdiklatpim	Capaian	Keterangan
1	2015	695	599	96%	599/695=96
2	2016	685	644	94%	644/685=94
3	2017	720	654	90%	654/720=90

Sumber : BKPSDM Kabupaten Barito Utara, 2018

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut :

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

2.4.1.1.1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Berdasarkan Hukum Engel/*Engel Law* bahwa semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat.

Tabel II.106
Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Barito Utara (rupiah), 2017

Kelompok Makanan	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan
Padi-padian	69.076
Umbi-umbian	4.364
Ikan	64.707
Daging	34.891
Telur dan susu	36.153
Sayur-sayuran	45.478
Kacang-kacangan	9.618
Buah-buahan	20.323
Minyak dan lemak	13.668
Bahan minuman	24.553
Bumbu-bumbuan	15.225

Kelompok Makanan	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan
Konsumsi lainnya	18.424
Makanan dan minuman jadi	136.948
Tembakau dan sirih	74.905
Jumlah	**568.333**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

Dari Tabel di atas dapat digambarkan bahwa pengeluaran tertinggi pada kelompok makanan dan minuman jadi diikuti oleh kelompok tembakau dan sirih kemudian kelompok padi-padian, kelompok ikan dan kelompok sayur-sayuran. Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Barito Utara pola konsumsinya menginginkan yang lebih praktis dan siap saji dan didukung juga kemudahan akses berbagai jenis makanan dan minuman jadi.

Untuk konsumsi tembakau dan sirih walaupun sudah ada perda masalah rokok yang mengatur kawasan tanpa rokok, namun tingkat konsumsinya masih tergolong tinggi yaitu pada urutan kedua dan hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat masih kurang sadar akan bahaya nikotin dan belum sadar juga untuk mengalokasikan pendapatannya untuk jenis kelompok yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

2.4.1.1.2. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (Angka konsumsi RT non pangan)

Pengeluaran Konsumsi Per kapita sebulan menurut kelompok bukan makanan di Kabupaten Barito Utara sebesar Rp.444.469,-angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok makanan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.107
Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Barito Utara (rupiah), 2017

Kelompok Makanan	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan
Perumahan, bahan bakar, penerangan, air	261.897
Aneka barang dan jasa	55.808
Biaya pendidikan	14.865

Kelompok Makanan	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan
Biaya kesehatan	20.583
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	19.544
Barang yang tahan lama	33.549
Pajak pemakaian dan premi asuransi	22.315
Keperluan pesta dan upacara	15.908
Jumlah	**444.469**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

Tingkat pengeluaran tertinggi pada kelompok perumahan, bahan bakar,penerangan dan air sebesar Rp.261.897,- dan dikuti oleh kelompok aneka barang dan jasa dan kelompok barang yang tahan lama. Sedangkan kelompok terendah pada pengeluaran biaya pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran untuk pendidikan berkurang karena biaya pendidikan sebagian besar ditanggung oleh pemerintah melalui program Bantuan Operasional Sekolah, sehingga masyarakat terbantu dari sisi pengeluaran untuk biaya pendidikan.

2.4.1.1.3. Persentase Penduduk Menurut Wilayah dan Golongan Pengeluaran per kapita Sebulan

Golongan pengeluaran perkapita perbulan penduduk Kabupaten Barito Utara tahun 2017 paling banyak berada pada rentang nilai 500.000 rupiah sampai dengan 749.999 rupiah (32,84%). Sementara itu, golongan pengeluaran perkapita per bulan penduduk Kabupaten Barito Utara tahun 2017 yang paling sedikit berada pada rentang nilai 200.000 hingga 299.999 rupiah (0,42%).

Tabel II.108
Persentase Penduduk Menurut Wilayah dan Golongan Pengeluaran per kapita Sebulan di Kabupaten Barito Utara (rupiah), 2017

Kelompok Makanan	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan
<150.000	-
150.000 – 199.999	-
200.000 - 299.000	0,42
300.000 – 499.999	13,49
500.000 – 749.999	32,84

Kelompok Makanan	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan
750.000 – 999.999	17,52
1.000.000 – 1.499.999	18,96
1.500.000+	16,77
Jumlah	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

Tabel II.109
Persentase Konsumsi Non Pangan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2014-2017

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017
1	Pengeluaran non pangan rata-rata per kapita sebulan (rupiah)	379.550	448.247	442.848	444.469
2	Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan (rupiah)	806.017	936.070	924.237	1.012.802
3	Rasio	0,4709	0,4789	0,4791	0,4389

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018 diolah

2.4.1.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) beguna untuk mengukur kemampuan/ daya tukar produk yang dijual terhadap barang yang dibutuhkan petani baik untuk konsumsi rumah tangga maupun proses produksi. Jika dilihat, kondisi petani di Kalimantan Tengah pada tahun 2017 mengalami defisit (NTP<100), artinya total pengeluaran yang terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi dan biaya produksi yang dikeluarkan rumah tangga petani lebih besar dari pendapatannya. Dengan kata lain, pendapatan petani masih belum mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan pengeluarannya.

Tabel II.110
NTP dan NTUP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Rata-rata Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)	106,14	106,15	104,57	104,79	105,70
Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP)	98,31	101,29	98,66	97,59	98,60

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalteng, 2018

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi besaran nilai tukar petani, antara lain inflasi dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan petani untuk memenuhi ongkos produksinya. Seharusnya ongkos produksi dapat ditekan dengan adanya beragam program bantuan pemerintah untuk petani. Subsidi pupuk dan penyaluran bibit gratis adalah beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu petani menekan ongkos produksi.

Selain itu, diperlukan pula adanya pembinaan kepada petani yang tepat sasaran, sehingga petani dapat menghasilkan produksi pertanian yang optimal. Penyaluran alat mesin pertanian (alsintan) dan penggunaan teknologi pertanian juga menjadi opsi yang tepat, sehingga petani dapat mempersingkat waktu pengelolaan lahan. Dengan demikian, maka nilai yang diterima petani seharusnya bisa menjadi lebih baik. Yang tak kalah pentingnya adalah adanya kesungguhan dari petani untuk membantu pemerintah memajukan sektor pertanian, sehingga terjadi hubungan timbal balik. Kesungguhan dari petani dapat dilakukan dengan terus menerus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan terkait pertanian. Misalnya terus menambah wawasan bagaimana cara untuk menghasilkan produksi pertanian yang optimal dan berkualitas, mempelajari inovasi dan teknologi terbaru, mempelajari bagaimana menggunakan dan memanfaatkan alat mesin pertanian, dan banyak cara lainnya. Disinilah peran Kelompok Tani dapat dimaksimalkan untuk membantu seluruh anggotanya.

Adapun inflasi, berpengaruh kepada nilai barang dan jasa yang harus dibayar petani untuk pengeluaran konsumsinya. Semakin tinggi inflasi maka semakin besar nilai yang harus dibayar petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sejatinya indeks NTP menggambarkan bagaimana tingkat kesejahteraan petani. Besarnya nilai NTP juga dapat memperlihatkan bagaimana prospek sektor pertanian. Sebagai salah satu sektor kunci dan penopang sektor-sektor lainnya, seharusnya sektor pertanian adalah sektor dengan prospek yang baik dan menjanjikan. Jika petani sejahtera, sektor pertanian akan semakin maju. Semakin maju sektor pertanian,

maka swasembada pangan seharusnya bukan hal mustahil yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Fungsi dan Manfaat RTRW Kabupaten yang sangat strategis untuk keberlangsungan pembangunan. Adapun fungsi RTRWK adalah : acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten; acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta; pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan acuan dalam administrasi pertanahan.

Sedangkan manfaat RTRWK yaitu untuk ; mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten; mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten dengan wilayah sekitarnya; dan menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang berkualitas.

Belum selesainya proses penyelesaian Legislasi Raperda tentang RTRWK dan RDTRK masih merupakan persoalan daerah yang perlu perhatian khusus, yang akhirnya berdampak kepada masih belum merata, sinkron dan konsisten pembangunan dengan rencana tata ruang serta kinerja penataan ruang daerah terkendala dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta terhambatnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Penataan Ruang.

Raperda RTRWK Barito Utara awalnya diajukan untuk proses legislasi pada tahun 2012, kemudian dilanjutkan pada tahun 2013 denga rekomendasi penyempurnaan menyesuaikan SK.529/Menhut-II/2012, tahun 2014 raperda hasil perbaikan diajukan pada prolegda untuk dilakukan pembahasan, kemudian tahun 2015 pada pembahasan

paripurna masih belum bisa menyepakati substansi RTRWK, kemudian pada tahun 2016 dan 2017 diajukan kembali untuk percepatan proses legislasi hingga pada Januari 2018 berdasarkan hasil penetapan Propemperda tahun 2018 bahwa Raperda RTRWK masuk dalam daftar urut pertama untuk dibahas pada masa sidang tahun 2018.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus melakukan beberapa upaya agar legislasi Raperda ini dapat segera diselesaikan dan sampai dengan akhir tahun 2018 telah sampai pada proses evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah.

2.4.2.2. Jalan dan Jembatan

Panjang Jalan Kabupaten Barito Utara pada tahun 2017 adalah 758,14 Km, sedangkan dalam kondisi baik panjang jalan di Kabupaten Barito Utara adalah 348,30 Km yang berarti dari seluruh panjang jalan di Kabupaten Barito Utara hanya 45,94 persen yang berada dalam kondisi baik. Kondisi jalan baik ini masih jauh dari harapan. Namun Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus berkomitmen untuk penyediaan jalan kondisi baik dalam rangka percepatan pertumbuhan pengembangan wilayah maupun pengembangan kawasan strategis, sehingga akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Tabel II.111
Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Kondisi Jalan	2013	2014	2015	2016	2017
Panjang Jalan (km)	608,34	625,74	625,74	758,14	758,14
Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	59,59	58,74	67,17	45,87	45,94

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, 2018

Tabel II.112
Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya di Kabupaten BaritoUtara (km), 2017

Kecamatan	Pemerintahan yang Berwenang Mengelola			
	Negara	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
Montallat	-	-	118,10	118,10
Gunung Timang	31,67	-	86,60	118,27
Gunung Purei	34,20	-	20,30	54,50
Teweh Timur	77,60	-	121,20	198,80
Teweh Tengah	57,80	10,58	187,49	255,87
Teweh Baru	68,97	-	74,35	143,32
Teweh Selatan	-	-	84,00	84,00
Lahei	-	-	48,10	48,10
Lahei Barat	-	-	18,00	18,00
Jumlah	**270,24**	**10,58**	**758,14**	**1.038,96**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara (asal data Dinas PUPR Kab. Barut), 2018

Pembangunan jembatan yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Utara yaitu pembangunan jembatan Muara Teweh-Jingah. Pembangunan jembatan berkonstruksi rangka baja dan beton dengan bentang keseluruhan adalah 418,21 meter, lebar 5 meter serta bentang tengah jembatan sepanjang 120 meter sejak tahun 2015. Dengan dibangunnya jembatan baru ini maka akses transportasi dan mobilisasi ke Kelurahan Jambu dan Kelurahan Jingah akan dapat ditempuh dengan waktu yang lebih cepat, dengan harapan agar pertumbuhan ekonomi warga di dua kelurahan tersebut serta desa-desa sekitar menjadi lebih berkembang.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan jalan dan jembatan guna meningkatkan perekonomian meliputi pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan, pemeliharaan berkala jalan dan pemeliharaan secara rutin jalan dan jembatan. Dalam rangka menekan ketimpangan wilayah antara pusat pemerintahan dan wilayah terpencil, juga dalam rangka membuka akses menuju potensi wisata, kawasan produk unggulan Barito Utara serta membuka akses menuju pusat pemerintahan provinsi, maka Pemerintah Kabupaten Barito Utara meng-agendakan pembangunan beberapa ruas jalan strategis dan jembatan yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 2018-2023. Diantaranya yaitu rencana pembangunan jembatan Sungai Barito di Kecamatan Montallat yang menghubungkan Desa Sikan – Tumpung

Laung dan pembangunan jembatan Sungai Barito di Kecamatan Lahei serta pembangunan jembatan Sungai Barito akses menuju Desa Lemo, sehingga dengan terbangunnya jalan dan jembatan tersebut konektivitas antar wilayah di Kabupaten Barito Utara dapat terwujud.

2.4.2.3. Fasilitas Kesehatan

Dalam menunjang pelayanan kesehatan masyarakat Barito Utara dilaksanakan pembangunan Gedung baru RSUD Muara Teweh yang merupakan prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Utara saat ini. Pembangunan pengembangan RSUD Muara Teweh pada awal 2015 merupakan program pihak manajemen RSUD yang dimulai dengan penyusunan studi kelayakan dan DED. Tetapi berdasarkan petunjuk BPK-RI kepada Pemkab Barito Utara, pekerjaan fisik dilaksanakan oleh instansi teknis yaitu Dinas PUPR, sehingga sejak Maret 2016 dokumen yang sudah ada dilengkapi dengan pembuatan dokumen Amdal yang dilaksanakan selama enam bulan.

Bangunan RSUD Muara Teweh terdiri dari bangunan gedung A, gedung B, dan gedung C dengan desain rancangan setara standar rumah sakit internasional yang disertai fasilitas lengkap dan peralatan medis berteknologi tinggi. Dari segi penggunaan anggaran dan kemajuan pembangunan, untuk pembangunan gedung A dilaksanakan pada APBD 2016 sebesar Rp8,8 miliar dan 2017 sebesar Rp50,3 miliar dengan target pekerjaan fisik lantai 1 dan 4 sudah dapat fungsional. Saat ini gedung A sudah dilengkapi dengan ruangan dan peralatan medis terkini seperti CT Scan, peralatan radiologi dan analisa medis terkini lainnya, termasuk helipad untuk layanan evakuasi pasien menggunakan helikopter.

Dari lima lantai di wing A ini hanya lantai 1 dan 4 yang operasional, sedangkan lantai 2, 3, dan 5 masih dilanjutkan dalam tahap dua. Sebagai tindak lanjut penyelesaian program pembangunan RSUD Muara Teweh, pada APBD murni 2018 dilanjutkan penyelesaian bangunan gedung B dengan anggaran sebesar Rp.51 miliar. Sedangkan untuk pembangunan gedung C, dilakukan secara bertahap dan dimulai pada tahun 2019. Pembangunan gedung RSUD Muara Teweh ini ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2020 atau paling lambat tahun 2021.

2.4.2.4. Perhubungan

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum di Barito Utara setiap tahunnya selalu mengalami penurunan dan kenaikan seperti halnya pada tahun 2014-2016 jumlah orang yang terangkut angkutan umum menurun 3 tahun berturut-turut sebagai dampak karena banyak penumpang yang beralih ke kendaraan roda dua maupun mobil pribadi. Namun pada tahun 2017 terjadi peningkatan sebanyak 15.166 orang dari yang semula tahun 2016 berjumlah 7.667 orang.

Tabel II.113
Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum

INDIKATOR	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Orang yang terangkut angkutan umum (orang)	8.844	22.035	15.898	7.667	15.166

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara, 2018

Untuk sektor perhubungan udara di Kabupaten Barito Utara sudah terlaksana pembangunan Bandara Haji Muhammad Sidik yang berlokasi di Desa Trinsing, Muara Teweh. Proyek pembangunan bandara tersebut merupakan proyek Kementerian Perhubungan yang menggunakan dana APBN, dengan panjang landasan pacu mencapai 1.400 meter. Namun sampai akhir tahun 2017 pembangunan bandara baru ini masih belum dapat diselesaikan terkait beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Dengan terbangunnya bandara baru ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat Barito Utara yang akan bepergian ke luar dan menuju Kabupaten Barito Utara dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah penciptaan iklim kondusif yang mendukung investasi. Indikator yang berkaitan dengan iklim investasi, antara lain jumlah kriminalitas yang dilihat dari jumlah kejadian kejahatan dan jumlah unjuk rasa /demonstrasi.

2.4.3.1. Jumlah Kriminalitas

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Kondisi ini akan menciptakan stabilitas daerah yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara diperlukan iklim yang kondusif , sehingga memungkinkan semua elemen masyarakat terlibat dan berperan serta secara optimal. Ditengah tengah kemajuan teknologi informasi komunikasi dan transportasi yang terjadi pada saat ini menjadikan Kabupaten Barito Utara terbuka dan berbagai interaksi baik individu, kelompok budaya dan berbagi organisasi lainnya yang terkait dengan aspek ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya serta keamanan dan ketertiban.

Kondisi tersebut mengandung berbagai perbedaan yang berpotensi konflik perbedaan atau heterogenitas tersebut jika dikelola dengan baik dan terarah diharapkan menjadi potensi pembangunan, akan tetapi jika tidak dikelola maka akan dapat menimbulkan kerawanan sosial maupun politik yang mengarah pada konflik sosial di masyarakat. Penanganan Konflik , keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah merupakan tugas pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait yang berperan sebagai fasilitator dalam mewujudkan iklim yang kondusif yang bisa tercapai bila suasana lingkungan terbebas dari berbagai gangguan keamanan dan konflik sosial yang berkepanjangan.

Kondisi ketertiban dan keamanan selalu menjadi hal penting yang harus dijaga di setiap daerah agar penghidupan masyarakat bisa lebih kondusif, berdasarkan data Polres Barito Utara angka tindak pidana di Kabupaten Barito Utara mengalami fluktuasi pada tahun 2013 sebanyak 227 kasus , tahun 2014 turun menjadi 129 kasus , sementara pada tahun 2015 naik menjadi 190 kasus , mengalami

penurunan pada tahun 2016 sebanyak 103 kasus dan pada akhir tahun 2017 naik sebanyak 156 kasus. Data jumlah kasus termasuk unjuk rasa . Data mengenai angka Tindak pidana dari Tahun 2013–2017, dan data keamanan di Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.114
Data Tindak Pidana / Kejahatan dan Kerugian
Yang Dilaporkan Tahun 2013 - 2017

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Kerugian (Rp)
1.	2013	227	± 130.000.000
2.	2014	129	± 83.000.000
3.	2015	190	± 117.000.000
4.	2016	103	± 74.000.000
5.	2017	156	± 102.000.000

Sumber : Badan Kesbangpol. Kab. Barito Utara (data asal Polres Barito Utara, 2018

Tabel II.115
Data Keamanan di Wilayah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 – 2017

No.	Tindak Pidana	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Curanmor	51	15	19
2.	Penganiayaan	24	12	-
3.	Narkoba	17	32	27
4.	Perjudian	9	2	2
5.	Curat dan Curas	72	24	19
6.	Pembunuhan	1	6	6
	J U M L A H	**174**	**91**	**73**

Sumber : Badan Kesbangpol. Kab. Barito Utara (data asal Polres Barito Utara, 2018

Dari tabel diatas kasus kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Barito Utara yaitu Curanmor, Penganiayaan, Narkoba, Perjudian, Pembunuhan, Curat dan Curas dan angka kriminalitas yang menonjol adalah kasus Narkoba, kasus Curanmor , serta kasus Curat dan Curas.

Jika dilihat dari kejadian kejahatan dari tahun 2013 hingga 2017 cenderung fluktuatif dari tahun ketahun. Namun dengan masih adanya kejadian kejahatan tersebut akan dapat mempengaruhi iklim investasi, dimana orang akan berpikir ulang untuk menanamkan sahamnya apabila tingkat keamanannya kurang. Kejadian kejahatan tersebut dapat disebabkan karena faktor ekonomi dimana tingkat kemiskinan terlalu tinggi, faktor lingkungan pergaulan dan belum baiknya disiplin

masyarakat dalam mematuhi hukum/peraturan perundang-undangan serta dengan adanya dampak negatif arus globalisasi yang tidak terbendung menimbulkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam masyarakat. Tantangan kedepan yang dihadapi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban adalah meningkatnya gangguan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, serta tindakan kriminal, kekerasan secara kualitas maupun kuantitas, serta tak terlepas pula munculnya berbagai isu dan teror yang dapat meresahkan masyarakat sebagai akibat kemajuan teknologi yang disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

2.4.3.2. Jumlah Unjuk Rasa/ Demonstrasi

Demonstrasi ("demo") atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Jumlah unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2014 berfluktuasi dan relatif intens karena hampir setiap tahun selalu ada kasus unjuk rasa , terlihat dari 4 kali tahun 2014 naik menjadi 7 kali tahun 2016 dan 8 kali tahun 2016, dan pada tahun 2017 (2 kasus) , 2018 (1 kasus) mengalami penurunan, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel II.116
Jumlah Unjuk Rasa Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 - 2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Politik	-	3	-	1	-
2.	Penanganan Bencana Kabut Asap	-	1	-	-	-
3 .	Ekonomi	-	-	-		
4.	Tata Batas	-	-	-	1	1
5.	Perusahaaan	2	1	-	-	-
6.	BBM	2	-	-	-	-
7.	Pelayanan PLN	-	2	5	-	-

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
8.	Hukum	-	-	3	-	-
	J U M L A H	**4**	**7**	**8**	**2**	**1**

Sumber : Polres Barito Utara

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi adanya demonstrasi yang mengarah kepada anarkis adalah dengan meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk melakukan deteksi dini terjadinya konflik dan mengaktifkan tim penanganan konflik sosial.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumber daya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu daerah dalam mengolah sumber daya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Pembangunan SDM di Barito Utara diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan daerah. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wilayah.

2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi yang masuk di suatu daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaan perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Selain itu, kualitas tenaga kerja juga ditentukan oleh kondisi internal tenaga kerja itu sendiri seperti: motivasi kerja, keahlian/ketrampilan, pengalaman kerja, serta sikap dan perilaku. Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam

mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri.

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sedangkan yang disebut angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 Tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau pengangguran. Perkembangan angkatan kerja di Barito Utara berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel.II.117
Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan Kabupaten Barito Utara

Tingkat Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
Tidak/Belum Tamat SD	N/A	17.774	10.258	10.258	7.699
SD	N/A	17.928	19.871	19.871	16.320
SMP	N/A	15.870	15.055	15.055	11.373
SMA	N/A	8.190	10.626	10.626	15.604
SMK	N/A	3.317	5.081	5.081	4.686
DIPLOMA/UNIVERSITAS	N/A	4.137	6.082	6.082	8.022
JUMLAH		**67.216**	**66.973**	**66.973**	**63.704**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara (Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2015 dan 2017

2.4.4.2. Tingkat ketergantungan (Rasio ketergantungan)

Angka ketergantungan atau beban ketergantungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif). Mereka yang digolongkan dalam kelompok umur bekerja adalah berumur 15 tahun ke atas sampai dengan umur 64 tahun. Sedangkan yang berumur 14 tahun ke bawah dan umur 65 tahun keatas digolongkan dalam usia beban ketergantungan.

Makin besar rasio ketergantungan berarti makin besar beban tanggungan bagi kelompok usia produktif. Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30 - 40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41.

Tabel II.118
Penduduk Menurut Kelompok Umum dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Kelompok Umur	2013	2014	2015	2016	2017
0 - 14 tahun (jiwa)	37.837	37.660	37.467	37.200	36.953
15 - 64 tahun (jiwa)	83.954	85.136	86.207	87.272	88.268
65 + (jiwa)	3.609	3.698	3.805	3.928	4.066
Rasio Ketergantungan	**49,37**	**48,58**	**47,88**	**47,13**	**46,47**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018, diolah

Berdasarkan data diatas , pada tahun 2016 dan 2017 berdasarkan rasio ketergantungan menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif menanggung 47 orang usia non produktif. Meskipun rasio ketergantungan di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2013-2017 cenderung selalu terjadi penurunan. Namun rasio ketergantungan masih masuk dalam golongan angka ketergantungan tinggi. Hal ini disebabkan masih tingginya jumlah penduduk usia non produktif terutama kelompok umur 0-14 tahun.

Sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 Kabupaten Barito Utara telah memperoleh bonus demografi, dimana persentase penduduk usia produktif lebih tinggi dibanding kategori yang lain, dampaknya adalah sumber daya manusia usia produktif (15-64 tahun) berlimpah di Kabupaten Barito Utara. Jika usia produktif tidak dapat diberdayakan untuk benar-benar produktif secara ekonomi atau hanya menjadi pengangguran, maka justru akan menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan sosial diantaranya kesenjangan sosial dan kerawanan sosial. Kedepannya bonus demografi ini diharapkan dapat dinikmati dan dimanfaatkan dengan optimal untuk mendukung pembangunan Barito Utara, serta rasio ketergantungan menjadi semakin rendah.

Berdasarkan uraian sebelumnya yang menjelaskan dan menyajikan dasar-dasar analisis, gambaran kondisi umum daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah pada periode sebelumnya. Sehingga diperoleh gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2027 yang meliputi

aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah, sebagaimana terangkum pada tabel II.114 berikut :

Tabel II.119
Gambaran Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara
Tahun 2013-2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1)	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**					
1.1.	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**					
1.1.1	Nilai PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barito Utara (juta rupiah)	6.010.923,4	6.298.631,7	6.708.086,8	7.358.692,9	8.266.444,0
1.1.2	Nilai PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Barito Utara (juta rupiah)	5.192.551,0	5.410.378,5	5.696.534,6	6.008.569,3	6.369.561,2
1.1.3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 s.d 2017 (%)	7,04	4,20	5,29	5,48	6,01
1.1.4	PDRB Per Kapita Kabupaten Barito Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2013-2017 (juta rupiah)	47.921,4	49.793,9	52.621,1	57.310,7	63.938,7
1.1.5	PDRB Per Kapita Kabupaten Barito Utara Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2013-2017 (ribu rupiah)	41.397	42.771,7	44.686,1	46.795,7	49.266,8
1.1.6	Indeks Gini Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017	0,289	0,333	0,340	0,314	0,317
1.1.7	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	7,5	7,5	7,5	6,9	6,7
1.1.8	Garis Kemiskinan (rupiah)	355.065	385.348	408.241	420.100	446.807
1.1.9	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,98	5,88	5,93	5,38	5,21
1.1.10	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan (%)	94,02	94,12	94,07	94,62	94,79
1.1.11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Utara	65,12	66,30	67,38	68,28	69,07
1.2.	**Fokus Kesejahteraan Sosial**					
1.2.1	Angka Melek Huruf penduduk usia > 15 tahun (%)	98,72	98,39	98,23	98,37	97,30
1.2.2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,01	11,15	11,50	11,96	12,38
1.2.3	Rata-Rata Lama Sekolah(tahun)	7.97	8	8.33	8.34	8.38
1.2.4	Angka Harapan Hidup Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2012–2017 (tahun)	70,81	70,91	71,01	71,26	71,27
1.2.5	Tingkat Parstisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 (%)	75,94	65,65	64,10	63	62,48
1.2.6	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kab. Barito Utara Tahun 2013-2017 (%)	3,01	3,34	4,78	-	5,19
1.3.	**Fokus Seni Budaya dan Olah Raga**					
1.3.1	Sanggar Seni dan Budaya di Kab. Barito Utara Tahun 2013-2017	4	16	16	16	16
1.3.2	Organisasi olah raga di	-	-	-	-	27

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Kabupaten Barito Utara					
1.3.3.	Persentase desa/ kelurahan yang memilik sarana olah raga (%)					
	- Lapangan sepak bola	-	-	-	-	8,74
	- Lapangan bola volly	-	-	-	-	43,69
	- Gelanggang Renang	-	-	-	-	0,97
	- Lapangan bulu tangkis	-	-	-	-	18,45
	- Lapangan tennis	-	-	-	-	3,88
	- Lapangan basket	-	-	-	-	8,74
	- Gedung olah raga	-	-	-	-	4,85
2)	**ASPEK PELAYANAN UMUM**					
2.1.	**Fokus Pelayanan Urusan Wajib**					
2.1.1	**Pendidikan**					
2.1.1.1	APK PAUD (%)	68,60	49,93	90,66	69,35	81,43
2.1.1.2	APK SD/MI (%)	110,07	123,94	125,06	113,80	87,91
2.1.1.3	APK SMP/MTs (%)	92,17	91,98	94,04	86,58	85,47
2.1.1.4	APK SMA/MA/SMK (%)	71,97	127,25	90,07	112,56	77,31
2.1.1.5	APM SD/MI (%)	90,81	93,61	99,15	93,67	73,35
2.1.1.6	APM SMP/MTs (%)	87,56	88,88	85,64	65,60	56,66
2.1.1.7	APM SMA/MA/SMK (%)	78,00	76,05	80,71	86,95	55,44
2.1.1.8	APS SD/MI (%)	90.81	93.61	99.15	96.2	73.35
2.1.1.9	APS SMP/MTs (%)	87.56	88.88	85.64	65.6	56.66
2.1.1.10	APS SMA/MA/SMK (%)	78	76.05	80.71	86.95	55.44
2.1.1.11	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	98	100	100	100	97.63
2.1.1.12	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	97.89	99.95	100	100	98.30
2.1.1.13	Angka Kelulusan (AL) SD/SMA/SMK/MA (%)	97.45	98.05	99.36	100	97.80
2.1.1.14	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	85.52	100	88.41	78.75	94.46
2.1.1.15	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA (%)	70.24	100	93.05	95.12	97.17
2.1.1.16	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar	9	9,3	9,14	9,6	10
2.1.1.17	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Pertama	11	10,2	10,36	10,5	14
2.1.1.18	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Atas	8	8,3	4,29	8,4	14
2.1.1.19	Guru dengan Kualifikasi S1/DIV Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 (%)	82	81.88	81.44	76.58	88.17
2.1.2	**Kesehatan**					
2.1.2.1	Angka Kematian Bayi Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2017	6/1000 KH	6/1000 KH	5/1000 KH	5/1000 KH	3/1000 KH
2.1.2.2	Cakupan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017	132/ 100.000 KH	221/ 100.000 KH	41/ 100.000 KH	253/ 100.000 KH	256/ 100.000 KH
2.1.2.3	Jumlah Posyandu di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017	161	161	169	170	170
2.1.2.4	Jumlah Puskesmas di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017	16	16	16	16	16
2.1.2.5	Jumlah Puskesmas Pembantu di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017	84	84	84	84	84
2.1.2.6	Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017	1	1	1	1	1

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
2.1.2.7	Rasio dokter per satuan penduduk (jumlah dokter + dokter gigi)	1.35	1.34	1.17	2.02	2.01
2.1.2.8	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk (jumlah Perawat + Bidan + Apoteker)	23.36	23.16	21.88	35.35	35.11
2.1.2.9	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017	34,73	36,02	52,40	42,81	41,77
2.1.2.10	Cakupan desa/kelurahan *Universal Children Immunization* 2013-2017 (BCG, DPT/HB 3, Polio, Campak) (%)	95,65	91,67	101,17	95,4	105,57
2.1.2.11	Jumlah Balita Gizi Buruk yang Ditemukan	1	2	4	1	2
2.1.2.12	Balita gizi buruk yang mendapat perawatan	1	2	4	1	2
2.1.2.13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 (orang)	199	205	225	240	211
2.1.2.14	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 (orang)	15	78	125	276	118
2.1.3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
2.1.3.1	Panjang Jalan Nasional (km)	408,17	408,17	408,17	294,00	270,24
2.1.3.2	Panjang Jalan Nasional Kondisi Baik (km)	399,80	399,80	399,80	288,00	245,90
2.1.3.3	Proporsi Panjang Jalan Nasional Kondisi Baik (%)	97,95	97,95	97,95	97,96	90,99
2.1.3.4	Panjang Jalan Provinsi (km)	34,10	34,10	34,10	18,00	10,58
2.1.3.5	Panjang Jalan Provinsi Kondisi Baik (km)	18,80	18,80	18,80	17,00	9,98
2.1.3.6	Proporsi Panjang Jalan Provinsi Kondisi Baik (%)	55,13	55,13	55,13	94,44	94,33
2.1.3.7	Panjang Jalan Kabupaten (km)	608,34	625,74	625,74	758,14	758,14
2.1.3.8	Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik (km)	362,54	367,59	420,34	347,76	348,30
2.1.3.9	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik (%)	59,59	58,74	67,17	45,87	45,94
2.1.3.10	Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 (km)	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09
2.1.3.11	Panjang Jalan Yang Memiliki Drainase/Saluran di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 (m)	9.902	10.275	11.659	12.450	13.711
2.1.3.12	Panjang Jalan Dilalui Roda Empat Permukaan Aspal di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 (km)	147,32	152,45	163,04	176,34	202,93
2.1.3.13	Panjang Jalan Dilalui Roda Empat Permukaan Tanah di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 (km)	387,64	375,49	365,49	364,94	306,69
2.1.3.14	Panjang Jaringan irigasi di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 (m)	125.869	125.961	125.869	122.369	125.869
2.1.4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**					
2.1.4.1	Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2017	-	-	3,59	3,59	3,60

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
2.1.5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**					
2.1.5.1	Banyaknya Bencana Alam Di Kabupaten Barito Utara	14	10	171	17	24
2.1.5.2	Banyaknya Korban Bencana Alam di Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2017					
	- Meninggal (orang)	0	0	1	0	4
	- Menderita (orang)	1.700	3.050	171	60	24.349
2.1.6	**Sosial**					
2.1.6.1	Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 (%)	8,51	4,84	6,36	3,72	7,02
2.1.6.2	Jumlah Kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberi bantuan Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 (Orang)	425	566	300	566	14.888
2.1.6.3	Jumlah KUBE yang menerima program pemberdayaan fakir miskin Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017	20	20	5	0	0
2.2.	**Fokus Layanan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**					
2.2.1	**Tenaga Kerja**					
2.2.1.1	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2014-2017 (jiwa)					
	- Angkatan Kerja	-	67.216	66.973	-	63.704
	- Bekerja	-	64.974	63.774	-	60.400
	- Pengangguran Terbuka	-	2.242	3.199	-	3.304
	- Bukan Angkatan Kerja	-	21.772	23.175	-	28.554
	- Sekolah	-	5.738	7.012	-	7.120
	- Mengurus rumah tangga	-	13.549	14.193	-	18.669
	- Lainnya	-	2.485	1.970	-	2.765
2.2.1.2	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang termasuk Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2017					
	- Tidak/Belum Tamat SD	-	-	-	-	7.699
	- SD	-	-	-	-	16.320
	- SMP	-	-	-	-	11.373
	- SMA	-	-	-	-	15.604
	- SMK	-	-	-	-	4.686
	- Diploma/Universitas	-	-	-	-	8.022
2.2.2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					
2.2.2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 (%)	7,22	7,39	9,13	8,29	13,49
2.2.2.2	Rasio KDRT Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017	0,0021	0,0022	0,0023	0,0024	0,0027
2.2.2.3	Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2012-2017	86,41	88,72	89,01	89,16	86,89

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
2.2.3	**Pangan**					
2.2.3.1	Ketersediaan Pangan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2017					
	- Beras (ton)	15,986		- Beras (ton)	15,986	
	- Daging (ton)	1,293		- Daging (ton)	1,293	
2.2.4	**Pertanahan**					
2.2.4.1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 (persen)	0,05	0,13	0,13	0,09	0,09
2.2.5	**Lingkungan Hidup**					
2.2.5.1	Persentase Penanganan Sampah Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017					
	- Volume sampah yang ditangani (m3)/tahun	55.216	58.387	64.480	66.614	69.560
	- Volume produksi sampah (m3)/tahun	64.961	67.112	69.333	71.628	74.000
	- Persentase tempat pembuangan sampah persatuan penduduk (persen)	25,6	23,8	29,5	29,7	38,2
	- Persentase penanganan sampah (persen)	81,25	81,50	81,70	84,97	89,87
2.2.5.2	Daya Dukung Lahan Pertanian Terhadap Konsumsi Beras di Kabupaten Barito Utara					
	Produksi Padi	25.480	30.326	32.175	33.979	33.512
	Produksi Beras	16.562	19.712	20.914	22.086	21.782
	Jumlah Penduduk	125.400	126.494	127.479	128.400	129.287
	Kebutuhan Beras /Tahun	12.289	12.295	12.492	14.586	14.816
	Rasio P/K	1,347709	1,603245	1,674171	1,514192	1,470167
2.2.5.3	Indeks Kualitas Air (IKA) pada Sungai Barito, Sungai Lahei, Sungai Teweh dan Sungai Montallat Tahun 2013-2016					
	Sungai Barito					
	- Bagian Hulu	3,1 -	3,4 - 2,20	6,19 – 1,10	1,68 -	-
	- Bagian Tengah	2 -	3,3 – 2,32	6,20 – 1,10	2,21 -	-
	- Bagian Hilir	2,9 -	2,7 – 2,22	6,22 – 1,09	3,63 -	-
	Sungai Lahei					
	- Bagian Tengah	2,9 -	2,5 – 2,20	6,18 – 1,14	1,17 -	-
	- Bagian Hilir	3,2 -	3,0 – 3,09	6,20 – 1,14	3,44 -	-
	Sungai Teweh					
	- Bagian Hulu	6,4 -	3,5 – 2,49	6,19 – 1,26	3,43 -	-
	- Bagian Tengah	9,1 -	3,2 – 4,05	6,22 – 1,09	1,92 -	-
	- Bagian Hilir	4,1 -	3 – 2,23	6,20 – 1,10	2,83 -	-
	Sungai Montallat					
	- Bagian Hulu	4,2 -	2,8 – 2,20	6,19 -	2,45 -	-
	- Bagian Tengah	3,4 -	3 - 2,21	6,21 -	2,78 -	-
	- Bagian Hilir	3,3 -	3,7 – 2,22	6,24 -	2,08 -	-
2.2.5.3	Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017					
	- Pertambangan	80	100	105	107	108
	- Perkebunan	10	17	19	19	19
	- Kehutanan	7	7	7	7	7
2.2.5.4	Penanganan Pelayanan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
	- Pertambangan	-	21	6	8	6
	- Perkebunan	-	-	-	-	-
	- Kehutanan	-	-	-	-	-
2.2.5.5	Jumlah Titik Api (Hotspot) Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017					
	- Lahei Barat	-	-	-	-	-
	- Lahei	-	-	2	4	2
	- Teweh Tengah	-	8	25	8	3
	- Teweh Baru	-	1	5	12	13
	- Teweh Selatan	-	3	-	3	1
	- Montallat	-	10	23	-	3
	- Gunung Timang	-	13	24	5	4
	- Teweh Timur	-	6	27	1	4
	- Gunung Purei	-	-	4	-	2
2.2.6	**Administrasi Kependudukan daan Pencatatan Sipil**					
2.2.6.1	Penduduk yang Memiliki KTP elektronik tahun 2013-2017	67.000	80.335	80.565	81.839	91.148
2.2.6.2	Penduduk yang Memiliki Akta kelahiran tahun 2013-2017	72.682	70.179	73.503	77.399	80.469
2.2.6.3	Penduduk yang memiliki Akta Nikah (orang)	9.468	9.597	9.799	9.929	9.999
2.2.7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2.2.7.1	Dana Desa Kabupaten Barito Utara tahun 2015-2017					
	- Dana Desa (Juta Rupiah)	-	-	25.996	58.303	74.042.
	- Realisasi Dana Desa (Juta Rupiah)	-	-	25.835	58.303	74.042.
2.2.7.2	ADD Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2017					
	- Alokasi Dana Desa (Juta Rupiah)	6.612	15.295	51.152	57.468	50.331
	- Realisasi ADD (Juta Rupiah)	5.824	15.169.	48.831	57.289	50.170
2.2.7.3	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	-	-	1	19	37
2.2.8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					
2.2.8.1	Jumlah Peserta KB Aktif	-	-	-	-	18.920
2.2.9	**Perhubungan**					
2.2.9.1	Transportasi Jalan					
	Jumlah Terminal Type C (buah)	1	1	1	1	1
	Jumlah arus penumpang melalui terminal (penumpang)	8.844	22.035	15.898	7.667	15.166
	Jumlah Angkutan Umum (unit)	234	234	215	183	181
2.2.9.2	Transportasi Sungai					
	Jumlah dermaga sungai (buah)	7	12	15	23	24
	Jumlah penumpang : Penumpang datang (orang) Penumpang berangkat (orang)	 30.684 30.019	 37.498 33.147	 54.000 62.725	 31.658 31.104	 41.908 43.822
	Jumlah bongkar muat barang : Barang masuk (ton) Barang keluar (ton)	 1.246 1.291	 935 1.127	 2.430 4.344	 645 744	 598 369
2.2.9.3	Uji KIR Angkutan Penumpang / Barang					
	Lama waktu pelaksanaan Uji KIR Mobil sesuai SOP Pengujian Kendaraan Bermotor (menit)	20	20	20	20	20
	Jumlah mobil penumpang/barang yang di uji KIR (unit)	949	1.058	1.069	962	1.027

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
2.2.10	**Komunikasi dan Informatika**					
2.2.10.1	Kapasitas Sentral dan Jumlah Pemegang Surat Ijin Penerima Pesawat Telepon, 2013-2017					
	- Telepon	3.916	4.120	4.475	4.475	6.656
	- Speedy	912	1.472	2.125	2.125	-
	- Indihome	-	-	-	-	6.656
2.2.10.2	Jumlah menara telekomunikasi (buah)	-	-	-	-	36
2.2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**					
2.2.11.	Persentase Koperasi Aktif Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017					
	- Jumlah Koperasi Aktif	159	186	203	208	212
	- Jumlah Seluruh Koperasi	237	262	267	272	219
	- Persentase Koperasi Aktif (persentase)	67,09	70,99	76,03	76,47	96,80
2.2.12	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017					
	- Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (unit)	6.947	7.022	7.200	8.488	8.466
	- Jumlah Seluruh UKM (unit)	75	75	105	285	285
	- Persentase UKM (persentase)	1	1	1,5	3,2	3,3
2.2.12	**Penanaman Modal**					
2.2.12.1	Jumlah Investor PMDN dan PMA Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017					
	- Jumlah investor PMDN (unit)	228	224	236	113	127
	- Jumlah Investor PMA (unit)	7	7	7	5	7
2.2.12.2	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 (jutaan)					
	- Realisasi Tahun berkenaan	565.417,99	1.358.782,00	1.169.231,00	817..504,00	2.068.769,00
	- Realisasi Tahun Yang Lalu	189.552,98	565.417,99	1.358.782,00	1.169.231,00	817.504,00
	- Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (persen)	198	140	-14	-30	153
2.2.13	**Perpustakaan**					
2.2.13.1	Pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan Daerah tahun 2013-2017					
	- Jumlah Pengunjung Perpustakaan (orang)	3.032	2.977	4.904	18.688	11.719
	- Jumlah Koleksi Buku (buah)	15.000	16.876	21.792	24.106	25.253
2.2.14	**Kearsipan**					
2.2.14.1	Arsip pada Perpustakaan Daerah tahun 2013-2017	52	75	100	100	130
2.3.	**Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan**					
2.3.1	**Kelautan dan Perikanan**					
2.3.1.1	Produksi Perikanan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-201					
	- Produksi Perikanan (Ton)	4.259,48	4.592,20	8.821,65	5.690,73	6.487,07

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
	- Target Daerah (Ton)	4.678,80	4.986,20	5.292,00	5.492,00	5.790,00
	- Persentase Produksi Perikanan	91,04	92,11	91,11	103,62	112,00
2.3.2	**Pariwisata**					
2.3.2.1	Jumlah Wisatawan Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017					
	- Jumlah Wisatawan Domestik	30.142	40.460	43.773	34.730	42.199
	- Jumlah Wisatawan Mancanegara	-	245	164	95	92
2.3.2.2	Jumlah obyek wisata di wilayah Kabupaten Barito Utara	52	52	52	52	52
2.3.2.3	Jumlah Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017 (juta rupiah)	1.088	2.832	1.253	1.253	2.540
2.3.3	**Pertanian**					
2.3.3.1	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017					
	- Produksi Tanaman Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar	25.480	30.326	32.175	33.979	33.572
	- Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha)	10.054	12.011	12.081	11.783	12.427
	- Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar (Ku/ha)	22.83	22.83	25.43	28.99	26.97
2.3.3.2	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2012-2017 (%)	10,91	11,78	12,42	12,18	11,5
2.3.4	**Kehutanan**					
2.3.4.1	Data Luas Lahan Kritis di Wilayah Kerja BPDAS Barito di Kabupaten Barito Utara Menurut Kecamatan					
	Tidak Kritis	35.626	-	-	-	-
	Potensi Kritis	466.636	-	-	-	-
	Agak Kritis	374.797	-	-	-	-
	Kritis	121.935	-	-	-	-
	Sangat Kritis	14.972	-	-	-	-
2.3.4.2	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,77	2,09	2,32	2,32	-
2.3.5	**Energi dan Sumber Daya Mineral**					
2.3.5.1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017					
	- Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik	18.751	20.297	21.044	22.453	25.938
	- Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik (%)	91,61	91,85	91,79	91,84	92,41
2.3.5.2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	50,63	46,42	42,85	42,81	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
2.3.6	**Perdagangan**					
2.3.6.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	4,68	5,27	5,74	6,04	-
2.3.7	**Perindustrian**					
2.3.7.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	6,87	7,74	8,16	7,88	-
2.3.7.2	Persentase Pertumbuhan Industri di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017					
	- Pertumbuhan Industri per tahun (unit)	379	379	379	379	398
	- Persentase Pertumbuhan Industri	1,06	0,00	0,00	0,00	1,79
2.4.	**Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan**					
2.4.1	**Pendapatan**					
2.4.1.1	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (juta rupiah)	24.500	41.508	50.310	56.817	90.000
2.4.1.2	Realisasi Dana Perimbangan (juta rupiah)	596.450	719.166	787.271	980.138	896.492
2.4.1.3	Realisasi Pendapatan (juta rupiah)	642.362	872.411	978.153	1.217.221	1.109.360
2.4.1.4	Desentralisasi Fiskal (%)	3,81	4,76	5,14	4,67	8,11
2.4.1.5	Rasio ketergantungan keuangan daerah (%)	96,19	95,24	94,86	95,33	91,89
2.4.1.6	Rasio kemandirian keuangan daerah (%)	3,97	5,00	5,42	4,90	8,83
2.4.2	**Kepegawaian**					
2.4.2.1	Jumlah dan Jumlah Target PNS Kab. Barito Utara Tahun 2015 – 2017					
	- Jumlah target PNS	-	-	4813	4893	4700
	- Jumlah realisasi PNS	-	-	4743	4643	3994
2.4.2.2	Jumlah Pejabat Struktural yang Lulus Diklatpim Kab. Barito UtaraTahun 2015 – 2017					
	- Jumlah pejabat - struktural	-	-	695	685	720
	- Yang telah lulus diklatpim	-	-	599	644	654
3)	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**					
3.1.	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**					
3.1.1	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Barito Utara (rupiah), 2017	-	-	-	-	568.333
3.1.2	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Barito Utara (rupiah), 2017	-	-	-	-	444.469
3.1.3	Persentase Konsumsi Non Pangan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2014-2017					
	- Pengeluaran non pangan rata-rata perkapita sebulan (rupiah)	-	379.550	448.247	442.848	444.469
	- Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan (rupiah)	-	806.017	936.070	924.237	1.012.802
	- Rasio	-	0,4709	0,4789	0,4791	0,4389
3.1.4	NTP dan NTUP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2017					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
	- Rata-rata Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)	106,14	106,15	104,57	104,79	105,70
	- Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP)	98,31	101,29	98,66	97,59	98,60
3.2	**Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur**					
3.2.1	**Jalan dan Jembatan**					
3.2.1.1	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017					
	- Panjang Jalan (km)	608,34	625,74	625,74	758,14	758,14
	- Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	59,59	58,74	67,17	45,87	45,94
3.2.2	**Perhubungan**					
3.2.2.1	Jumlah Orang yang terangkut angkutan umum	8.844	22.035	15.898	7.667	15.166
3.3	**Fokus Iklim Berinvestasi**					
3.3.1	**Kriminalitas**					
3.3.1.1	Data Tindak Pidana / Kejahatan dan Kerugian Yang Dilaporkan Tahun 2013 - 2017					
	- Jumlah Kasus	227	129	190	103	156
	- Kerugian (rupiah.)	± 130.000.000	± 83.000.000	± 117.000.000	± 74.000.000	± 102.000.000
3.3.1.2	Data keamanan di wilayah Kabupaten Barito Utara, berdasarkan tindak pidana :					
	- Curanmor	-	-	51	15	19
	- Penganiayaan	-	-	24	12	-
	- Narkoba	-	-	17	32	27
	- Perjudian	-	-	9	2	2
	- Curat dan curas	-	-	72	24	19
	- pembunuhan	-	-	1	6	6
3.3.1.3	Jumlah unjuk rasa	-	4	7	8	2
3.4	**Fokus Sumber Daya Manusia**					
3.4.1	**Kualitas Tenaga Kerja**					
3.4.1.1	Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan Kabupaten Barito Utara					
	- Tidak/Belum Tamat SD	-	17.774	10.258	10.258	7.699
	- SD	-	17.928	19.871	19.871	16.320
	- SMP	-	15.870	15.055	15.055	11.373
	- SMA	-	8.190	10.626	10.626	15.604
	- SMK	-	3.317	5.081	5.081	4.686
	- DIPLOMA/UNIVERSITAS	-	4.137	6.082	6.082	8.022
3.4.2	**Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)**					
3.4.2.1	Penduduk Menurut Kelompok Umum dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017					
	- 0 - 14 tahun (jiwa)	37.837	37.660	37.467	37.200	36.953
	- 15 - 64 tahun (jiwa)	83.954	85.136	86.207	87.272	88.268
	- 65 + (jiwa)	3.609	3.698	3.805	3.928	4.066
	- Rasio Ketergantungan	49,37	48,58	47,88	47,13	46,47

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan gambaran keuangan daerah dimaksudkan untuk mengetahui gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dibutuhkan analisis realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, meliputi: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selain itu juga dilakukan analisis terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Kapasitas keuangan daerah harus diketahui, agar daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan, sehingga belanja pembangunan dapat dilakukan secara optimal, efektif dan efisien.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Analisis kinerja keuangan dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan

gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain – lain pendapatan daerah yang sah, belanja (belanja langsung dan tidak langsung); serta pembiayaan daerah. Neraca daerah menggambarkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah dan kondisi ekuitas dana tersedia.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2017 digambarkan berdasarkan pendapatan dan belanja sebagai berikut :

3.1.1.1 Pendapatan Daaerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Barito Utara cukup baik dan mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, total pendapatan daerah Kabupaten Barito Utara adalah sebesar Rp.642.362.081.930,00. Angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2016 menjadi Rp.1.219.855.289.867,91 dengan peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 15,21%, sedangkan pada tahun 2017 pendapatan daerah menjadi Rp.1.075.758.067.239,96 atau mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar Rp.144.097.222.627,95.

Pendapatan Asli Daerah rata-rata per tahun cenderung meningkat dari periode tahun 2013-2017 dengan pertumbuhan rata-rata 40,49%. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi

Umum selama periode 2013-2017 cenderung mengalami peningkatan dan penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,67%. Untuk pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah selama periode 2013-2017 dengan besaran yang berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 111,02%.

Pendapatan daerah yang disajikan secara serial menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2013-2017 sebagaimana disajikan pada tabel III.1.

Tabel III.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2013-2017 Kabupaten Barito Utara

Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata– Rata Pertum buhan (%)
PENDAPATAN	**642.362.081.930,00**	**872.411.013.437,64**	**978.153.928.826,89**	**1.219.855.289.867,91**	**1.075.758.067.239,96**	**15,21**
Pendapatan Asli Daerah	**24.500.000.000,00**	**41.508.164.460,74**	**50.310.290.201,94**	**56.816.976.472,69**	**90.000.490.218,48**	**40,49**
Hasil Pajak Daerah	2.750.000.000,00	7.297.065.956,00	6.617.788.233,00	9.595.705.448,00	8.550.869.077,00	47,54
Hasil Retribusi Daerah	10.353.000.000,00	16.778.182.392,00	4.103.439.540,00	4.339.171.750,00	4.208.653.378,00	(2,69)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.500.000.000,00	3.582.144.479,56	4.831.224.481,21	5.689.134.793,00	7.906.774.228,00	23,49
Lain-lain PAD yang Sah	7.897.000.000,00	13.850.771.633,18	34.757.837.947,73	37.192.964.481,69	69.334.193.535,48	79,94
Dana Perimbangan	**596.450.802.918,00**	**719.166.440.891,00**	**787.270.188.604,00**	**982.771.521.439,00**	**862.889.806.025,00**	**10,67**
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	82.838.812.918,00	163.670.759.891,00	146.024.194.604,00	231.924.157.890,00	147.228.406.026,00	27,28
Dana Alokasi Umum	475.180.280.000,00	514.638.471.000,00	517.551.314.000,00	569.672.938.000,00	559.665.616.000,00	4,30
Dana Alokasi Khusus	38.431.710.000,00	40.857.210.000,00	123.694.680.000,00	181.174.425.549,00	155.995.783.999,00	60,41
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**21.411.279.012,00**	**111.736.408.085,90**	**140.573.450.020,95**	**180.266.791.956,22**	**122.867.770.996,48**	**111,02**
Hibah	-	-	-	-	-	-
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	19.411.279.012,00	46.846.739.504,79	21.556.964.206,42	34.257.167.665,66	33.756.122.162,48	36,20
Dana Penyesuaian dana Otonomi Khusus	-	40.064.636.000,00	83.258.940.000,00	61.454.617.000,00	7.500.000.000,00	(2,06)
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	2.000.000.000,00	7.000.000.000,00	34.746.772.000,00	58.142.276.000,00	74.042.909.000,00	185,27
Pendapatan lainnya	-	17.825.032.581,11	1.010.773.814,53	26.412.731.290,56	7.568.739.834,00	782,48

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara, 2018

3.1.1.2 Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupeten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Realisasi belanja daerah dari tahun 2013 hingga 2017 selalu meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,39%. Untuk belanja tidak langsung rata-rata peningkatannya sebesar 12,63%, sedangkan belanja langsung dengan rata-rata peningkatan sebesar 18,23%. Secara keseluruhan realisasi belanja daerah selama periode 2013-2017 disajikan pada tabel III.2 berikut:

Tabel III.2
Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah
Tahun 2013-2017 Kabupaten Barito Utara

Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata– Rata Pertum buhan (%)
BELANJA	**669.068.845.740,00**	**774.677.935.503,50**	**1.070.801.844.959,72**	**1.122.435.883.083,00**	**1.152.857.209.714,00**	**15,39**
Belanja Tidak langsung	**335.979.632.864,00**	**389.512.778.221,00**	**498.703.317.710,00**	**544.619.451.044,00**	**530.198.570.257,00**	**12,63**
Belanja Pegawai	274.777.524.784,00	333.658.417.805,00	379.593.249.177,00	403.908.154.213,00	364.037.909.277,00	7,93
Belanja Subsidi						
Belanja Hibah	35.778.702.200,00	24.343.400.000,00	22.479.010.000,00	19.737.400.000,00	35.648.450.000,00	7,20
Belanja Bantuan Sosial	1.706.000.000,00	1.918.325.000,00	502.883.197,00	360.628.000,00	1.487.840.000,00	55,74
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	784.100.000,00	784.100.000,00	1.825.800.000,00	1.363.520.000,00	1.314.824.809,00	25,99
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	21.933.305.880,00	28.766.535.416,00	94.131.725.336,00	119.162.098.831,00	127.345.546.171,00	72,96
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	42.000.000,00	170.650.000,00	87.650.000,00	364.000.000,00	119,29
Belanja Langsung	**333.089.212.876,00**	**385.165.157.282,50**	**572.098.527.249,72**	**576.816.432.039,00**	**622.658.639.457,00**	**18,23**
Belanja Pegawai	26.627.924.300,00	32.851.542.333,00	32.526.299.265,00	36.829.741.049,00	43.034.771.205,00	13,12
Belanja Barang dan Jasa	130.778.908.905,50	151.187.627.014,00	183.970.859.645,72	229.448.232.342,00	199.810.868.335,00	12,31
Belanja Modal	175.682.379.670,50	201.125.987.935,50	355.601.368.339,00	310.538.458.648,00	379.812.999.917,00	25,23

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara, 2018

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Barito Utara serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

3.1.2.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara selama periode tahun 2013-2017 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,12%. Aset pemeintah daerah terdiri dari beberapa komponen seperti aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan investasi jangka panjang yang memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan berbeda-beda setiap tahunnya.

3.1.2.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab

untuk bertindak di masa lalu Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara selama periode tahun 2013-2017 hanya memiliki kewajiban jangka pendek yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan shingga pada tahun 2017 mencapai angka sebesar Rp. 8.692.259.245,00.

3.1.2.3 Ekuitas Dana

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Sebelum tahun 2015, ketika basis akrual belum diterapkan, ekuitas disebut dengan Ekuitas Dana yang meliputi Ekuitas Dana Lancar (EDL), Ekuitas Dana Investasi (EDI) dan Ekuitas Dana Cadangan (EDC). Sejak tahun 2015, dengan diterapkannya basis akrual, ekuitas tidak disajikan seperti itu lagi.

Nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Barito Utara dari tahun 2013–2017 rata rata pertumbuhannya adalah sebesar 5,96% dengan saldo pada tahun 2013 sebesar Rp.2.370.353.615.778,75 dan pada tahun 2017 menjadi Rp. 2.877.545.701.691,86.

Tabel III.3
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
1	**ASET**						
1.1	**ASET LANCAR**	**342.277.793.086,91**	**425.660.838.766,11**	**211.458.506.917,03**	**327.274.255.561,51**	**322.830.932.060,13**	**6,86**
1.1.1	Kas di Kas Daerah	321.096.625.115,49	407.618.287.009,63	168.924.145.943,55	264.055.206.898,46	271.308.554.063,42	6,86
1.1.2	kas di Bendahara Penerimaan	423.565.944,62	0,00	43.953.934,25	0,00	3.591.269,00	-90,73
1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	40.869.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Kas di BLUD			6.731.555.496,00	13.372.990.461,00	11.056.484.030,00	40,67
1.1.5	Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610.862.476,00	0,00
1.1.6	Kas lainnya	0,00	885.997.661,00	352.683.448,00	0,00	0,00	-60,19
1.1.7	Kas di dana kapitasi	0,00	0,00	1.524.269.880,00	2.582.505.219,00	0,00	69,43
1.1.8	Piutang pendapatan	0,00	0,00	24.961.431.648,11	32.409.075.979,99	19.831.229.465,87	-4,49
1.1.9	Kas pada bendahara dana BOS	0,00	0,00	0,00	296.337.149,00	1.012.389.843,00	241,63
1.1.10	Piutang Pajak	4.615.264.844,00	5.087.462.238,00	0,00	0,00	0,00	10,23
1.1.11	piutang Retribusi	562.225.954,00	519.492.245,00	0,00	0,00	0,00	-7,60
1.1.12	Piutang Dana Bagi Hasil	11.284.477.212,80	6.371.000.172,48	0,00	0,00	0,00	-43,54
1.1.13	Piutang Lain - Lain	884.853.982,00	407.064.878,00	965.800.713,62	640.598.590,85	1.450.590.096,84	44,01
1.1.14	penyisihan piutang	0,00	0,00	(2.430.478.753,50)	(4.432.691.632,21)	(4.950.993.022,00)	47,04
1.1.15	Persediaan	3.410.780.034,00	4.638.165.062,00	5.256.116.943,00	8.885.362.626,00	9.474.073.881,00	31,25
1.1.16	Beban dibayar dimuka	0,00	92.500.000,00	268.070.157,00	599.487.005,00	132.163.913,00	78,49

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
1.2	**ASET TETAP**	**1.974.370.824.267,20**	**2.387.344.644.698,11**	**2.038.944.452.694,11**	**2.238.387.697.667,11**	**2.427.772.301.135,19**	**6,14**
1.2.1	Tanah	360.228.964.317,00	553.484.649.018,40	556.563.181.298,40	548.517.557.838,40	566.531.443.933,40	14,01
1.2.2	Peralatan dan Mesin	182.657.961.068,00	225.631.890.900,00	270.428.164.156,00	297.208.828.451,00	335.123.852.618,00	16,51
1.2.3	Gedung dan Bangunan	565.837.479.975,00	640.885.546.032,71	696.656.901.337,50	750.422.005.062,50	750.105.426.603,50	7,41
1.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	827.460.732.546,00	921.080.612.308,00	1.079.574.925.110,00	1.175.639.285.255,00	1.471.074.924.579,00	15,64
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	8.419.545.000,00	10.865.444.953,00	11.735.464.359,21	12.059.548.035,21	11.195.579.188,29	8,16
1.2.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	29.766.141.361,20	35.396.501.486,00	121.816.731.735,00	226.261.137.765,00	174.926.058.000,00	81,53
1.2.7	Akumulasi penyusutan	0,00	0,00	(697.830.915.302,00)	(771.720.664.740,00)	(881.184.983.787,00)	12,39
1.3	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**26.274.179.668,64**	**29.972.728.886,62**	**40.684.778.006,00**	**49.906.338.101,00**	**57.036.539.462,00**	**21,69**
1.3.1	Investasi Non Permanen lainnya	559.332.000,00	423.978.000,00	423.978.000,00	423.978.000,00	0,00	-8,07
1.3.2	Penyertaan modal pemerintah	25.714.847.668,64	29.548.750.886,62	40.260.800.006,00	49.482.360.101,00	57.036.539.462,00	22,33
1.4	**ASET LAINNYA**	**27.439.820.246,00**	**37.338.969.085,29**	**2.664.554.187,62**	**6.808.921.672,62**	**78.198.851.163,54**	**286,81**
1.4.1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	690.753.600,62	559.695.230,62	419.818.393,62	-21,98
1.4.2	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	Tagihan Tuntutan ganti kerugian Daerah	113.391.611,00	810.649.304,62	0,00	0,00	0,00	614,91
1.4.4	Kemitraan Dengan Pihak Kedua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	Aset Tak Berwujud	255.765.100,00	377.590.100,00	480.652.100,00	943.532.100,00	729.186.197,00	37,13
1.4.6	Aset lain-lain	27.070.663.535,00	36.150.729.680,67	1.493.148.487,00	5.305.694.342,00	77.049.846.572,92	386,30

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
1.5	**Jumlah Dana Cadangan**	0,00	0,00	**120.471.481.712,00**	**106.619.502.703,00**	**10.301.323.160,00**	**-50,92**
	JUMLAH ASET DAERAH	**2.370.362.617.268,75**	**2.880.317.181.436,13**	**2.414.223.773.516,76**	**2.728.996.715.705,24**	**2.896.139.946.980,86**	**6,12**
2	**KEWAJIBAN**	**9.001.490,00**	**796.794.265,00**	**1.289.538.139,00**	**3.521.884.050,00**	**8.692.259.245,00**	**2283,39**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**9.001.490,00**	**796.794.265,00**	**1.289.538.139,00**	**3.521.884.050,00**	**8.692.259.245,00**	**2283,39**
2.1.1	Utang Perhitungan pihak Ketiga	9.001.490,00	0,00	0,00	90.516,00	0,00	-98,99
2.1.2	Utang Beban	0,00	0,00	804.534.498,00	3.521.793.534,00	8.582.104.495,00	240,71
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	796.794.265,00	485.003.641,00	0,00	110.154.750,00	-58,21
2.2	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	**EKUITAS DANA**	**2.370.353.615.778,75**	**2.879.520.387.172,13**	**2.408.073.277.871,76**	**2.716.609.448.390,82**	**2.877.545.701.691,86**	**5,96**
3.1	**EKUITAS DANA LANCAR**	**342.268.791.596,91**	**424.864.044.502,11**	**0**	**0**	**0**	**24,13**
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Angsuran (SILPA)	321.087.623.625,49	408.545.154.171,63	0,00	0,00	0,00	27,24
3.1.2	Cadangan untuk Piutang	17.346.821.992,80	12.477.519.533,48	0,00	0,00	0,00	-28,07
3.1.3	cadangan Untuk Persediaan	3.410.780.034,00	4.638.165.062,00	0,00	0,00	0,00	35,99
3.1.4	Pendapatan yang Ditangguhkan	423.565.944,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran hutang jangka pendek	0,00	(796.794.265,00)	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
3.2	**EKUITAS DANA INVESTASI**	**2.028.084.824.181,84**	**2.454.656.342.670,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,03**
3.2.1.	Diinvestasikan dalam Investasi Jngka Panjang	26.274.179.668,64	29.972.728.886,62	0,00	0,00	0,00	14,08
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.974.370.824.267,20	2.387.344.644.698,11	0,00	0,00	0,00	20,92
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	27.439.820.246,00	37.338.969.085,29	0,00	0,00	0,00	36,08
3.3	**EKUITAS**	**0**	**0**	**2.408.073.277.871,76**	**2.716.609.448.390,82**	**2.877.545.701.691,86**	**9,37**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**2.370.362.617.268,75**	**2.880.317.181.437,13**	**2.409.362.816.010,76**	**2.720.131.332.440,82**	**2.886.237.960.936,86**	**6,04**

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara, 2018

3.1.3. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan rasio lancar (current ratio) dan rasio cair (quick ratio). Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek,sedangkan Rasio cair adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Kedua alat analisis tersebut, bertujuan sama yaitu untuk menilai kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Perbedaannya Rasio Cair sudah mengeluarkan nilai persediaan dari aset lancar, karena persediaan meskipun termasuk aset lancar dianggap kurang cepat untuk dicairkan (kurang likuid).

Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada tahun 2013 sebesar 38.024,57 menjadi 3.714,00 pada tahun 2017. Nilai-nilai yang diperoleh ini mengindikasikan bahwa pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan dengan rasio lancar (current ratio), karena rasio cair telah mempertimbangkan mengeluarkan persediaan dalam perhitungannya. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai rasio cair neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada tahun 2017 sebesar 35,95. Nilai dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kabupaten Barito Utara setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Tabel III.4
Rasio Likuiditas Neraca Keuangan
Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio lancar (*current ratio*)	38.024,57	53.421,67	16.398,00	9.292,59	3.714,00
2	Rasio cair (*quick ratio*)	38.024,57	534,22	70,56	62,65	35,95

3.1.4. Rasio Solvabilitas

Rasio ini disebut juga Ratio Leverage yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam dari pihak ketiga. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva yang dimiliki dibiayai dengan hutang. Dari data pada neraca daerah, rasio solvabilitas yang dapat dihitung adalah rasio kewajiban terhadap aset (Total Debt to Total Asset Ratio) dan rasio kewajiban terhadap ekuitas (Total Debt to Equity Ratio)

Rasio kewajiban terhadap aset adalah perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka panjang terhadap jumlah seluruh aktiva yang dimiliki. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Rasio ini dihitung dengan rumus total kewajiban dibagi dengan total aset.

Rasio kewajiban terhadap ekuitas merupakan perbandingan antara hutang–hutang dan ekuitas dalam pendanaan pemerintahan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri dari pemerintah untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio ini dihitung dengan rumus total kewajiban dibagi dengan ekuitas.

Tabel III.5
Rasio Solvabilitas Neraca Keuangan
Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Kewajiban Terhadap Aset	0,0000038	0,0002766	0,0005341	0,0012905	0,0030013
2	Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas	0,0000038	0,0002767	0,0005355	0,0012964	0,0030207

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio kewajiban terhadap aset tahun 2013 sebesar 0,0000038 atau 0,00038 % dan pada tahun 2017 sebesar 0,0030013 atau 0,30013%. Semakin kecil nilai rasio solvabilitas, maka semakin baik. Jika dilihat dari hasil penghitungan tersebut, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan selama tahun 2013-2017 tidak tergantung dari pinjaman.

3.1.5. Rasio Kewajiban Terhadap Aset

Rasio ini digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan keseluruhan kewajiban. Rasio kewajiban terhadap ekuitas dihitung dengan membandingkan keseluruhan ekuitas dana dengan keseluruhan kewajiban.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2013 sebesar 0,00038 persen dan pada tahun 2017 sebesar 0,30013 persen . Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin baik rasio rasio kewajiban terhadap ekuitas karena menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membayar kewajibannya. Kinerja keuangan Pemda yang sangat baik, karena ekuitas dana yang dijadikan jaminan kewajiban hanya kecil sekali bahkan dibawah angka 1%.

3.1.6. Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset

Rasio kewajiban terhadap ekuitas secara langsung membandingkan kewajiban dibagi dengan ekuitas. Ekuitas dana tersebut terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dan Ekuitas Dana Cadangan. Rasio ini merupakan kebalikan dari rasio hutang terhadap total Aset, sehingga yang diukur adalah persentase jumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sendiri dalam membiayai pembangunan. Angka rasio yang mendekati 100% berarti baik, artinya pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh kemampuan sendiri. Rasio Ekuitas Dana terhadap total aset pada tahun 2013 sebesar 99,9996%, 2014 sebesar 99,9723%, 2015 sebesar 99,7452%, 2016 sebesar 99,5461% dan 2017 sebesar 99,3580%, hal ini menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang sangat baik, artinya hampir seluruh biaya pembangunan dibiayai dari dana sendiri.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat.

Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta dalam penyajian laporan keuangan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

3.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara yang disepakati setiap tahunnya, maka secara umum kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Barito Utara tahun anggaran sebelumnya sebagai berikut :

a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan

tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan kebijakan terkait pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

- Dalam upaya merencanakan target pendapatan asli daerah dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah serta optimalisasi pencapaiannya.
- Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.
- Dalam rangka pemungutan pajak daerah, dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya yang dapat ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi

nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). Jumlah rencana penerimaan yang dianggarkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hendaknya mencerminkan rasionalitas dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan kembali ditetapkan sebagai penyertaan modal (telah diinvestasikan). Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan peraturan daerah.

- Penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagal akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaaan daerah merupakan pendapatan daerah.

2. Dana Perimbangan
   - Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Barito Utara Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Secara keseluruhan, terus diupayaan peningkatan Dana Perimbangan terutama melalui DAK dan dana bagi hasil.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
   - Dana darurat yang diterima dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana korban/kerusakan akibat bencana.
   - Hibah yang diterima berupa uang harus dianggarkan dalam APBD dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara

pemerintah daerah dan pemberi hibah. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah.

- Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima pemerintah kabupaten merupakan lain-lain penerimaan yang sah.

3.2.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Secara umum, kebijakan umum keuangan daerah menyangkut tentang belanja daerah Kabupaten Barito Utara, sebagai berikut :

a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah

yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

e. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang memiliki kriteria :
   1) masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   2) merupakan objek pemeliharaan;
   3) jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
   4) pengadaan *software* dalam rangka pengembangan sistem lnformasi manajemen dianggarkan pada belanja modal.

f. Belanja DPRD
   1) Penganggaran belanja DPRD berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pada tahun 2017 mengunakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perubahan terakhir atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007. Disamping itu mempedomani pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
   2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD meliputi uang representasi, uang keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain.

g. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   1) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109

Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2) Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja tidak langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3) Belanja rumah tangga, beserta pembelian inventaris/perlengkapan rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharaannya, biaya pemeliharaan kesehatan, belanja perjalanan dinas dan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja langsung Sekretariat Daerah; dan
4) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu kesatuan dalam belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau tidak dianggarkan secara terpisah dan pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

h. Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau memberikan bantuan kepada daerah lain dalam penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang dapat ditunda.
i. Belanja subsidi
   1) Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
   2) Belanja Subsidi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

j. Bantuan Sosial

1) Bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan harus selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Pemberian bantuan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran pada organisasi kemasyarakatan yang sama.
2) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

k. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

l. Belanja Bantuan Keuangan

1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada Kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
2) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

3) Penganggaran untuk Alokasi Dana Desa agar mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

m. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

3.2.3 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Barito Utara bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Barito Utara pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang, analisis proporsi penggunaan anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

3.2.3.1 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun ke tahun menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Barito Utara. Pada tahun 2015 sampai dengan 2016 realisasi belanja daerah berturut-turut 85,90 %, 93,75% dan 87,56%, dengan rata-rata realisasi sebesar 89,70%. Realisasi belanja ini merupakan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Realisasi belanja tidak langsung tahun 2015 sebesar 84,68%, 2016 sebesar 85,444 % dan tahun 2017 sebesar 82,77 % dengan rata-rata realisasi belanja tidak langsung sebesar 84,30%. Untuk realisasi belanja langsung tahun 2015 sebesar 87%, 2016 sebesar 90,17 % dan tahun 2017 sebesar 92,10% dengan rata-rata realisasi belanja langsung sebesar 89,76%. Secara terinci realisasi belanja tahun 2015-2017 untuk masing-masing jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.6
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2017

No	Uraian	2015			2016			2017		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	**BELANJA**	**1.246.531.211.901,00**	**1.070.801.844.959,72**	**85,90**	**1.197.237.665.390,56**	**1.122.435.883.083,00**	**93,75**	**1.316.626.863.005,78**	**1.152.857.209.714,00**	**87,56**
5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**588.933.930.701,00**	**498.703.317.710,00**	**84,68**	**637.452.677.119,72**	**544.619.451.044,00**	**85,44**	**640.564.002.034,31**	**530.198.570.257,00**	**82,77**
5.1.1	Belanja Pegawai	458.499.571.527,00	379.593.249.177,00	82,79	**493.428.947.919,72**	**403.908.154.213,00**	**81,86**	470.481.963.584,31	364.037.909.277,00	77,38
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Hibah	26.759.010.000,00	22.479.010.000,00	84,01	20.447.400.000,00	19.737.400.000,00	96,53	37.833.060.000,00	35.648.450.000,00	94,23
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.603.214.074,00	502.883.197,00	19,32	900.000.000,00	360.628.000,00	40,07	2.035.000.000,00	1.487.840.000,00	73,11
5.1.6	Belanja Bagi Hasil	1.825.800.000,00	1.825.800.000,00	100	1.363.520.000,00	1.363.520.000,00	100	1.575.870.000,00	1.314.824.809,00	83,43
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	97.746.335.100,00	94.131.725.336,00	96,30	119.812.809.200,00	119.162.098.831,00	99,46	128.138.108.450,00	127.345.546.171,00	99,38
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	170.650.000,00	11,38	1.500.000.000,00	87.650.000.,00	5,84	500.000.000,00	364.000.000,00	72,80
5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**657.597.281.200,00**	**572.098.527.249,72**	**87,00**	**639.723.638.427,56**	**576.816.432.039,00**	**90,17**	**676.062.860.971,47**	**622.658.639.457,00**	**92,10**
5.2.1	Belanja Pegawai	37.080.472.756,00	32.526.299.265,00	87,72	40.427.227.810,00	36.829.741.049,00	91,10	49.098.119.504,00	43.034.771.205,00	87,65
5.2.2	Belanja Barang dan jasa	215.344.119.411,00	183.970.859.645,72	85,43	229.602.482.849,56	229.448.232.342,00	99,93	202.375.962.772,47	199.810.868.335,00	98,73
5.2.3	Belanja Modal	405.172.689.033,00	355.601.368.339,00	87,77	369.693.927.768,00	310.538.458.648,00	84,00	424.588.778.695,00	379.812.999.917,00	89,45

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara, 2018

3.2.3.2 Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Kebijakan pengelolaan keuangan selama tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa pengeluaran yang digunakan untuk belanja aparatur cenderung menurun. Hal tersebut ditunjukkan dengan proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran pada tahun 2016 mencapai 51,89% menurun menjadi 45,99 % pada tahun 2017.

Adapun belanja aparatur terbagi menjadi 2 pos, yakni Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan, Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH, Belanja pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insetif Pemungutan Pajak Retribusi, Belanja Iuran Pemerintah Daerah. Sedangkan pos Belanja Langsung meliputi Belanja Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur, Belanja Pegawai (BLUD), Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan /Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Premi Asuransi, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Sewa Rumah/Gedung, Belanja sewa Sarana Mobilitas, Belanja sewa perlengkapan kantor, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Pakaian Kerja, Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dab Bimbingan teknis PNS, Belanja Perjalanan Pindah Tugas, Belanja Pemeliharaan, Belanja perawatan peralatan kantor, Belanja Transportasi dan akomodasi, Belanja Medical Check-up. Juga pada pos Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll).

Tabel III.7
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2017

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	2016	591.922.141.159,00	1.140.682.283.081,00	51,89
2	2017	535.812.044.498,00	1.165.100.009.710,00	45,99

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara, 2018

3.2.3.3 Analisis Pengeluaran Wajib dan Meningkat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran Wajib dan Mengikat dapat dilihat pada Tabel III.8 berikut :

Tabel III.8
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2017

No	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata – Rata Pertumbuhan (%)
A	**Belanja Tidak Langsung**	**594.660.843.046,00**	**665.145.069.875,00**	**658.858.941.237,00**	**5,45**
1	Belanja Pegawai	498.703.317.710,00	544.619.451.044,00	530.198.570.257,00	3,28
2	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.825.800.000,00	1.363.520.000,00	1.314.824.809,00	(14,45)
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa , Parpol	94.131.725.336,00	119.162.098.831,00	127.345.546.171,00	16,73
B	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**18.246.399.998,00**	**8.246.399.998,00**	**12.242.799.996,00**	**(3,17)**
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	18.246.399.998,00	8.246.399.998,00	12.242.799.996,00	(3,17)
	TOTAL A+B	**612.907.243.044,00**	**673.391.469.873,00**	**671.101.741.233,00**	**4,76**

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara, 2018 (diolah)

3.2.4 Analisis Pembiayaan

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

3.2.4.1 Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam penganggarannnya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Berdasarkan data realisasi selama periode 2013-2017 memperlihatkan terjadinya fluktuasi pembiayaan daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 27,14%.

Realisasi Pembiayaan Kabupaten Barito Utara mulai tahun 2013 sampai dengan 2017 dan rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada Tabel III.9.

Tabel III.9
Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata – Rata Pertumbuhan (%)
A	**REALISASI PENDAPATAN DAERAH**	**642.362.081.930,00**	**872.411.013.437,64**	**978.153.928.826,89**	**1.219.855.289.867,91**	**1.075.758.067.239,96**	**15,21**
B	**REALISASI BELANJA DAERAH**	**669.068.845.740,00**	**774.677.935.503,50**	**1.070.801.844.959,72**	**1.122.435.883.083,00**	**1.152.857.209.714,00**	**15,39**
	Surplus/(defisit) anggaran	**(26.706.763.810,00)**	**97.733.077.934,14**	**(92.647.916.132,83)**	**97.419.406.784,91**	**(77.099.142.474,04)**	
C	**PEMBIAYAAN DAERAH**						
1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**207.416.088.861,82**	**321.096.625.115,49**	**413.414.527.616,62**	**210.963.553.220,20**	**390.251.174.309,08**	**29,89**
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	195.635.086.661,82	321.096.625.115,49	408.583.303.049,63	178.856.316.294,55	284.156.029.783,04	11,72
b	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0,00
c	Pencairan Dana Cadangan	11.781.002.200,00	0	0	26.418.101.822,00	98.188.370.060,00	197,96
d	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	4.831.224.481,21	5.689.134.793,00	7.906.774.228,00	28,37
2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**6.147.002.200,00**	**10.246.400.000,00**	**148.246.399.998,00**	**18.246.399.998,00**	**12.242.799.996,00**	**37,29**
a	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.366.000.000,00	10.246.400.000,00	18.246.399.998,00	8.246.399.998,00	12.242.799.996,00	101,20
b	PembentukanDana Cadangan	3.781.002.200,00	0	130.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0	1048,64
c	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0	0
	Pembiayaan Netto	**201.269.086.661,82**	**310.850.225.115,49**	**265.168.127.618,62**	**192.717.153.222,20**	**378.008.374.313,08**	**27,14**
	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	**174.562.322.851,82**	**408.583.303.049,63**	**172.520.211.485,79**	**290.136.560.007,11**	**300.909.231.839,04**	**37,04**

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara, 2018 (diolah)

3.2.4.2 Defisit Rill Anggaran

Defisit riil anggaran dihitung dengan realisasi pendapatan daerah dikurangi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Apabila nilainya positif dikategorikan surplus anggaran, sebaliknya apabila negatif dikategorikan defisit anggaran.

Selama kurun waktu 2013-2017, APBD Kabupaten Barito Utara mengalami tiga kali defisit anggaran yaitu tahun 2013 mencapai Rp.32.853.766.010,00, tahun 2015 sebesar Rp.240.894.316.130,83 dan tahun 2017 sebesar Rp.89.341.942.470,04. Namun demikian, defisit tersebut masih dapat ditutup dengan pembiayaan daerah. Surplus realisasi anggaran terjadi pada tahun 2014 dan 2016.

Sedangkan Penutup defisit anggaran Kabupaten Barito Utara dilakukan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan, yang terdiri dari: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya dan Pencairan dana cadangan. Untuk tahun 2014 dan 2016 APBD Kabupaten Barito Utara terjadi surplus anggaran, maka terjadi SiLPA tahun berjalan dari akumulasi surplus anggaran, SiLPA tahun sebelumnya dan pencairan.

Secara lengkap defisit dan surplus riil anggaran dan komposisi penutup defisit dan surplus riil anggaran tahun 2013-2017 sebagaimana tabel III.10 dan III.11 berikut:

Tabel III.10
Defisit Rill Anggaran
Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	642.362.081.930,00	872.411.013.437,64	978.153.928.826,89	1.219.855.289.867,91	1.075.758.067.239,96
2	Belanja Daerah	669.068.845.740,00	774.677.935.503,50	1.070.801.844.959,72	1.122.435.883.083,00	1.152.857.209.714,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.147.002.200,00	10.246.400.000,00	148.246.399.998,00	18.246.399.998,00	12.242.799.996,00
	Surplus/(Defisit) Riil	**(32.853.766.010,00)**	**87.486.677.934,14**	**(240.894.316.130,83)**	**79.173.006.786,91**	**(89.341.942.470,04)**

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara, 2018

Tabel III.11
Penutup Defisit Rill Anggaran
Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)	195.635.086.661,82	321.096.625.115,49	408.583.303.049,63	178.856.316.294,55	284.156.029.783,04
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
3	Pencairan dana cadangan	11.781.002.200,00	0	0	26.418.101.822,00	98.188.370.060,00
4	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	4.831.224.481,21	5.689.134.793,00	7.906.774.228,00
	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan	**207.416.088.861,82**	**321.096.625.115,49**	**413.414.527.530,84**	**210.963.552.909,55**	**390.251.174.071,04**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		174.562.322.851,82	408.583.303.049,63	172.520.211.400,01	290.136.559.696,46	300.909.231.601,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara, 2018

Tabel III.12
Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran
Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

No	Uraian	PROPORSI DARI TOTAL DEFISIT RIIL				
		2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)	-595,47	367,02	-169,61	225,91	-318,05
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3	Pencairan dana cadangan	-35,86	-	-	33,37	-109,90
4	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-171,62	266,46	-436,81
4	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-531,33	467,02	-71,62	366,46	-336,81

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara, 2018 (diolah)

Komposisi penutup defisit riil anggaran diperhitungkan dengan rumus untuk masing-masing komponen penutup defisit riil dibandingkan dengan total masing-masing defisit riil pertahun, sehingga diperoleh nilai persentase/proporsi masing komponen penutup defisit riil.

Kemudian analisis yang dapat dilakukan untuk mendapat gambaran kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara yaitu melalui Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan, berturut-turut tahun 2013 sebesar Rp.174.562.322.851,82; tahun 2014 sebesar Rp.408.583.303.049,63; tahun 2015 sebesar Rp.172.520.211.400,01 dan tahun 2016 sebesar Rp. 290.136.559.696,46 serta tahun 2017 sebesar Rp.300.909.231.601,00 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 37,04%.

Realisasi SiLPA APBD Kabupaten Barito Utara pada tahun 2013-2017 berasal sisa penghematan belanja di SKPD serta kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, tidak terserap habis anggaran Dana Alokasi Khusus, serta anggaran DBH-DR yang terserap dikarenakan keterbatasan regulasi teknis yang mengatur penggunaannya.

Pada tahun 2013-2017 ketidakterserapan anggaran terhadap SiLPA disebabkan hampir seluruhnya merupakan belanja kontra pos yang penggunaannya masih menunggu petunjuk teknis.

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Proyeksi pendapatan Belanja daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Belanja daerah Kabupaten Barito Utara terdiri dari Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Proyeksi pendapatan daerah berdasarkan rata–rata pertumbuhan sebaran pendapatan periode sebelumnya, sebagaimana disajikan pada Tabel III.13.

Tabel III.13
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2018-2023 Kabupaten Barito Utara

No	Uraian	Pertumbuhan (%)	Proyeksi					
			2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
A.	**PENDAPATAN**	**6,60**	**1.102.812.463.518,40**	**1.265.093.090.648,00**	**1.288.864.019.900,00**	**1.353.980.436.332,60**	**1.422.496.267.310,74**	**1.512.090.353.256,13**
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	17,76	**66.880.498.164,00**	**85.682.169.648,00**	**102.270.613.920,00**	**112.375.914.315,00**	**122.481.214.709,00**	**150.000.000.000,00**
-	Pendapatan Pajak Daerah	12,92	12.420.108.227,00	11.162.619.000,00	16.066.905.361,00	17.890.303.927,00	19.713.702.494,00	21.537.101.061,00
-	Retribusi Daerah	11,21	7.690.113.582,00	10.715.975.648,00	9.590.928.523,00	10.541.335.994,00	11.491.743.464,00	12.442.150.935,00
-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34,31	8.650.607.987,00	10.614.597.000,00	20.559.839.741,00	21.826.955.618,00	23.094.071.494,00	33.067.929.819,00
-	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17,43	38.119.668.368,00	53.188.978.000,00	56.052.940.295,00	62.117.318.776,00	68.181.697.257,00	82.952.818.185,00
2	**DANA PERIMBANGAN**	**6,11**	**872.870.490.354,40**	**983.597.732.000,00**	**1.026.384.805.640,00**	**1.071.783.405.657,20**	**1.120.004.669.259,72**	**1.171.279.346.913,59**
-	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	14,72	141.974.210.354,40	189.702.024.000,00	208.672.226.400,00	229.539.449.040,00	252.493.393.944,00	277.742.733.338,40
-	Dana Alokasi Umum	2,95	559.665.616.000,00	575.136.443.000,00	592.390.536.290,00	610.162.252.378,70	628.467.119.950,06	647.321.133.548,56
-	Dana Alokasi Khusus	7,95	171.230.664.000,00	218.759.265.000,00	225.322.042.950,00	232.081.704.238,50	239.044.155.365,66	246.215.480.026,63
3	**LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**3,98**	**163.061.475.000,00**	**195.813.189.000,00**	**160.208.600.340,00**	**169.821.116.360,40**	**180.010.383.342,02**	**190.811.006.342,55**
-	Hibah	0,00	19.673.000.000	19.673.000.000,00	0	0	0	0
-	Dana Darurat	0,00	-	0	0	0	0	0
-	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	4,80	38.172.496.000	38.172.496.000,00	40.462.845.760,00	42.890.616.505,60	45.464.053.495,94	48.191.896.705,69
-	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1,54	27.250.000.000,00	22.811.541.000,00	24.180.233.460,00	25.631.047.467,60	27.168.910.315,66	28.799.044.934,60
-	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	283,03	1.650.000.000,00	25.000.000.000,00		0	0	0
-	Dana Desa	8,43	76.315.979.000,00	90.156.152.000,00	95.565.521.120,00	101.299.452.387,20	107.377.419.530,43	113.820.064.702,26
B	**BELANJA**	**1,41**	**1.337.073.793.621,00**	**1.317.536.576.702,00**	**1.363.020.086.509,62**	**1.408.956.139.185,62**	**1.457.272.725.013,97**	**1.508.002.252.171,83**
1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2,15	701.092.838.631,00	718.553.884.143,00	734.088.259.322,67	748.577.720.639,32	763.875.385.540,36	779.935.045.724,54
-	Belanja Pegawai	3,51	484.397.583.797,30	521.001.790.443,00	534.026.835.204,08	547.377.506.084,18	561.061.943.736,28	575.088.492.329,69

No	Uraian	Pertumbuhan (%)	Proyeksi					
			2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
-	Belanja Bunga	0,00	0	0	0	0	0	
-	Belanja Subsidi	0,00	0	0	0	0	0	
-	Belanja Hibah	-25,35	60.400.437.000,00	20.094.095.000,00	17.079.980.750,00	14.517.983.637,50	12.340.286.091,88	10.489.243.178,09
-	Belanja Bantuan Sosial	22,99	2.800.000.000,00	6.018.000.000,00	6.018.000.000,00	6.018.000.000,00	6.018.000.000,00	6.018.000.000,00
-	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9,48	3.109.856.198,70	2.200.000.000,00	3.358.644.694,60	3.627.336.270,16	3.917.523.171,78	4.230.925.025,52
-	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa	4,17	149.084.961.635,00	168.239.998.700,00	171.604.798.674,00	175.036.894.647,48	178.537.632.540,43	182.108.385.191,24
-	Belanja Tidak Terduga	15,38	1.300.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2	**BELANJA LANGSUNG**	2,84	**635.980.954.990,00**	**598.982.692.559,00**	**628.931.827.186,95**	**660.378.418.546,30**	**693.397.339.473,61**	**728.067.206.447,29**
-	Belanja Pegawai	5,82	73.831.751.873,00	80.542.076.862,00	84.569.180.705,10	88.797.639.740,36	93.237.521.727,37	97.899.397.813,74
-	Belanja Barang dan Jasa	0,83	258.838.834.438,00	217.822.291.922,00	228.713.406.518,10	240.149.076.844,01	252.156.530.686,21	264.764.357.220,52
-	Belanja Modal	3,82	303.310.368.679,00	300.618.323.775,00	315.649.239.963,75	331.431.701.961,94	348.003.287.060,03	365.403.451.413,04
C	**PEMBIAYAAN**							
1	Penerimaan Pembiayaan	-15,99	292.998.865.104,42	118.218.631.185,42	112.656.461.536,93	107.094.291.888,45	101.532.122.239,96	95.969.952.591,47
2	Pengeluaran Pembiayaan		5.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	18,97	53.487.535.001,82	65.775.145.131,42	38.500.394.927,31	52.118.589.035,43	66.755.664.536,72	100.058.053.675,77

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara, 2018 (diolah)

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembungunan jangka menengah selama 5 tahun ke depan. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat.

3.3.2.1 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)

Proyeksi SILPA sesuai Tabel III.14 berdasarkan pertumbuhan realisasi besaran SiLPA, sehingga direncanakan proyeksi nilai dan tingkat pertumbuhan SILPA tahun 2018-2023.

Tabel III.14
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

Uraian	Proyeksi					
	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya (SiLPA)	292.998.865.104,42	118.218.631.185,42	112.656.461.536,93	107.094.291.888,45	101.532.122.239,96	95.969.952.591,47

3.3.2.2 Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Meningkat

Proyeksi belanja pengeluaran wajib dan mengikat proyeksi tahun 2018 sampai dengan 2023 menggunakan data rata-rata pertumbuhan belanja wajib kurun waktu 2013-2017. Dengan asumsi terjadinya peningkatan pada pengeluaran wajib dan mengikat, terutama untuk belanja pegawai akibat adanya penerimaan CPNS dan meningkatnya anggaran untuk tambahan penghasilan serta asumsi peningkatan pada Alokasi Dana Desa/ Dana Desa. Hal ini ditunjukkan melalui Tabel III.15 berikut:

Tabel III.15
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

No.	Uraian	Proyeksi					
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
A	**Belanja Tidak Langsung**	**636.592.401.631,00**	**691.441.789.143,00**	**708.990.278.572,67**	**726.041.737.001,82**	**743.517.099.448,49**	**761.427.802.546,45**
1	Belanja Pegawai	484.397.583.797,30	521.001.790.443,00	534.026.835.204,08	547.377.506.084,18	561.061.943.736,28	575.088.492.329,69
2	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.109.856.198,70	2.200.000.000,00	3.358.644.694,60	3.627.336.270,16	3.917.523.171,78	4.230.925.025,52
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ kota dan Pemerintahan Desa*	149.084.961.635,00	168.239.998.700,00	171.604.798.674,00	175.036.894.647,48	178.537.632.540,43	182.108.385.191,24
B	**Pengeluaran Pembiayaan**	**5.250.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Penyertaan Modal	5.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Belanja Wajib Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama (A+B)	**641.842.401.631,00**	**691.441.789.143,00**	**708.990.278.572,67**	**726.041.737.001,82**	**743.517.099.448,49**	**761.427.802.546,45**

3.3.2.3 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), maka dapat diproyeksikan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kabupaten Barito Utara dalam terhitung tahun 2018 sampai dengan tahun 2023,

Dengan asumsi pengeluaran belanja daerah dari pengeluaran wajib dan mengikat yang cenderung meningkat (tabel III.15), namun diasumsikan juga terjadinya peningkatan pendapatan daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,6 persen, maka kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan untuk pembangunan daerah selama periode RPJMD diprediksi cenderung meningkat.

Kemampuan riil keuangan daerah untuk membiayai belanja langsung pada tahun 2018 sebesar Rp. 635.980.954.990,00 hingga pada tahun 2023 belanja langsung diproyeksikan menjadi sebesar Rp.728.067.206.447,29.

Kapasitas Riil dihitung menjumlahkan seluruh penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan, pencairan dana cadangan serta Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran dikurangi belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama, sebagaimana disajikan pada Tabel III.16 berikut:

Tabel III.16
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

No.	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Pendapatan	1.102.812.463.518,40	1.265.093.090.648,00	1.288.864.019.900,00	1.353.980.436.332,60	1.422.496.267.310,74	1.512.090.353.256,13
2.	Pencairan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	292.998.865.104,42	118.218.631.185,42	112.656.461.536,93	107.094.291.888,45	101.532.122.239,96	95.969.952.591,47
.	**Total Penerimaan (1+2+3)**	**1.395.811.328.622,82**	**1.383.311.721.833,42**	**1.401.520.481.436,93**	**1.461.074.728.221,05**	**1.524.028.389.550,70**	**1.608.060.305.847,60**
	Dikurangi :						
4.	Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	641.842.401.631,00	691.441.789.143,00	708.990.278.572,67	726.041.737.001,82	743.517.099.448,49	761.427.802.546,45
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**753.968.926.991,82**	**691.869.932.690,42**	**692.530.202.864,26**	**735.032.991.219,23**	**780.511.290.102,21**	**846.632.503.301,16**

Rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2018-2023 digambarkan dalam Tabel III.17 sebagai berikut :

Tabel III.17
Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

NO.	Uraian	Proyeksi					
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	**KAPASITAS RILL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**	753.968.926.991,82	691.869.932.690,42	692.530.202.864,26	735.032.991.219,23	780.511.290.102,21	846.632.503.301,16
2	**Rencana Alokasi Pengeluaran PRIORITAS I**						
2a	Belanja Langsung	635.980.954.990,00	598.982.692.559,00	628.931.827.186,95	660.378.418.546,30	693.397.339.473,61	728.067.206.447,29
2b	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dikurangi :						
2c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total rencana pengeluaran PRIORITAS I (2a+2b)-(2c)	**635.980.954.990,00**	**598.982.692.559,00**	**628.931.827.186,95**	**660.378.418.546,30**	**693.397.339.473,61**	**728.067.206.447,29**
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (1- Total Prioritas I)	117.987.972.001,82	92.887.240.131,42	63.598.375.677,31	74.654.572.672,93	87.113.950.628,60	118.565.296.853,87
3	**Rencana Alokasi Pengeluaran PRIORITAS II**						
3a	Belanja Tidak Langsung	701.092.838.631,00	718.553.884.143,00	734.088.259.322,67	748.577.720.639,32	763.875.385.540,36	779.935.045.724,54
	Dikurangi :						
3b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	641.842.401.631,00	691.441.789.143,00	708.990.278.572,67	726.041.737.001,82	743.517.099.448,49	761.427.802.546,45
	Total rencana pengeluaran PRIORITAS II (3a)-3b)	**59.250.437.000,00**	**27.112.095.000,00**	**25.097.980.750,00**	**22.535.983.637,50**	**20.358.286.091,88**	**18.507.243.178,09**
	Surplus anggaran (1-2-3)	**58.737.535.001,82**	**65.775.145.131,42**	**38.500.394.927,31**	**52.118.589.035,43**	**66.755.664.536,72**	**100.058.053.675,77**

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta isu strategis serta visi dan misi pembangunan jangka menengah yang telah dirumuskan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan langkah untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah yang didukung dengan arah kebijakan. Pembangunan jangka menengah daerah dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

Sebagai dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah perlu diketahui isu-isu strategis dan permasalahan-permasalahan pembangunan yang secara eksisting terjadi. Analisis permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting, sehingga, penyajian analisis ini akan menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Isu-isu strategis dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, hal tersebut dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu-isu strategis ini juga dapat digali berdasarkan berbagai analisis terhadap sesuatu persoalan atau dari berbagai permasalahan yang teridentifikasi pada proses penyusunan rencana itu dibuat.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Proses pembangunan akan sangat bergantung dengan apa yang dimiliki daerah tersebut sebagai modal dalam penyokong keberhasilan pembangunan. Namun pada perjalanannya pembangunan daerah juga kerap kali harus menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan dalam mencapai target-target pembangunan. Permasalahan tersebut baik yang

telah dan tengah berlangsung, ataupun permasalahan yang dapat terjadi pada masa yang akan datang. Permasalahan umum pembangunan di Kabupaten Barito Utara tersebar di berbagai bidang pemerintahan.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan realitas kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang telah direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Pemetaan masalah dalam pembangunan sangat diperlukan dalam proses penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih, yang kemudian akan menjadi salah satu input dalam merumuskan tujuan dan sasaran RPJMD. Identifikasi permasalah pembangunan tersebut didapatkan dari data serta informasi yang ada pada Gambaran Umum Daerah dan evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan yang difokuskan kepada masing-masing aspek dan urusan, serta berbagai keinginan dari para pemangku kepentingan, maka permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

4.1.1 Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur memiliki peran yang luas dan mencakup berbagai konteks dalam pembangunan wilayah, baik dalam konteks fisik-lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan konteks lainnya. Permasalahan infrastruktur di Kabupaten Barito Utara berkaitan dengan kualitas pelayanan infrastruktur yang tersedia dan kuantitas ketersediaan yang diperlukan kualitas pelayanan pada prasarana transportasi, jaringan irigasi, perumahan, air bersih, listrik dan teknologi telekomunikasi.

Masih belum optimalnya penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai untuk memberikan kemudahan/akses bagi masyarakat di pedesaan dan kecamatan dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Walaupun target infrastruktur jalan dan jembatan sampai dengan akhir tahun 2017 tercapai, namun secara komulatif kondisi tersebut masih kurang memadai, berdasarkan target panjang jalan dalam

kondisi baik pada periode tahun 2013-2017 sampai dengan Tahun 2017 sepanjang 360,87 Km (tabel II.44). Total panjang jalan kabupaten sepanjang 758,14 Km berarti proporsi jalan kondisi baik sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar 47,60%, masih ada 52,40% kondisi belum baik. Sampai tahun 2017 untuk panjang jalan yang dilalui roda empat dengan jenis permukaan aspal sepanjang 202,93 Km, dan permukaan tanah 306,69 Km (tabel II.47) dengan panjang jalan yang memiliki trotoar 9,09 Km (tabel II.45) menunjukkan masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan yang disediakan.

Belum optimalnya penyediaan prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman (jalan lingkungan, limbah, persampahan, sanitasi, air bersih dan rumah hunian yang layak) juga masih menjadi permasalahan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan jangkauan pelayanan pembangunan prasarana jalan lingkungan permukiman. Sedangkan untuk penyediaan air bersih juga masih merupakan permasalahan, karena pelayanan air bersih masih belum merata dan masih ditemukan beberapa wilayah yang kesulitan untuk ketersediaan air bersih terutama pada musim kemarau.

Selain itu Pengelolaan persampahan dan ruang terbuka hijau yang masih belum optimal karena penanganan persampahan masih sebatas diwilayah perkotaan dan belum mencakup seluruh wilayah Barito Utara serta ketersediaan armada pengangkut sampah masih sangat kurang. Untuk kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih perlu perhatian karena kurangnya tenaga pengelola RTH yang terampil.

Untuk mendukung sektor pertanian, infrastruktur jaringan irigasi, rawa dan pengairan masih belum optimal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan data jumlah/panjang irigasi yang dibangun/ditingkatkan sampai dengan tahun 2017 sepanjang 11.240 meter dari keseluruhan panjang jaringan irigasi tahun 2017 sepanjang 125.869 meter (tabel II.48). Walaupun demikian Persoalan-persoalan yang dihadapi untuk Peningkatan kualitas / kuantitas infrastruktur irigasi dan pengairan mengharuskan dilakukannya penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan secara bertahap.

Penyediaan sarana dan prasarana gedung pemerintah, fasilitas umum dan rumah ibadah yang masih kurang, hal ini terlihat saat ini gedung-gedung kantor pemerintah, fasilitas umum dan rumah ibadah yang kurang

representatif karena sebagian besar adalah bangunan-bangunan lama sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelayanan.

Walaupun di Barito Utara sudah terbangun dan beroperasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), namun berdasarkan data rumah tangga yang menggunakan listrik di Barito Utara hingga tahun 2017 adalah 25.938 rumah tangga (tabel II.92), kelistrikan masih belum bisa melayani kebutuhan keseluruhan rumah tangga di wilayah Barito Utara yang berjumlah 32.381 rumah tangga. Hal ini disebabkan karena masih belum tersedianya jaringan kelistrikan yang menjangkau seluruh kecamatan, desa/kelurahan di wilayah Barito Utara.

Masih belum optimalnya penataan kawasan permukiman kumuh, masih banyak rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Barito Utara, dan tingginya kebutuhan penyediaan rumah hunian yang layak bagi masyarakat masih merupakan permasalahan disektor perumahan. Berdasarkan data hingga tahun 2017 untuk rasio rumah tidak layak huni adalah 3,60 persen (tabel II.49).

Belum terpenuhinya sarana dan prasarana dan belum optimalnya kualitas layanan komunikasi dan informatika yang menjangkau seluruh wilayah Barito, hal ini disebabkan topografi dan wilayah Kabupaten Barito Utara yang sulit untuk dijangkau sehingga kesulitan terpenuhinya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, sehingga berdampak pada ketersediaan fasilitas penunjang informasi dan komunikasi yang masih terbatas terutama untuk wilayah perdesaan.

Kondisi sistem transportasi saat ini untuk melayani mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi, masih mengalami kendala terutama transportasi yang menghubungkan wilayah kecamatan, desa/kelurahan. Interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang,barang, maupun jasa. Kondisi pelayanan transportasi yang belum optimal, disebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, menurunnya jumlah penumpang angkutan umum dan kinerja dan pelayanan angkutan umum yang rendah. Selain itu kondisi jalan yang belum seluruhnya dalam kondisi baik, juga sangat berpengaruh terhadap pelayanan transportasi. Dalam

upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan, pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi system keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pembenahan regulasi di bidang keselamatan/keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, serta melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur yang memadai. Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesbilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat.

Belum selesainya proses penyelesaian Legislasi Raperda tentang RTRWK dan RDTRK masih merupakan persoalan daerah yang perlu perhatian khusus, yang akhirnya berdampak kepada masih belum merata, sinkron dan konsisten pembangunan dengan rencana tata ruang serta kinerja penataan ruang daerah terkendala dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta terhambatnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Penataan Ruang.

Pertanahan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan performa daerah yang baik. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan pertanahan yang baik. Permasalahan pengelolaan pertanahan yang kurang optimal akan berdampak pada performa wilayah, khususnya pada tidak optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah. Persentase luas lahan bersertifikat hingga tahun 2017 berkisar 0,09 persen (tabel II.62). Permasalahan pengelolaan tanah adalah masih tingginya kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah daerah dan masih tingginya konflik pertanahan yang terjadi.

Bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan dan tanah longsor merupakan bencana yang kerap kali menimpa di Kabupaten Barito Utara. Karena sebagian besar permukiman penduduk terletak di bantaran DAS Barito dan berbatasan langsung dengan hutan sehingga bencana banjir merupakan ancaman yang harus diwaspadai, sedangkan kebakaran hutan dan lahan juga sering terjadi terutama pada musim kemarau yang berakibat munculnya bencana kabut asap. Sedangkan pada saat intensitas hujan cukup tinggi kerap

kali juga terjadi tanah longsor pada beberapa wilayah. Berdasarkan data pada tahun 2017 tercatat bencana kebakaran sebanyak 17 kejadian, banjir terjadi 5 kali dalam setahun, dan tanah longsor 2 kali kejadian (tabel II.50).

Kegiatan penanggulangan bencana masih belum berorientasi pada mitigasi bencana: identifikasi, kajian dan pemantauan risiko bencana serta penetapan sistem peringatan dini masih kurang. Upaya penanggulangan bencana dititikberatkan pada pencegahan atau pengurangan risiko diharapkan dapat lebih efektif daripada respon terhadap bencana. Permasalahan dalam penanggulangan bencana antara lain: belum terintegrasi penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan, membangun sistem penanggulangan bencana yang handal melalui kelembagaan yang kuat, pendanaan yang memadai dan membangun masyarakat yang tangguh/tahan dalam menghadapi bencana.

Salah satu upaya mitigasi non struktural adalah dengan regulasi dan kegiatan peningkatkan kapasitas masyarakat dengan pembentukan desa tangguh bencana. Upaya mitigasi struktural adalah dengan pemenuhan sarana prasarana penanggulangan bencana seperti peringatan dini, dan peralatan penanganan bencana. Namun demikian desa tangguh bencana yang telah terbentuk belum seluruhnya memenuhi kriteria utama, hal ini mengakibatkan kejadian bencana masih menimbulkan resiko yang tinggi.

Tabel IV.1.
Analisis Permasalahan Infrastruktur Wilayah

AKAR PERMASALAHAN		PERMASALAHAN	MASALAH POKOK
Masih belum optimalnya penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan	Belum optimalnya pelayanan infrastruktur	Belum optimalnya pelayanan infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah	**Belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah**
Belum optimalnya penyediaan prasarana, prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman (jalan lingkungan, limbah, persampahan, sanitasi, air bersih dan rumah hunian yang layak)			
Kualitas dan kuantitas infrastruktur jaringan irigasi, rawa dan pengairan masih belum optimal			
kurangnya fasilitas perlengkapan jalan yang disediakan.			
sarana dan prasarana gedung pemerintah, fasilitas umum dan rumah ibadah yang masih kurang			

AKAR PERMASALAHAN		PERMASALAHAN	MASALAH POKOK
masih belum tersedianya jaringan kelistrikan yang menjangkau seluruh kecamatan, desa/kelurahan			
Belum optimalnya penyediaan perumahan dan permukiman yang berkualitas			
Belum terpenuhinya sarana dan prasarana dan belum optimalnya kualitas layanan komunikasi dan informatika yang menjangkau seluruh wilayah Barito			
Belum selesainya proses penyelesaian Legislasi Raperda tentang RTRWK dan RDTRK	Belum optimalnya pengelolaan pertanahan dan tata ruang		
pengelolaan pertanahan yang kurang optimal			
pelayanan transportasi yang belum optimal	Konektivitas antar wilayah masih belum optimal		
kondisi jalan yang belum seluruhnya dalam kondisi baik			
Penduduk masih bermukim di daerah yang rawan bencana (banjir,karhutla, tanah longsor)	Resiko terjadinya bencana masih ada		
Sumber daya penanggulangan bencana masih kurang			

4.1.2 Pendidikan

Dalam rangka upaya mewujudkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang optimal (Tahun 2017 sebesar 69,07) meskipun nilai IPM dari tahun 2013-2017 cenderung selalu terjadi peningkatan (tabel II.8), diharapkan pendidikan dapat memberikan dukungan yang lebih baik. Saat ini, pendidikan memiliki berberapa permasalahan yang kompleks, antara lain:

a. Masih rendahnya APK dan APM pada semua jenjang pendidikan;

Belum semua anak usia PAUD di Kabupaten Barito Utara yang memperoleh layanan pendidikan, sebagaimana ditunjukkan dengan capaian APK PAUD pada tahun 2013-2017 (tabel II.23). Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah masih terbatasnya jumlah sekolah PAUD di Kabupaten Barito Utara yaitu 5 TK Negeri, 128 TK Swasta dan 64 KB Swasta. Sehingga jumlah sekolah PAUD dan kualitas penyelenggaraan PAUD pun masih harus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan akses layanan kepada semua anak usia PAUD di Kabupaten Barito Utara.

Pelayanan pendidikan dasar di Kabupaten Barito Utara belum maksimal, meskipun capaian APK SD pada tahun 2013-2016 telah di atas 100%, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2017, sedangkan capaian APK SMP juga masih di bawah 100%. Dari sisi lainnya capaian APM SD dan SMP pun masih di bawah 100% (tabel II.23).

Belum semua anak usia 16-18 tahun di Kabupaten Barito Utara yang memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, yaitu ditunjukkan pada Capaian APK SMA/SMK/MA yang masih rendah pada tahun 2013, 2014 dan 2017, meskipun capaian APK SMA/SMK/MA tahun 2014 dan 2016 bisa di atas 100%, akan tetapi menurun kembali pada tahun 2017 (tabel II.23). Selain itu sejak tahun 2017 bahwa urusan pendidikan menengah SMA/SMK/MA menjadi wewenang Pemerintah Provinsi.

Masih rendahnya APK dan APM pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Barito Utara itu dapat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain : tingkat pendidikan orang tua yang masih rendah, kesadaran dan motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak juga masih rendah, faktor ekonomi dan mata pencaharian orang tua, serta kondisi geografis wilayah Kabupaten Barito Utara yang berbukit dan banyak sungai.

b. Belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana prasarana pendidikan;

Sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Barito Utara masih kurang dan belum optimal, misalnya buku-buku referensi guru dan siswa masih kurang karena sebagian buku-buku yang tersedia adalah kurikulum lama sehingga belum sesuai dengan kurikulum yang baru yaitu kurikulum 2013 atau K13, alat peraga dan media pembelajaran sebagai bahan penunjang proses belajar mengajar juga belum cukup tersedia untuk semua jenjang pendidikan.

Adapun kondisi bangunan sekolah di Kabupaten Barito Utara untuk jenjang pendidikan dasar pada tahun 2017 yaitu SD kondisi baik sebanyak 146 unit dari 174 unit atau sebesar 83,91% sisanya 28 unit SD kondisi rusak atau sebesar 16,09%. Sedangkan jumlah SMP kondisi baik sebanyak 31 unit dari 39 unit atau sebesar 79,49% sisanya 8 unit SMP kondisi rusak atau sebesar 20,51% (tabel II.28).

Jumlah sekolah jenjang pendidikan dasar yang memiliki ruang perpustakaan yaitu SD yang sudah ada ruang perpustakaan sebanyak 140 sekolah dari 174 sekolah atau sebesar 80,46% sisanya 34 SD tidak ada ruang perpustakaan atau sebesar 19,54%. Sedangkan jumlah SMP yang sudah ada ruang perpustakaan sebanyak 31 sekolah dari 39 sekolah atau sebesar 79,49% sisanya 8 SMP tidak ada ruang perpustakaan atau sebesar 20,51% (tabel II.28).

Jumlah SMP yang mempunyai ruang Laboratorium pun masih terbatas, yaitu SMP yang sudah ada ruang laboratorium IPA sebanyak 25 sekolah dari 39 sekolah atau sebesar 64,10%; SMP yang sudah ada ruang laboratorium Bahasa sebanyak 3 sekolah saja dari 39 sekolah atau sebesar 7,69% dan SMP yang sudah ada ruang laboratorium Komputer sebanyak 10 sekolah dari 39 sekolah atau sebesar 25,64% akan tetapi baru 6 sekolah saja yang sudah ada peralatan komputernya (tabel II.28).

c. Jumlah maupun kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang;

Kondisi distribusi guru yang belum merata di Kabupaten Barito Utara tidak dapat semata-mata hanya dilihat dari rasio pendidik terhadap siswa yang telah baik/memadai, karena jumlah guru tersebut merupakan jumlah Guru PNS + Guru Tidak Tetap (GTT). Di sisi lain, proses rekrutmen guru PNS tidak serta merta disetujui dan/atau diberikan formasi CPNS Guru oleh Pemerintah Pusat meskipun Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah mengusulkan formasi CPNS Guru sesuai jumlah kekurangan guru di Kabupaten Barito Utara. Sementara itu untuk pemenuhan kekurangan guru di desa-desa, masing-masing sekolah merekrut Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara pun telah memberikan insentif atau honorarium yang dianggarkan pada APBD.

Faktor yang mempengaruhi jumlah dan kualitas guru yang masih rendah antara lain : penempatan guru yang tidak merata antar desa, antar kecamatan karena adanya guru bersertifikasi yang sulit dipindahkan sebab akan kehilangan beban mengajar dan tunjangan profesi (sertifikasi guru); dan juga masih terdapat guru yang belum

berijazah kualifikasi S1 (Sarjana) karena rata-rata sudah tua sehingga tidak ada motivasi untuk melanjutkan studi ke jenjang S1/D-IV. Masih terdapat Guru PNS jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) yang belum berijazah kualifikasi S1/D-IV sebanyak 159 orang atau sebesar 9,39% dari jumlah total 1.535 orang (tabel II.31).

d. Masih adanya masyarakat usia produktif yang belum melek huruf;

Angka melek huruf yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada tahun 2013-2017 secara persentase dapat menurunkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta aksara atau buta huruf sedikit demi sedikit (tabel II.14). Dari data angka melek huruf terdapat penurunan capaian dari tahun 2015 semula pada angka 98,25% menjadi 93,86% pada tahun 2016 . Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi antara lain : terbatasnya kemampuan tenaga penyelenggara program pendidikan non formal (Paket A, B, C), kurangnya motivasi penduduk usia >15 tahun untuk mengikuti pendidikan non formal (Paket A, B, C), jenis pekerjaan/mata pencaharian, kondisi geografis, dan jauhnya jarak tempat tinggal menjadi kendala dalam mempercepat pengentasan buta aksara atau buta huruf.

e. Masih rendahnya kunjungan ke perpustakaan;

Minat kunjungan masyarakat ke perpustakaan yang masih rendah (tabel II.82), Kondisi masih rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana yang layak, serta aktivitas/kegiatan/event yang mendukung minat kunjungan masyarakat kunjungan perpuspustakan, tentu akan menghasilkan peningkatan kapasitas pada aspek minat baca masyarakat, baik melalui layanan perpustakaan klasik maupun digital, baik perpustakaan di kabupaten, di kecamatan, di satuan pendidikan dan tempat khusus lainnya. Sehingga masih diperlukan upaya-upaya yang inovatif agar tingkat kunjungan ke perpustakaan meningkat.

f. Masih rendahnya prestasi pemuda dan olah raga.

Pembangunan di bidang kepemudaan mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral,

kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan urusan kepemudaan masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yaitu antara lain masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan, belum optimalnya pengembangan potensi pemuda dalam kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan untuk mendorong kemandirian pemuda dan pemudi di daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan urusan olahraga dan prestasi bidang olahraga masih dihadapkan pada permasalahan-permasalah yakni belum optimalnya upaya pembinaan keolahragaan daerah. Terutama pengembangan konsep pembinaan keolahragaan secara luas melalui upaya-upaya yang diharapkan dapat mendorong pencapaian prestasi olah raga daerah yang gemilang, baik dalam pencapaian prestasi pada cabang-cabang olah raga prestasi dan olah raga tradisional di tingkat lokal, propinsi dan Nasional serta terbatasnya sarana dan prasarana olahraga yang representatif. Hal ini berdampak kepada masih rendahnya capaian prestasi pemuda dan olah raga. Melihat permasalahan tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga untuk menjadi yang terbaik di Kalimantan Tengah.

Dari beberapa aspek di atas, bahwa upaya meningkatkan kapasitas di atas bertujuan agar adanya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dan prestasi generasi muda, sehingga dalam menghadapi tantangan global, baik dari urusan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan serta perpustakaan optimal. Masyarakat dimaksud tidak hanya usia sekolah (PAUD 0- 6 tahun, SD 7-12 tahun, SMP 13-15 tahun, maupun SMA/SMK 16-18 tahun), namun termasuk mereka yang mengikuti pendidikan non formal, kelompok pemuda, cabang olahraga, maupun kelompok masyarakat lainnya. Generasi muda berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, bahwa pemuda adalah warga yang berusia 16-30 tahun, tentu menjadi perhatian yang sama. Dampak atas peningkatan kapasitas di atas, bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Barito Utara akan lebih kompetitif seiring akan tumbuh dan berkembangnya Barito Utara.

Tabel IV.2.
Analisis Permasalahan Pendidikan

AKAR PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	MASALAH POKOK
Masih rendahnya APK dan APM pada semua jenjang pendidikan	Masih rendahnya kualitas Pendidikan masyarakat dan prestasi generasi muda	**Sumber Daya Manusia belum kompetitif**
Belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana prasarana pendidikan		
Jumlah maupun kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang		
Masih adanya masyarakat usia produktif yang belum melek huruf		
Masih rendahnya kunjungan ke perpustakaan		
Masih rendahnya prestasi pemuda dan olah raga		

4.1.3 Kebudayaan

Kebudayaan memiliki arti hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat dan setiap kecakapan, dan kebiasaan. Kebudayaan yang ada di Kabupaten Barito Utara sangat beragam. Keberadaan kebudayaan lokal saat ini semakin terkikis oleh kebudayaan modern hal ini berdampak kepada belum optimalnya pelestarian budaya lokal, begitu pula dengan benda-benda peninggalan sejarah yang sarat akan nilai-nilai luhur serta cagar budaya yang ada saat ini belum dikelola dengan baik.

Untuk mendukung terbentuknya karakter Sumber Daya Manusia yang berbudaya maka diperlukan perhatian terhadap upaya-upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu belum optimalnya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya permasalahan tersebut terjadi karena dengan berbagai macam jenis dan kelompok kesenian yang ada, baru beberapa yang bisa menjadi unggulan dan kelompok yang aktif sangat tergantung pada dukungan pemerintah. Implementasi nilai-nilai luhur budaya belum sepenuhnya menjadi perhatian dari masyarakat. Diperlukan dukungan dari lintas sektor untuk bisa mengimplementasikan hal tersebut.

Selain itu lemahnya perlindungan hukum atas kekayaan budaya menjadi permasalahan tersendiri. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, masih kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi terhadap pelestarian dan perlindungan

cagar budaya akan mempersulit tercapainya upaya pembentukan karakter masyarakat yang berbudaya. Dalam hal pelaksanaan event-event adat dan budaya daerah dari sisi pelaksanaan juga belum terkoordinir dengan baik. Dari permasalahan tersebut di atas maka perlu diambil langkah-langkah ke depan agar peningkatan kualitas SDM dapat tercapai.

Tabel IV.3.
Analisis Permasalahan Kebudayaan

AKAR PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	MASALAH POKOK
belum optimalnya pelestarian budaya lokal	Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan seni dan kekayaan budaya	**Sumber Daya Manusia belum kompetitif**
belum optimalnya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya		
pengelolaan benda-benda peninggalan sejarah yang sarat akan nilai-nilai luhur dan pengelolaan cagar budaya yang belum optimal		
lemahnya perlindungan hukum atas kekayaan budaya		
Belum terkoordinir dengan baik pelaksaa *event-event* adat dan budaya daerah		

4.1.4 Kesehatan

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu wilayah, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Permasalahan kesehatan yang diukur dengan tiga indikator yang merupakan gambaran dari keadaan derajat kesehatan masyarakat, yakni :

a. angka harapan hidup;
b. angka kematian ibu; dan
c. angka kematian bayi;

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian derajat kesehatan masyarakat adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup atau life expectancy rate merupakan suatu ukuran yang menyatakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Pada tahun 2016, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Barito Utara mencapai 71,26 tahun, naik 0,35 persen dibanding tahun 2015 yang mencapai 71,01 tahun. Angka harapan hidup tersebut berarti bahwa bayi yang lahir pada tahun 2015 diestimasi dapat hidup hingga 71 tahun lagi, sementara bayi yang lahir pada tahun 2016 diestimasi dapat hidup hingga 71 atau 72 tahun lagi. Sedangkan Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Utara pada tahun 2017 yaitu 71,27 sudah cukup tinggi merupakan urutan kedua se Kalimantan Tengah dan masih lebih tinggi dari rata-rata AHH Kalimantan Tengah yaitu 69,59 (tabel II.16).

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia menurut Survei demografi Kesehatan Indonesia Tahun 2012 adalah 32 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi di Kabupaten Barito Utara menurut laporan pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara pada tahun 2017 sebanyak 7 kasus dari 2339 kelahiran hidup (KH) di Kabupaten Barito Utara atau sebesar 3/1000 Kelahiran Hidup (KH), (tabel II.32). Sampai dengan September 2018 tercatat ada 2 kasus kematian bayi.

Penyebab utama kematian di kabupaten Barito Utara yaitu Bayi Lahir dengan berat badan rendah (BBLR). Bayi Berat badan Lahir Rendah adalah bayi yang lahir dengan berat badan < 2500 gram. Kasus Bayi Lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah merupakan penyumbang utama kematian bayi di Indonesia karena bayi BBLR sangat rentan terhadap infeksi. Upaya yang terus dilakukan untuk menurunk anangka kematian bayi ini antara lain dengan meningkatkan promosi kesehatan tentang pemeriksaan kehamilan secara berkala kepada petugas kesehatan, peningkatan ketrampilan bidan dalam penanganan bayi baru lahir serta peningkatan fasilitas kesehatan khususnya dalam hal kelengkapan peralatan untuk pertolongan persalinan dan bayi baru lahir. Selain melakukan intervensi di wilayah pasca kelahiran dinas kesehatan Kabupaten Barito Utara juga berupaya meminimalisir penyebab lahirnya bayi BBLR yaitu dengan melakukan intervensi pada remaja putri untuk persiapan menjadi seorang ibu serta memantau kesehatan ibu hamil melalui pemeriksaan ibu hamil sesuai standar.

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan.Angka kematian Ibu (AKI) merupakan indikator utama dalam program kesehatan ibu dan anak.

Angka kematian ibu di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Berdasarkan data SDKI tahun 1991-2012, selama periode tahun 1991-2007 angka kematian ibu mengalami penurunan dari 390 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup. AKI di Indonesia menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup, meningkat dibandingkan hasil SDKI tahun 2007 sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup. Kementerian Kesehatan telah menetapkan target angka kematian ibu untuk tahun 2019 yaitu 306 per 100.000 kelahiran hidup.

Di Kabupaten Barito Utara jumlah kematian ibu sejak lima tahun terakhir juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 terdapat 3 kasus kematian

ibu dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 5 kasus kematian ibu. Jumlah kematian ibu tersebut turun lagi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 1 kasus dan meningkat kembali pada tahun 2016 sebanyak 6 kasus kematian. Pada tahun 2017 terdapat 6 kasus kematian ibu di Kabupaten Barito Utara (tabel II.33), dan sampai dengan bulan september 2018 tercatat ada 1 kasus kematian ibu. Meskipun angka tersebut cukup kecil bila dibandingkan dengan angka nasional permasalahan kematian ibu harus tetap menjadi perhatian mengingat angkanya yang berfluktuatif beberapa tahun terakhir. Ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup untuk memberi pelayanan, pemberian pelayanan yang sesuai standar, sarana dan prasarana pendukung yang lengkap serta pemantauan ibu hamil secara berkala serta mekanisme rujukan yang baik tetap harus dilaksanakan untuk keselamatan ibu dan bayi.

Berdasarkan data hasil survei pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2015-2017 persentase balita stunting di Kabupaten Barito Utara mengalami peningkatan selama tuga tahun berturut-turut. Pada tahun 2015 menurut hasil survei terdapat 27,4 % balita stunting, pada tahun 2016 terdapat 36,8 % dan pada tahun 2017 terdapat 37,2 % balita stunting. Barito Utara merupakan salah satu kabupaten dari 9 Kabupaten di Propinsi kalimatan Tengah dengan persentase stunting yang terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Oleh karena itu masalah balita pendek (stunting) ini perlu mendapat perhatian serius mengingat dampaknya yang besar untuk masa depan generasi penerus bangsa. Berbagai kegiatan terus digalakkan dalam rangka pencegahan stunting melalui upaya promotif dan preventif diantaranya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya gizi 1000 hari pertama kehidupan yaitu dari ibu hamil sampai bayi berusia 2 tahun, pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil dan anak balita, penyehatan lingkungan serta pemantauan pertumbuhan dan pemberian makanan tambahan pada anak dengan status gizi kurus dan ibu hamil kurang energi kronik

Sehingga dengan masih terdapat kematian ibu dan kematian bayi (tabel II.33) serta meningkatnya persentase stunting di Kabupaten Barito Utara menjadikan derajat kesehatan masyarakat belum optimal. Keadaan derajat kesehatan yang belum optimal ini disebabkan oleh beberapa aspek penting, yakni :

4.1.4.1 masih rendahnya kualitas kesehatan keluarga

Permasalahan ini disebabkan antara lain masih kurangnya praktek penerapan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di rumah tangga, praktek pengasuhan yang tidak baik yang menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting, kurangnya akses ke makanan bergizi untuk pemenuhan nutrisi keluarga, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi, kurangnya pemanfaatan posyandu oleh masyarakat sebagai tempat pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, kurangnya pemanfaatan fasilitas kesehatan yang tersedia oleh masyarakat karena terdapat kebiasaan mengobati diri sendiri dengan obat yang dijual dipasaran, serta masih kurang aktivitas fisik atau olahraga yang dilakukan keluarga juga berpengaruh terhadap taraf kesehatan seseorang. Sedangkan hal utama yang paling berpengaruh rendahnya kualitas kesehatan keluarga yaitu edukasi pengetahuan kesehatan masyarakat yang masih kurang literasi kesehatan. Edukasi Kesehatan merupakan kegiatan upaya meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat paling sedikit mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat, mencegah timbulnya kembali penyakit dan memulihkan penyakit.

Namun berdasarkan data Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) yaitu Cakupan Imunisasi Tahun 2013-2017 (tabel II.40), dapat dilihat bahwa untuk program imunisasi Di Barito Utara mengalami peningkatan dalam pencapaian UCI desa dari tahun 2013 sampai 2017 sesuai dengan target Nasional tiap tahunnya. Peningkatan Cakupan Imunisasi tersebut di dasarkan pada salah satunya meningkatnya Kesadaran Orang tua dalam memberikan Imunisasi kepada anaknya, dan meningkatnya pengetahuan orangtua tentang imunisasi.

4.1.4.2 belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta jaminan kesehatan atau pembiayaan kesehatan

Masih kurangnya sarana prasarana pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Dokter Praktek Perorangan, Klinik Pratama, RS Kelas D dan Dokter Gigi), Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit dan Klinik Utama), serta fasilitas kesehatan penunjang seperti apotek dan optik yang tersebar di seluruh Kabupaten Barito Utara bekerjasama dengan BPJS

Kesehatan berakibat pada belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana sesuai Permenkes RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas dan belum optimalnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan untuk Rumah Sakit dan juga belum semua Fasilitas Kesehatan terakreditasi.

Hal lain yang tidak kalah penting pengaruhnya yaitu masih kurangnya tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan (Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes) menyesuaikan Permenkes RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.

Sementara, masih kurangnya akses Pelayanan Antenatal Care Ibu hamil post natal dan pembelajaran dini yang berkualitas kepada ibu hamil berdampak kepada belum optimal terbatasnya pelayanan kesehatan. Antenatal care (ANC) yaitu pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh dokter atau bidan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik dari ibu hamil untuk menghindari resiko komplikasi pada kehamilan dan persalinan serta mempersiapkan ibu untuk masa nifas dan pemberian ASI eksklusif. Sementara, akses pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan juga masih rendah

Hal lain yang berpengaruh yaitu rendahnya persentase pelayanan kesehatan bagi Penderita Penyakit Tidak Menular (Diabetes Militus dan Hipertensi), rendahnya persentase pelayanan kesehatan sesuai standar bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, rendahnya jumlah peserta mandiri BPJS, belum semua peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesmas yang ditanggung Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan data cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Positif, upaya penanggulangan penyakit TB Paru di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2013 – 2017 (tabel II.42) masih perlu ditingkatkan. Dilihat secara prosentase (BTA + dan rontgen) terjadi secara fluktuatif. Penurunan prosentase terjadi pada tahun 2014 yang menurun dibandingkan tahun 2013 yaitu dari 78% menjadi 76%. Penurunan ini terjadi karena adanya peningkatan target cakupan penderita TB paru dari 254 menjadi 269 (Kemenkes RI). Pada tahun berikutnya 2015 s/d 2017, terjadi peningkatan prosentase cakupan penderita TB. Peningkatan prosentase ini harus senantiasa diiringi dengan peningkatan pelayanan TB di seluruh fasilitas kesehatan

Kabupaten Barito Utara dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan penularan penyakit TB.

4.1.4.3 belum optimalnya ketahanan keluarga

Beberapa hal yang berpengaruh kepada ketahanan keluarga antara lain disebabkan oleh komunikasi yang rendah dalam keluarga sehingga kedekatan antara anggota keluarga semakin renggang. Belum optimalnya advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) serta penguatan kelembagaan program kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi seperti belum tersedianya data akurat mengenai kependudukan, KB dan pembangunan keluarga meliputi data-data basis terkait jumlah PUS, jumlah Akseptor, jumlah Keluarga Sejahtera dan Pra Sejahtera I dan Data lain yang mendukung. Hal ini juga menjadi penyebab belum optimalnya ketahanan keluarga yang dari sisi akses dan kualitas sangat masih kurang. Beberapa indikator rendahnya ketahanan keluarga antara lain berdasarkan jumlah persalinan remaja dan tingginya jumlah perceraian.

4.1.4.4 belum optimalnya penerapan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga

Belum sepenuhnya kebijakan tentang kesehatan kerja dan Kesehatan olahraga didukung oleh para pemangku kepentingan terkait (stakeholder). Dalam implementasinya masih dijumpai kendala karena belum mendapatkan informasi dan pemahaman serta munculnya kesadaran secara utuh mengenai program kesehatan kerja dan olahraga. Dan juga masih adanya ego sektoral pada lembaga/kementerian/pemerintah daerah sehingga kebijakan, program dan kegiatan disusun dan dilaksanakan secara parsial, tidak efektif dan efisien. Untuk itu, upaya koordinasi dan harmonisasi perlu ditingkatkan.

Kesehatan kerja dan kesehatan olahraga dianggap membutuhkan biaya tinggi karena outcome seringkali tidak terlihat atau tidak dapat secara langsung dirasakan. Oleh karenanya, diperlukan advokasi dan sosialisasi secara luas. Terbatasnya SDM untuk melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dan olahraga di tingkat kabupaten/kota, di perusahaan dan Puskesmas. Untuk itu, perlu peningkatan koordinasi, kolaborasi dan kemitraan di antara lintas program, lintas sektor terkait serta upaya kesehatan kerja dan olahraga pada sektor

informal belum berjalan dengan baik dibandingkan di sektor formal, padahal jumlah masyarakat pekerja di sektor informal lebih besar. Hal ini berdampak juga kepada derajat kesehatan masyarakat.

Tabel IV.4.
Analisis Permasalahan Kesehatan

AKAR PERMASALAHAN		PERMASALAHAN	MASALAH POKOK
kurangnya praktek penerapan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di rumah tangga	masih rendahnya kualitas kesehatan keluarga	Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat	**SDM belum kompetitif**
praktek pengasuhan yang tidak baik			
kurangnya akses ke makanan bergizi untuk pemenuhan nutrisi keluarga			
kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi,			
kurangnya pemanfaatan posyandu oleh masyarakat			
kurangnya pemanfaatan fasilitas kesehatan yang tersedia oleh masyarakat			
kurang aktivitas fisik atau olahraga yang dilakukan keluarga			
edukasi pengetahuan kesehatan masyarakat yang masih kurang literasi kesehatan			
Masih kurangnya sarana prasarana Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Faskes rujukan tingkat lanjutan, serta faskes penunjang	belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta jaminan kesehatan atau pembiayaan kesehatan		
belum semua Fasilitas Kesehatan terakreditasi.			
kurangnya akses Pelayanan *Antenatal Care* Ibu hamil post natal dan pembelajaran dini yang berkualitas kepada ibu hamil			
akses pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan juga masih rendah			
rendahnya persentase pelayanan kesehatan bagi Penderita Penyakit Tidak Menular			
rendahnya persentase pelayanan kesehatan sesuai standar bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat			
rendahnya jumlah peserta mandiri BPJS			

AKAR PERMASALAHAN		PERMASALAHAN	MASALAH POKOK
belum semua peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesmas yang ditanggung Pemerintah Daerah			
Belum optimalnya pelayanan TB di seluruh fasilitas kesehatan			
Masih kurangnya kualitas dan akses kepada pelayanan KB dan KR	belum optimalnya ketahanan keluarga		
Belum optimalnya advokasi dan KIE serta penguatan kelembagaan program kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi			
Belum sepenuhnya kebijakan tentang kesehatan kerja dan Kesehatan olahraga didukung oleh para pemangku kepentingan terkait (stakeholder).	belum optimalnya penerapan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga		
Kurangnya advokasi dan sosialisasi mengenai kesehatan kerja dan Kesehatan olahraga			
Terbatasnya SDM untuk melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dan olahraga			
kesehatan kerja dan olahraga pada sektor informal belum berjalan dengan baik			

4.1.5 Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan dan pemerataan merupakan kondisi yang dapat digambarkan dengan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan gini rasio (tabel II.11). Laju pertumbuhan ekonomi Barito Utara pada tahun 2017 sebesar 6,01 persen apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata di Kalimantan Tengah tahun 2017 yaitu 6,74 persen, Kabupaten Barito Utara masih berada di bawah provinsi (tabel II.8).

Sementara itu persentase penduduk miskin Kabupaten Barito Utara dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 secara umum semakin kecil (tabel II.12). Sedangkan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, tingkat kemiskinan di Kabupaten Barito Utara tahun 2016-2017 masih lebih rendah dibandingkan Kalimantan Tengah.

Program prioritas nasional untuk penanganan masalah kemiskinan yang bersumber dari dana APBN yang berasal dari Kementerian Sosial RI yang ada di

Kabupaten Barito Utara adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut dimulai sejak tahun 2014 dengan kouta yang didapat oleh Kabupaten Barito Utara adalah untuk 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Teweh Tengah dan Kecamatan Teweh Timur. Tahun 2015 Pengembangan Lokasi Kecamatan penerima PKH di Kabupaten Barito Utara bertambah 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Teweh Baru, Kecamatan Teweh Selatan, Kecamatan Montallat dan Kecamatan Gunung Timang. Selanjutnya pada tahun 2016 bertambah lagi 1 Kecamatan, yaitu Kecamatan Gunung Purei. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima PKH setiap tahunnya mengalami peningkatan, yang mana jumlah keseluruhan KPM penerima PKH tahun 2017 berjumlah 1.576 KPM.

Di Kabupaten Barito Utara perkembangan Rasio Gini dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan, jika dibandingkan dibandingkan dengan Rasio Gini Kalimantan Tengah maupun Nasional, Gini Rasio Kabupaten Barito Utara masih dibawahnya (tabel II.11). Hal tersebut menggambarkan kondisi ketimpangan antar penduduk di Kabupaten Barito Utara masih relatif lebih baik dibandingkan dengan Kalimantan Tengah dan nasional. Sehingga rasio gini Kabupaten Barito Utara masih berada pada kisaran ketimpangan rendah (rendah bila gini rasio kurang dari 0,4 ; sedang/moderat bila gini rasio antara 0,4-0,5; tinggi bila gini rasio lebih dari 0,5).

Pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Barito Utara mempunyai nilai kategori sedang jika dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Tengah. PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 sebesar 8.266,44 milyar rupiah dibandingkan tahun 2016 yang besarnya mencapai 7.358,69 milyar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2017 sebesar 6.369,56 milyar rupiah.

Pengangguran terbuka di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan trend kenaikan, tahun 2017 pengangguran terbuka mencapai 3.304 jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun 2013-2017 hampir tetap berkisar pada 0,15 persen (tabel II.18).

Permasalahan Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Barito Utara terkait dengan beberapa aspek penting sebagai penyebabnya yaitu:

4.1.5.1 Belum optimalnya produksi pertanian, peternakan dan perkebunan

Pada dasarnya proses pembangunan pertanian tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan produk semata, akan tetapi secara bersamaan kegiatan pertanian adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, sekaligus dalam upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat di pedesaan. Mengingat bahwa komoditi padi memegang peranan yang sangat strategis sebagai sumber bahan pangan pokok masyarakat Indonesia pada umumnya, maka arah utama kebijakan pembangunan pertanian adalah meraih swasembada beras secara berkelanjutan. Namun demikian persoalan pokok adalah masih rendahnya produksi padi yang dicapai karena belum optimalnya pemberdayaan lahan potensial dan rendahnya produktivitas yaitu rata-rata 25,41 Ku/Ha atau lebih rendah dari produktivitas padi tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yaitu 32,10 Ku/Ha.

Rendahnya produktivitas padi ini, disamping masih belum optimalnya penerapan rekomendasi pola tanam intensifikasi dan dukungan sarana prasarana penunjang seperti jaringan pengairan, juga secara matematis tidak terlepas dari konsekuensi angka produktivitas padi berdasarkan hasil konversi atau kompilasi hasil dari angka produktivitas padi sawah yang luas tanamnya lebih kecil yaitu rata-rata 2.820 Ha/tahun dan angka produktivitas padi ladang dengan luasnya lebih besar dari padi sawah yaitu rata-rata 10.109 Ha/tahun tetapi produktivitasnya memang masih rendah karena beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya: cuaca, serangan hama, teknologi tepat guna dan SDM yang kurang memadai. Selain padi, komoditas pertanian tanaman pangan yang mempunyai peran penting dan nilai tambah yang cukup tinggi adalah jagung kedelai sebagai bahan baku pakan ternak atau ikan. Namun demikian kuantitas dan kwalitas produksi serta produktivitasnya pun masih rendah.

Belum efektifnya sarana dan prasarana pertanian dalam menunjang produktivitas adalah juga permasalahan yang ditemukan untuk meningkatkan produksi pertanian yaitu masalah biaya operasional beberapa alat dan mesin utama pertanian yang sangat besar untuk membuka lahan. Beberapa sarana

dan prasarana yang masih belum memadai salah satunya seperti: kesulitan penggadaan bibit yang bersertifikasi, fluktuasi harga bibit terutama jenis unggas dan harga pakan yang terus naik, kurangnya saprodi dengan kebutuhan yang diperlukan, penambahan luas tanam/PATB belum didukung peralatan alat berat yang seimbang antara penambahan luasan dengan alat, beberapa lumbung, embung, DAM parit, dan Jalan Usaha Tani (JUT) yang masih belum memadai.

Pada bidang usaha peternakan skala usaha dan produksi yang dihasilkan masih rendah dan kurang kompetitif sehingga belum dapat menjadi andalan atau salah satu sumber utama pendapatan petani untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Kemampuan per tahun untuk ketersediaan produksi daging yang berasal dari ternak besar/kecil baru mencapai 258,3 Ton atau 53,26 % dari kebutuhan semestinya 485 Ton dengan demikian, peningkatan skala usaha dan produksi akan dilakukan dengan penguatan kelembagaan tani, inovasi teknologi, pengaman produksi, dan peningkatan kualitas sarana produksi (bibit) serta membangun pola kemitraan.

Perkebunan di Kabupaten Barito Utara umumnya dikelola oleh masyarakat dan investor. Umumnya komoditi perkebunan masyarakat adalah jenis karet, kelapa sawit, dan kakao. Sedangkan yang dikelola oleh investor adalah kelapa sawit. Masalah yang terjadi pada perkebunan masyarakat adalah harga hasil produksi perkebunan tidak stabil; kemampuan dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil produk perkebunan masih rendah; kapasitas kelembagaan perkebunan belum optimal; akses permodalan bagi petani belum tercapai dan beredar bibit tanaman pangan perkebunan tidak bersertifikasi.

4.1.5.2 Produksi perikanan belum optimal

Produksi perikanan tangkap pada tahun 2017 sebesar 1.097,0 ton cenderung menurun dibandingkan tahun 2016 sebesar 1.110,3 ton. Sedangkan untuk jenis produksi perikanan budidaya paling besar adalah keramba 3.048,90 Ton (56,56%), kemudian kolam 2.317,10 Ton (42,99%) dan paling kecil adalah jaring apung 24,27 Ton (0,45%). Produksi perikanan yang ada di Kabupaten Barito Utara dibandingkan target pada tahun 2013 sebesar 91,04 persen, meningkat di tahun 2014 menjadi 92,11persen. Di tahun 2015 kembali turun menjadi 91,11 dan pada tahun-tahun selanjutnya kembali naik menjadi

103,62 dan 112,00 (tabel II.84). Namun demikian sektor perikanan masih belumlah optimal kontribusinya kepada peningkatan pendapatan masyarakat. Beberapa faktor penyebab rendahnya produksi perikanan ini antara lain ; masih terbatasnya kemampuan pelaku usaha untuk perikanan budidaya, faktor kondisi alam, keterbatasan sarana dan prasarana dan jumlah unit produksi budidaya pelaku usaha dan pelaku utama, serta terbatasnya tenaga penyuluh perikanan dan SDM Pengawas/PPNS di perairan umum.

4.1.5.3 Belum optimalnya produksi pangan untuk kebutuhan daerah

Berdasarkan data bahwa sudah empat desa di Kabupaten Barito Utara sudah tahap mandiri pangan. Yakni Desa Beringin Raya Kecamatan Teweh Tengah, Desa Tongka Kecamatan Gunung Timang, Desa Jamut Kecamatan Teweh Timur, dan Desa Bintang Ninggi I Kecamatan Teweh Selatan. Namun demikian masih banyak desa di Barito Utara yang memerlukan perhatian khusus dalam hal ketersediaan pangan dan untuk itu guna mengantisipasi terjadinya rawan pangan salah satunya melalui pemberian bantuan gabah/beras kepada masing masing lumbung pangan desa dari tahun 2010 hingga 2016.

Untuk komoditi jagung, produktivitas yang dapat di capai baru 43,81 Ku/Ha atau diatas angka produktivitas Provinsi 35,06 Ka/Ha, sedangkan produktivitas kedelai adalah 12,77 Ka/Ha atau lebih kecil dari produktivitas Provinsi 12,92Ka/Ha. Oleh sebab itu dalam rangka mencapai hasil yang optimal, peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi, jagung dan kedelai serta hortikultura, akan diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana / prasana pertanian, optimalisasi lahan potensial dan pemberdayaan masyarakat tani melalui penerapan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan sebagai representasi dari Ekonomi Kerakyatan.

4.1.5.4 Belum optimalnya nilai usaha industri

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2012 sebesar 7,11 persen, menurun di tahun 2013 menjadi 6,87 persen, meningkat kembali di tahun 2014 dan 2015 menjadi 7,74 persen dan 8,16 persen (tabel II.95). Sedangkan persentase pertumbuhan industri di

Kabupaten Barito Utara tahun Tahun 2013 berada di posisi 1,06 persen, pada Tahun 2014-2016 samasekali tidak ada angka pertumbuhan industri di Kabupaten Barito Utara. Namun di tahun 2017 kembali ada kenaikan pertumbuhan industri sebesar 1,79 persen (tabel II.96). Laju pertumbuhan sektor industri yang fluktuatif secara tidak langsung mengambarkan nilai usaha industri yang belum optimal padahal potensi bahan baku industri masih bisa ditingkatkan kinerjanya.

Permasalahan nilai usaha industri yang masih belum optimal disebabkan beberapa hal, antara lain :

- Belum tersedianya Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah (RPIK).
- Kualitas produksi masih belum bersaing dengan kuantitas yang terbatas.
- Masih kurangnya pembinaan terkait pemasaran, sarana prasarana untuk usaha industri kecil menengah.

4.1.5.5 Belum optimalnya nilai usaha perdagangan

Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Barito Utara, jumlah usaha perdagangan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 6,48 persen dari tahun 2015. Usaha perdagangan di Kabupaten Barito Utara didominasi oleh usaha pedagang kecil. Pada tahun 2016, dari total 263 pedagang terdaftar, sebesar 80,99 persen merupakan pedagang kecil, 18,25 persen pedagang menengah, dan 0,76 persen pedagang besar. Sebagian besar usaha perdagangan berada di Kecamatan Teweh Tengah. Hal ini dikarenakan sebagian besar perekonomian terpusat di kecamatan ini yang merupakan ibukota Kabupaten Barito Utara. Selama tahun 2012-2016, kontribusi kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap total PDRB mengalami peningkatan. Hal ini menandakan kategori ini semakin berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Barito Utara. Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya jumlah pedagang di tahun 2016. Banyaknya perusahaan tambang khususnya batubara yang kembali aktif di tahun 2016 dimungkinkan turut berpengaruh terhadap bertambahnya pedagang di Kabupaten Barito Utara

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2012 dan 2013 sebesar 4,68 persen, dan terus meningkat di tahun-tahun selanjutnya sampai dengan tahun 2016 (tabel II.94).

Beberapa faktor yang sangat berpengaruh kepada nilai usaha perdagangan antara lain :

- Sarana dan prasarana pasar dan fasilitas penunjang pasar (pasar induk dan pasar tradisional) yang masih kurang, terutama pasca terbakarnya pasar induk (Pasar Pendopo) pada tahun Juli 2018.
- Minimnya fasilitas tempat bongkar muat barang dagangan
- harga kebutuhan pokok tidak stabil.

4.1.5.6 Belum optimalnya Usaha Koperasi dan UMKM

Persentase koperasi aktif yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2013 sebesar 67,09 persen, di tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 kenaikan persentase koperasi aktif meningkat drastis dikarenakan berkurangnya koperasi dari 272 koperasi pada tahun 2016 menjadi 219 pada tahun 2017 (tabel II.78).

Jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2016 mengalami lonjakan yang tinggi yaitu 8.488 unit dari Tahun 2013 sebanyak 6.947 unit, pada tahun 2017 usaha mikro dan kecil menurun 0,1 persen menjadi 8.466 unit (tabel II.79).

Penurunan jumlah Koperasi dan jumlah UMKM seperti tersebut di atas disebabkan karena ketatnya persaingan dunia usaha, rendahnya jiwa kewirausahaan, terbatasnya akses permodalan, kurangnya perlindungan terhadap KUMKM serta lemahnya kelembagaan KUMKM. Dari fluktuatifnya volume usaha koperasi dan omzet UMKM dapat dibuktikan bahwa pengembangan KUMKM masih belum optimal.

4.1.5.7 Belum optimalnya penanganan PMKS

Penguatan kebijakan pelayanan bagi PMKS secara terpadu dan lintas sektoral, untuk meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS. Jenis PMKS meliputi anak terlantar, anak nakal, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan kedasibilitasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia

terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, korban penyalahgunaan NAPZA, korban bencana alam, dan fakir miskin.

Banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memerlukan bantuan hingga tahun 2017 tercatat sebanyak 109 jiwa yang tersebar di seluruh kecamatan di Barito Utara, sedangkan persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2017 mengalami turun naik hingga pada tahun 2017 mencapai nilai 7,02 persen (tabel II.53). Dalam hal bimbingan sosial dan penyuluhan juga berdasarkan data dari tahun 2003 -2016 terus terjadi penurunan baik dari segi frekuensi dan maupun jumlah peserta, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran daerah yang tersedia. Kedepan hal ini harus lebih ditingkatkan mengingat urusan sosial termasuk urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan pemerintah daerah.

Beberapa permasalahan penanganan PMKS antara lain ; Komitmen politik dan dukungan anggaran daerah belum optimal, sinergitas dan sinkronisasi program kurang konsisten, serta sulit diukur tingkat capaian keberhasilannya, penanganan PMKS untuk membangun kapasitas individu dan kelembagaan PMKS masih belum berjalan secara optimal, terbatasnya daya tampung dan ketersediaan sarana dan prasarana panti sosial, belum optimalnya kemitraan lintas sektoral juga menjadi permasalahan dalam penanganan PMKS, sumber daya manusia pelaku pembangunan kesejahteraan sosial belum memadai.

4.1.5.8 Masih rendahnya kunjungan wisata

Berdasarkan data bahwa kunjungan wisatawan masih tergolong terutama wisatawan mancanegara pada tahun 2017 hanya berjumlah 92 orang sedangkan kunjungan wisatawan domestik berjumlah 42.199 orang (tabel II.86), jumlah ini menurun dari tahun 2016 yang berjumlah 95 wisatawan mancanegara dan 66.392 wisatawan domestik. Banyak faktor penyebab sektor pariwisata belum optimal kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi daerah, antara lain sarana dan prasarana penunjang pariwisata seperti fasilitas umum di objek wisata yang belum memadai, penyediaan akomodasi yang kurang, belum optimalnya kegiatan promosi pariwisata daerah, belum optimalnya

pengelolaan peninggalan sejarah dan situs cagar budaya untuk dikembangkan menjadi objek pariwisata, masih rendahnya minat investor untuk mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan di Barito Utara, belum tersusunnya Road Map Kepariwisataan Daerah yang dapat dijabarkan ke dalam kebijakan daerah untuk mendukung pengembangan dan pembangunan kepariwisataan daerah yang dapat beradaptasi dengan perkembangan pembangunan daerah, baik di tingkat lokal maupun nasional, serta minimnya peran stake holder, pelaku usaha wisata dan masyarakat untuk merumuskan kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah yang dapat diharapkan mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) di sektor pariwisata. Kedepannya diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan sektor pariwisata ini, terutama 52 tempat tujuan wisata yang sudah ada di Barito Utara sekarang ini.

4.1.5.9 Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, laki-laki, perempuan, anak-anak maupun orangtua secara adil, efektif dan akuntabel.

urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain untuk peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG, termasuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran, menjamin perlindungan hak perempuan dan anak. Pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain :

- belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG (Indeks pembangunan Gender), Persentase Perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi; persentase kontribusi pendapatan perempuan dalam keluarga dan pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian kabupaten/kota layak anak yang masih kurang.

- Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang, dan belum optimalnya perlindungan dan Pelaporan terhadap kasus kekerasan, tindak pidana perdagangan orang, dan perlindungan perempuan dan kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak, ANAK Berhadapan dengan Hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah dan penelantaran. Dalam beberapa kejadian KDRT tersebut semuanya bermula dari masih rendahnya dari sisi pendapatan masyarakat sehingga berdampak kepada munculnya berbagai macam permasalahan dalam rumah tangga.
- Belum Optimalnya PUG kaitan dengan perencanaan dan penganggaran responsif gender bertujuan Anggaran yang Responsive Gender (ARG) di Kabupaten Barito Utara.

4.1.5.10 Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu hal yang diharapkan dapat menjadi penopang bagi pembangunan desa. permasalahan urusan pemberdayaan masyarakat adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan , belum optimalnya kualitas dan peran lembaga ekonomi desa serta rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih berada dibawah angka yang diharapkan. Sedangkan untuk kualitas lembaga ekonomi desa tidak berkembang. Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) juga masih belum optimal dengan hasil yang belum memuaskan sehingga pendampingan dan pembinaan harus lebih ditingkatkan.

Program lainnya yang ditujukkan untuk penanganan masalah kemiskinan yang bersumber dari dana APBN yang berasal dari Kementerian Sosial RI yang ada di Kabupaten Barito Utara adalah Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial. Fakir miskin yang menerima program tersebut akan dibentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mana 1 (satu) kelompok terdiri dari 10 Kepala Keluarga. Namun program ini juga belum optimal untuk menangani masalah kemiskinan di Barito Utara, sebagaimana data pada tahun 2017 tidak ada KUBE yang

menerima program pemberdayaan fakir miskin melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial (tabel II.55).

4.1.5.11 Rendahnya produktivitas tenaga kerja

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah produktivitas tenaga kerja yang masih rendah. Produktivitas tenaga kerja dapat dilihat dari tingkat pendidikan, berdasarkan struktur angkatan kerja Kabupaten Barito Utara terlihat bahwa angkatan kerja terbesar pada tahun 2017 adalah pendidikan SMA sebanyak 15.604 jiwa (tabel II.112) Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa.

Berdasarkan data BPS Barito Utara menunjukkan bahwa dominasi angkatan kerja pada tahun 2017 berada pada usia 35-39 tahun yaitu sebanyak 10.332 jiwa. Persebaran angkatan kerja yang tidak merata juga merupakan salah satu faktor rendahnya produktifitas.

Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja akan menyebabkan sulit bersaing di pasar kerja baik di tingkat lokal, daerah maupun luar negeri. Disisi lain kesempatan kerja di Barito Utara akan berkembang dengan pesat seiring dengan tumbuhnya beberapa proyek strategis dan berkembangnya investasi usaha swasta di daerah. Berdasarkan data jumlah perusahaan Industri di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2017 adalah 379 perusahaan. Penyerapan tenaga kerja pada tahun 2017, yaitu 1.406 tenaga kerja.

4.1.5.12. Rendahnya realisasi investasi

Berdasarkan data jumlah investor PMDN dan PMA (tabel II.80) menunjukkan jumlah investor PMDN tahun 2013 sebanyak 228 unit, dan menurun di tahun 2014 menjadi 224 unit, namun pada tahun 2015 kembali naik menjadi 236 unit. Di tahun 2016 menurun drastis menjadi 113 unit dan 2017 jumlah investor PMDN menjadi 127 unit.

Dengan potensi investasi Kabupaten Barito Utara yang masih cukup besar serta didukung oleh kondisi perekonomian yang terus mengalami pertumbuhan, serta adanya komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan

iklim investasi yang kondusif akan tetapi pertumbuhan investasi dari tahun ke tahun yang fluktuatif (tabel II.81). Hal tersebut mengambarkan realisasi investasi relatih masih rendah.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi investasi sehingga peluang potensi Investasi belum termanfaatkan secara optimal, antara lain :

- Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih belum memadai sesuai yang diharapkan untuk menunjang investor masuk ke Kabupaten Barito Utara.
- Masih rendahnya tingkat inovasi dan capaian keberhasilan pelayanan penanaman modal yàng meliputi aktivitas promosi investasi, perijinan investasi dan insentif penanaman modal di daerah.
- Kapasitas aparatur pada kelembagaan yang menangani penanaman modal masih belum optimal.

Tabel IV.5.
Analisis Permasalahan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

AKAR PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	MASALAH POKOK
Belum optimalnya produksi pertanian, peternakan dan perkebunan	Masih rendahnya pendapatan masyarakat	Belum optimalnya tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
Produksi perikanan belum optimal		
Belum optimalnya produksi pangan untuk kebutuhan daerah		
Belum optimalnya nilai usaha industri		
Belum optimalnya nilai usaha perdagangan		
Belum optimalnya Usaha Koperasi dan UMKM		
Masih rendahnya kunjungan wisata		
Belum optimalnya penanganan PMKS		
Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan		
Rendahnya produktivitas tenaga kerja		
Rendahnya realisasi investasi		

4.1.6 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Persoalan ketentraman dan ketertiban pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang akan tetap menjadi permasalahan krusial bagi Kabupaten Barito Utara. Hal ini sejalan dengan dinamika yang berkembang bersamaan dengan transformasi masyarakat menuju masyarakat yang demokratis. Kondisi yang tentram dan tertib menjadi salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan dalam rangka mendukung kinerja pemerintah diperlukan iklim yang kondusif sehingga memungkinkan semua elemen masyarakat terlibat dan berperan serta secara optimal.

Kriminalitas terkait dengan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, norma sosial dan norma agama, sehingga ditentang oleh masyarakat. Perkara kriminal yang terjadi di Kabupaten Barito Utara selama tahun 2017 berdasarkan data yang bersumber dari Pengadilan Negeri Kabupaten Barito Utara tercatat sebanyak 239 perkara (tabel II.52). Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 217 perkara. Jenis kejahatan yang paling banyak terjadi adalah penyalahgunaan narkotika. Sedangkan berdasarkan data Polres Barito Utara mengenai angka tindak pidana yang dilaporkan dari tahun 2013-2017 (tabel II.109) dan Data Keamanan di wilayah Barito Utara Tahun 2015-2018 (tabel II.110). Terkait jumlah unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2014-2017 berfluktuatif dan relatif intens karena hampir setiap tahun ada kejadian unjuk rasa (tabel II.111).

Dari sisi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdapat permasalahan yakni; belum optimalnya implementasi peraturan daerah. Permasalahan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor yakni; dampak sosial adanya pembangunan/proyek strategis dan investasi usaha swasta, adanya pembangunan maupun usaha yang mengesampingkan perizinan. Masih terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perkada dengan variasi pelanggaran yang makin beragam. Namun hal ini belum diimbangi dengan peningkatan sarana prasarana maupun SDM yang ada. Keterbatasan jumlah personil maupun PPNS menjadi salah satu kendala dalam upaya peningkatan penegakan peraturan perda.

Keberadaan organisasi sosial, organisasi masyarakat, LSM dan Partai Politik yang ada di lingkungan masyarakat belum menunjukan kinerja yang

optimal, masih banyak organisasi masyarakat yang belum terdaftar. Jumlah ormas, organisasi sosial, LSM yang terus meningkat setiap tahunnya perlu dilakukan pengelolaan ormas melalui kaidah organisasi masyarakat yang sehat.

Kondisi ketenteraman, ketertiban umum dipengaruhi oleh adanya beberapa aksi demo/ aksi unjuk rasa yang hampir setiap tahun selalu ada dan berdampak mengganggu ketentraman dan keamanan dan dapat menyebabkan potensi konflik sosial dan politik, sebagai akibat pemahaman politik yang rendah dan tidak merata di masyarakat sehingga sering terjadi konflik/pergesekan yang di akibatkan provokasi pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan, serta akibat menurunnya rasa nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air.

Meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketertiban umum sangat mungkin terjadi dengan adanya peluang investasi yang semakin terbuka. Kejadian kriminalitas maupun aksi demo tersebut dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor lingkungan pergaulan dan belum baiknya disiplin masyarakat dalam mematuhi hukum/peraturan perundang-undangan serta dengan adanya dampak negatif arus globalisasi yang tidak terbendung, belum optimalnya pembinaan kamtibmas swakarsa serta masih minimnya pemberian pemahaman kepada masyarakat akan peran sertanya dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal-hal tersebut yang diantaranya menimbulkan masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam masyarakat.

Untuk itu diperlukan upaya peningkatan koordinasi lintas sektoral misalnya dengan membentuk Tim Penanganan Konflik Sosial Kabupaten untuk melakukan deteksi dini terjadinya konflik serta meningkatkan peran aktif masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan serta upaya peningkatan wawasan kebangsaan. Sehingga kekhawatiran timbulnya dampak meningkatnya kerawanan dan gangguan ketertiban umum dapat diantisipasi dengan merencanakan program dan kegiatan yang terintegrasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal dan masyarakat.

Tabel IV.6.
Analisis Permasalahan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

AKAR PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	MASALAH POKOK
belum optimalnya implementasi peraturan daerah	permasalahan ketertiban dan keamanan di masyarakat cenderung meningkat	**meningkatnya kerawanan di masyarakat dan gangguan ketertiban umum**
Meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketertiban umum		

4.1.7 Lingkungan Hidup

Kabupaten Barito Utara dari sebelah Selatan ke Timur merupakan dataran agak rendah sedangkan ke arah Utara dengan bentuk daerah berbukit-bukit lipatan, patahan yang dijajari oleh pegunungan Muller/Schwaner. Menurut keadaan wilayahnya, Kabupaten Barito Utara tanahnya terdiri dari berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 25-400 m. Sedangkan dataran rendah terdapat pada bagian Selatan membentang sejauh lebih kurang 150 Km ke Utara dan merupakan tanah dengan derajat keasaman kurang dari 7. Pada kiri kanan dataran rendah tersebut terdiri dari dataran tinggi, perbukitan, pegunungan lipatan dan patahan, terdapat adanya tanah berwarna merah, kuning serta batuan induk hasil endapan, batuan beku dan batu-batuan lainnya.

Keragaman konfigurasi fisik lingkungan ini selain merupakan modal bagi pembangunan daerah, karakteristik fisik wilayah juga menyimpan kerentanan terhadap kerusakan lingkungan sebagai akibat pengelolaan yang tidak optimal yang akan berakibat pada penurunan daya dukung lingkungan. Masalah daya dukung fisik wilayah dapat berupa konflik pemanfaatan ruang sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan.

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah pada Bab II Gambaran Umum wilayah, dapat diidentifikasi wilayah Barito Utara yang berpotensi rawan bencana alam seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, dan lain-lain. Bencana banjir masih sering terjadi, yaitu di wilayah sepanjang DAS Barito yang merupakan dataran rendah yang tersebar diseluruh kecamatan. Permasalahan bencana ini sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan hidup yang

ditempati oleh masyarakat. Disisi lain kelembagaan penanggulangan bencana yang belum optimal menjadi persoalan tersendiri terutama dalam hal pemenuhan sarana prasarana penanggulangan bencana seperti peringatan dini, dan peralatan penanganan bencana.

Sementara itu belum disusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkugan Hidup (DDDTLH), Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup (DIKPLHD).

Masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup seperti perubahan kualitas air pada SubDAS Barito wilayah Kabupaten Barito Utara dan 3 SubDAS (Lahei, Teweh, dan Montallat), meningkatnya timbulan sampah serta minimnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan persampahan, kebakaran hutan dan lahan, perubahan tutupan lahan serta deforestasi akibat usaha dan atau kegiatan sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Semua permasalahan tersebut berkontribusi kepada meningkatnya pencemaran lingkungan.

Masih rendahnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga berpengearuh kepada kualitas lingkungan hidup. Hal ini teridentifikasi dari belum terlaksananya inventarisasi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan, kurangnya pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatnya sengketa lingkungan hidup antara masyarakat dengan pelaku usaha dan/atau kegiatan akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Masih kurangnya upaya untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti belum adanya pengakuan pemerintah daerah terhadap masyarakat hukum adat dan pengelolaan hutan adat, belum terbentuknya kelembagaan masyarakat yang mandiri dan professional. Semua itu berdampak kepada belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup.

Masih terkendalanya proses penyelesaian Legislasi Raperda tentang RTRWK dan RDTRK memunculkan beberapa permasalahan kepada pengelolaan

lingkungan hidup, terutama terkait alih fungsi lahan yang masih terjadi dan regulasi yang belum mengakomodir dinamika pembangunan yang mengakibatkan banyaknya pemanfaatan ruang tidak sesuai peruntukannya. Kecenderungan alih fungsi lahan pertanian atau yang berpotensi dikembangkan untuk pertanian ke arah non pertanian pangan seperti perumahan, jalan, pertambangan dan perkebunan yang menyebabkan gangguan pada prasarana pertanian (rusaknya saluran air), rusaknya sumberdaya alam dan berkurangya lahan produktif pertanian.

Berdasarkan gambaran kondisi prasarana sarana utilitas terlihat bahwa masih banyak terdapat rumah tidak layak huni dan akses air bersih yang belum dapat menjangkau seluruh kawasan perumahan serta pengelolaan sampah yang belum optimal. Pengelolaan air bersih dilaksanakan oleh PDAM dan non PDAM (SPAMDES). Terutama untuk wilayah perdesaan dimana kelembagaan dan tata kelola sampah, limbah dan pengelolaan air bersih yang masih belum optimal.

Permasalahan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana utilitas (PSU) di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang masih kurang meliputi genangan air atau banjir disebabkan penanganan sistem drainase yang tidak terpadu dalam satu daerah tangkapan air, rumah sudah terbangun namun prasarana pendukung lingkungannya belum optimal, pelaksanaan pembangunan atau pengembang lebih mementingkan cluster (persil) sehingga PSU tidak terpadu antar sistem. Sehingga penyediaan PSU dan fasilitas umum untuk perumahan dan permukiman yang belum optimal masih menjadi permasalahan yang harus dicarikan solusinya kedepan.

Tabel IV.7.
Analisis Permasalahan Lingkungan Hidup

AKAR PERMASALAHAN		PERMASALAHAN	MASALAH POKOK
Barito Utara sebagai daerah berpotensi rawan bencana alam (banjir, karhutla dan longsor)	Belum optimalnya penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	Menurunnya kualitas lingkungan hidup	**Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan fungsi lingkungan hidup**
kelembagaan penanggulangan bencana yang belum optimal			
belum disusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup	Resiko meningkatnya pencemaran		

AKAR PERMASALAHAN		PERMASALAHAN	MASALAH POKOK
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	lingkungan hidup		
Masih rendahnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			
alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang		
Belum selesainya Legislasi Raperda tentang RTRWK dan RDTRK			
kelembagaan dan tata kelola sampah, limbah dan pengelolaan air bersih yang masih belum optimal	penyediaan PSU dan fasilitas umum untuk perumahan dan permukiman yang belum optimal		
kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana utilitas (PSU) di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang masih kurang			

4.1.8 Tata Kelola Pemerintahan

Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Repormasi dan Birokrasi bahwa pada tahun 2017 Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kabupaten Barito Utara memperoleh Nilai 49,00/ "C" namun demikian mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yantu 43,36, sehingga sangat di perlukan komitmen dari semua fihak supaya kedepannya dapat meningkatkan perolehan nilai yang lebih baik lagi. Beberapa hal penyebab belum efektifnya kinerja pemerintah dapat dilihat dari beberapa kondisi yang masih ada. Diantaranya belum optimalnya perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal.

Selain itu, Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD) berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100-53 tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah, maka penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD) yang dinilai pada tahun 2017 memperoleh Peringkat I (satu) tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dan peringkat ke 200 untuk tingkat Nasional. Target tersebut diharapkan akan lebih ditingkatkan pada penilaian berikutnya di

tahun 2018, terutama untuk penilaian di tingkat Nasional agar memperoleh peringkat yang lebih baik dari sebelumnya.

Lemahnya pengendalian internal di masing-masing organisasi pemerintah daerah juga mempengaruhi terhadap efektivitas kinerja pemerintah. Sebagaimana hasil penilaian tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah masih pada tingkat Maturitas Berkembang dengan skor 2.028 (berkembang adalah 2,0≤skor≤3,0). Pengendalian internal pada setiap unit organisasi merupakan faktor yang mendasar sehingga tugas pokok dan fungsi tiap-tiap organisasi pemerintah daerah dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kualitas perencanaan sangat berpengaruh dalam penilaian kinerja, hal ini disebabkan kualitas perencanaan yang belum optimal. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab, diantaranya masih belum terpenuhinya kuantitas maupun kualitas SDM perencana pada semua Perangkat Daerah. Selain itu permasalahan lain yang terjadi di fungsi perencanaan adalah belum tepatnya sasaran perencanaan untuk mampu menjawab permasalahan daerah. Kesemua permasalahan dalam fungsi perencanaan di atas berimplikasi pada belum optimalnya kualitas perencanaan yang pada akhirnya mempengaruhi pada kinerja pemerintah daerah yang belum optimal.

Dari sisi pendapatan daerah dinilai juga masih belum optimal, walapun terlihat dari ratio peningkatan peningkatan pendapatan daerah cenderung terus mengalami kenaikan (gambar II.3). Dimana Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2013 sebesar Rp. 24.500.000.000 mengalami peningkatan selama pembangunan tahun 5 tahun yaitu pada tahun 2017 sejumlah Rp.90.000.490.218,48, sedangkan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Barito Utara pada tahun 2013 sebesara Rp.596.450.802.918 meningkat hingga tahun 2017 sebesar Rp.896.492.588.089. Sehingga Realisasi Pendapatan Kabupaten Barito Utara pada tahun 2013 Rp.642.362.081.930 terus meningkat hingga pada tahun 2017 sebesar Rp.1.109.360.849.303,96.

Namun di sisi yang lain nilai belanja daerah dan rasio peningkatannya juga terus mengalami kenaikan. Hal ini akan menimbulkan limitasi dalam kemampuan keuangan daerah untuk mampu membiayai belanja

pembangunan. Derajat Desentralisasi masih pada kategori kurang terlihat dari nilai desentralisasi fiskal kabupaten Barito utara pada tahun 2013 sebesar 3,81 % pada tahun 2017 meningkat menjadi 8,11 %, sedangkan dari sisi rasio ketergantungan keuangan daerah juga masih cukup tinggi terlihat dari nilai rasio ketergantungan keuangan daerah pada tahun 2013 sebesar 96,19 % dapat turun pada tahun 2017 menjadi 91,89% namun nilai ini masih pada kategori sangat tinggi.

Peluang peningkatan pendapatan daerah masih terbuka melalui beberapa sumber seperti pajak dan retribusi serta hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah. Sehingga strategi untuk menggali potensi potensi baru pendapatan daerah, mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah, meningkatkan kualitas dan efisiensi pengelolaan BUMD serta meningkatkan investasi daerah, perlu untuk dikedepankan melalui upaya-upaya yang inovatif.

Namun demikian, dalam hal pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan terbukti mampu memperoleh opini WDP pada tahun 2013 kemudian meningkat menjadi WTP berturut-turut pada tahun 2014-2017. Hal ini perlu dipertahankan melalui upaya tertib pengelolaan pendapatan, tertib pengelolaan belanja dan tertib pengelolaan asset daerah.

Untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada perangkat daerah yang menjalankan urusan kepegawaian melalui pendidikan formal seperti pengiriman PNS Tugas Belajar (D3, S1 dan S2) dan setiap aparatur diberi keleluasan untuk mendapatkan ijin belajar . Untuk diklat struktural penjenjangan telah dikirim peserta ke Badan Diklat Provinsi Kalteng dan untuk diklat teknis fungsional lainnya dapat diikuti oleh semua aparatur perangkat daerah masing-masing. Namun upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur masihlah belum terlaksana secara optimal.

Belum optimalnya peningkatan sumber daya aparatur kearah yang berkualitas dan profesional ini terkendala masih minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut dan juga terbatasnya kuota peserta yang diberikan untuk Kabupaten Barito Utara karena penyelenggaraan diklat struktural penjenjangan diadakan oleh Badan Diklat Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk tahun 2018 hanya mendapat kuota 6 orang untuk diklatpim III dan 10 orang untuk

diklatpim IV, sedangkan daftar tunggu peserta untuk mengikuti diklat tersebut masih 15 orang untuk diklatpim III dan 135 orang untuk diklatpim IV. Sedangkan anggaran untuk mengikutisertakan peserta diklatpim tersebut ke luar Provinsi Kalteng dan untuk tugas belajar juga masih terbatas. Hal itu berdampak dengan belum terpenuhinya kompetensi pejabat dalam hal unsur pemenuhan diklat kepemimpinan. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah pejabat struktural yang diangkat pada perubahan kelembagaan menyeluruh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang belum memiliki kompetensi syarat diklat sesuai jabatan yang diduduki. Melihat kesenjangan yang ada dapat dipahami bahwa sangat pemenuhan SDM sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mendukung tercapainya kinerja pemerintahan daerah.

Belum optimalnya kinerja pemerintah desa juga dipengaruhi adanya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan pelaksanaannya, dalam aturan tersebut mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa berjalan dengan baik. Selama ini, masih dijumpai adanya ketidaksesuain/ketidaktepatan dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan RPJM Desa, RKP Desa, penetapan APB Desa serta pelaporan penyelengaaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini disebabkan oleh karena masih kurangya pemahaman terhadap regulasi dan materi cara penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan desa oleh aparatur desa. Hal ini mengakibatkan masih banyaknya temuan dari hasil pengawasan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah desa.

Peningkatan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang efektif, efisien serta memuaskan dari pegawai pemerintah sebagai pelayan publik semakin populer. Hal ini terkait dengan perkembangan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat yang terus bertambah dan kian mutakhir. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan publik adalah adalah melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Pada Tahun 2017 Survei di laksanakan di 8 unit kerja pelayanan yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, PDAM Tirta Dharma Muara Teweh, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), Badan Kepegawaian dan Sumber Daya

Manusia (BKPSDM), RSUD Muara Teweh, Puskesmas Muara Teweh, dan Puskesmas Lanjas dengan memperoleh nilai rata-rata 74,69 (Baik). Hasil survei ini menunjukkan bahwa pemberian pelayanan publik yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara masih walaupun telah memperoleh nilai baik namun masih perlu ditingkatkan kedepannya.

Belum terintegrasinya sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkup pemerintahan sebagai akibat dari belum terlaksanakannya pencapaian fungsi GPR (Government Publik Relations) secara menyeluruh, pelayanan jaringan internet FO (Fiber Optik) belum menjangkau seluruh perangkat daerah, pengetahuan SDM yang minim mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Disamping itu masih terbatasnya sarana publikasi dan dokumentasi publik disebabkan oleh masih terbatasnya media dalam pencapaian informasi terutama media cetak yang masih terbatas jumlahnya menjangkau sampai perdesaan, sehingga berdampak pada belum optimalnya informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ysng tersampaikan kepada masyarakat.

Tabel IV.8.
Analisis Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

AKAR PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	MASALAH POKOK
Lemahnya pengendalian internal di masing-masing organisasi pemerintah daerah	Belum optimalnya kinerja pemerintahan	**Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah**
Belum optimalnya kualitas perencanaan daerah		
belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah untuk membiaya belanja pembangunan yang terus mengalami kenaikan		
Belum optimalnya peningkatan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional		
Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa		
Belum optimalnya kualitas dan sistem pelayanan publik	Belum optimalnya pelayanan publik	
belum optimalnya informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ysng tersampaikan kepada masyarakat.		

4.2. Isu Strategis

Isu strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara berasal dari permasalahan pembangunan yang diprioritaskan untuk diselesaikan maupun dari dunia international, nasional maupun regional. Berikut ini disajikan isu strategis daerah yang memiliki pengaruh pada 5 (lima) tahun mendatang.

4.2.1 Isu Strategis Internasional

Sebagai bagian dari masyarakat internasional tentunya dinamika yang terjadi secara global sangatlah penting untuk diperhatikan, karena hal tersebut sering memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan perkembangan daerah, terutama kaitannya dengan pembangunan selama 5 tahun yang mendatang. Dari hasil analisis didapatkan bahwa isu yang sedang berkembang secara global adalah sebagai berikut:

4.2.1.1 *Sustainable Development Goals (SDG's)*

Konsep Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan kelanjutan dari konsep Millenium Development Goals (MDG's). SDGs adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru penggant i MDGs . SDG's adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. SDG's berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan mampu menjawab ketertinggalan pembangunan Negara-negara diseluruh dunia, baik Negara maju dan Negara berkembang.

Tujuan dan sasaran dalam SDG's sebagai berikut:

1). Mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana.

2). Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan.

3). Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia.
4). Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
5). Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.
6). Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua.
7). Menjamin akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8). Meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan secara berkelanjutan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
9). Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi.
10). Mengurangi ketimpangan di dalam suatu dan di antara negara-negara.
11). Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12). Memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan.
13). Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14). Konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumberdaya samudera dan kepesisiran untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15). Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari, memerangi dan menghentikan proses penggurunan, memulihkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16). Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua

dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

17). Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.

Secara garis besar, 17 (tujuh belas) tujuan SDGs di atas dapat dikelompokkan dalam empat pilar, yakni pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, dan governance. Pilar pembangunan manusia menjadi isu penting pemerintah daerah, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan mencapai kesetaraan gender, serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Upaya pencapaian SDGs di pilar ekonomi yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, mendorong investasi, mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan industri dengan komoditas unggulan, memastikan ketahanan pangan. Sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. Dari sisi infrastruktur akan mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni serta pengurangan kawasan kumuh. Membangun infrstruktur pada kawasan strategis dan pusat pertumbuhan. Upaya pencapaian SDGs pada pilar pembangunan lingkungan hidup antara lain mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan, konservasi sumberdaya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati; mengelola ekosistem yang berkelanjutan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

Sedangkan tujuan dalam bidang governance, upaya mencapai tujuan SDGs antara lain memastikan masyarakat dalam kondisi yang aman, tertib dan tenteram, dan membangun organisasi/tata kelola pemerintah daerah yang efektif dan akuntabel.

4.2.1.2 *AFTA (ASEAN Free Trade Area)*

AFTA (ASEAN Free Trade Area) yang mulai dilaksanakan tahun 2015 menjadi tantangan besar bagi daerah. Terbukanya pasar bebas ASEAN, maka aliran perdagangan barang dan jasa, investasi, dan perpindahan tenaga kerja antar negara ASEAN tak ada lagi hambatannya. Dengan adanya AFTA ini

antara lain peningkatan perdagangan international, tebukanya peluang kerja lebih banyak, meningkatkan kompetisi antar pengusaha, terbukanya peluang pengusaha local untuk go international meningkatkan nilai ekspor, dapat meningkatkan devisa dari sektor pariwisata, tidak adanya bea cukai sehingga banyaknya produk dari Negara-negara tetangga masuk dan itu merupakan keuntungan bagi konsumen, serta kompetisi antar pengusaha, tentu ini akan menghadirkan peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Utara.

4.2.1.3 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah masyarakat yang masuk dalam kawasan bebas AFTA, atau negara-negara yang masuk dalam AFTA. Jadi kawasan ekonomi suatu negara yang termasuk dalam MEA ini akan menjadi lebih luas, adanya perekonomian yang menglobal diantara para negara-negara ASEAN. Dengan adanya MEA maka menjadi kesempatan yang baik bagi Kabupaten Barito Utara untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas produk daerah serta kualitas sumber daya manusia. Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang sudah dimulai tanggal 31 Desember 2015.

4.2.1.4 Perkembangan Bidang Teknologi Transportasi dan Informatika

Pada saat ini semakin berkembang pesatnya teknologi transportasi dan informasi mengakibatkan jarak baik dari pengertian ruang maupun waktu menjadi relatif tidak ada artinya lagi. Dengan teknologi transportasi setiap orang dan barang dapat berpindah dengan cepat secara mudah demikian pula berbagai kejadian diseluruh pelosok dunia bahkan diluar bumi ini pun dapat diketahui oleh hampir setiap orang secara transparan dan real time. Perkembanan ini menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia dan hubungan antar negara dan bangsa di dunia termasuk didalamnya tatanan budaya, perekonomian dan hubungan antar manusia di dunia global.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

4.2.2.1 RPJMN 2015-2019

Dalam penentuan isu strategis di tingkat nasional masih diwarnai oleh kebijakan nasional, hal tersebut dimaksudkan agar perencanaan yang disusun

pusat dan daerah akan sinkron dan menjamin tujuan pembangunan nasional telah mendukung dan dilaksanakan oleh daerah sehingga penentuan arah kebijakan Kabupaten Barito Utara sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh nasional. Dalam kaitannya dengan hal tersebut sesuai RPJMN tahun 2015-2019, kebijakan yang menjadi prioritas nasional terdapat dalam 7 misi dan 9 agenda prioritas yang kemudian dikenal dengan istilah NAWACITA. Adapun 7 misi Pemerintah yang dimaksud meliputi:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sedangkan 9 agenda prioritas Pemerintah (NAWACITA) meliputi:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain amanat Nawacita sebagai agenda pembangunan kurun waktu 2015-2019, RPJMN juga mengamanatkan beberapa hal, antara lain target pembangunan nasional berupa: akses air minum 100%, kawasan permukiman kumuh perkotaan 0 Ha dan akses sanitasi layak 100% (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan). Sebagai upaya mempercepat terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional, maka Pemerintah Daerah harus mensinergikan segala potensi dan sumberdaya untuk mendukung pencapaian amanat tersebut.

4.2.2.2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menjadi penentu kebijakan di daerah. Dalam aturan tersebut menjelaskan tentang konsep desentralisasi dalam pemerintahan daerah selalu berkaitan dengan penyerahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Terkait dengan hal itu, dalam rangka perencanaan pembangunan desa dan guna mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Makna yang terkandung dari pembangunan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang tentang Desa memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa untuk melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan keuangan desa dalam rangka pembangunan di desa.

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat untuk diatur dalam susunan pemerintahan. Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self-government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

4.2.2.3 Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun

Kebijakan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun adalah salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan, yang akan dilaksanakan dalam periode 2015-2019. Wajar 12 Tahun diletakkan dalam konteks penyelenggaraan pendidikan untuk membekali peserta didik dengan empat kemampuan: (i) learning to know, (ii) learning to do, (iii) learning to be, dan (iv) learning to live together. Pelaksanaan Wajar 12 Tahun, antara lain, ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan pengentasan kemiskinan. Dalam tes internasional seperti dalam Programme for International Student Assessment (PISA) dan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), hasil belajar siswa Indonesia juga tidak menggembirakan. Nilai rata-rata siswa Indonesia dalam PISA2012 hanya 396, jauh lebih rendah dari nilai rata-rata negara OECD.

4.2.2.4 Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan dan Pemenuhan Hak Anak

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil

dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Capaian dalam peningkatan kapasitas kelembagaan PUG di tingkat nasional dan daerah sampai tahun 2013 adalah telah disahkannya Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG), yang dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan Stranas PPRG untuk kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah, melalui Surat Edaran bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2012.

Sementara itu capaian dalam peningkatan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, antara lain telah disusunnya berbagai peraturan perundang-undangan serta peraturan teknis lainnya. Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai terkait kelembagaan PUG, terutama dalam hal kerangka hukum dan kebijakan seperti diuraikan di atas, namun kapasitas kelembagaan PUG masih belum optimal dalam mendukung proses pengintegrasian PUG dalam berbagai bidang pembangunan.

Sementara, perlindungan anak meliputi seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Tantangan yang akan dihadapi adalah meningkatkan berbagai upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya dengan mengedepankan upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban secara efektif.

4.2.2.5 Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci keberhasilan peningkatan daya saing. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi.

SIDa merupakan agenda nasional sesuai dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Setiap daerah harus melakukan beberapa poin penting tentang penguatan SIDa, yaitu :

1. Kebijakan membuat tim koordinasi dan *Roadmap* SIDa
2. Penataan SIDa baik kelembagaan maupun sumberdaya SIDa
3. Mengembangkan SIDa melalui potensi lokal
4. Melakukan koordinasi dan pelaporan SIDa hingga pemerintah pusat

SIDa mempunyai peranan yang sangat strategis dalam upaya peningkatan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan daerah, melalui kegiatan kelitbangan yang terdiri dari kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh OPD yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan. Berkenaan dengan hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

4.2.2.6 Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

Berdasarkan rancangan teknokratik tema RPJMN 2020-2024 yaitu "Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan".

Dengan isu strategis nasional berdasarkan rancangan teknokratik yaitu : Pertumbuhan Ekonomi Stagnan dan Defisit Transaksi Berjalan Meningkat.

Serta sektor pembangunan prioritas adalah :

- Pembangunan manusia, meliputi ; Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial , SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.
- Pembangunan sektor ekonomi, meliputi ; pangan, energi, pariwisata dan ekonomi kreatif, industri manufaktur, kelautan dan kemaritiman.
- Pembangunan kewilayahan, meliputi ; Sentra-Sentra Pertumbuhan, komoditas Unggulan Daerah, Pertumbuhan Perkotaan
- Pembangunan infrastruktur, meliputi ; Transportasi, Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Perumahan dan Pemukiman.
- Pembangunan politik, hukum, pertahanan & keamanan, meliputi ; Sentra-Sentra Pertumbuhan, Pertahanan dan Keamanan, Politik.

4.2.2.7 Stunting

Anak Indonesia masa depan harus sehat, cerdas, kreatif, dan produktif. Jika anak-anak terlahir sehat, tumbuh dengan baik dan didukung oleh pendidikan yang berkualitas maka mereka akan menjadi generasi yang menunjang kesuksesan pembangunan bangsa. Sebaliknya jika anak-anak terlahir dan tumbuh dalam situasi kekurangan gizi kronis, mereka akan menjadi anak pendek (stunting). Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Dengan demikian periode 1000 hari pertama kehidupan seyogyanya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan. Definisi stunting menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah anak balita dengan nilai z-scorenya kurang dari -2SD/standar deviasi (*stunted*) dan kurang dari – 3SD (*severely stunted*).

Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Situasi ini jika tidak diatasi dapat mempengaruhi kinerja pembangunan Indonesia baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan. Di Indonesia, sekitar 37% (hampir 9 Juta) anak balita mengalami stunting (Riset Kesehatan Dasar/ Riskesdas 2013) dan di seluruh dunia, Indonesia adalah negara dengan prevalensi stunting kelima terbesar. Balita/Baduta (Bayi dibawah usia Dua Tahun) yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar kesenjangan sosial. Pengalaman dan bukti Internasional menunjukkan bahwa stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, sehingga mengakibatkan hilangnya 11% GDP (*Gross Domestic Products*) serta mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%. Selain itu, stunting juga dapat berkontribusi pada melebarnya kesenjangan/inequality, sehingga mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup dan juga menyebabkan kemiskinan antar-generasi.

4.2.2.8 Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Pelaksanaan GERMAS harus dimulai dari keluarga, karena keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk kepribadian.

Pencanangan GERMAS pada puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-52 yang jatuh pada 12 November 2016 yang mengusung tema Indonesia Cinta Sehat dengan sub tema Masyarakat Hidup Sehat, Indonesia Kuat. Tema ini harus dimaknai secara luas, seiring dengan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga melalui gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS).

Secara nasional Gerakan Masyarakat hidup sehat (GERMAS) dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup sehat, dalam pelaksanaannya berpedomaan pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

GERMAS dapat dilakukan dengan cara: Melakukan aktifitas fisik, Mengonsumsi sayur dan buah, Tidak merokok, Tidak mengonsumsi alkohol, Memeriksa kesehatan secara rutin, Membersihkan lingkungan, dan Menggunakan jamban. Pada tahap awal, GERMAS secara nasional dimulai dengan berfokus pada tiga kegiatan, yaitu: 1) Melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, 2)Mengonsumsi buah dan sayur; dan 3) Memeriksakan kesehatan secara rutin. Dalam kehidupan sehari-hari, praktik hidup sehat merupakan salah satu wujud Revolusi Mental. GERMAS mengajak masyarakat untuk membudayakan hidup sehat, agar mampu mengubah kebiasaan-kebiasaan atau perilaku tidak sehat.

GERMAS merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden RI yang mengedepankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Untuk menyukseskan GERMAS, tidak bisa hanya mengandalkan peran sektor kesehatan saja. Peran Kementerian dan Lembaga di sektor lainnya juga turut menentukan, dan ditunjang peran serta seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari individu, keluarga, dan masyarakat dalam mempraktekkan pola hidup sehat, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi dalam menggerakkan anggotanya untuk berperilaku sehat; serta Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya. GERMAS diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan mengurangi beban biaya kesehatan.

4.2.3 Isu Strategis Regional

Selain merupakan hasil penelaahan terhadap dinamika pembangunan yang terjadi di Kabupaten Barito Utara, penetapan isu strategis Kabupaten

Barito Utara juga mengacu kepada isu-isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah serta isu-isu strategis kabupaten lain yang berbatasan langsung dengan Barito Utara. Dilakukan telaahan terhadap beberapa dokumen RPJMD dalam skala regional yaitu :

4.2.3.1 RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021

Untuk mengetahui dinamika Provinsi dilakukan dengan melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021. Beberapa isu strategis yang menjadi isu pembangunan 5 (lima) tahun di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, disajikan sebagai berikut:

1). Percepatan penyelesaian permasalahan kawasan hutan dalam RTRWP Kalteng, pengelolaan SDA dan LH, penanganan dan mitigasi bencana kebakaran lahan, hutan dan kebun.
2). Peningkatan Kualitas SDM dan Tenaga Kerja berdaya saing.
3). Pengembangan *green economy* dan *green government* dalam realisasi pembangunan daerah.
4). Pemerataan kesejahteraan masyarakat.
5). Restrukturisasi sektor pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan.
6). Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah.
7). Penggalian potensi sumber daya alam melalui optimalisasi investasi.
8). Mewujudkan *Good Governance* secara menyeluruh.

Sementara itu untuk visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah periode 2016-2021 adalah;

“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, ditempuh dengan 8 misi sebagai berikut:

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi.
2. Pengelolaan Infrastruktur.

3. Pengelolaan Sumber Data Air, Pesisir, dan Pantai.
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan ekonomi, Pengentasan Kemiskinan.
5. Pemantapan tata Kelola Pemerintah Daerah.
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata.
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam.
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Kemudian jika ditelaah lebih lanjut berkaitan tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Utara mendapatkan beberapa kawasan strategis yakni pada;

1. Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis;
2. Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipadusertakan dengan pengembangan;
3. Kawasan pengembangan peternakan berupa kawasan peternakan ruminansia dan non ruminansia;
4. Kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao);
5. Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan;
6. Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan;
7. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya berupa rumah adat;
8. Kawasan strategis sekitar kawasan adat masyarakat terutama bagi umat hindu kaharingan;
9. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi dan perikanan di kawasan andalan laut.
10. Kawasan strategis daerah aliran sungai meliputi DAS Barito, DAS Kapuas, DAS Kahayan, DAS Barito Utara, DAS Seruyan, dan DAS Mentaya, DAS Jelai, DAS Arut, DAS Lamandau, DAS Kumai dan DAS Sebangau.
11. Kawasan strategis Heart of Borneo (HoB);
12. Taman nasional Gunung Lumut.

4.2.3.2 RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah Barito Selatan, isu-isu strategis pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis provinsi, dan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Barito Selatan, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

1). Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah;
2). Peningkatan Kualitas SDM dan Tenaga Kerja berdaya saing;
3). Pengelolaan SDA dan LH melalui optimalisasi Investasi;
4). Mewujudkan Good Governance secara menyeluruh;
5). Pemerataan kesejahteraan masyarakat

Sedangkan untuk Visi Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 adalah :

“ Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Daerah yang Maju dan Mandiri, Sehingga Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera Secara Merata dan Memiliki Daya Saing Dilandasi Iman dan Taqwa ”.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh dengan 5 Misi yaitu :

1. Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau dan lain-lain), dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidik dan pengamalan agama yang balk untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia;
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan pedesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi;

4. Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah;
5. Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.

Prioritas pembangunan Kabupaten Barito Selatan 2017-2022, meliputi:

1. Peningkatan Infrastruktur Fisik Sarana dan Prasarana;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas Serta Bertaqwa;
3. Peningkatan Ekonomi Berbasis Lokal dan Lingkungan Hidup;
4. Peningkatan kerukunan hidup beragama, sosial dan budaya yang lestari; dan
5. Pengelolaan tata pemerintahan yang baik.

4.2.3.3 Rancangan RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023

Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan Kabupaten Murung Raya, rencana pembangunan Kabupaten Murung Raya memiliki fokus pada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan wilayah secara berkesinambungan. Visi Kabupaten Murung Raya 2018-2023 yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Murung Raya Yang Sejahtera dan Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030”.

untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif.

1 . Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekonomi dan pengusahaan potensi sumber daya alam dengan

kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, dan menciptakan produk unggulan daerah untuk membuka lapangan kerja.

2. Menciptakan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal.
3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan dan desa serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dari perkotaan sampai perdesaan untuk memperkuat pengembangan wilayah.
4. Mewujudkan destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal, yang kreatif dan inovatif.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan pembangunan Kabupaten Murung Raya selama 5 (lima) tahun ke depan diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter .
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang bermartabat berbasis nilai budaya dan kearifan lokal
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten yang inklusif dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Good Governance dan pemerintah yang dan bebas KKN.
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan standar hidup layak masyarakat merata dan berkelanjutan.
6. Meningkatnya kelestarian lingkungan.
7. Meningkatnya daya saing daerah di kancah nasional dan internasional.

Sasaran pembangunan yang harus dicapai hingga akhir periode pembangunan jangka menengah adalah:

1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan yang merata dan terjangkau.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

3 . Meningkatnya keamanan dan kearifan lokal.
4 . Meningkatnya daya saing ekonomi daerah berbasis sektor ungggulan.
5 . Meningkatnya kualitas tenaga kerja.
6 . Menurunnya kemiskinan masyarakat.
7 . Meningkatnya investasi daerah.
8 . Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
9 . Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
10 . Meningkatkan standar hidup layak masyarakat.
11 . Meningkatnya kualitas infrastuktur yang handal.
12 . Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
13 . Meningkatnya potensi pariwisata Kabupaten Murung Raya.

4.2.3.4 Rancangan RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023

Secara lebih spesifik, isu-isu strategis daerah Kabupaten Kapuas tahun 2018-2023 adalah:

1). Permasalahan aksesibilitas daerah, irigasi teknis, air bersih dan kelistrikan.
2). Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan di wilayah terpencil.
3). Peningkatan penyediaan lapangan kerja.
4). Peningkatan akses dan layanan kesehatan masyarakat.
5). Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah.
6). Peningkatan kerjasama para pelaku pembangunan yang mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7). Peningkatan investasi daerah sesuai prioritas daerah.
8). Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
9). Pengembangan nilai tambah dan pemasaran komoditas unggulan daerah.
10). Konsistensi kebijakan daerah dan layanan birokrasi yang mendukung prioritas dan kemandirian.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Kapuas Yang Lebih Maju, Sejahtera Dan Mandiri Melalui Pembangunan Yang Adil Dan Merata Serta Berkelanjutan”

Pemerintah Kabupaten Kapuas menetapkan 14 misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan yaitu:

1. Mempercepat pembangunan peningkatan jalan, jembatan, irigasi, jalan desa, jalan usaha tani, pelabuhan, terminal, pasar, listrik, air bersih, perumahan dan kawasan permukiman layak huni, jaringan komunikasi serta infrastruktur lainnya.
2. Meningkatkan usaha pertanian masyarakat yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan, dengan melibatkan para petani lokal dan transmigrasi, membuka pelatihan pertanian, agro bisnis dan agro industri dengan semangat kebersamaan sesuai falsafah Huma Betang dengan memberikan Kartu Petani dan Nelayan Sejahtera, pupuk, kapur, Saprodi, Alsintan dan Alat Tangkap GRATIS.
3. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memberikan kemudahan kepada dunia usaha serta tetap memperhatikan hak masyarakat.
4. Memberikan kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi, memfasilitasi kehadiran investor pada bidang hilirisasi sesuai potensi sumber daya alam dan masyarakat bekerja di perusahaan yang sudah operasional (sawit dan batubara)
5. Mengoptimalkan dan mewujudnyatakan kemitraan antara pemerintah, pengusaha atau pihak ketiga dan masyarakat secara harmonis yang saling menguntungkan
6. Melindungi, menghargai dan mengakui tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah, bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas melalui kelembagaan adat Dayak

7. Meningkatkan peran perusahaan daerah untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daerah guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang, menerima guru kontrak untuk memberikan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesempatan kepada semua golongan masyarakat memperoleh pendidikan bermutu pada tingkat SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA, baik negeri maupun swasta serta memberikan beasiswa Kepada Lulusan SLTA/MA di Kabupaten Kapuas yang memperoleh ranking 1 s/d 3 untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi serta mewujudkan berdirinya Universitas Kapuas
9. Mengembangkan dan mendorong peningkatan pendidikan keterampilan bagi kaum wanita, kelompok pemuda, remaja putus sekolah, penyandang cacat melalui kemitraan, balai latihan kerja dan memberikan pelatihan perbengkelan modern untuk meraih kehidupan yang lebih baik
10. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang mudah, adil dan merata, menerima tenaga kontrak bidang kesehatan serta pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan obat-obatan, dan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Dengan Menyediakan Kartu Kapuas Sehat untuk BPJS GRATIS
11. Meningkatkan pembinaan kegiatan kepemudaan (Bagi Yang Putus Sekolah Diberikan Pelatihan Perbengkelan, dan Jasa Lainnya), kepramukaan, olahraga, seni budaya serta pengembangan pariwisata
12. Meningkatkan peran, fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, RT/RW, Guru Agama, Guru Mengaji, Guru Sekolah Minggu, Damang, Mantir, Basir, Pemangku Agama Hindu, Pedanda, Babinsa, Babinkamtibmas dan meningkatkan Insentif Guru Mengaji, Kaum Masjid, Guru Sekolah Minggu, Damang, Mantir, Kepala Handel, Basir, Pemangku

Agama Hindu, Pedanda, Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri, RT, Kepala Desa, BPD Desa dan Petugas Pemadam Kebakaran serta mengalokasikan anggaran pembangunan yang dikelola Kelurahan setara dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

13. Meningkatkan kerukunan, kedamaian, keimanan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan dengan melibatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM serta komunitas masyarakat lainnya.
14. Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan ASN, tenaga kesehatan, guru-guru kontrak, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas, dan meningkatkan Tunjangan Daerah bagi Pejabat dan ASN, serta meningkatkan Insentif guru - guru kontrak, tenaga kesehatan kontrak.

4.2.3.5 RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019

Visi Kabupaten Tabalong Tahun 2015 – 2019 adalah:

“ Menuju Kabupaten Tabalong yang Agamais, Sejahtera dan Mandiri “

Untuk mewujudkan Visi tersebut, disusun 3 (tiga) Misi sebagai berikut :

1). Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Agamais.
2). Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
3). Mewujudkan Kemandirian dengan Membangun dan mengembangkan Potensi Sumber Daya.

Prioritas Pembangunan Tabalong Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintah yang melayani rakyat.
2. Peningkatan pembangunan agribisnis dengan menyediakan bibit gratis untuk petani, pupuk yang murah serta peningkatan pendapatan petani karet dengan membangun crumb rubber mini yang akan dikelola oleh koperasi petani karet.

3. Menyediakan pendidikan yang murah dan berkualitas, memberikan beasiswa kepada anak keluarga miskin dan berprestasi, menyediakan angkutan bus untuk pelajar dan guru serta perbaikan tunjangan untuk guru dan tunjangan khusus untuk guru di daerah terpencil dan bantuan dana pendidikan untuk guru.
4. Menyediakan pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas, pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin dan perbaikan tunjangan daerah untuk tenaga medis dan paramedis serta tunjangan khusus untuk yang bertugas di daerah terpencil.
5. Membuka 5000 lapangan kerja baru bagi putra/putri Tabalong dengan memberikan pelatihan keterampilan kerja dan permodalan usaha.
6. Menganggarkan dana 1 (satu) milyar untuk tiap desa melalui gerakan membangun desa terpadu.
7. Beras gratis untuk keluarga miskin.
8. Asuransi untuk ulama, guru agama, khatib, bilal dan kaum mesjid serta menyediakan dana untuk kegiatan majelis ta'lim, pengajian, seni budaya Islam dan kegiatan keagamaan lainnya serta membangun pesantren pendidikan Al – Qur'an serta pesantren modern.
9. Perbaikan tunjangan aparat pemerintah daerah serta aparat dan pamong desa.
10. Menganggarkan dana abadi untuk pelayanan kesehatan dan beasiswa bagi keluarga miskin serta untuk olahraga dan pengembangan seni budaya.
11. Peningkatan pembangunan jalan, jembatan, prasarana pertanian dan air bersih serta listrik pedesaan.
12. Meningkatkan keterampilan dan bantuan permodalan untuk kaum wanita untuk menunjang ekonomi keluarga serta menata industri perkayuan melalui peningkatan keterampilan dan bantuan permodalan.
13. Pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.

4.2.3.6 RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016-2021

Sebagai salah satu dari daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Barito Utara dipandang perlu dilakukan telaahan terhadap RPJMD Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Visi Daerah jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kutai Barat Tahun 2016 – 2021 yaitu :

"Terwujudnya Kutai Barat Yang Semakin Adil, Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia"

Sedangkan Misi untuk mewujudkan Visi di atas di tetapkan Tujuh butir sebagai berikut :

1). Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar publik yang semakin merata ke seluruh wilayah Kutai Barat;
2). Peningkatan kualitas SDM melalui penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang semakin berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
3). Reformasi tata kelola pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan murah;
4). Pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi potensial dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
5). Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lokal, terutama masyarakat miskin dan tidak mampu;
6). Penerapan nilai-nilai keagamaan dan budaya luhur dalam upaya menciptakan lingkungan dan hubungan sosial yang harmonis, tertib dan aman berbasiskan sikap toleransi, tenggang rasa, dan gotong royong;
7). Pemberdayaan peran kampung, pemuda dan perempuan sebagai basis pembangunan masyarakat.

Prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2016-2021, meliputi:

1. Meningkatkan keterbukaan akses, antar wilayah kecamatan dan kampung maupun dengan daerah lain.
2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
3. Meningkatnya cakupan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi.
4. Meningkatnya pemanfatan ruang wilayah sesuai peruntukkannya.
5. Meningkatnya kualitas dan mutu pelayanan pendidikan yang layak.
6. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya minat masyarakat untuk membaca dan belajar.
7. Meningkatkan akses bagi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
8. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di kampung-kampung.
9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB.
10. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
11. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian dalam perencanaan pembangunan.
12. Penataan dan penguatan sistem administrasi kependudukan.
13. Meciptakan tertib administrasi kearsipan dan penyelamatan/ pelestarian dokumen/arsip daerah.
14. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan prosedur serta mekanisme perijinan yang lebih cepat (faster), lebih mudah (easier) dan lebih murah (cheaper).
15. Upaya untuk meningkatkan daya saing koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kutai Barat, sehingga mampu menjadi soko guru perekonomian.
16. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah pertanian.

17. Upaya mendukung kebijakan kedaulatan pangan di tingkat lokal, regional dan nasional.
18. Pengembangan kemitraan pariwisata, baik antar pemerintah, maupun antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha wisata yang ada di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
19. Meningkatkan terciptanya lapangan kerja formal dan informal di masyarakat.
20. Pembangunan hutan secara berkelanjutan, melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dan memperkuat basis produksi.
21. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
22. Terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan bagi masyarakat miskin.
23. Upaya tanggap darurat penanggulangan bencana.
24. Menciptakan rasa aman, toleransi, saling pengertian dan kebersamaan antar etnik dan golongan dalam kehidupan bermasyarakat.
25. Upaya pengembangan nilai budaya yang berorientasi pada pelestarian dan aktualisasi adat budaya lokal.
26. Meningkatkan peran aktif, partsisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan pemerintahan kampong.
27. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah.
28. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif perempuan dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah.

4.2.4 Isu Strategis Lokal

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya,

dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

4.2.4.1 RPJPD Kabupaten Barito Utara 2005-2025

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005–2025 merupakan pedoman pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun. Atas dasar hal tersebut pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito Utara memiliki visi:

"Kabupaten Barito Utara yang Sejahtera, Maju, Adil, Mandiri"

Dalam upaya mewujud-nyatakan Masyarakat Kabupaten Barito Utara yang sejahtera, maju, adil dan mandiri tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara, yaitu :

1. **Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**.

   Manusia adalah modal utama pembangunan dan yang akan menikmati hasil-hasil pembangunan. Manusia yang berkualitas akan tercipta melalui pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian serta keagamaan. Karenanya pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan harus dapat menjamin bahwa tingkat perekonomian masyarakat tidak menjadi kendala utama bagi masyarakat untuk memperolehnya. Perekonomian yang maju secara merata diberbagai daerah akan memacu dan memberi peluang untuk dapat memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas. Pembangunan bidang pendidikan harus disertai dan dilengkapi dengan pembangunan keagamaan yang berkualitas sehingga terjamin bahwa manusia yang terbangun di Kabupaten Barito Utara adalah menusia dengan kualitas keahlian, keterampilan yang berkualitas lebih baik serta memiliki keimanan serta taqwa (Imtaq) kepada Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Barito Utara yang maju, mandiri, adil dan sejahtera, sehingga memiliki daya saing dalam era

globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan sumber daya manusia dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan dan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kesehatan yang semakin meningat, semakin berperannya perempuan dan generasi muda dalam pembangunan daerah. Pencapaian indikator Milenium Development Goal (MDGs) adalah menjadi tujuan utama yang harus diperhatikan untuk mensejajarkan bahkan melampaui prestasi yang diperoleh oleh Kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

2. **Membangun Infrastruktur Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Antar Wilayah.**

   Akses dan perhatian terhadap infrastruktur untuk kawasan perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur diperhatikan dengan seksama sehingga wilayah perbatasan mempunyai akses yang lebih baik untuk mencapai daerah Kabupaten Barito Utara lainnya dan Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya. Oleh karena itu pembukaan isolasi daerah dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan berkualitas sehingga mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah. Untuk itu, pembangunan transportasi dilaksanakan dengan mengembangkan jaringan pelayanan secara antarmoda dan intramoda; Sarana dan prasarana yang dikembangkan dapat bersifat massif, cepat dan sebanyak mungkin mengakomodasi kepentingan masyarakat, mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan; meningkatkan iklim kompetisi secara sehat agar dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan alternatif bagi pengguna jasa dengan tetap mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan umum yang terjangkau kepada masyarakat.

3. **Memperkuat Perimbangan dan Daya Saing Perekonomian Daerah.**

Pengembangan perekonomian yang berimbang pada berbagai daerah di Kabupaten Barito Utara sesuai potensinya akan memberikan pondasi yang kuat bagi pengembangan perekonomian Daerah yang kuat pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu perekonomian daerah dikembangkan dengan memperkuat perekonomian daerah serta berorientasi dan berdaya saing global. Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Interaksi antar daerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar daerah yang kokoh. Pembangunan perekonomian untuk daerah perbatasan dengan Kalimantan Timur harus dilakukan dengan lebih seksama karena nampaknya kawasan ini adalah kawasan yang harus mendapat perhatian lebih dari sebelumnya agar perekonomian pada seluruh daerah yang berbatasan dengan Kalimantan Timur berkembang secara berimbang dengan daerah lainnya di Kabupaten Barito Utara. Untuk itu peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan harus semakin ditingkatkan, baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam penciptaan pendapatan maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar: mengelola peningkatan produktivitas melalui inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian dan ketahanan daerah secara berkelanjutan; mengelola kelembagaan ekonomi termasuk jasa keuangan yang melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik secara berkelanjutan, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

4. **Mewujudkan Kabupaten Barito Utara Sejahtera dan Lestari.**

Kesejahteraan yang ingin diwujudkan adalah kesejahteraan yang bertumpu dan dibangun atas prinsip keberlanjutan, baik yang menyangkut sumberdaya alam, manusia dan modal. Oleh karena itu melalui misi ini pengelolaan pelaksanaan pembangunan Kabupaten

Barito Utara harus mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi. Upaya untuk meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan harus dibarengi dengan memperbaiki tatacara pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk yang mendukung perbaikan kualitas kehidupan manusia secara berkelanjutan seraya terus memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan dengan terus meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. Sumberdaya manusia yang ada harus terus ditingkatkan kualitasnya sehingga mampu memanfaatkan sumberdaya alam yang ada secara lestari dan bernilai tambah tinggi yang juga berarti akan menghasilkan kegiatan perekonomian yang lebih efisien yang dengan demikian harus dibarengi dengan pengembangan akses yang lebih mudah bagi semua masyarakat pada berbagai daerah untuk memperoleh modal.

5. **Mewujudkan Pembangunan Yang Merata Dan Berkeadilan.**

Pemerataan pembangunan pada seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara diwujudkan dengan mengembangan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan infrastruktur yang mendukung untuk berkembangnya potensi dimaksud. Secara khusus untuk daerah perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan dengan melakukan pengembangan potensi yang sinergis dengan pengembangan potensi yang dilakukan pada oleh Kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu perwujudan dari misi ini adalah dengan meningkatkan pembangunan daerah secara berimbang sesuai kebutuhan riil daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, mengembangkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah.

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilakukan secara terencana dengan menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi seraya terus menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk isu yang berhubungan dengan gender. Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta kapasitas lembaga legislatif daerah. Selain itu perhatian yang lebih besar harus diberikan untuk daerah perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka untuk memberikan rasa kebersamaan sebagai warga Kabupaten Barito Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito Utara saat ini memasuki tahap ke-4 (2018-2023) Rencana Program Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara 2005-2025 memiliki isu strategis sebagai berikut:

1. Isu Pembangunan Ekonomi
2. Isu Pembangunan Sosial
3. Isu Pembangunan Infrastruktur
4. Isu Pembangunan Hukum, Politik, dan Pemerintahan
5. Isu Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
6. Isu Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
7. Isu Kerjasama Antar Daerah

Tujuan dari tahap keempat Rencana Program Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Daya saing perekonomian Kabupaten Barito Utara semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian,

pariwisata dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur penegak hukum di daerah makin mampu mendukung pembangunan.

Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat dan merata sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah/kabupaten lain di Kalimantan Tengah dan di Indonesia, yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; serta kesejahteraan dan perlindungan anak; Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi (darat/rel, pelabuhan, dan udara), terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian dan pariwisata.

Pelaksanaan pembangunan berkesinambungan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian

fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.

4.2.4.2 RTRW Kabupaten Barito Utara 2019-2039

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun. Sebelum menelaah struktur dan pola ruang tersebut, maka perlu ditelaah tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2019-2039, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkeseimbangan lingkungan berbasis pengembangan pertanian, agroindustri, pertambangan dan pariwisata.

Kemudian untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Barito Utara disusun kebijakan penataan ruang yang meliputi:

a. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan.
b. Pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah.
c. Pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstentifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
d. Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri.
e. Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri).
f. Pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan.
g. Pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah.

Tujuan tersebut juga dijabarkan kembali kedalam strategi penataan ruang wilayah Kabupaten antara lain :

a. Strategi pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan, meliputi :
   1. Mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi lahan hutan, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan bahaya rawan kebakaran hutan, dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan.
   2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
   3. Memastikan penetapan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi.
   4. Mempertahankan prosentase kawasan hutan dan non hutan berdasarkan fungsinya.
   5. Memberikan ijin usaha pengelolaan pertambangan secara terkendali dan terkoordinasi.
   6. Melakukan penertiban secara berkala dan kontinyu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.

b. Strategi pengembangan Prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah, meliputi :
   1. Membangun Prasarana dan sarana wilayah untuk mendukung keseimbangan dan konsistensi arahan pemanfaatan ruang wilayah.
   2. Mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berorientasi pada keterpaduan antara perkotaan dan perdesaan sebagai satu kesatuan wilayah.
   3. Mensyaratkan kepada pengelola pertambangan /perkebunan untuk berkontribusi langsung dalam upaya pengembangan Prasarana dan sarana dasar wilayah/kawasan.

c. Strategi pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstentifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, meliputi :

1. Mendorong pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan terintegrasi berbasis kawasan demi terciptanya kawasan ekonomi produktif yang mampu merangsang pertumbuhan sektor lainnya dan meningkatkan perkembangan kawasan secara lebih luas.
2. Meningkatkan teknologi pertanian ramah lingkungan, sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Memperluas lahan pertanian dalam rangka mendukung pola ekstentifikasi pertanian.
4. Membangun dan meningkatkan prasarana pertanian.
5. Penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaannya.
6. Membentuk dan mengembangkan kemitraan antara perusahaan perkebunan besar dengan perkebunan rakyat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.

d. Strategi pengembangan industri Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri, meliputi :

1. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur jaringan transportasi darat, sungai, udara dan jaringan prasarana lainnya yang terintegrasi dan pada kawasan aglomerasi industri.
2. Mendorong masuknya penanaman modal untuk melakukan investasi dan kegiatan industri melalui upaya-upaya promosi dan kemudahan pelayanan perizinan
3. Mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja dan pengembangan potensi lokal bagi masyarakat
4. Mendorong kerjasama penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan kegiatan industri.

5. Mendorong terciptanya jaringan pemasaran hasil industri melalui upaya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kerjasama antar daerah disektor ekonomi termasuk kerjasama perdagangan dan pemasaran.

e. Strategi pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri), meliputi :
   1. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro (pertanian, perkebunan dan kehutanan) yang ramah lingkungan sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis).
   2. meningkatkan kegiatan agroindustri melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
   3. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan melalui intensifikasi dan teknologi perkebunan yang ramah lingkungan.
   4. memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi.
   5. mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

f. Strategi pengembangan sektor pertambangan dengan prinsif pengelolaan berkelanjutan, meliputi :
   1. Memetakan potensi pertambangan secara lebih detail dan jelas dalam rangka memberikan informasi secara jelas tentang potensi pertambangan kepada peminat usaha pertambangan.
   2. Memberikan informasi secara jelas dan tegas mengenai aturan dan prosedur pengelolaan pertambangan terkait pelestarian lingkungan hidup.
   3. Memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup.

4. Merumuskan prosedur perijinan bagi kegiatan usaha pertambangan terkait pemanfaatan, pengendalian dan pengawasannya.
5. Memberikan ijin usaha pengelolaan pertambangan secara terkoordinasi dan terkendali.
6. Memperluas jaringan penjualan hasil-hasil pertambangan
7. Membangun jaringan infrastruktur angkutan khusus hasil pertambangan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat umum.
8. Melakukan penertiban secara berkala dan kontinyu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.

g. Strategi pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah, meliputi :
   1. Melakukan inventarisasi dan penggalian potensi wisata daerah.
   2. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukungnya.
   3. Menyelenggarakan even-even wisata tahunan dan terjadwal, sehingga mampu menarik wisatawan.
   4. Meningkatkan pengelolaan objek wisata yang lebih professional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

Rencana kawasan strategis Kabupaten berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah terdiri dari :

1. Kawasan strategis nasional

   Pengembangan Kawasan Strategis Nasional adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Pulau meliputi :

   a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
      - kawasan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, minyak dan gas bumi tersebar di 9 (sembilan kecamatan di wilayah kabupaten.

- kawasan pusat kegiatan wilayah kota Muara Teweh dan sekitarnya untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional.
- Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito sebagai pengembangan atau peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).
- infrasturktur jalur kereta api dari Puruk Cahu – Bengkuang melalui kabupaten Barito Utara sebagai peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional.

b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di kecamatan Lahei sebagai pengembangan Pembangkitan Tenaga Listrik Nasional.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :
   - Wilayah Sungai (WS) Barito sebagai konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengemdalian daya rusak air.
   - kawasan suaka alam Pararawen di kecamatan Teweh Tengah sebagai pengembangan kawasan lindung nasional.
   - kawasan jantung kalimantan/Heart of Borneo (HoB) sebagai pengembangan atau peningkatan kualitas kawasan strategis nasional.

2. Kawasan strategis provinsi

   Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi :

   a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas :
      - kawasan *food estate* di provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Kecamatan Gunung Timang, Teweh Selatan, Teweh Baru, Montallat, Teweh Timur dan Gunung Purei.
      - kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis di kecamatan Teweh Selatan, Gunung Timang dan Montallat.

- kawasan pengembangan peternakan ruminansia dan non ruminansia tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
- kawasan perkebunan kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
- kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu kawasan strategis sekitar kawasan adat masyarakat terutama bagi umat Hindu Kaharingan di kecamatan Teweh Tengah, Lahei Barat, Gunung Purei dan Gunung Timang.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan berpotensi pengembangan sumberdaya energi di kecamatan Lahei.

d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :
   - kawasan strategis Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito di Kecamatan Lahei Barat, Lahei, Teweh Tengah, Teweh Baru, Teweh Selatan dan Montallat.
   - kawasan strategis Heart of Borneo (HoB) di kecamatan Lahei.
   - Cagar alam Pararawen I dan II di kecamatan Teweh Tengah sebagai kawasan strategis perlindungan keanekaragaman hayati.

3. Kawasan strategis kabupaten

   Kawasan strategis kabupaten, meliputi :

   a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :
      - kawasan aglomerasi industri di sekitar kawasan energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di kecamatan Lahei.
      - kawasan berbasis pertanian Trinsing dan Trahean di kecamatan Teweh Selatan sebagai kawasan pengembangan agrowisata dan agropolitan.
      - kawasan pariwisata tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu kawasan kearifan lokal budaya dan masyarakat adat hutan lindung Gunung Lumut di kecamatan Gunung Purei.
c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan potensi minyak dan gas bumi di kecamatan Lahei, Teweh Baru dan kecamatan Teweh Timur.
d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan keanekaragaman hayati danau Butong di Kecamatan Teweh Selatan.

Rencana kawasan strategis ini digambarkan dalam peta seperti pada gambar berikut.

Gambar IV.1
Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Barito Utara

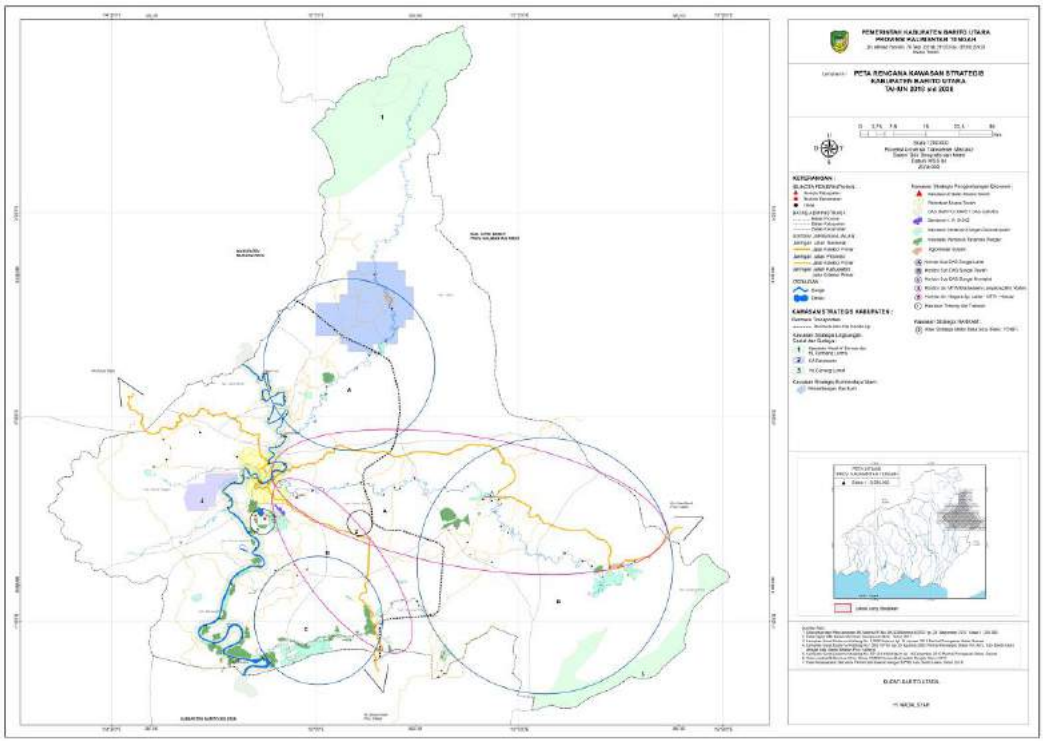

-Hasil Revisi Pasca Klinik Peta dan Raperda RTRWK Barito Utara, 23 - 24 November 2018.
-Hasil Pembahasan Raperda tentang RTRWK di DPRD, 12 Desember 2018.

Sedangkan untuk Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara terdiri dari :

a. Sistem perkotaan dan pusat-pusat kegiatan lainnya.
b. Sistem jaringan prasarana utama.
c. Sistem jaringan prasarana lainnya.

Perwujudan rencana Struktur ruang wilayah tersebut kemudian dijabarkan melalui indikasi program dan kegiatan pada tabel berikut :

Tabel IV.9.
Indikasi Program dan Kegiatan Rencana Struktur Ruang Wilayah

No	Program	Kegiatan
Sistem perkotaan dan pusat-pusat kegiatan lainnya		
1	Peningkatan fungsi PKW Muara Teweh	Penyusunan Masterplan sistem transportasi
		Pengembangan perkantoran pemerintahan
		Peningkatan Sistem Angkutan Umum darat, sungai, udara
		Peningkatan fasilitas terminal tipe A, AKAP
		Peningkatan Dermaga dan Moda transportasi sungai
		Pembangunan, peningkatan fasilitas Bandara Trinsing
		Pembangunan Trase Jalur Kereta Api 120 km (wil. Kab. Barito Utara
		Pengembangan Interkoneksi, Jaringandan kapasitas PLTMG
		Masterplan Penataan Kawasan Aglomerasi Industri
		Peningkatan kapasitas PAM
		Pengembangan fasilitas danskala pelayanan RSUD
		Pegembangan dan Penataan Kawasan Permukiman dan Perumahan
		Pembangunan/Peningkatan dan Penataan Kawasan Pasar
		Penataan dan DekorasiKota, serta layanan persampahan
		Pengembanganparasarana dan sarana Perguruan Tinggi
		Pembangunan Fasilitas peribadatan
		Peningkatan Fasilitas Keuangan, Jasa, Perbankan
2	Peningkatan Fungsi PKL Kandui	Penyusunan RDTRK Kandui
		Peningkatan Pusat Perdagangan dan Jasa
		Peningkatan fasilitas dan skala pelayanan kesehatan
		Peningkatan skala pelayanan, fasilitas persampahan
		Pembangunan terminal tipe C dan peningkatan simpul transportasi darat
		Peningkatan Fasillitas Keuangan dan Perbankan
		Peningkatan Pasar Rakyat
		Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan
		Pembangunan Fasilitas peribadatan
		Pengembangan Pertanian Pangan
3	Peningkatan Fungsi PPK Hajak	Penyusunan RDTRK Hajak
		Peningkatan Pusat Perdagangan
		Peningkatan fasilitas dan skala pelayanan kesehatan
		Peningkatan skala pelayanan, fasilitas persampahan
		Peningkatan simpul transportasi darat
		Peningkatan Fasillitas Keuangan dan Perbankan
		Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan
		Pembangunan Fasilitas peribadatan
4	Peningkatan Fungsi PPK Trahean	Penyusunan RDTRK Trahean
		Peningkatan Pusat Perdagangan
		Peningkatan fasilitas dan skala pelayanan kesehatan

No	Program	Kegiatan
		Peningkatan skala pelayanan, fasilitas persampahan
		Pembangunan fasilitas perhubungan udara, Pembangunan terminal tipe C dan peningkatan simpul transportasi darat
		Pegembangan dan Penataan Kawasan Permukiman dan Perumahan
		Peningkatan Fasillitas Keuangan dan Perbankan
		Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan
		Pembangunan Fasilitas peribadatan
		Pengembangan Pertanian Pangan dan Perikanan
		Pengembangan Kawasan wisata dan fasilitas pendukungnya
5	Peningkatan Fungsi PPK Muara Lahei	Penyusunan RDTRK Muara Lahei
		Peningkatan Pusat Perdagangan
		Peningkatan fasilitas dan skala pelayanan kesehatan
		Peningkatan skala pelayanan, fasilitas persampahan
		Pembagunan/ Peningkatan Dermaga dan Moda Sungai, serta simpul transportasi darat
		Peningkatan Fasillitas Keuangan dan Perbankan
		Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan
		Pembangunan Fasilitas peribadatan
6	Peningkatan Fungsi PPK Tumpung Laung	Penyusunan RDTRK Tumpung Laung
		Peningkatan Pusat Perdagangan
		Peningkatan fasilitas dan skala pelayanan kesehatan
		Peningkatan skala pelayanan, fasilitas persampahan
		Pembagunan/ Peningkatan Dermaga dan Moda Sungai, simpul transportasi darat
		Penyediaan kelistrikan
		Peningkatan Fasillitas Keuangan dan Perbankan
		Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan
		Pembangunan Fasilitas peribadatan
		Pengembangan Pertanian Pangan
7	Peningkatan Fungsi PPK Benangin	Penyusunan RDTRK Benangin
		Peningkatan Pusat Perdagangan
		Peningkatan fasilitas dan skala pelayanan kesehatan
		Peningkatan skala pelayanan, fasilitas persampahan
		Pembagunan/ peningkatan simpul transportasi darat
		Peningkatan Fasillitas Keuangan dan Perbankan
		Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan
		Pembangunan Fasilitas peribadatan
		Penyediaan kelistrikan
8	Peningkatan Fungsi PPK Benao Hilir	Penyusunan RDTRK Benao Hilir
		Peningkatan Pusat Perdagangan
		Peningkatan fasilitas dan skala pelayanan kesehatan
		Peningkatan skala pelayanan, fasilitas persampahan
		Pembagunan/ Peningkatan Dermaga dan Moda Sungai, simpul transportasi darat
		Peningkatan Fasillitas Keuangan dan Perbankan
		Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan
		Pembangunan Fasilitas peribadatan
		Penyediaan kelistrikan
9	Peningkatan Fungsi PPK Lampeong	Penyusunan RDTRK Lampeong
		Peningkatan Pusat Perdagangan Pasar, pengumpul kerajinan lokal

No	Program	Kegiatan
		Peningkatan fasilitas dan skala pelayanan kesehatan
		Peningkatan skala pelayanan, fasilitas persampahan
		Pembagunan/ peningkatan simpul transportasi darat
		Peningkatan Fasillitas Keuangan dan Perbankan
		Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan
		Pembangunan Fasilitas peribadatan
		Penyediaan kelistrikan
10	Peningkatan Fungsi PPL Desa Sei. Rahayu II, Desa Sikui dan Desa Karendan	Peningkatan Perdagangan dan Jasa
		Peningkatan Fasillitas Keuangan dan Perbankan
		Peningkatan fasilitas dan skala pelayanan kesehatan
		Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan
		Peningkatan Simpul dan Moda Transportasi darat dan Sungai
Sistem Jaringan Prasarana Utama		
1	Peningkatan dan Pengembangan Jalan	Ruas Jalan Kolektor Primer 1 (KP1)
		Ruas Jalan Kolektor Primer 3 (KP3)
		Ruas Jalan lokal Primer (LP)
		Ruas Jalan Lingkungan
2	Peningkatan Terminal	Terminal Tipe A
		Terminal Tipe C
		Terminal Tipe C
3	Peningkatan jangkauan, kapasitas dan Moda Transpor-tasi Sungai	Pelabuhan dan Moda Angkutan Sungai
4	Optimalisasi	Bandar Udara Beringin Muara Teweh
5	Peningkatan	Bandar udara H. M. Sidiq
6	Pembangunan Trase Jalur Kereta Api Umum 120 km, lebar 60 m (Wil. Kabupaten Barito Utara)	Rencana Rel
7	Pembangunan Stasiun Kereta Api	Pembangunan Stasiun Kereta Api
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya		
1	Pengembangan	pengembangan PLTMG
2	Peningkatan Jaringan SUTT, SUTM, Jaringan Distribusi, Jaringan SR	Perluasan layanan listrik
		Penyediaan layanan energi untuk Aglomerasi Industri
3	Peningkatan& Pengembangan	Fasilitasi pengembangan usaha pelayanan telakomunikasi operator swasta/BUMN
		Penataan dan efisiensi penempatan BTS
		Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk operasionalisasi kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk
4	Peningk./ Pengemb. Daerah Irigasi dan Daerah Rawa	Peningkatan layanan pengairan dan Pembangunan Bendung, Jaringan Irigasi, Bangunan Pelengkap

No	Program	Kegiatan
5	Normalisasi Sungai	Normalisasi aliran sungai
6	Revitalisasi Sungai	Penguatan tebing
7	Pengelolaan transportasi dan sumber energi dari DAS Barito dan Sub DAS	Pembangunan Bendung DAS Barito dan Sub DAS
8	Air Minum	Peningkatan, pengembangan kapasitas debit dan skala pelayanan IPA
9	Persampahan	Pengelolaan Persampahan
		Peningkatan TPASanitary Landfilldan TPA Air Limbah
		Pengembangan TPA Sanitary Landfill
10	Air Limbah	Pembangunan Sistem Terpadu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal
11	Limbah Tinja	Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2019

Rencana Pola ruang wilayah Kabupaten Barito Utara yang meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya di jabarkan ke dalam tabel peruntukan ruang dan luasan rencna pola ruang berikut :

Tabel IV.10.
Peruntukan Ruang Dan Luasan Rencana Pola Ruang
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2038

NO	PERUNTUKAN RUANG	LUAS (Ha)	Persentase		KETERANGAN
I.	**KAWASAN HUTAN**	**872.701,28**	**86,75**	**%**	Sesuai SK. 529/Menhut-II/2012
A.	**Kawasan Lindung :**				
1.	Kaw. Perairan	7.226,94	0,72	**%**	Sesuai SK. 529/Menhut-II/2012
2.	KSA/KPA	5.927,76	0,59	**%**	Sesuai SK. 529/Menhut-II/2012
3.	Hutan Lindung (HL)	35.799,42	3,56	**%**	Sesuai SK. 529/Menhut-II/2012
	Jumlah Kawasan Lindung	*48.954,12*	*4,87*	**%**	
B.	**Kawasan Budidaya Kehutanan :**				
1.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	274.224,88	27,26	**%**	Sesuai SK. 529/Menhut-II/2012
2.	Hutan Produksi (HP)	310.953,25	30,91	**%**	Sesuai SK. 529/Menhut-II/2012
3.	Hutan Produksi dapat di konversi (HPK)	238.569,03	23,72	**%**	Sesuai SK. 529/Menhut-II/2012
	Jumlah Kaw. Budidaya Kehutanan	*823.747,16*	*81,89*	**%**	

II.	**KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN -**	**133.256,73**	**13,25**	**%**	Sesuai SK. 529/Menhut-II/2012
	AREL PENGGUNAAN LAINNYA (APL)				
1.	Kawasan Permukiman	14.024,06	1,39	%	Kota, Desa dan Transmigrasi
2.	Kawasan Pertanian	55.170,94	5,48	%	Tanaman Pangan
3.	Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan	663,33	0,07	%	Tanaman Pangan
4.	Kawasan Perkebunan	55.929,79	5,56	%	Kebun Masy., HGU/PKH Pusat
5.	Fasilitas Sosial-Umum	65,67	0,01	%	Bandara H.M.Sidiq
6.	Kawasan Industri	429,27	0,04	%	PLTMG, Aglomerasi Industri
7.	Kawasan Wisata	1,77	0,00	%	Potensi Obyek dan Atraksi Wisata
8.	Kawasan Budidaya Lainnya	6.971,90	0,69	%	Perizinan Batubara, Keg. Budidaya Lain
	TOTAL PURUNTUKAN RUANG I + II	**1.005.958,01**	**100,00**	**%**	
III.	**PEMANFAATAN DAN KEGIATAN DILUAR KEHUTANAN**				
	YANG MASUK KAW. HUTAN *(OUTLINE)*				
1.	Kawasan Permukiman	5.977,98	0,01	%	Kota, Desa dan Usulan Transmigrasi
2.	Kawasan Pertanian	4.077,46	0,41	%	Tanaman Pangan
3.	Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan	9.267,93	0,92	%	Cad. Lahan Tanaman Pangan pada HPK
4.	Kawasan Perkebunan Rakyat	181.838,43	18,08	%	Eksisting kebun masyarakat
5.	Fasilitas Sosial-Umum	129,21	0,01	%	Kaw. Bandara H.M.Sidiq
6.	Kawasan Wisata	184,83	0,02	%	Kaw. Buper dan Wisata Air Terjun
7.	Perizinan Non Kehutanan	352.374,99	35,03	%	IUP-OP, PKP2B dan Izin Lokasi Kebun
	TOTAL YANG DI OUTLINE	**553.850,83**	**55,06**	**%**	

Sumber : -SK. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah.
-Hasil Revisi Pasca Klinik Peta dan Raperda RTRWK Barito Utara, 23 - 24 November 2018.
-Hasil Pembahasan Raperda tentang RTRWK di DPRD, 12 Desember 2018.

4.2.4.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2018-2023

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan

diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 juga wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan / atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/ program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/ atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mans Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan diharapkan KRP

yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Dalam konteks pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), KLHS menjadi kerangka integratif untuk:

1. Meningkatkan manfaat pembangunan.
2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan.
3. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun antarnegara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program.
4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
5. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut:

1. Isu pembangunan berkelanjutan pilar sosial, dengan tujuan untuk :
   - Mengentaskan segala bentuk kemiskinan;
   - Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.
   - Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia.
   - Menjamin kulitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.
   - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

2. Isu pembangunan berkelanjutan pilar ekonomi, dengan tujuan untuk :
   - Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua.
   - Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong investasi.
   - Mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara.
   - Menguatkan cara pelaksanaan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.
3. Isu pembangunan berkelanjutan pilar lingkungan, dengan tujuan untuk :
   - Menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
   - Membangun kota dan permukiman yang inklusif , aman, tangguh dan berkelanjutan.
   - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
   - Membuat langkah segera untuk mengatasi iklim dan dampaknya.
   - Melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutann ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi penggunaan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
4. Isu pembangunan berkelanjutan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan, dengan tujuan untuk :
   - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh.

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data yang dilakukan oleh Tim Penyusun KLHS Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 menunjukkan bahwa indikator TPB di Kabupaten Barito Utara yang telah dilaksanakan dan mencapai target baru mencapai 48 indikator dari total 140 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten. Berikut komposisi secara keseluruhan terhadap capaian TPB di Barito Utara (Gambar IV.2)

Gambar IV.2
Proporsi Capaian TPB Kabupaten Barito Utara

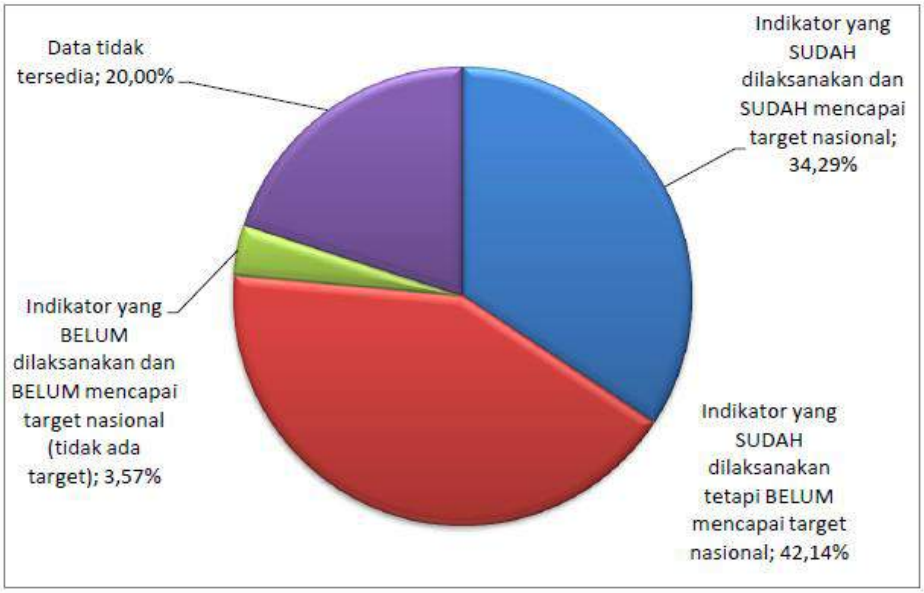

Kabupaten Barito Utara, telah melaksanakan indikator TPB meliputi 16 TPB. Adapun TPB yang tidak dapat dilaksanakan adalah TPB 7 yaitu energi bersih dan terjangkau serta TPB 14 yaitu ekosistem lautan. TPB tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten Barito Utara karena bukan merupakan kewenangan kabupaten dan tidak sesuai dengan keadaan Kabupaten Barito Utara. Untuk lebih jelas sebaran indikator TPB di Kabupaten Barito Utara dalam setiap TPB dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.11
Capaian Indikator TPB di Kabupaten Barito Utara

Tujuan TPB	Jumlah indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional	Jumlah indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional	Total indikator yang telah dilaksanakan
1	9	12	21
2	5	5	10
3	6	9	15
4	5	3	8
5		6	6
6	3	4	7
7	-	-	-
8	1	7	8
9	4	2	6

Tujuan TPB	Jumlah indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional	Jumlah indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional	Total indikator yang telah dilaksanakan
10	1	-	1
11	7	-	7
12	1	-	1
13	1	-	1
14	-	-	-
15	-	-	-
16	4	8	12
17	1	3	4

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

Secara lengkap seluruh kajian serta skenario alternatif dan rekomendasi sebagaimana tercantum dalam dokumen KLHS yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018-2023.

Berdasarkan hasil KLHS dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek lingkungan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) untuk meminimalisasi dampak lingkungan, sebaliknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Barito Utara. Dengan minimnya dampak tersebut, maka diharapkan integrasi hasil KLHS ini dalam RPJMD mampu menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara.

4.2.4.4 Isu Strategis Berdasarkan Analisis Permasalahan

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Barito Utara yang diperoleh dari analisis permasalahan daerah adalah sebagai berikut :

1. **Belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah**

   Penentuan isu strategis tersebut didasarkan atas beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain :

   - Belum optimalnya pelayanan infrastruktur.
   - Belum optimalnya pengelolaan pertanahan dan tata ruang.
   - Konektivitas antar wilayah masih belum optimal.
   - Resiko terjadinya bencana masih ada.

Belum optimalnya pelayanan infrastruktur adalah permasalahan yang sebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- Masih belum optimalnya penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan.
- Belum optimalnya penyediaan prasarana, prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman (jalan lingkungan, limbah, persampahan, sanitasi, air bersih dan rumah hunian yang layak).
- Kualitas dan kuantitas infrastruktur jaringan irigasi, rawa dan pengairan masih belum optimal.
- kurangnya fasilitas perlengkapan jalan yang disediakan.
- sarana dan prasarana gedung pemerintah masih kurang.
- masih belum tersedianya jaringan kelistrikan yang menjangkau seluruh kecamatan, desa/kelurahan.
- Belum optimalnya penyediaan perumahan dan permukiman yang berkualitas.
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana dan belum optimalnya kualitas layanan komunikasi dan informatika yang menjangkau seluruh wilayah Barito

Belum optimalnya pengelolaan pertanahan dan tata ruang adalah permasalahan yang sebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- Belum selesainya proses penyelesaian Legislasi Raperda tentang RTRWK dan RDTRK.
- pengelolaan pertanahan yang kurang optimal.

Konektivitas antar wilayah masih belum optimal adalah permasalahan yang sebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- pelayanan transportasi yang belum optimal.
- kondisi jalan yang belum seluruhnya dalam kondisi baik.

Resiko terjadinya bencana masih ada adalah permasalahan yang sebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- Penduduk masih bermukim di daerah yang rawan bencana (banjir, karhutla, tanah longsor).
- Sumber daya penanggulangan bencana masih kurang.

2. Sumber Daya Manusia Belum Kompetitif

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan atas beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain :

- Masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat dan prestasi generasi muda yang disebabkan oleh masih rendahnya APK dan APM pada semua jenjang pendidikan, belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana prasarana pendidikan,jJumlah maupun kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang, masih adanya masyarakat usia produktif yang belum melek huruf, masih rendahnya kunjungan ke perpustakaan dan masih rendahnya prestasi pemuda dan olah raga.
- Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh masih rendahnya kualitas kesehatan keluarga, belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, belum optimalnya ketahanan keluarga dan belum optimalnya penerapan kesehatan kerja dan olah raga.

3. Belum optimalnya tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan atas beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain :

- Belum optimalnya produksi pertanian, peternakan dan perkebunan yang disebabkan oleh; belum optimalnya pemberdayaan lahan potensial dan rendahnya produktivitas, belum optimalnya penerapan rekomendasi pola tanam intensifikasi dan dukungan sarana prasarana penunjang, Belum efektifnya sarana dan prasarana pertanian dalam menunjang produktivitas, usaha peternakan skala usaha dan produksi yang dihasilkan masih rendah dan kurang kompetitif, harga hasil produksi perkebunan tidak stabil; kemampuan dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil produk perkebunan masih rendah.
- Produksi perikanan belum optimal disebabkan masih terbatasnya kemampuan pelaku usaha untuk perikanan budidaya, faktor

kondisi alam, keterbatasan sarana dan prasarana dan jumlah unit produksi budidaya pelaku usaha dan pelaku utama, serta terbatasnya tenaga penyuluh perikanan dan SDM Pengawas/PPNS di perairan umum.

- Belum optimalnya produksi pangan untuk kebutuhan daerah disebabkan kuantitas dan kualitas sarana / prasana pertanian, optimalisasi lahan potensial dan pemberdayaan masyarakat tani yang masih kurang.
- Belum optimalnya nilai usaha industri disebabkan karena Belum tersedianya Peraturan Daerah Tentang Rencana Pengembangan Industri Daerah (RPIK) dan kualitas produksi masih belum bersaing dengan kuantitas yang terbatas.
- Belum optimalnya nilai usaha perdagangan yang dipengaruhi oleh Sarana dan prasarana pasar dan fasilitas penunjang pasar (pasar induk dan pasar tradisional) yang masih kurang, minimnya tempat bongkar muat barang dagangan serta harga kebutuhan pokok tidak stabil.
- Belum optimalnya Usaha Koperasi dan UMKM disebabkan karena ketatnya persaingan dunia usaha, rendahnya jiwa kewirausahaan, terbatasnya akses permodalan, kurangnya perlindungan terhadap KUMKM serta lemahnya kelembagaan KUMKM.
- Belum optimalnya penanganan PMKS disebabkan keterbatasan anggaran daerah yang tersedia dalam hal penanganan dan pemberdayaan PMKS.
- Masih rendahnya kunjungan wisata disebabkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata seperti fasilitas umum di objek wisata yang belum memadai, penyediaan akomodasi yang kurang, belum optimalnya kegiatan promosi pariwisata daerah, belum optimalnya pengelolaan peninggalan sejarah dan situs cagar budaya untuk dikembangkan menjadi objek pariwisata, masih rendahnya minat investor untuk mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan di Barito Utara, belum tersusunnya Road Map Kepariwisataan Daerah yang dapat dijabarkan ke dalam kebijakan

daerah serta minimnya peran stake holder, pelaku usaha wisata dan masyarakat.

- Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak disebakan antara lain; belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang, belum optimalnya PUG kaitan dengan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan disebabkan karena kualitas lembaga ekonomi desa tidak berkembang dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) juga masih belum optimal.
- Rendahnya produktivitas tenaga kerja disebabkan karena minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh tenaga kerja dan persebaran angkatan kerja yang tidak merata.
- Rendahnya realisasi investasi sebagai dampak dari Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih belum memadai, masih rendahnya tingkat inovasi dan capaian keberhasilan pelayanan penanaman modal dan kapasitas aparatur pada kelembagaan yang menangani penanaman modal masih belum optimal.

4. Meningkatnya kerawanan di masyarakat dan gangguan ketertiban umum

Penentuan isu strategis ini berdasarkan analisa terhadap beberapa permasalahan , antara lain :

- Belum optimalnya implementasi peraturan daerah, yang disebabkan oleh: dampak sosial adanya pembangunan/proyek strategis dan investasi usaha swasta, adanya pembangunan maupun usaha yang mengesampingkan perizinan, keterbatasan sarana prasarana dan personil serta PPNS, belum optimalnya kinerja ormas, organisasi sosial dan LSM, Pemahaman politik yang rendah dan tidak merata di masyarakat , menurunnya rasa nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air.

- Meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketertiban umum sebagai dampak dari adanya peluang investasi yang semakin terbuka, belum baiknya disiplin masyarakat dalam mematuhi hukum/peraturan perundang-undangan, belum optimalnya pembinaan kamtibmas swakarsa.

5. Belum Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan fungsi lingkungan hidup

Kesimpulan isu strategis ini berdasarkan beberapa permasalahan di daerah , antara lain :

- Belum optimalnya penanggulangan dan pengurangan resiko bencana, sebagai akibat Barito Utara sebagai daerah yang berpotensi rawan bencana banjir, karhutla dan longsor namun secara kelembagaan penanggulangan bencana daerah yang ada belum optimal.
- Resiko meningkatnya pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat dari belum disusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Masih rendahnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang yang disebabkan oleh masih terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan dampak belum selesainya Legislasi Raperda tentang RTRWK dan RDTRK.
- penyediaan PSU dan fasilitas umum untuk perumahan dan permukiman yang belum optimal, disebabkan kelembagaan dan tata kelola sampah, limbah dan pengelolaan air bersih yang masih belum optimal dan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana utilitas (PSU) di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang masih kurang.

6. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan atas beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain :

- Belum optimalnya kinerja pemerintahan yang disebabkan lemahnya pengendalian internal di masing-masing organisasi pemerintah daerah, belum optimalnya kualitas perencanaan daerah, belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah yang terus mengalami kenaikan, Belum optimalnya peningkatan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional, Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa.
- Belum optimalnya pelayanan publik sebagai dampak dari Belum optimalnya kualitas dan sistem pelayanan publik dan belum optimalnya informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ysng tersampaikan kepada masyarakat.

Latar belakang permasalahan pembangunan daerah yang telah diinventarisir dan dilakukan analisis, selanjutnya dikaitkan dengan keberadaan isu-isu strategis yang dihadapai. Dalam gambar berikut menyajikan rangkuman permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Barito Utara, yang bermuara pada isu strategis yang harus segera diselesaikan oleh Kabupaten Barito Utara.

Gambar IV.3
Analisis Isu Strategis yang Menghasilkan Permasalahan Utama Daerah

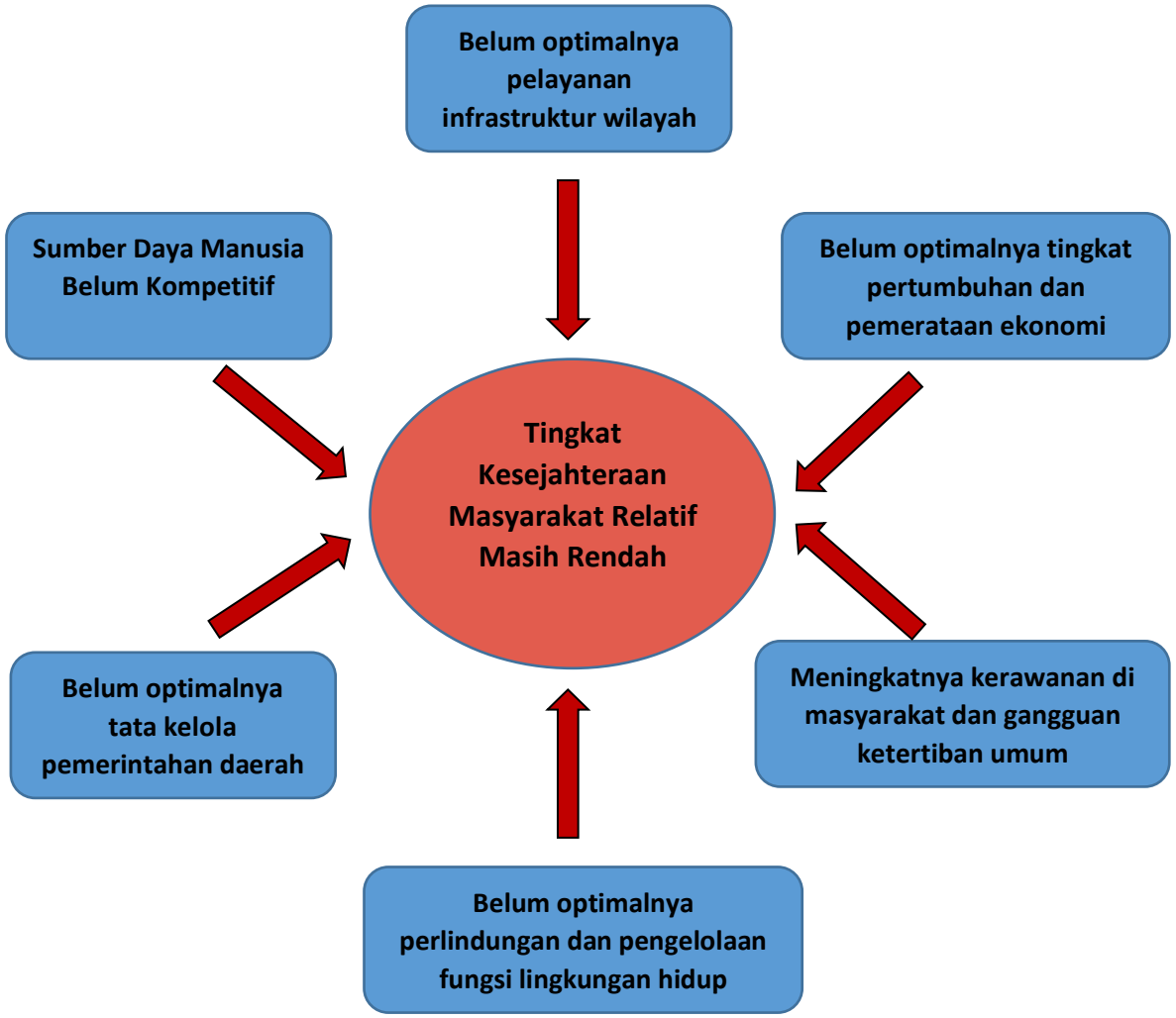

Masalah utama yang dihadapi oleh Kabupaten Barito Utara adalah tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah. Rendahnya kesejahteraan tersebut bermula dari belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah karena infrastruktur merupakan barang komplementer yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi. Terjaminnya ketersediaan infrastruktur dapat mendorong kegiatan ekonomi wilayah dan peningkatan pendapatan per kapita. Pembangunan ekonomi tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan tetapi memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan.

Dengan adanya pembangunan infrastruktur, kesenjangan antar wilayah dapat diminimalisasi, namun untuk memadukan pembangunan infrastruktur maka dilakukan pendekatan pembangunan melalui wilayah pertumbuhan. Membangun infrastuktur saat ini harus berbasis kewilayahan, sehingga

pembangunan infrastruktur tidak sekedar dalam bentuk fisik saja, tapi membangun kawasan yang terkoneksi satu sama lain. Kemudian juga suatu kawasan digali potensi yang ada, sehingga dapat berkembang dan juga memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Barito Utara akan memajukan daerah, menggerakkan ekonomi lokal, mengurangi ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan.

Sejumlah kendala membuat lambatnya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Utara seperti kualitas sumber daya manusia yang belum kompetitif, kelembagaan dan struktur sosial ekonomi dan ketersediaan infrastruktur yang kurang mendukung. Sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam yang cukup potensial tetapi belum bisa mendatangkan rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat karena berbagai permasalahan salah satunya adalah kualitas sumber daya manusia yang belum kompetitif. sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembangunan. Pada era globalisasi dan otonomi daerah. Sumberdaya manusia yang unggul dan berkualitas merupakan syarat penting bagi tercapainya pembangunan ekonomi. Pendidikan yang didukung oleh kesehatan dan fasilitas infrastruktur yang baik memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan memiliki makna bagi perbaikan kualitas bangsa, sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan potensi dasar yang dimiliki bangsa. Kebijakan fiskal menjadi instrumen penting dalam mengatasi permasalahan pembangunan. Peningkatan pengeluaran kesehatan dan pendidikan dapat meningkatkan akumulasi asset/modal SDM (*human capital).* Penanganan SDM sebagai *human capital* menunjukkan bahwa hasil dari investasi non fisik jauh lebih tinggi dibandingkan investasi berupa pembangunan fisik. Peningkatan *human capital* diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta dapat mendorong kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat memutus rantai kemiskinan. Kedepannya Kabupaten Barito Utara harus mengutamakan aspek pembangunan sumber daya manusia yang memiliki tiga pilar utama yaitu

pendidikan, kesehatan serta pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya.

Hal lain yang sangat berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat adalah belum optimalnya tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Karena meskipun pertumbuhan ekonomi di Barito Utara dari tahun ke tahun terjadi pertumbuhan yang positif, namun pertumbuhan yang diraih masih belum mencerminkan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat, dengan kata lain belum ada pemerataan kesejahteraan.

Menggapai pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Barito Utara, pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada dasarnya akan berkualitas, jika pertumbuhan ekonominya berkonstribusi menekan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi berkualitas juga tercermin dari aktivitas perekonomian yang mampu memberikan pemerataan pendapatan masyarakat, serta mendongkrak tumbuhnya lapangan kerja baru yang memiliki daya serap yang tinggi terhadap pertumbuhan tenaga kerja. Fokus pada pertumbuhan ekonomi berkualitas penting karena secara empirik berkorelasi positif terhadap penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan indikator kesejahteraan lainnya. Secara sederhana kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan tersebut ditandai oleh tiga hal yang fundamental. Pertama, semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin Kedua, semakin kecilnya jumlah penduduk usia produktif yang masih menganggur. Ketiga, semakin mengecilnya kesenjangan ekonomi antar sesama masyarakat di suatu daerah.

Kondisi keamanan dan ketertiban di Barito Utara harus ditingkatkan kualitasnya, dengan peningkatan penegakan perda, dan peningkatan pelayanan perijinan (kemudahan akses, transparan dan cepat) karena kondisi yang tentram dan tertib menjadi salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan akan sangat berpengaruh kepada tingkat kemandirian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin daerah saja, melainkan tanggung jawab setiap masyarakat. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di

sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apa pun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak. Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Kedepannya pemerintah Kabupaten Barito Utara agar lebih memperhatikan e!ek negatif Pembangunan, karena yang merasakan dampak negatif langsung adalah masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Tata kelola pemerintahan dari segi ekonomi sangat berdampak kepada tingkat kesejahteraan, bahwa suatu daerah telah mencapai tata kelola yang baik apabila telah berhasil menyelenggarakan sistem pengaturan pembangunan daerah yang kuat, serta bertanggung jawab, dengan tetap beriringan dengan prinsip demokrasi dan prinsip pasar yang efisien. Di samping itu, dalam tata kelola pemerintah yang baik akan menghindari kesalahan dalam alokasi dana pembangunan, termasuk penanggulangan dini tindak pidana korupsi. *Good governance* juga akan menjalankan anggaran secara disiplin sehingga aktivitas usaha rakyat dapat tumbuh dengan baik.

Pemerintahan yang baik adalah baik dalam proses maupun hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari masyarakat, serta terbebas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses dan laju pembangunan. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika produktif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi masyarakat meningkat, baik dalam aspek produktivitas maupun dalam daya belinya; kesejahteraan spiritualnya meningkat dengan indikator rasa aman, bahagia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan misi dalam RPJMD adalah adopsi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan yang merupakan visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Perumusan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran lima tahun keempat dari Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025.

RPJPD merupakan kaidah penuntun yang memuat haluan dan arah kebijakan yang ingin dicapai Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2025 guna mencapai Kabupaten Barito Utara dapat setara dan diharapkan lebih maju dibanding daerah lainnya dan mempunyai posisi serta daya saing yang kuat dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan pelayanan publik. Untuk itu dengan melihat kondisi dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun yang memperhatikan modal dasar dan potensi yang dimiliki Kabupaten Barito Utara maka dirumuskan Visi jangka panjang Tahun 2005-2025 yaitu **”Barito Utara yang Sejahtera, Maju, Adil dan Mandiri”.**

Selanjutnya untuk menjalankan RPJPD pada lima tahun keempat rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 didasarkan pada isu-isu strategis daerah. Penekanan pada lima tahun keempat adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas; membangun infrastruktur perhubungan, komunikasi dan informasi antar wilayah; memperkuat perimbangan dan daya saing perekonomian daerah; mewujudkan Kabupaten Barito Utara sejahtera dan lestari serta mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Bertitik tolak pada RPJPD Kabupaten Barito Utara dan pencapaian RPJMD lima tahun ketiga (2013-2018), serta RPJMN Tahun 2015-2019 maka dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi misi jangka menengah lima tahun Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

5.1 Visi

Visi Pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai *(desired future)* dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara untuk Periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan"

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Barito Utara dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel V.1
Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018 – 2023

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di	Meningkatnya pembangunan ekonomi kerakyatan	Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu mendorong dan memfasilitasi berjalannya ekonomi kerakyatan yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis wilayah dan berpihak kepada masyarakat Kabupaten Barito utara serta mendorong perekonomian yang

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan		senantiasa menyelaraskan antara kondisi potensi SDA dan SDM daerah dengan kinerja ekonomi berdasarkan kearifan lokal, sehingga pembangunan ekonomi yang berbasis pada ekonomi rakyat akan mampu memberikan dampak nyata kepada masyarakat luas di Kabupaten Barito Utara.
	Meningkatnya pembangunan infrastruktur	Pembangunan lima tahun mendatang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar daerah terencana dan berkelanjutan yang memperhatikan pada keserasian tata ruang, lingkungan hidup, nilai-nilai sosial dan budaya serta kearifan lokal ke dalam proses pembangunan.
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Pembangunan lima tahun mendatang guna peningkatan kapasitas dan kualitas daerah melalui pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul, dan merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental merupakan modal utama dalam mendukung pembangunan, sehingga akan berdampak terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah.

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
	Masyarakat Barito Utara yang religius	Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan masyarakat dan aparatur yang mempunyai nurani moralitas serta kepekaan sosial yang tinggi, harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar keyakinan akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupan. Masyarakat Barito Utara yang taat dan patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain, sehingga nilai nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati
	Masyarakat Barito Utara yang mandiri	Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat menghasilkan kemandirian pada tataran masyarakat yaitu masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan layak, sehingga mampu menunjukkan masyarakat Kabupaten Barito Utara yang telah berkembang secara normal bersama-sama dengan masyarakat

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		Kabupaten/Kota lainnya Pada tataran pemerintah daerah, mandiri adalah mampu membiayai pembangunannya dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan daerahnya sehingga ketergantungan dengan luar semakin berkurang. Wujud riil dari kemandirian ini adalah ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan keberdayaan masyarakat yang dilandasi oleh modal sosial yang melembaga dalam sikap dan perilaku sehari-harinya. Dengan memanfaatkan secara optimal keunggulan komparatif dan kompetitif Kabupaten Barito Utara, sehingga dapat berdaya saing dalam kancah pembangunan, baik di tingkat lokal, regional dan nasional.
	Masyarakat Barito Utara yang sejahtera	Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat lahir dan batin, masyarakat dapat tercukupi kebutuhan hak dasarnya, baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan, sandang dan papan, pelayanan pendidikan, kesehatan secara merata maupun memiliki pendapatan secara layak. Masyarakat yang sejahtera adalah

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		masyarakat yang sudah terpenuhi sebagian besar kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan materi juga kebutuhan mental spiritual, telah berada dalam kondisi aman dan sentosa (terlepas dari segala gangguan dan kesulitan), makmur (telah terpenuhinya atau tercukupinya seluruh kebutuhan dasarnya) sesuai dengan standar hidup yang layak bagi kemanusiaan, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting kehadiran masyarakat Barito Utara bagi daerah lain di Provinsi Kalimantan Tengah maupun pada tataran nasional.

Visi tersebut dimaknai sebagai:

Cita-cita luhur untuk melaksanakan pembangunan menuju cita-cita masyarakat yang religius, mandiri dan sejahtera yang berbasiskan potensi sumber daya lokal (kesesuaian lahan dan karateristik masyarakat setempat), adat dan budaya yang dimiliki, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat (tokoh adat, tokoh masyarakat, perempuan maupun laki-laki) dan lembaga yang ada (asosiasi, perguruan tinggi dan swasta) secara aktif, dengan menitikberatkan percepatan pembangunan di bidang sumber daya manusia, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan yang dimulai dari desa dan kelurahan agar secara langsung dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat di Kabupaten Barito Utara dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan, sandang dan papan secara merata.

Tabel V.2
Kesesuaian dan Konsistensi Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Barito Utara terhadap Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah

NO.	MISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016-2021	MISI RPJMD KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018-2023
1	**Misi 1 :** Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi	**Misi 1 :** Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi
2	**Misi 2 :** Pengelolaan Infrastruktur	**Misi 1 :** Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi
3	**Misi 3 :** Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai	**Misi 4 :** Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup
4	**Misi 4 :** Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan	**Misi 3 :** Peningkatan Ekonomi Masyarakat
5	**Misi 5 :** Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah	**Misi 5 :** Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*)
6	**Misi 6 :** Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata	**Misi 2 :** Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan **Misi 4 :** Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup
7	**Misi 7 :** Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam	**Misi 4 :** Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup
8	**Misi 8 :** Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Misi 3 :** Peningkatan Ekonomi Masyarakat

5.2 Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023 berorientasi pada Percepatan Pembangunan di Bidang Sumber daya Manusia, Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Barito Utara yang telah di tetapkan diatas, maka ditetapkan **Misi Pembangunan Kabupaten Barito Utara 2018-2023** sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat.
4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup.
5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Lima butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemakan dalam bentuk visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi berbeda penafsiran dan ketidakjelasan dalam memahami butir misi, maka penjabaran Misi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.2.1 . Misi 1 Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi

Misi meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan energi perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah. Sehingga sektor unggulan di Kabupaten Barito Utara dapat memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur dasar akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus pembangunan infrastruktur adalah meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar dan mengembangkan konektivitas antar wilayah melalui infrastruktur yang telah tersedia. Sedangkan peningkatan ketersediaan energi

khususnya listrik kepada masyarakat pengguna di Kabupaten Barito Utara akan dapat memicu kemudahan berusaha dan menciptakan lapangan usaha, tentunya hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

5.2.2 . Misi 2 Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang, sehat, berprestasi dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan.

Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan sehingga dapat membentuk sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing dalam tantangan global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. Kualitas pendidikan dan kesehatan sangat berpengaruh pada upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan salah satu variabel yang menentukan adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar yang didukung oleh infrastruktur pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan yang menjadi prasyarat terwujudnya pelayanan dasar yang optimal.

Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara dan perhatian pada kesejahteraan tenaga pendidikan dan kesehatan sesuai wilayah pelayanannya. Melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan sesuai potensi dan kebutuhan daerah, diharapkan mampu menghasilkan masyarakat Barito Utara yang semakin cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi. Kemudian BLUD RSUD Muara Teweh diharapkan semakin mandiri dan profesional dalam penyediaan layanan kesehatan. Selain itu masyarakat dan swasta berpartisipasi aktif dalam peningkatan derajat kesehatan serta pengendalian angka kelahiran.

5.2.3 . Misi 3 Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Misi meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan. Untuk mewujudkan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah serta pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah. Selain itu diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi lainnya melalui pembinaan kelompok-kelompok usaha serta upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan produktif dalam kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi harus ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

5.2.4 . Misi 4 Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup

Penguatan nilai-nilai sosial budaya dimaksudkan untuk mengangkat dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya setempat untuk menciptakan kondisi sosial budaya yang mantap dan kondusif dalam rangka mendorong proses pembangunan. Nilai-nilai yang diangkat memiliki interkoneksitas dengan tatanan lain terutama sejalan dengan perkembangan pembangunan, masih dipelihara dan diakui oleh masyarakat setempat bahkan sangat berperan dalam menciptakan keharmonisan dan ketenteraman didalam masyarakat. Nilai-nilai sosial budaya tersebut merupakan suatu “ Kearifan Lokal ” yang menjadi perekat, semangat, identitas kebanggaan dan kehormatan sebagai suatu persekutuan dalam menghadapi tantangan, hambatan dan

permasalahan pembangunan. Aneka ragam suku bangsa yang hidup bersama-sama di wilayah Barito Utara tentu membawa adat istiadat, budaya dan berbagai nilai- nilai kearifan dalam kehidupan sehari-hari. Aset budaya dan kearifan lokal ini harus dikelola sebagai sebuah kekuatan dalam pembangunan daerah. Daerah harus maju, masyarakat harus maju namun tidak harus melupakan budaya dan kearifan lokal yang dimiliki. Kemajuan harus bercirikan budaya dan kearifan lokal. Nilai budaya dan kearifan lokal yang telah lama ada ditengah-tengah masyarakat bila diterus dipelihara, diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari akan dapat memberi warna masyarakat yang khas/unik.

Pariwisata merupakan salah satu fokus pembangunan untuk meraih pemasukan daerah, membuka peluang usaha, dan menciptakan lapangan kerja. Pengelolaan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya serta memajukan kebudayaan. Dengan demikian, pembangunan pariwisata memiliki potensi dalam menyumbang perekonomian suatu daerah dan mendukung perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Namun, di sisi lain, pembangunan pariwisata seringkali justru mendukung terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan pengembangan pariwisata dengan melibatkan peran masyarakat (*civil society*), sehingga pembangunan pariwisata tidak cenderung merusak tetapi justru mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kedepannya Kabupaten Barito Utara harus dapat memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara produktif, efisien, optimal dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus keberlanjutan kehidupan yang baik, sehingga daerah harus maju namun tetap juga harus lestari. Semua hal tersebut diatas dapat tercapai tentunya juga harus didukung oleh suasana Kabupaten Barito Utara yang aman, tertib dan tentram.

Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib

akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh stakeholder pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen dan adil tanpa diskriminasi. Selain itu, faktor penting bagi terpeliharanya stabilitas kehidupan yang tentram, tertib dan dinamis adalah adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh stakeholders pembangunan.

Kedepannya pengelolaan sosial, budaya, pariwisata dan lingkungan hidup harus tepat, efisien untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui manajemen profesional pada even-even seni, budaya dan olah raga yang secara teratur dilaksanakan setiap tahunnya sehingga masuk dalam kalender even Barito Utara. Untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur destinasi pariwisata, perhotelan, kuliner, produk kerajinan oleh-oleh (buah tangan) dan berbagai kegiatan ekonomi yang mengiringinya. Sehingga pada muaranya, sektor budaya, pariwisata dan lingkungan hidup menjadi lebih produktif dalam kontribusinya menyumbang pertumbuhan ekonomi daerah.

5.2.5. Misi 5 Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik *(Good Governance)*.

Misi mewujudkan peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin variatif kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaannya yang efektif dan efisien, serta bentuk pemerintahan yang berlandas pada prinsip *good governance*. Tata kelola pemerintahan yang baik berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dengan tata kelola kepemerintahan yang baik diharapkan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan berkualitas, menjamin penegakkan hukum, HAM, perlindungan perempuan dan anak serta perlindungan sosial, dalam rangka terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib. Wujud keberhasilan tata kelola kepemerintahan yang baik antara lain diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk pengelolaan keuangan, penilaian "Baik" pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh Kemen PAN & RB, Penghargaan Pangripta Nusantara atas Kualitas Perencanaan yang Baik oleh Kementerian PPN/Bappenas, Penghargaan Adipura oleh Kemen LH & Kehutanan dan berbagai pengakuan lain oleh instansi eksternal.

5.3. Tujuan dan Sasaran

5.3.1. Tujuan

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2018-2023 adalah :

1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah.
2. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan sejahtera.
3. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan yang tenteram harmonis dan berbudaya.
5. Terwujudnya Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).

5.3.2. Sasaran

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya desa yang terhubung dengan pusat wilayah.
2. Meningkatnya desa yang yang terhubung listrik.
3. Menurunnya desa *blankspot.*

4. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
6. Meningkatnya daya beli masyarakat.
7. Meningkatnya sektor pertanian.
8. Meningkatnya sektor perikanan.
9. Meningkatnya sektor perkebunan
10. Meningkatnya sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan serta industri.
11. Meningkatnya daya saing tenaga kerja
12. Menurunnya pencemaran lingkungan.
13. Meningkatnya daya saing pariwisata.
14. Meningkatnya ketertiban masyarakat.
15. Meningkatnya toleransi dikalangan masyarakat.
16. Menurunnya penyandang masalah sosial.
17. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi.
18. Meningkatnya kualitas penerapan managemen kinerja.
19. Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik.
20. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset daerah

Keterkaitan antara visi dan misi yang ditetapkan dengan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel V.3
Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran
Visi: "Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan"

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 1 Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat kota	Meningkatnya desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah
			Meningkatnya desa/ kelurahan yang yang terhubung listrik	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
			Menurunnya desa/ kelurahan *blankspot*	Persentase desa/ kelurahan *blankspot*
Misi 2 Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah 2. Angka melek huruf
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	1. Angka Harapan Hidup 2. Angka Kematian Ibu 3. Angka Kematian Bayi
			Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita pertahun
Misi 3 Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. Indeks Gini 3. Persentase Penduduk Miskin	Meningkatnya sektor pertanian	PDRB sektor pertanian
			Meningkatnya sektor perikanan	PDRB sektor perikanan
			Meningkatnya sektor perkebunan	PDRB sektor perkebunan
			Meningkatnya sektor koperasi dan ukm, perdagangan serta industri	1. PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah 2. PDRB sektor perdagangan 3. PDRB sektor industri
			Meningkatnya daya saing tenaga kerja	1. Angka pengangguran terbuka 2. Pendapatan Perkapita Penduduk
Misi 4 Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan yang tenteram harmonis dan berbudaya.	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Angka kriminalitas yang tertangani 3. Angka Konflik	Menurunnya pencemaran lingkungan	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan
			Meningkatnya daya saing pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
			Meningkatnya ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)
			Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Persentase kasus konflik yang tertangani
			Menurunnya penyandang masalah sosial	Persentase PMKS yang tertangani
Misi 5 Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik *(Good Governance)*	Terwujudnya Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
			Meningkatnya kualitas penerapan managemen kinerja	Nilai SAKIP
			Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
			Meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset daerah	Opini BPK

Untuk indikator target dari dampak (impacts) pencapaian sasaran program yang diukur dari hasil (outcomes) secara agregat dari misi yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi, maka ditetapkan ukuran capaian tujuan dan sasaran jangka menengah yang sering disebut Indikator Kinerja Utama Daerah sebagai berikut:

Tabel V.4
Visi Misi Tujuan dan Sasaran Rencana Jangka Menengah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

Visi: "Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan"

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	**Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi**	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat kota			%	66,99	67,96	67,96	81,55	81,55	87,38	92,23
				Meningkatnya desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	%	84,47	84,47	84,47	84,47	85,44	92,23	92,23
				Meningkatnya desa/ kelurahan yang yang terhubung listrik	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	%	49,51	60,19	66,99	74,76	81,55	88,35	95,15
				Menurunnya desa/ kelurahan *blankspot*	Persentase desa/ kelurahan *blankspot*	%	88,35	66,02	46,60	27,18	17,48	7,77	0,00
2.	**Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan**	Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia			Nilai	69,07	69,70	70,37	71,02	71,65	72,30	73,04
				Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah	tahun	8,38	8,57	8,60	8,70	8,80	8,90	9,00
					2. Angka Melek Huruf	%	97,01	98,14	98,80	99,00	99,20	99,40	99,60
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	1. Angka Harapan Hidup	tahun	71,27	71,27	71,28	71,29	71,30	71,31	71,32
					2. Angka Kematian Ibu	per 100.000 Kelahiran Hidup	256	256	256	256	213	213	213
					3. Angka Kematian Bayi	per 1.000 Kelahiran Hidup	3	3	3	3	3	2	2
				Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita pertahun	Juta Rupiah	9.067	9.179	9.324	9.478	9.643	9.825	10.027

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.	**Peningkatan Ekonomi Masyarakat**	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi			%	6,01	6,21	6,4	6,63	6,98	7,16	7,46
			2. Indeks Gini			nilai	0,317	0,316	0,315	0,314	0,304	0,302	0,299
			3. Persentase Penduduk Miskin			%	5,98	5,16	5,11	5,06	4,51	4,34	4,19
				Meningkatnya sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	Juta Rupiah	281.985,4	443.932,5	447.870,3	528.757,4	571.795,0	618.194,5	668.183,8
				Meningkatnya sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	Juta Rupiah	132.642,0	144.040,5	156.533,2	165.273,2	173.743,4	180.593,6	186.685,8
				Meningkatnya sektor perkebunan	PDRB sektor Perkebunan	Juta Rupiah	361.185,4	352.767,4	361.324,2	369.472,9	378.721,2	387.784,1	396.640,2
				Meningkatnya sektor koperasi dan ukm, perdagangan serta industri	1. PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	Juta Rupiah	114.111,9	111.920,3	120.314,3	129.337,9	139.038,2	149.466,1	160.676,1
					2. PDRB sektor perdagangan	Juta Rupiah	507.514,2	508.735,0	509.701,6	510.873,9	512.662,0	513.584,8	515.125,5
					3. PDRB sektor industri	Juta Rupiah	677.509,5	678.892,3	680.182,2	681.746,6	684.132,7	685.364,2	687.420,3
				Meningkatnya daya saing tenaga kerja	1. Angka Pengangguran terbuka	%	5,19	4,60	4,31	3,99	3,71	3,44	3,17
					2. Pendapatan Per Kapita Penduduk	Juta Rupiah	49,27	47,30	48,67	50,05	51,42	52,79	54,17
4.	**Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup**	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan yang tenteram harmonis dan berbudaya	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Nilai	86,85	86,87	86,88	86,89	86,91	86,93	86,94
			2. Angka kriminalitas yang tertangani			per 10.000 penduduk	10	10	10	11	12	12	13
			3. Angka Konflik			Kasus	2	4	4	4	4	4	4

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				Menurunnya pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Air	Nilai	80,00	80,01	80,02	80,03	80,04	80,05	80,05
					Indeks Kualitas Udara	Nilai	96,72	96,73	96,75	96,76	96,78	96,80	96,80
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	84,59	84,61	84,62	84,63	84,65	84,68	84,70
				Meningkatnya daya saing pariwisata	Kunjungan wisata	%	79,0	83,2	83,2	87,3	91,5	95,7	99,8
				Meningkatnya ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	%	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	93,75
				Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Persentase kasus konflik yang tertangani	%	100	80	80	80	80	80	80
				Menurunnya penyandang masalah sosial	Persentase PMKS yang tertangani	%	23,95	26,82	42,52	62,34	83,39	80,99	100
5.	**Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*)**	Terwujudnya Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*)	Indeks Reformasi Birokrasi			Kategori (Nilai)	-	-	C (31)	C (35)	CC (51)	CC (55)	B (61)
				Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (Nilai)	-	-	C (31)	C (35)	CC (51)	CC (55)	B (61)
				Meningkatnya kualitas penerapan managemen kinerja	Nilai SAKIP	Predikat (Nilai)	C	CC (53,97)	CC (54,00)	B (60,01)	BB (70,01)	BB (70,01)	A (80,01)
				Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM	Predikat (Nilai)	B	C (75,21)	B (76,61)	B (76,70)	B (76,80)	B (76,90)	B (77,00)
				Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Predikat (Opini ke-)	WTP	WTP (1)	WTP (1)	WTP (1)	WTP (1)	WTP (1)	WTP (1)

5.4. Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Barito Utara, RPJPD Kalimantan Tengah dan RPJMN

5.4.1. Keselarasan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025

Visi dan misi jangka menengah merupakan penjabaran lima tahunan dalam rangka mencapai target dalam pembangunan jangka panjang. Misi yang ingin dicapai dalam rencana pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran misi dan arah kebijakan dalam visi jangka panjang. Untuk mewujudkan visi jangka panjang, maka ditempuh melalui 5 (lima) Misi Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Membangun infrastruktur perhubungan, komunikasi dan informasi antar wilayah.
3. Memperkuat perimbangan dan daya saing perekonomian daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Barito Utara sejahtera dan lestari.
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Korelasi antara Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Utara dapat digambarkan sebagaimana gambar V.1 :

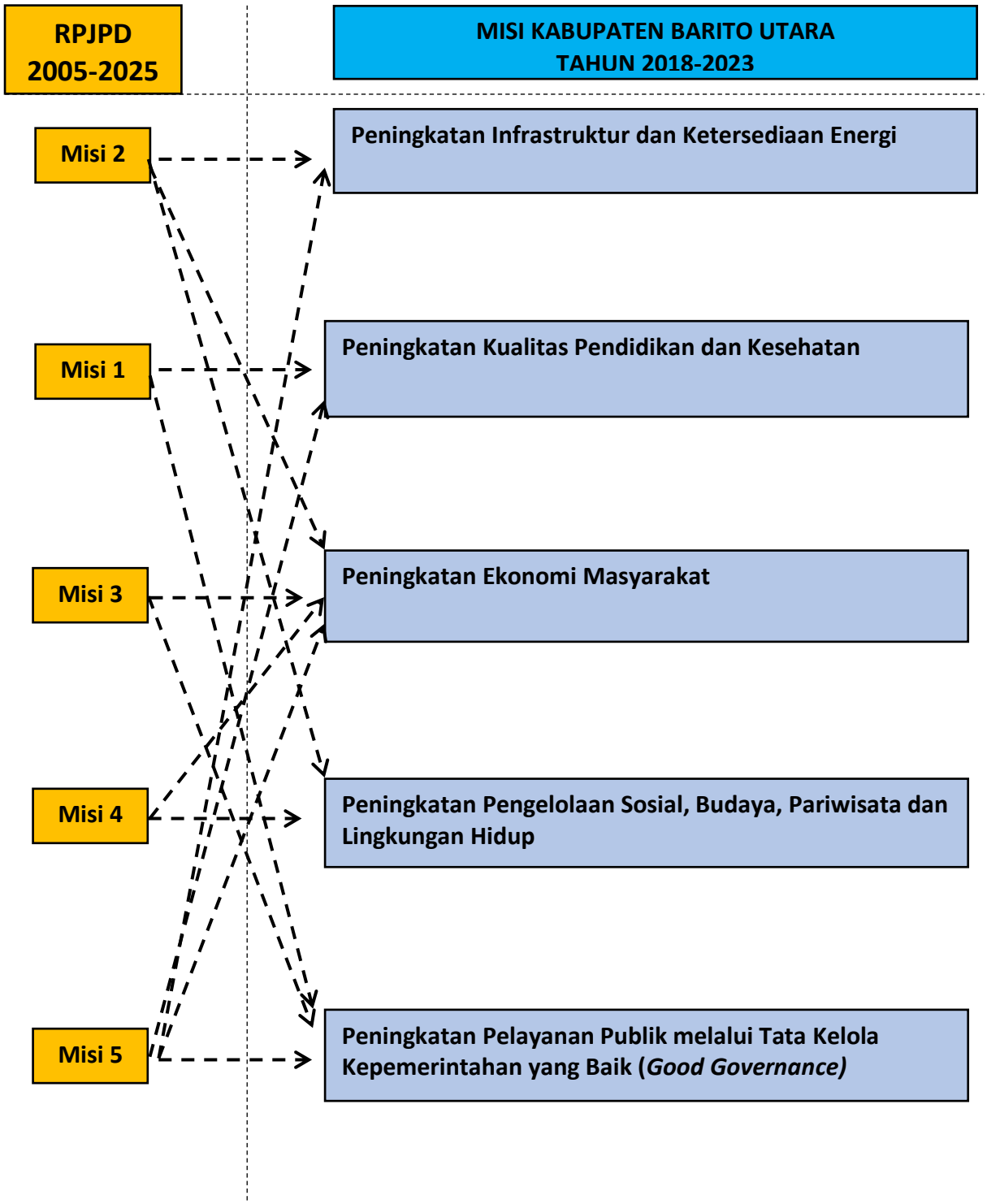

Gambar V.1
Keterkaitan Misi RPJPD Kab. Barito Utara dan Misi RPJMD 2018-2023

5.4.2. Keselarasan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kalimantan Tengah 2005-2025

Visi pembangunan daerah kabupaten Barito Utara untuk Periode RPJMD 2018-2023 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan" dilaksanakan melalui peningkatan infrastruktur dan ketersediaan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan pengelolaan sosial, budaya, pariwisata dan lingkungan hidup serta peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Visi Kabupaten Barito Utara tersebut sejalan pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 yaitu "Kalimantan Tengah Yang Maju, Mandiri Dan Adil". Adapun misi pembangunan daerah Kalimantan Tengah tahun 2005-2025 untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang maju, mandiri dan adil adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
2. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
3. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
4. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.
5. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis,jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif,

dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

6. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
8. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
11. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
12. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Keselarasan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Utara dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah dapat digambarkan sebagaiman gambar V.2.

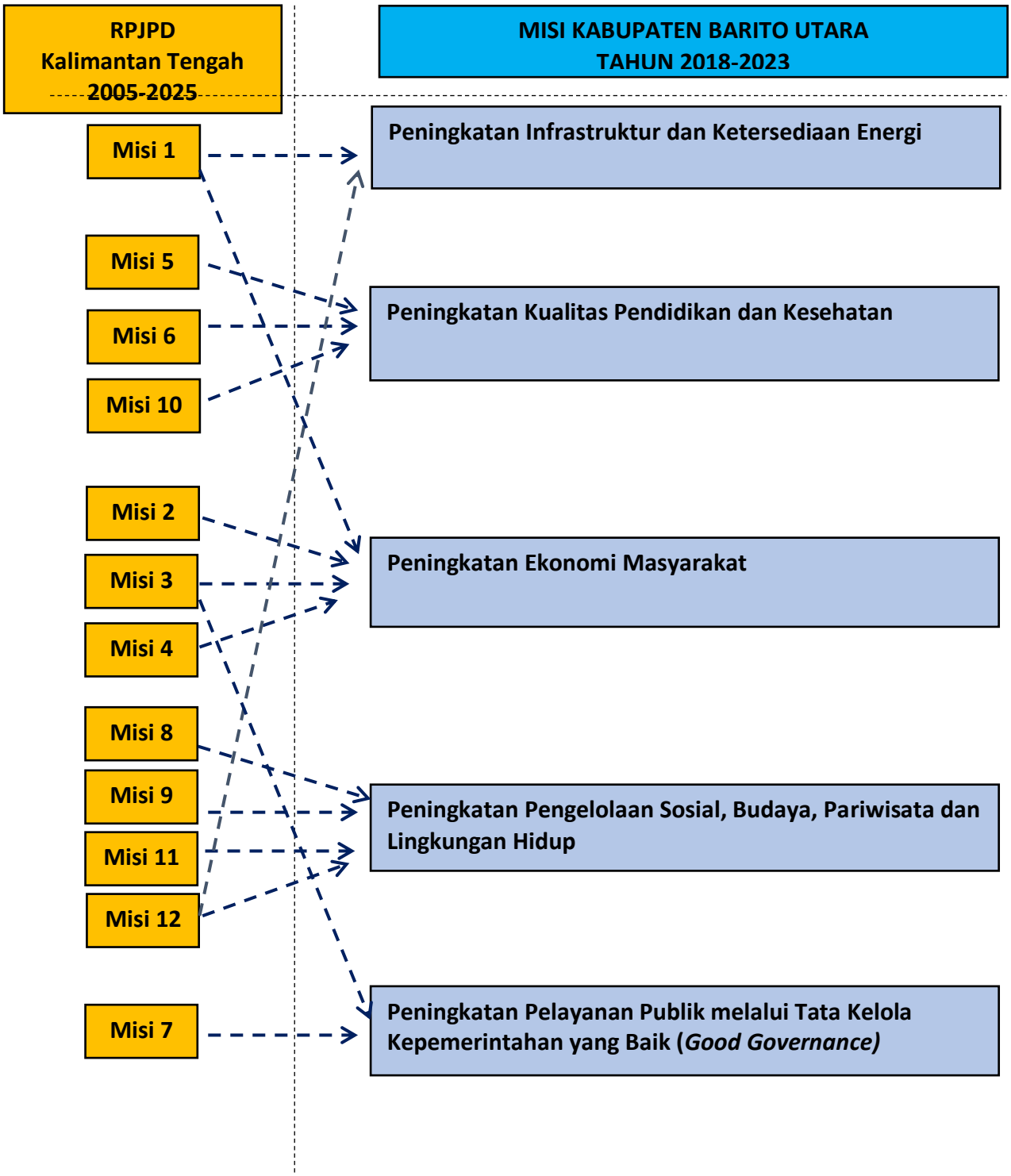

Gambar V.2
Keterkaitan Misi RPJMD 2018-2023 dan Misi RPJPD Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025

Sedangkan keselarasan RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021 dengan Visi Gubernur Kalimantan Tengah yaitu:

"Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)"

Visi gubernur tersebut tersebut dijabarkan ke dalam beberapa misi yaitu:

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Korelasi antara Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Barito Utara dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalimantan Tengah dapat digambarkan sebagaimana gambar V.3

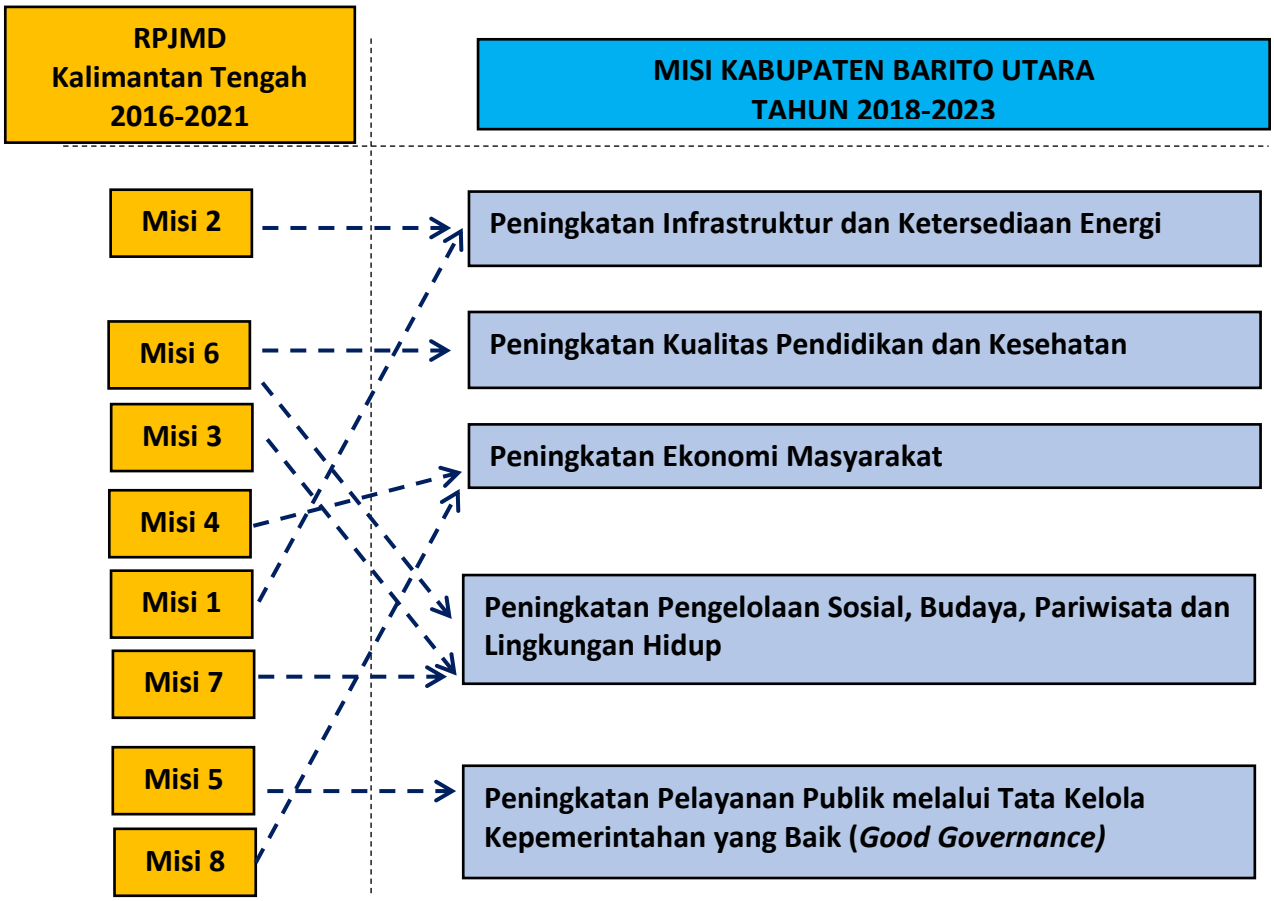

Gambar V.3
Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Barito Utara dan Misi RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021

5.4.3. Keselarasan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dengan RPJMN Tahun 2015-2019

Visi Kabupaten Barito Utara selaras dengan visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 yaitu: ”Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandasan Gotong Royong”, dimana visi pembangunan nasional tersebut mengedepankan upaya meletakkan dasar dan sekaligus memberikan arah pembangunan jiwa bangsa untuk menegakkan kembali kedaulatan, martabat, dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa, menegaskan kembali fungsi publik negara, menggelorakan kembali harapan ditengah krisis sosial yang mendalam, menemukan jalan bagi masa depan bangsa, serta meneguhkan kembali jiwa gotong royong sesuai dengan Pancasila 1 Juni 1945.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Korelasi misi RPJMN dengan misi Kabupaten Barito Utara digambarkan sebagaimana gambar V.4:

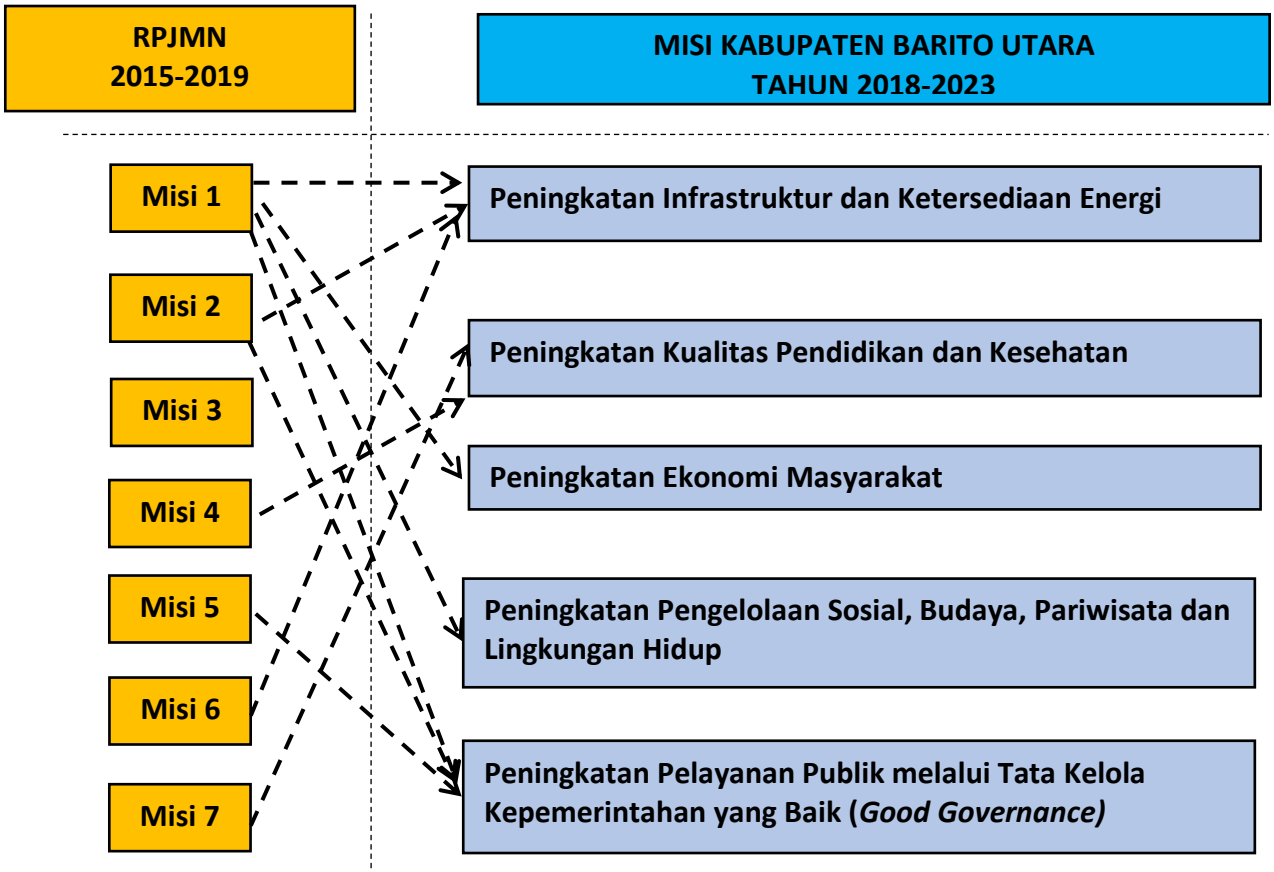

Gambar V.4
Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Barito Utara
dan Misi RPJMN 2015-2019

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN
DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mendukung visi "Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan" maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pengembangan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Barito Utara melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

6.1. Strategi

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

6.1.1. Misi Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi adalah:

1. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta infrastruktur dasar lainnya;
2. Percepatan penyediaan infrastruktur jalan untuk menunjang pengembangan jaringan kelistrikan dan energi lainnya di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.
3. Percepatan perluasan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara;

6.1.2. Misi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan adalah:

1. Meningkatkan akses pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan formal termasuk pendidikan non formal;
2. Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan;
5. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit sesuai standar dan jaringannya;
6. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit;
7. Pengembangan manajemen pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit bertaraf nasional;
8. Meningkatkan pelayanan, advokasi dan KIE keluarga berencana.
9. Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat;
10. Meningkatkan pendidikan kecakapan hidup, keterampilan hidup, sikap wirausaha dan kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat.

6.1.3. Misi Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi Peningkatan ekonomi masyarakat adalah:

1. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian berbasis pasar;
2. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan perikanan berbasis pasar;
3. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan perkebunan berbasis pasar;
4. Meningkatkan koperasi dan UKM, usaha perdagangan serta industri yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal;
5. Meningkatkan investasi dan kemudahan iklim berusaha yang dapat memberikan kesempatan kerja masyarakat;
6. Mengembangkan pelatihan kerja melalui lembaga/balai latihan kerja/produktivitas, baik milik pemerintah maupun swasta.

6.1.4. Misi Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup adalah:

1. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan fungsi lingkungan hidup;
2. Meningkatkan pembuatan dokumen lingkungan bagi pelaku usaha;
3. Mengembangkan pariwisata berbasis seni, budaya dan kearifan lokal;
4. Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan;
5. Mengembangkan nilai-nilai toleransi dan pluralisme dalam kehidupan masyarakat;
6. Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat.

6.1.5. Misi Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*) adalah:

1. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;
2. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas aparatur;
3. Meningkatkan sistem pelayanan publik;
4. Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan asset daerah.

Alur rumusan visi, tujuan, sasaran dan strategi disajikan dalam tabel VI.1 berikut ini:

Tabel VI.1
Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Strategi
Kabupaten Barito Utara

Visi : **"Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan"**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Misi 1 : Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi		
Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Meningkatnya desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta infrastruktur dasar lainnya
	Meningkatnya desa/ kelurahan yang yang terhubung listrik	Percepatan penyediaan infrastruktur jalan untuk menunjang pengembangan jaringan kelistrikan dan energi lainnya di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.
	Menurunnya desa/ kelurahan *blankspot*	Percepatan perluasan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara
Misi 2 : Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan		
Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan sejahtera	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatkan akses pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan formal termasuk pendidikan non formal.
		Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
		Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit sesuai standar dan jaringannya
		Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit
		Pengembangan manajemen pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit bertaraf nasional
		Meningkatkan pelayanan, advokasi dan KIE keluarga berencana
		Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat
	Meningkatnya daya beli masyarakat	Meningkatkan pendidikan kecakapan hidup, keterampilan hidup, sikap wirausaha dan kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat.
Misi 3 : Peningkatan Ekonomi Masyarakat		
Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Meningkatnya sektor pertanian	Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian berbasis pasar
	Meningkatnya sektor perikanan	Meningkatkan daya saing komoditas unggulan perikanan berbasis pasar
	Meningkatnya sektor	Meningkatkan daya saing komoditas unggulan

Visi : **"Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan"**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
	perkebunan	perkebunan berbasis pasar
	Meningkatnya sektor koperasi dan UKM, perdagangan serta industri	Meningkatkan koperasi dan UKM, usaha perdagangan serta industri yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal
	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Meningkatkan investasi dan kemudahan iklim berusaha yang dapat memberikan kesempatan kerja masyarakat.
		Mengembangkan pelatihan kerja melalui lembaga/balai latihan kerja/produktivitas, baik milik pemerintah maupun swasta.
Misi 4 : Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup		
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan yang tenteram harmonis dan berbudaya	Menurunnya pencemaran lingkungan	Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan fungsi lingkungan hidup;
		Meningkatkan pembuatan dokumen lingkungan bagi pelaku usaha
	Meningkatnya daya saing pariwisata	Mengembangkan pariwisata berbasis seni budaya dan kearifan lokal
	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan
	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Mengembangkan nilai-nilai toleransi dan pluralisme dalam kehidupan masyarakat
	Menurunnya penyandang masalah sosial	Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat
Misi 5 : Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*)		
Terwujudnya Kepemerintahan yang baik (*Good Governance).*	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif
	Meningkatnya kualitas penerapan managemen kinerja	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas aparatur
	Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik	Meningkatkan sistem pelayanan publik
	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset daerah	Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan asset daerah

6.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Dalam rangka pencapaian Visi-Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 perlu disusun rumusan arahan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari strategi pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Kebijakan umum pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan.

6.2.1. Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Umum Misi 1

Arah kebijakan untuk **Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi** meliputi :

1. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, fasilitas umum serta perhubungan sebagai penunjang perekonomian, dan konektivitas antar wilayah;
2. Percepatan pembangunan jalan penghubung antar desa untuk perluasan jaringan energi kelistrikan di seluruh wilayah Barito Utara;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Barito Utara.

Dengan rumusan arah kebijakan umum sebagai berikut :

1. Peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan dari kabupaten ke kecamatan dan desa-desa/ kelurahan serta ke pusat wilayah;
2. Meningkatkan sarana prasarana perhubungan terutama Pengembangan Bandara Baru Trinsing;
3. Meningkatkan sarana prasarana kepemerintahan terutama mewujudkan pembangunan komplek perkantoran pemerintah daerah;

4. Meningkatkan sarana prasarana fasilitas umum terutama sarana olah raga, taman kota dan Water Front City serta rumah ibadah;
5. Pembangunan jaringan pipa gas perkotaan;
6. Pengembangan jaringan pipa air minum (PDAM) Kota Muara Teweh, kecamatan dan desa/kelurahan;
7. Pengembangan SPBU milik BUMD;
8. Pembangunan siring/turap pada wilayah rawan longsor;
9. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
10. Mempercepat pembangunan jalan menuju desa-desa untuk pengembangan jaringan kelistrikan yang menjangkau seluruh kecamatan/ desa/ kelurahan;
11. Mempercepat perluasan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh kecamatan/desa/kelurahan.

6.2.2. Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Umum Misi 2

Arah kebijakan untuk **Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan** meliputi :

1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas penyelenggaraan, sarana prasarana, sumber daya manusia pendidikan;
2. Meningkatkan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan.

Dengan rumusan arah kebijakan umum sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan merata di setiap jenjang pendidikan;
2. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
4. Meningkatkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA);
5. Meningkatkan pembinaan pengelolaan perpustakaan;
6. Meningkatkan pendidikan luar sekolah dan pendidikan kecakapan/keterampilan hidup serta kewirausahaan;

7. Meningkatkan sarana prasarana kesehatan terutama melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh sehingga menjadi rumah sakit sesuai standar nasional;
8. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan khususnya bagi penduduk miskin melalui sistem jaminan kesehatan;
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan dasar;
10. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
11. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan dan RSUD bertaraf nasional;
12. Meningkatkan upaya promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat ;
13. Peningkatan kualitas pelayanan, Advokasi dan KIE keluarga berencana.

6.2.3. Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Umum Misi 3

Arah kebijakan untuk **Peningkatan Ekonomi Masyarakat** meliputi :

1. Meningkatkan kontinuitas, kuantitas dan kualitas serta daya saing produk pertanian, perkebunan dan perikanan;
2. Meningkatan pemberdayaan usaha perdagangan, industri, koperasi, UKM;
3. Peningkatan fasilitasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif dan menciptakan kemudahan iklim usaha;
4. Meningkatkan pelatihan tenaga kerja terampil.

Dengan rumusan arah kebijakan umum sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengembangan komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan berbasis pasar;
2. Pengembangan daerah irigasi dan lahan pertanian dalam arti luas;
3. Meningkatkan pengembangan dan revitalisasi pasar, terutama pembangunan Pasar Pendopo Muara Teweh;
4. Meningkatkan pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat;
5. Meningkatkan pengembangan dan revitalisasi industri/usaha kecil dan menengah;

6. Pengembangan industri kabupaten berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK);
7. Meningkatkan kemudahan iklim usaha;
8. Meningkatkan pelatihan kerja dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan.

6.2.4. Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Umum Misi 4

Arah kebijakan untuk **Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup** meliputi :

1. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Meningkatkan kapasitas pelaku dan sarana prasarana pariwisata dan fasilitas olah raga;
3. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa, cagar/warisan budaya;
4. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan;
5. Menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya nilai-nilai toleransi dan pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat
6. Meningkatkan upaya perlindungan sosial masyarakat;

Dengan rumusan arah kebijakan umum sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas pengendalian pencemaran air, tanah dan udara;
2. Meningkatkan upaya pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kesiagaan terhadap bencana;
3. Meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata;
4. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan even seni, budaya dan olah raga secara reguler dan terjadwal;
5. Meningkatkan pengembangan dan pelestarian seni budaya masyarakat;
6. Meningkatkan keamanan lingkungan dan perlindungan masyarakat;
7. Meningkatkan penanganan masalah sosial masyarakat;
8. Meningkatkan upaya menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

6.2.5. Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Umum Misi 5

Arah kebijakan untuk **Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik *(Good Governance)*** meliputi :

1. Meningkatkan upaya menuju pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang lebih profesional;
3. Meningkatkan manajemen pelayanan publik;
4. Meningkatkan sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan asset.

Dengan rumusan arah kebijakan umum sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan desa;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju Kota Cerdas (*Smart City*);
3. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur yang profesional;
4. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik;
5. Meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah dan asset.

Untuk memperjelas alur arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan tahun 2018-2028, disajikan dalam tabel VI.2 berikut ini:

Tabel VI.2
Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Barito Utara

Arah Kebijakan Pembangunan				
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Arah Kebijakan Pembangunan				
Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, fasilitas umum serta perhubungan sebagai penunjang perekonomian, dan konektivitas antar wilayah				
Arah Kebijakan Umum :				
1. Peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan dari kabupaten ke kecamatan dan desa-desa/ kelurahan serta ke pusat wilayah. 2. Meningkatkan sarana prasarana perhubungan terutama Pengembangan Bandara Baru Trinsing. 3. Meningkatkan sarana prasarana kepemerintahan terutama mewujudkan pembangunan komplek perkantoran pemerintah daerah. 4. Meningkatkan sarana prasarana fasilitas umum terutama sarana olah raga, taman kota dan Water Front City serta rumah ibadah. 5. Pembangunan jaringan pipa gas perkotaan. 6. Pengembangan jaringan pipa air minum (PDAM) Kota Muara Teweh, kecamatan dan desa/kelurahan. 7. Pengembangan SPBU milik BUMD. 8. Pembangunan siring/turap pada wilayah rawan longsor; 9. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman.				
Arah Kebijakan Pembangunan				
Percepatan pembangunan jalan penghubung antar desa untuk perluasan jaringan energi kelistrikan di seluruh wilayah Barito Utara				
Arah Kebijakan Umum :				
Mempercepat pembangunan jalan menuju desa-desa untuk pengembangan jaringan kelistrikan yang menjangkau seluruh kecamatan/desa/kelurahan				
Arah Kebijakan Pembangunan				
Percepatan pembangunan dan pengembangan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Barito Utara.				
Arah Kebijakan Umum :				
Mempercepat perluasan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh kecamatan/ desa/ kelurahan				
Arah Kebijakan Pembangunan				
Meningkatkan pemerataan dan kualitas penyelenggaraan, sarana prasarana, sumber daya manusia pendidikan				
Arah Kebijakan Umum :				
1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan merata di setiap jenjang pendidikan 2. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan 4. Meningkatkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) 5. Meningkatkan pembinaan pengelolaan perpustakaan 6. Meningkatkan pendidikan luar sekolah dan pendidikan kecakapan/keterampilan hidup serta kewirausahaan				

Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan
Arah Kebijakan Umum :
1. Meningkatkan sarana prasarana kesehatan terutama melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh sehingga menjadi rumah sakit sesuai standar nasional 2. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan khususnya bagi penduduk miskin melalui sistem jaminan kesehatan 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan dasar 4. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan 5. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan dan RSUD bertaraf nasional 6. Meningkatkan upaya promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat 7. Peningkatan kualitas pelayanan, Advokasi dan KIE keluarga berencana
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan kontinuitas, kuantitas dan kualitas serta daya saing produk pertanian, perkebunan dan perikanan
Arah Kebijakan Umum :
1. Meningkatkan pengembangan komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan berbasis pasar 2. Pengembangan daerah irigasi dan lahan pertanian dalam arti luas
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatan pemberdayaan usaha perdagangan, industri, koperasi, UKM
Arah Kebijakan Umum :
1. Meningkatkan pengembangan dan revitalisasi pasar, terutama pembangunan Pasar Pendopo Muara Teweh. 2. Meningkatkan pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat 3. Meningkatkan pengembangan dan revitalisasi industri/ usaha kecil dan menengah 4. Pengembangan industri kabupaten berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan fasilitasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif dan menciptakan kemudahan iklim usaha
Arah Kebijakan Umum :
Meningkatkan kemudahan iklim usaha
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan pelatihan tenaga kerja terampil
Arah Kebijakan Umum :
Meningkatkan pelatihan kerja dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Arah Kebijakan Umum :
1. Meningkatkan kapasitas pengendalian pencemaran air, tanah dan udara 2. Meningkatkan upaya pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kesiagaan terhadap bencana;.

Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan kapasitas pelaku dan sarana prasarana pariwisata dan fasilitas olah raga
Arah Kebijakan Umum :
1. Meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata 2. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan even seni, budaya dan olah raga secara reguler dan terjadwal
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa, cagar/warisan budaya
Arah Kebijakan Umum :
Meningkatkan pengembangan dan pelestarian seni budaya masyarakat
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan
Arah Kebijakan Umum :
Meningkatkan keamanan lingkungan dan perlindungan masyarakat
Arah Kebijakan Pembangunan
Menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya nilai-nilai toleransi dan pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat.
Arah Kebijakan Umum :
Meningkatkan upaya menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan upaya perlindungan sosial masyarakat
Arah Kebijakan Umum :
Meningkatkan penanganan masalah sosial masyarakat
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan upaya menuju pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
Arah Kebijakan Umum :
Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan desa;
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang lebih profesional
Arah Kebijakan Umum :
Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur yang profesional
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan manajemen pelayanan publik
Arah Kebijakan Umum :
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju Kota Cerdas (*Smart City*) 2. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik

Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan asset
Arah Kebijakan Umum :
Meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah dan asset

Selanjutnya berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2018-2023 yaitu: 1) Infrastruktur dan Energi; 2) Pendidikan dan Kesehatan; 3) Peningkatan Ekonomi Masyarakat; 4) Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup; dan 5) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Serta dari masing-masing strategi pembangunan maka dirumuskan menjadi program pembangunan. Adapun 20 (dua puluh) Program Pemerintah Daerah untuk mewujudkan indikator sasaran daerah adalah:

1. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan.
2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Pengembangan Jaringan Kelistrikan serta Energi lainnya.
3. Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi dan Informasi.
4. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Batara Pintar.
5. Program Peningkatan Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Manajemen dan Pelayanan Bidang Kesehatan.
6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif.
7. Program Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta Pemasaran Hasil Pertanian.
8. Program Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta Pemasaran Hasil Perikanan.
9. Program Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta Pemasaran Hasil Perkebunan.
10. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi , UKM dan Peningkatan/ Pengembangan Perdagangan dan Industri.
11. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

12. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta Pengendalian Pencemaran / Perusakan Lingkungan Hidup.
13. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Destinasi Pariwisata dan Kemitraan.
14. Program Penanganan Konflik dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
15. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
16. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Fakir Miskin, KAT dan PMKS.
17. Program Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.
18. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.
19. Program Pengelolaan Pelayanan Publik.
20. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kemudian untuk menjalankan 20 Program Pemerintah Daerah tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam program masing-masing Perangkat Daerah tahun 2018-2023 yang secara terinci berikut kegiatan sebagai operasional program sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Tabel VI.3.
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Barito Utara

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Transisi		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Piriode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Misi 1 : Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi																		
Tujuan 1 : Meningkatnya konektivitas antar wilayah																		
Sasaran 1 : Meningkatnya desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah																		
Program peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	%	84,47	84,47	124.727,736	84,47	101.630,449	84,47	106.711,971	85,44	112.047,570	92,23	117.649,949	92,23	123.532,446	92,23	686.300,121	1. Dinas PUPR 2. Dishub
Sasaran 2 : Meningkatnya desa/ kelurahan yang yang terhubung listrik																		
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan serta energi lainnya	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	%	49,51	60,19	1.701,550	66,99	4.396,080	74,76	4.615,884	81,55	4.846,678	88,35	5.089,012	95,15	5.343,463	95,15	25.992,667	1. Dinas PUPR 2. Bagian Adm. Perekonomian SETDA
Sasaran 3 : Menurunnya desa/ kelurahan *blankspot*																		
Program pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi	Persentase desa/ kelurahan blankspot	%	88,35	66,02	2.079,742	46,60	1.555,691	27,18	1.633,476	17,48	1.715,149	7,77	1.800,907	0,00	1.890,952	0,00	10.675,917	Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Transisi		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Piriode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Misi 2 : Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan																		
Tujuan 2 : Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan sejahtera																		
Sasaran 4 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan																		
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Batara Pintar	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8,38	8,57	51.393,435	8,60	63.177,566	8,70	66.336,444	8,80	69.653,266	8,90	73.135,930	9,00	76.792,726	9,00	400.489,367	Dinas Pendidikan
	Angka Melek Huruf	%	97,01	98,14		98,80		99,00		99,20		99,40		99,60		99,60		1. Disdik 2. Dinas Siptaka
Sasaran 5 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat																		
Program peningkatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup	tahun	71,27	71,27	115.312,487	71,28	136.879,880	71,29	143.120,747	71,30	150.427,440	71,31	157.978,684	71,32	165.893,836	71,32	869.613,075	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Ibu	per 100.000 Kelahiran Hidup	256	256		256		256		213		213		213		213		Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi	per 1.000 Kelahiran Hidup	3	3		3		3		3		2		2		2		Dinas Kesehatan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Transisi		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Piriode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Sasaran 6 : Meningkatnya daya beli masyarakat																		
Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif	Pengeluaran perkapita pertahun	Juta rupiah	9.067	9.179	1.477,050	9.324	1.156,600	9.478	1.519,773	9.643	1.483,854	9.825	1.544,964	10.027	1.636,729	10.027	8.818,969	1. Dinas Naker trans Koperasi dan UKM 2. Dinas Sosial PMD 3. DPMPTSP
Misi 3 : Peningkatan Ekonomi Masyarakat																		
Tujuan 3 : Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi																		
Sasaran 7 : Meningkatnya sektor pertanian																		
Program Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil Pertanian	PDRB Sektor Pertanian	Juta rupiah	281.985,4	443.932,5	15.444,126	447.870,3	15.993,560	528.757,4	16.372,931	571.795,0	17.653,112	618.194,5	18.605,719	668.183,8	19.295,690	668.183,8	103.365,138	Dinas Pertanian

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Transisi		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Piriode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Sasaran 8 : Meningkatnya sektor perikanan																		
Program Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perikanan	PDRB Sektor Perikanan	Juta rupiah	132.642,0	144.040,5	2.473,254	156.533,2	2.172,610	165.273,2	2.274,491	173.743,4	2.369,882	180.593,6	2.514,251	186.685,8	2.640,610	186.685,8	14.445,096	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Sasaran 9 : Meningkatnya sektor perkebunan																		
Program Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembang an Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perkebunan	PDRB Sektor Perkebunan	Juta rupiah	361.185,4	352.767,4	2.036,488	361.324,2	2.118,788	369.472,9	2.451,784	378.721,2	2.003,558	387.784,1	2.103,605	396.640,2	2.506,243	396.640,2	13.220,464	Dinas Pertanian
Sasaran 10 : Meningkatnya sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan serta industri																		
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi , UKM dan peningkatan/ pengembangan perdagangan dan industri	PDRB Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Juta rupiah	114.111,9	111.920,3	13.100,426	120.314,3	16.672,261	129.337,9	17.632,824	139.038,2	18.609,376	149.466,1	19.702,549	160.676,1	20.694,831	160.676,1	106.412,266	Dinas Nakertrans Koperasi dan UKM
	PDRB Sektor Perdagangan	Juta rupiah	507.514,2	508.735,0		509.701,6		510.873,9		512.662,0		513.584,8		515.125,5		515.125,5		Disgadrin

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Transisi		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Piriode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	PDRB Sektor Industri	Juta rupiah	677.509,5	678.892,3		680.182,2		681.746,6		684.132,7		685.364,2		687.420,3		687.420,3		Disgadrin
Sasaran 11 : Meningkatnya daya saing tenaga kerja																		
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta peningkatan iklim investasi dan realisasi Investasi	Angka penganggura terbuka	%	5,19	4,60	355,613	4,31	948,410	3,99	1.017,410	3,71	1.010,000	3,44	983,000	3,17	1.110,000	3,17	5.424,433	Dinas Nakertrans Koperasi dan UKM
	Pendapatan Perkapita penduduk	Juta Rupiah	49,27	47,30		48,67		50,05		51,42		52,79		54,17		54,17		1. Dinas Naker trans Koperasi dan UKM 2. DPMPTSP
Misi 4 : Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup																		
Tujuan 4 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan yang tenteram harmonis dan berbudaya																		
Sasaran 12 : Menurunnya pencemaran lingkungan.																		
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta pengendalian pencemaran / perusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Nilai	80,00	80,01	48.535,234	80,02	27.887,127	80,03	29.281,483	80,04	30.745,557	80,05	32.282,835	80,05	33.896,977	80,05	202.629,212	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara	Nilai	96,72	96,73		96,75		96,76		96,78		96,80		96,80		96,80		Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	84,59	84,61		84,62		84,63		84,65		84,68		84,70		84,70		Dinas Lingkungan Hidup

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Transisi		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Piriode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Sasaran 13 : Meningkatnya daya saing pariwisata																		
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, destinasi pariwisata dan kemitraan	Jumlah kunjungan wisatawan	%	79,0	83,2	3.543,735	83,2	5.152,595	87,3	5.344,970	91,5	5.638,869	95,7	5.969,093	99,8	6.333,354	99,8	31.982,616	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Sasaran 14 : Meningkatnya ketertiban masyarakat																		
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	%	87,50	87,50	4.179,967	87,50	4.212,802	87,50	4.097,013	87,50	4.481,031	87,50	4.720,799	93,75	5.086,887	93,75	26.778,499	1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sasaran 15 : Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat																		
Program Penanganan Konflik dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase kasus konflik yang ditangani	%	100	80	1.853,820	80	1.430,660	80	1.790,075	80	1.823,884	80	1.946,258	80	1.960,067	80	10.804,764	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Transisi		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Piriode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Sasaran 16 : Menurunnya penyandang masalah sosial																		
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Fakir Miskin, KAT dan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	%	23,95	26,83	14.105,404	42,52	25.360,867	62,34	26.972,041	83,39	28.431,199	80,99	29.862,939	100	31.461,220	100	156.193,671	Dinas Sosial PMD
Misi 5 : Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik *(Good Governance)*																		
Tujuan 5 : Terwujudnya Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*)																		
Sasaran 17 : Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi																		
Program penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (Nilai)	-	-	9.607,486	C (31)	9.014,101	C (35)	9.536,781	CC (51)	10.018,160	CC (55)	10.491,538	B (61)	11.014,869	B (61)	59.682,933	Semua Perangkat Daerah
Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas penerapan managemen kinerja																		
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Predikat (Nilai)	C	CC (53,97)	7.803,038	CC (54,00)	7.204,513	B (60,01)	7.404,500	BB (70,01)	7.774,183	BB (70,01)	8.231,674	A (80,01)	8.739,072	A (80,01)	47.156,981	Semua Perangkat Daerah

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Transisi		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Piriode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Sasaran 19 : Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik																		
Program Pengelolaan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat (Nilai)	B	C (75,21)	201.610,979	B (76,61)	162.369,237	B (76,70)	171.040,375	B (76,80)	179.390,010	B (76,90)	188.222,710	B (77,00)	197.147,959	B (77,00)	1.099.781,270	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Semua Perangkat Daerah
Sasaran 20 : Meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset daerah																		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Predikat (Opini ke-)	WTP	WTP (1)	14.639,386	WTP (1)	9.648,898	WTP (1)	9.776,855	WTP (1)	10.255,642	WTP (1)	10.560,925	WTP (1)	11.089,275	WTP (1)	65.970,982	Semua Perangkat Daerah
JUMLAH					**635.980,955**		**598.982,693**		**628.931,827**		**660.378,419**		**693.397,339**		**728.067,206**		**3.945.738,439**	

RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023 dilaksanakan dalam setiap tahun perencanaan dengan arahan prioritas tema tahunan sebagai berikut:



Gambar VI.1.
Indikasi Prioritas Tema Perencanaan Tahunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2023

Dengan tema pembangunan tiap tahun tersebut pembangunan di Barito Utara mengarah pada konsep pembangunan yang holistik, integratif dan spasial dengan memprioritaskan pada pembangunan pusat-pusat

pertumbuhan sesuai dengan potensi unggulan di masing-masing kawasan pusat pertumbuhan tanpa meninggalkan pembangunan di kawasan yang lain dalam rangka tetap mengimplementasikan prinsip pemerataan pembangunan. Dengan konsep dan prinsip tersebut dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah dan dukungan keuangan dari pihak lain dalam membangun kawasan secara terintegrasi dilakukan secara bertahap sesuai tema tersebut di atas.

Tahun 2019 :

Pembangunan infrastruktur dasar untuk pengembangan sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan dengan tetap memperhatikan prinsip pemerataan pembangunan, sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan perekonomian daerah.

Tahun 2020 :

Pembangunan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan pusat pertumbuhan lainnya dengan tetap melanjutkan tahapan sebelumnya, sehingga pengembangan sektor-sektor yang berpengaruh dapat memacu pertumbuhan dan pemerataan peningkatan perekonomian daerah.

Tahun 2021 :

Pembangunan masih diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar untuk melanjutkan tahapan-tahapan sebelumnya, dengan melakukan perhatian khusus pada beberapa sektor yang berkontribusi pada percepatan pertumbuhan dan pemerataan yang berdampak pada peningkatan perekonomian daerah.

Tahun 2022 :

Pembangunan lebih diarahkan untuk pengembangan infrastruktur dasar yang telah dibangun sehingga diharapkan akan lebih memantapkan pertumbuhan dan pemerataan, sehingga semua sektor dapat berkembang pada kawasan pusat pertumbuhan sehingga peningkatan perekonomian daerah bergerak kearah yang lebih baik.

Tahun 2023 :

Pembangunan masih diarahkan untuk pengembangan infrastruktur dasar yang telah dibangun, dengan mensinergikan semua sektor-sektor terkait sehingga dapat mengoptimalkan pertumbuhan dan pemerataan. Pada tahapan ini semua potensi sektor-sektor pada kawasan pusat pertumbuhan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga terjadi peningkatan perekonomian daerah secara signifikan.

Tahapan pembangunan 5 tahunan ini selalu dilakukan secara terintegrasi dengan semua sektor pembangunan sebagai satu kesatuan utuh, sehingga apa yang dicita-citakan yaitu masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera dapat terwujud dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat.

Pada periode RPJMD tahun 2018-2023 diasumsikan bahwa pengeluaran belanja daerah dari pengeluaran wajib dan mengikat yang cenderung meningkat, namun diasumsikan juga terjadinya peningkatan pendapatan daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,6 persen, maka kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan untuk pembangunan daerah selama periode RPJMD diprediksi cenderung meningkat.

Kemampuan riil keuangan daerah untuk membiayai belanja langsung pada tahun 2018 sebesar Rp.635.980.954.990,00 hingga pada tahun 2023 belanja langsung diproyeksikan menjadi sebesar Rp.728.067.206.447,29.

Belanja daerah dibedakan menjadi belanja tidak langsung langsung dan belanja langsung.

7.1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai

Anggaran belanja pegawai tersebut selain gaji dan tunjangan PNS daerah pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas, meliputi gaji dan tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD, Biaya Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, BPOP DPRD, Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) DPRD, Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tambahan penghasilan PNS guru dan non guru, sertifikasi guru, dan juga sudah termasuk tunjangan kesejahteraan pegawai, insentif pajak dan retribusi

daerah, iuran jaminan kecelakaan, iuran jaminan kematian dan subsidi iuran BPJS PNS.

b) Belanja Bunga

Bagi daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD. Pada tahun 2018-2023 diprediksi Kabupaten Barito Utara tidak memilik kewajiban pembayaran bunga pinjaman.

c) Belanja Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orangbanyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan. Pemerintah daerah dapat memberikan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD. Pada periode tahun 2018-2023 belanja subsidi tidak dialokasikan.

d) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemeritah daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka, PKK), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dan hibah ini secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.

Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomimasyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

e) Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari kabupaten ke Pemerintah Desa dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Provinsi dan Partai Politik

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Provinsi dan Parpol dihitung berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran tersebut digunakan untuk Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, bantuan kepada provinsi dan bantuan kepada partai politik dan bantuan keuangan ke desa/lembaga untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

g) Belanja Tak Terduga

Belanja ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya tidak biasa, tidak bisa diprediksikan dan atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan.

7.2. Belanja Langsung

Belanja Langsung ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2018-2023 tertuang dalam tabel berikut :

Tabel VII.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara
Tahun 2018-2023

NO.	URAIAN	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
A.	**KAPASITAS RIIL KEUANGAN**	**753.968.926.991,82**	**691.869.932.690,42**	**692.530.202.864,26**	**735.032.991.219,23**	**780.511.290.102,21**	**846.632.503.301,16**
B.	**BELANJA**	**1.337.073.793.621,00**	**1.317.536.576.702,00**	**1.363.020.086.509,62**	**1.408.956.139.185,62**	**1.457.272.725.013,97**	**1.508.002.252.171,83**
1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**701.092.838.631,00**	**718.553.884.143,00**	**734.088.259.322,67**	**748.577.720.639,32**	**763.875.385.540,36**	**779.935.045.724,54**
1.1	Belanja Pegawai	484.397.583.797,30	521.001.790.443,00	534.026.835.204,08	547.377.506.084,18	561.061.943.736,28	575.088.492.329,69
1.2	Belanja Hibah	60.400.437.000,00	20.094.095.000,00	17.079.980.750,00	14.517.983.637,50	12.340.286.091,88	10.489.243.178,09
1.3	Belanja Bantuan Sosial	2.800.000.000,00	6.018.000.000,00	6.018.000.000,00	6.018.000.000,00	6.018.000.000,00	6.018.000.000,00
1.4	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
1.5	Belanja Bagi Hasil	3.109.856.198,70	2.200.000.000,00	3.358.644.694,60	3.627.336.270,16	3.917.523.171,78	4.230.925.025,52
1.6	Belanja Bantuan Keuangan	149.084.961.635,00	168.239.998.700,00	171.604.798.674,00	175.036.894.647,48	178.537.632.540,43	182.108.385.191,24
1.7	Belanja Tidak Terduga	1.300.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2.	**BELANJA LANGSUNG**	**635.980.954.990,00**	**598.982.692.559,00**	**628.931.827.186,95**	**660.378.418.546,30**	**693.397.339.473,61**	**728.067.206.447,29**
2.1	Belanja Pegawai	73.831.751.873,00	80.542.076.862,00	84.569.180.705,10	88.797.639.740,36	93.237.521.727,37	97.899.397.813,74
2.2	Belanja Barang dan Jasa	258.838.834.438,00	217.822.291.922,00	228.713.406.518,10	240.149.076.844,01	252.156.530.686,21	264.764.357.220,52
2.3	Belanja Modal	303.310.368.679,00	300.618.323.775,00	315.649.239.963,75	331.431.701.961,94	348.003.287.060,03	365.403.451.413,04

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara, 2018

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Barito Utara berisi program program untuk mencapai visi dan misi jangka menengah dan pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menjalankan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan serta Fungsi Penunjang. Rincian kebutuhan pendanaan dirinci dengan pagu indikatif dana yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator kinerja program (outcomes) yang telah ditetapkan.

Dalam menyusun perencanaan pendanaan ini berusaha menerapkan prinsip "*money follow program*" sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia pada sidang Kabinet tanggal 10 Februari 2016, bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran harus merubah dari paradigma "*money follow function*" menjadi "*money follow program*". Hal ini berarti bahwa pengalokasian anggaran atau dana tidak lagi sekedar mengikuti fungsi struktur kelembagaan yang ada, tetapi anggaran harus dioptimalkan untuk mendukung pencapaian program-program prioritas yang terkait langsung dengan pencapaian visi misi dan pelayanan masyarakat. Konsep "*money follow function*" selama ini mengandung kelemahan, anggaran justru diorientasikan untuk membiayai fungsi atau organisasi birokrasi yang mahal untuk menjalankan kegiatannya. Akibatnya program-program strategis dan prioritas belum mendapatkan porsi anggaran yang memadai sebagai program unggulan daerah.

Ada beberapa kendala yang menyebabkan penyusunan pagu indikatif tidak bisa secara ideal dilakukan, sehingga konsep "*money follow program*" belum mampu diaplikasikan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

a. Potensi dana yang bisa cukup leluasa diarahkan untuk pendanaan program prioritas bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun jumlahnya tidak terlalu signifikan untuk mendesain pagu indikatif secara ideal. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara hingga tahun 2018 hanya berkontribusi rata-rata sebesar 7,86 persen dari total pendapatan daerah.
b. Banyaknya kewajiban dari Pemerintah Pusat yang harus dipenuhi oleh daerah dalam bentuk belanja wajib dan diarahkan, seperti : pemenuhan kewajiban alokasi dana untuk bidang pendidikan minimal 20%, bidang

kesehatan 10%, Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari Total dana perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana transfer wajib digunakan untuk belanja modal minimum 20 persen dan dana bagi hasil yang peruntukannya sebagian besar sudah ditentukan. Kondisi tersebut menyebabkan sangat terbatasnya potensi dana yang bisa diarahkan secara ideal untuk mendanai program-program prioritas daerah.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu potensi dana yang besarannya cukup signifikan untuk mendanai program-program pembangunan di daerah akan tetapi besarannya belum dapat dimasukkan secara pasti dalam proyeksi pendapatan dan kerangka pendanaan APBD sebelum ada aturan yang ditetapkan dan dipublikasikan serta dalam melaksanakan harus sesuai dengan petunjuk dari Pemerintah, sehingga dengan kondisi tersebut daerah tidak leluasa dalam penggunaannya untuk mendanai program prioritas daerah.

Namun demikian penyusunan pagu indikatif tersebut tetap diupayakan mengacu ketentuan yang ada, namun karena berbagai keterbatasan tersebut ada beberapa kebijakan daerah yang harus dilakukan untuk mensikapinya sehingga diperoleh solusi yang lebih realistis dan rasional. Secara umum beberapa pertimbangan yang dipergunakan sebagai penghitung pagu indikatif antara lain : pemenuhan kewajiban belanja wajib mengikat, prioritas-prioritas daerah terkait pencapaian visi misi jangka menengah, belanja untuk membiayai urusan wajib bersifat pelayanan dasar, dan belanja-belanja prioritas yang sifatnya mendukung pencapaian kinerja daerah.

Program-program telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), termasuk dalam menjabarkan kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan.

Pencapaian kinerja kepala daerah yang bersifat dampak (*impacts*) merupakan agregasi program yang dilaksanakan juga didukung program/kegiatan yang bersumber dari APBD Kalimantan Tengah, APBN, Dana Desa, swasta , masyarakat dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat. Mengingat kemampuan kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan tersebut sangat terbatas maka dalam Bab VIII ini matrik yang

ditampilkan bersumber dari APBD Kabupaten Barito Utara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Bab III dan program program yang direncanakan pembiayaanya dengan pihak lain. Adapun Program pembangunan yang direncanakan disertai pendanaan pembangunan dengan sumber dana APBD Kabupaten Barito Utara sebagai berikut :

Tabel VII.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Barito Utara

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				**352.381,993**		**359.248,330**		**377.032,143**		**396.026,222**		**415.888,180**		**436.772,633**		**2.337.349,501**	
PENDIDIKAN				**50.912,689**		**62.714,251**		**65.849,964**		**69.142,462**		**72.599,585**		**76.229,564**		**397.448,515**	
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	81,43 %	82,17 %	1.479,100	84,00%	1.286,600	86,00 %	1.350,930	88,00 %	1.418,477	90,00 %	1.489,400	92,00 %	1.563,870	92,00 %	8.588,377	**DINAS PENDIDIKAN**
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	87,91 %	100,71 %	25.683,285	102,00 %	26.091,117	103,00 %	27.324,898	104,00 %	28.691,142	105,00 %	30.125,700	106,00 %	31.631,985	106,00 %	169.548,126	**DINAS PENDIDIKAN**
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	85,47 %	98,17 %		99,00%		100,00 %		101,00 %		102,00 %		103,00 %		103,00 %		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	73,35 %	89,64 %		91,00%		93,00 %		95,00 %		97,00 %		99,00 %		99,00 %		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	56,64 %	75,09 %		80,00%		83,00 %		86,00 %		89,00 %		92,00 %		92,00 %		
	Angka Lulusan (AL) SD	97,63 %	97,64 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
	Angka Lulusan (AL) SMP	79,49 %	98,34 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (Non IKU)	83,91 %	84,00 %		86,00 %		89,00 %		92,00 %		95,00 %		98,00 %		98,00 %		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik ((Non IKU)	79,49 %	84,00 %		86,00 %		89,00 %		92,00 %		95,00 %		98,00 %		98,00 %		
Program Pendidikan Menengah		-	-	59,100		-		-		-		-		-		59,100	
Program Batara Pintar	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,38 tahun	8,57 tahun	-	8,6 tahun	-	8,7 tahun	1.146,994	8,8 tahun	1.204,344	8,9 tahun	1.264,561	9 tahun	1.327,789	9 tahun	4.943,688	**DINAS PENDIDIKAN**
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang bersertifikat Profesi	37,00 %	38,00 %	2.397,280	48,00 %	13.305,680	58,00 %	13.146,746	68,00 %	13.804,083	78,00 %	14.494,287	88,00 %	15.219,001	88,00 %	72.367,076	**DINAS PENDIDIKAN**
	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (Non IKU)	0,07	0,07		0,07		0,08		0,08		0,09		0,09		0,09		
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (Non IKU)	80,69 %	84,77 %		86,00%		88,00 %		90,00 %		92,00 %		94,00 %		94,00 %		
Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	97,01 %	98,14 %	842,000	98,80 %	2.627,304	99,00 %	2.758,669	99,20 %	2.896,603	99,40 %	3.041,433	99,60 %	3.193,504	99,60 %	15.359,513	**DINAS PENDIDIKAN**
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Capaian Manajemen Pelayanan Pendidikan (Non IKU)	100%	100%	500,865	100%	357,150	100%	249,008	100%	261,458	100%	274,531	100%	288,257	100%	1.931,268	**DINAS PENDIDIKAN**
Program Perencanaan Pendidikan	Capaian Perencanaan pendidikan (Non IKU)	100%	100%	199,510	100%	175,000	100%	183,750	100%	192,938	100%	202,584	100%	212,714	100%	1.166,495	**DINAS PENDIDIKAN**
Program Bantuan Biaya Pendidikan Peserta didik	Bantuan Biaya Pendidikan Peserta didik (Non IKU)	-	2 org	120,000	2 org	120,000		-		-		-		-	2 org	240,000	**DINAS PENDIDIKAN**
Program Bantuan Operasional Sekolah	Capaian Dana Bos Pusat	100,00 %	100,00 %	19.631,549	100,00 %	18.751,400	100,00 %	19.688,970	100,00 %	20.673,419	100,00 %	21.707,089	100,00 %	22.792,444	100,00 %	123.244,871	**DINAS PENDIDIKAN**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
KESEHATAN				**110.852,849**		**132.513,733**		**139.139,420**		**146.096,391**		**153.401,210**		**161.071,271**		**843.074,874**	
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Harapan Hidup (IKU)	71,27	71,27	137,312	71,28	195,296	71,29	205,061	71,3	215,314	71,31	226,080	71,32	237,384	71,32	1.216,446	**DINAS KESEHATAN**
	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (IKU)	89,22	80		81		82		83		84		85		85		
	Cakupan pelayanan nifas (IKU)	85,94	83		83,5		84		84,5		85		85		85		
	Cakupan pelayanan anak balita (IKU)	64,1	60,1		60,2		60,3		60,4		60,5		60,6		60,6		
	Cakupan kunjungan bayi (IKU)	99,32	80		81		82		83		84		85		85		
	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup (IKU)	256	256		256		256		213		213		213		213		
	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup (IKU)	3	20		19		18		17		16		15		15		
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (IKU)	3	3		3		3		3		2		2		2		
	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (IKU)	3	3		3		3		3		2		2		2		
	Angka kelangsungan hidup bayi (IKU)	997	975		976		977		978		979		980		980		
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (IKU)	26,72	25		25,1		25,3		25,5		25,6		25,8		25,8		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (IKU)	41,77	35		36		37		38		39		40		40		
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (IKU)	86,31	80		81		82		83		84		85		85		
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat	100%	95%	63,732	95%	63,732	95%	66,919	95%	70,265	95%	73,778	95%	77,467	95%	415,892	**DINAS KESEHATAN**
	Persentase balita 6-59 bulan mendapat vitamin A	82,77 %	95%		95%		95%		95%		95%		95%		95%		
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (IKU)	100	100	807,603	100	634,695	100	666,430	100	699,751	100	734,739	100	771,476	100	4.314,694	**DINAS KESEHATAN**
	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (IKU)	99,9	90		92		95		98		98		100		100		
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (IKU)	94	85	3.377,251	85	826,350	87	867,668	87	911,051	90	956,603	95	1.004,434	95	7.943,356	**DINAS KESEHATAN**
	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) (IKU)	162	114		135		135		123		115		93		93		
	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) (IKU)	2	4		4		4		4		4		4		4		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (IKU	100	100		100		100		100		100		100		100		
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (IKU)	100	100		100		100		100		100		100		100		
	Penderita diare yang ditangani (IKU)	76	70		75		75		80		80		85		85		
	Angka kejadian Malaria (IKU)	16	4		15		12		8		4		4		4		
	Tingkat kematian akibat malaria (IKU)	0	0		0		0		0		0		0		0		
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (IKU)	90,3	88		91		94		97		100		100		100		
	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (IKU)	108,1	95		95		95		95		95		95		95		
	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk (IKU)	2,86	2,86		2,86		2,86		2,86		2,86		2,86		2,86		
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (IKU)	6,2	6,2		6,2		6,2		6,2		6,2		6,2		6,2		
	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (IKU)	40	35		35		30		30		25		25		25		
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	74%	74%	477,440	80%	409,060	80%	429,513	85%	450,989	90%	473,538	79%	497,215	90%	2.737,755	**DINAS KESEHATAN**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Persentase desa yang memanfaatkan dana desa untuk UKBM	100%	90%		90%		97%		98%		95%		100%		100%		
	Persentase posyandu aktif	-	30%		30%		35%		40%		45%		50%		50%		
	Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk program kesehatan	9	5		5		5		5		5		5		25		
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	% Meningkatnya pengembangan lingkungan sehat	75%	75%	423,740	75%	189,900	75%	199,395	75%	209,365	75%	219,833	75%	230,825	75%	1.473,057	**DINAS KESEHATAN**
	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (kumulatif)	103 desa	103 desa		103 desa		103 desa		103 desa		103 desa		103 desa		103 desa		
	Jumlah Tempat-Tempat Umum (TTU) yang Memenuhi Syarat Kesehatan Lingkungan (Puskesmas, SD/SMP)	56	50%		50%		55%		60%		65%		70%		70%		
	Jumlah Pasar yg memenuhi syarat kesehatan yg dilakukan pengawasan	-	25%		25%		30%		35%		40%		45%		45%		
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terselenggaranya standarisasi, akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta pengembangan sistem informasi kesehatan	16 Pusk, 9 Kec	16 Pusk, 9 Kec	29,664	16 Pusk, 9 Kec	45,000	16 Pusk, 9 Kec	47,250	16 Pusk, 9 Kec	49,613	16 Pusk, 9 Kec	52,093	16 Pusk, 9 Kec	54,698	16 Pusk, 9 Kec	278,317	**DINAS KESEHATAN**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Cakupan Puskesmas yang mempunyai SOP kesehatan	80%	95%		95%		95%		95%		95%		95%		95%		
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan Pelayanan Lansia	-	75%	15,320	75%	90,000	80%	94,500	85%	99,225	90%	104,186	100%	109,396	100%	512,627	**DINAS KESEHATAN**
	Cakupan Pelayanan Lansia Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan lansia sesuai standar	-	16 Pusk		16 Pusk		16 Pusk		16 Pusk		16 Pusk		16 Pusk		16 Pusk		
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Jumlah industri rumah tangga pangan yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan	80%	80%	66,070	80%	115,000	85%	120,750	85%	126,788	90%	133,127	90%	139,783	90%	701,518	**DINAS KESEHATAN**
	Jumlah kegiatan bimtek,supervisi , monev yang dilakukan	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		90%		
	Jumlah sampel makanan di TTU (Tempat-tempat umum)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan BMHP Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes	95%	95%	2.899,308	95%	1.414,573	95%	1.485,302	95%	1.559,567	95%	1.637,545	95%	1.719,422	95%	10.715,717	**DINAS KESEHATAN**
	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	% Meningkatnya ketersediaan obat asli Indonesia	95%	95%	66,225	95%	73,370	95%	77,039	95%	80,890	95%	84,935	95%	89,182	95%	471,641	**DINAS KESEHATAN**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Jumlah penyelenggaraan kegiatan komunikasi,informasi,edukasi obat tradisional (Sosialisasi) di desa /kota kabupaten	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan/pertemuan CPOTB terkait obat tradisional/obat asli Indonesia	95%	95%		95%		95%		95%		95%		95%		95%		
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan pra sarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya	% Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar	95%	95%	9.832,348	95%	12.003,440	95%	12.603,612	95%	13.233,793	95%	13.895,482	95%	14.590,256	95%	76.158,931	**DINAS KESEHATAN**
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase Rumah Sakit yang memiliki sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan sesuai standar dan aman	-	95%	13.813,904	95%	51.929,771	95%	54.526,260	95%	57.252,573	95%	60.115,201	95%	63.120,961	95%	300.758,669	**DINAS KESEHATAN**
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan	Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap kesehatan	-	75%	130,994	75%	113,993	77%	119,693	80%	125,677	83%	131,961	85%	138,559	85%	760,877	**DINAS KESEHATAN**
	Cakupan UKS/UKSG yang mendapatkan Pembinaan	-	75%		75%		77%		80%		83%		85%		85%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Peran Serta Masyarakat bidang Kesehatan																
Program pengembangan SDM, Regislasi dan Kebutuhan Nakes	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (IKU)	0,78	0,79	263,573	0,79	270,813	0,79	284,354	0,79	298,572	0,79	313,500	0,79	329,175	0,79	1.759,988	**DINAS KESEHATAN**
	Bad Occupancy Rate (BOR) (IKU)	87,00	77		74		71		73		76		79		79		
	Rasio Dokter Umum (IKU	18	21,37		21,37		21,37		20,72		20,72		20,72		20,72		
	Rasio Perawat (IKU)	170	171,59		171,59		171,59		171,59		170,94		170,94		170,94		
	Rasio Bidan (IKU)	84	88,06		88,06		88,06		88,06		88,06		88,06		88,06		
	Rasio Dokter Spesialis (IKU)	9	9,71		9,71		9,71		9,07		9,07		9,07		9,07		
	Cakupan puskesmas (IKU)	1,8	1,8		1,8		1,8		1,8		1,8		1,8		1,8		
	Cakupan pembantu puskesmas (IKU)	0,8	0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		
	Rasio posyandu per satuan balita (IKU)	14	10		10		10		10		10		10		10		
Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Meningkatnya pelayanan preventif dan promotif di Puskesmas	100%	100%	11.283,494	100%	15.243,628	100%	16.005,809	100%	16.806,100	100%	17.646,405	100%	18.528,725	100%	95.514,161	**DINAS KESEHATAN**
Program Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Persentase Jumlah Puskesmas Terakreditasi	60%	60%	1.000,000	60%	3.145,240	100%	3.302,502	100%	3.467,627	100%	3.641,008	100%	3.823,059	100%	18.379,436	**DINAS KESEHATAN**
Program Jaminan Persalinan (Jampersal)	Meningkatnya kunjungan persalinan pada fasilitas kesehatan	75%	75%	2.454,803	75%	1.530,000	75%	1.606,500	75%	1.686,825	75%	1.771,166	75%	1.859,725	75%	10.909,019	**DINAS KESEHATAN**
	Peningkatan penggunaan rumah tunggu sebelum dan sesudah persalinan pada		50%		50%		55%		60%		65%		70%		70%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	fasilitas kesehatan																
Program Peningkatan Akreditasi Rumah Sakit	Meingkatnya status rumah sakit yang terakreditasi	-	-	-	100%	240,000	100%	252,000	100%	264,600	100%	277,830	100%	291,722	100%	1.326,152	**DINAS KESEHATAN**
	Peningkatan status akreditasi Rumah Sakit	-	-		Dasar		Madya		Utama		Paripurna		Paripurna		Paripurna		
Program BLUD RSU M.Teweh	Persentase pelayanan rumah sakit	-	100%	37.756,215	100%	31.156,250	100%	32.714,063	100%	34.349,766	100%	36.067,254	100%	37.870,617	100%	209.914,164	**DINAS KESEHATAN**
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada penduduk miskin	96%	96%	116,116	96%	144,900	96%	152,145	96%	159,752	96%	167,740	96%	176,127	96%	916,780	**DINAS KESEHATAN**
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	Menjamin ketersediaan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Barito Utara	96%	96%	25.837,737	96%	12.678,722	96%	13.312,658	96%	13.978,291	96%	14.677,206	96%	15.411,066	96%	95.895,679	**DINAS KESEHATAN**
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (IKU)	1,25	1,25		1,25		1,25		1,25		1,25		1,25		1,25		
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (IKU)	0,48	0,48		0,48		0,48		0,48		0,48		0,48		0,48		
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**160.679,293**		**153.635,944**		**161.317,741**		**169.383,628**		**177.852,810**		**186.745,450**		**1.009.614,866**	
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat kota	66,69 %	67,96 %	93.654,625	67,96%	89.742,819	81,55 %	94.229,960	81,55 %	98.941,458	87,38 %	103.888,531	92,23 %	109.082,957	92,23 %	589.540,350	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	29,75	32,78		36,11		39,77		43,82		48,25		53,13		53,12		
	Persentase jembatan dalam kondisi baik	62,82	69,82		73,86		76,91		80,64		83,83		87,43		87,43		
Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	29,75	32,78	21.987,381	36,11	3.267,200	39,77	3.430,560	43,82	3.602,088	48,25	3.782,192	53,13	3.971,302	53,12	40.040,724	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
	Persentase jembatan dalam kondisi baik	62,82	69,82		73,86		76,91		80,64		83,83		87,43		87,43		
Program Pengendalian Banjir	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	3,23	13,23	1.980,000	23,23	6.824,032	33,23	7.165,234	43,23	7.523,495	53,23	7.899,670	63,23	8.294,654	63,23	39.687,085	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	35	40	4.595,913	45	5.295,815	50	5.560,606	55	5.838,636	60	6.130,568	65	6.437,097	65	33.858,636	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
Program Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase rumah tangga berakses air bersih	42,47	44,71	2.672,400	46,83	1.100,000	49,17	1.155,000	51,63	1.212,750	54,21	1.273,388	56,92	1.337,057	56,92	8.750,594	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	58,15	61,07		64,10		67,31		70,68		74,20		77,92		77,92		
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase rumah tinggal bersanitasi	43,24	50	1.636,664	55	1.030,000	60	1.081,500	65	1.135,575	70	1.192,354	75	1.251,971	75	7.328,064	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Jumlah prasarana air bersih yang dibangun/ direhab		9 unit	1.055,000	9 unit	3.734,530	9 unit	3.921,257	9 unit	4.117,319	9 unit	4.323,185	9 unit	4.539,345	45 unit	21.690,636	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
Program Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)	Persentase rumah tinggal bersanitasi	43,24	50	310,000	55	295,000	60	309,750	65	325,238	70	341,499	75	358,574	75	1.940,061	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman	Jumlah jalan lingkungan yang dibangun/ direhabilitasi	-	900 m	6.102,600	1.000 m	17.065,000	1.050 m	17.918,250	1.103 m	18.814,163	1.158 m	19.754,871	1.216 m	20.742,614	1.276 m	100.397,497	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase/ rasio kesesuaian pemanfaatan RTRW	0,49	0,49	610,800	0,56	630,455	0,63	661,978	0,72	695,077	0,81	729,830	0,92	766,322	0,92	4.094,462	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
'Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah lokasi strategis yang ditata	-	2 lokasi	5.940,000	2 lokasi	3.501,875	2 lokasi	3.676,969	2 lokasi	3.860,817	2 lokasi	4.053,858	2 lokasi	4.256,551	2 lokasi	25.290,070	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah sarana dan prasarana RTH yang dilakukan penataan	-	5 lokasi	12.117,373	5 lokasi	6.122,368	5 lokasi	6.428,486	5 lokasi	6.749,910	5 lokasi	7.087,406	5 lokasi	7.441,776	5 lokasi	45.947,318	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbunan Sampah yang di tangani	88,16 %	88,56 %	6.950,178	89,12%	11.766,250	89,74 %	12.354,563	90,5%	12.972,291	91,4%	13.620,905	92,31 %	14.301,950	92,31 %	71.966,136	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
Program Pengelolaan Bengkel, Laboratorium Teknik dan Alat Berat	prosentase pemeliharaan alat-alat berat dan angkutan darat		85%	835,800	90%	2.960,600	90%	3.108,630	90%	3.264,062	90%	3.427,265	90%	3.598,628	90%	17.194,984	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
Program pengembangan data/informasi	Jumlah Tersedianya Data dan Informasi untuk penyusunan Program/ Kegiatan SKPD		1 dok	116,360	1 dok	150,000	1 dok	157,500	1 dok	165,375	1 dok	173,644	1 dok	182,326	1 dok	945,205	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pembinaan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksana dan terkendalinya penyusunan program SKPD	100%	100%	114,200	100%	150,000	100%	157,500	100%	165,375	100%	173,644	100%	182,326	100%	943,045	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMA				**4.728,620**		**5.518,000**		**5.793,900**		**6.083,595**		**6.387,775**		**6.707,163**		**35.219,053**	
Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah layak huni	73,11 %	74,28 %	1.720,000	75,71%	1.875,000	77,29 %	1.968,750	78,86 %	2.067,188	80,49 %	2.170,547	82,20 %	2.279,074	82,20 %	12.080,559	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN**
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rasio Rumah layak huni	73,11 %	74,28 %	270,000	75,71%	140,000	77,29 %	147,000	78,86 %	154,350	80,49 %	162,068	82,20 %	170,171	82,20 %	1.043,588	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN**
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rasio Rumah layak huni	73,11 %	74,28 %	20,000	75,71%	20,000	77,29 %	21,000	78,86 %	22,050	80,49 %	23,153	82,20 %	24,310	82,20 %	130,513	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN**
Program Perbaikan Perumahan akibat Bencana alam/ sosial	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	-	10,000	-	10,000	100%	10,500	100%	11,025	100%	11,576	100%	12,155	100%	65,256	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN**
	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-	-	-	-	100%		100%		100%		100%		100%		
Program Peningkatan kesiagaan	Rasio lingkungan Pemukiman	4,08 %	3,53%	184,000	2,98%	226,500	2,43%	237,825	1,88%	249,716	1,33%	262,202	0,78%	275,312	0,78%	1.435,555	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
dan pencegahan bahaya kebakaran	Kumuh																**KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN**
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rasio Pemukiman layak huni	95,92 %	96,47 %	928,250	97,02%	2.053,300	97,57 %	2.155,965	98,12 %	2.263,763	98,67 %	2.376,951	99,22 %	2.495,799	99,22 %	12.274,029	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN**
Program Penyusunan Kebijakan Pemukiman Daerah	Rasio Pemukiman layak huni	95,92 %	96,47 %	946,100	97,02%	104,500	97,57 %	109,725	98,12 %	115,211	98,67 %	120,972	99,22 %	127,020	99,22 %	1.523,528	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN**
Program Peningkatan/ Rehabilitasi Sarana dan prassarana Pemukiman	Rasio Pemukiman layak huni	95,92 %	96,47 %	358,570	97,02%	690,575	97,57 %	725,104	98,12 %	761,359	98,67 %	799,427	99,22 %	839,398	99,22 %	4.174,433	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN**
Program Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Rasio lingkungan Pemukiman Kumuh	4,08 %	3,53%	291,700	2,98%	398,125	2,43%	418,031	1,88%	438,933	1,33%	460,879	0,78%	483,923	0,78%	2.491,592	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN**
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**24.315,442**		**3.638,802**		**3.642,138**		**3.966,717**		**4.225,700**		**4.527,029**		**44.315,828**	
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	% Terpeliharanya Keamanan dan ketertiban masyarakat	100%	100%	1.359,950	100%	1.533,250	100%	1.610,000	100%	1.633,220	100%	1.774,990	100%	1.863,690	100%	9.775,100	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
	Angka kriminalitas yang tertangani (per 10.000 penduduk)	10	10		10		11		12		12		13		13		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Penanganan konflik sosial	80%	80%		80%		80%		80%		80%		80%		80%		
Program Pengembangan wawasan Kebangsaan	% Meningkatnya Pemahaman tentang Wasbang	100%	100%	393,250	100%	115,000	100%	120,700	100%	126,790	100%	140,490	100%	139,780	100%	1.036,010	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi/ kegiatan Wasbang	100 orang	100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		500 orang		
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (PEKAT)	%Terpeliharanya Keamanan dan ketertiban masyarakat	100%	100%	154,500	100%	148,430	100%	155,850	100%	163,640	100%	171,830	100%	180,420	100%	974,670	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
Program Pendidikan politik masyarakat	% Meningkatnya Pengetahuan politik dan kesadaran politik masyarakat	100%	100%	399,350	100%	100,000	100%	252,000	100%	264,600	100%	315,400	100%	238,900	100%	1.570,250	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi /Pendidikan politik	450 orang	450 orang		450 orang		450 orang		450 orang		450 orang		450 orang		2.250 orang		
Program Pemilihan Umum	% Meningkatnya Pengetahuan politik dan kesadaran politik masyarakat	100%	100%	353,860	100%	290,000	0	0,000	100%	100,000	0	0,000	100%	100,000	100%	843,860	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Petugas Perlindungan masyarakat	1	2	777,640	2	239,209	2	333,000	2	410,000	2	450,000	2	485,000	2	2.694,849	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**
	Persentazse Penyelesaian Pelnggaran K3 (Ketertiban Ketentraman Keindahan)	87,50	87,50		87,50		87,50		87,50		87,50		93,75		93,75		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase Penanganan Bencana Kebakaran	75,00 %	95,83 %	403,517	95,83%	450,138	100%	318,000	100%	378,000	100%	413,000	100%	443,000	100%	2.405,655	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**
Program Pendidikan Politik Masyarakat	% Jumlah Pengamanan Pilpres,Pileg dan Pilkada	-	85%	0,000	85%	32,500	90%	35,000	-	0,000	-	0,000	100%	60,000	100%	127,500	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**
Program Penataan Peraturan Perundangan - undangan	Persentase Penegakan Perda dan Perbub	75%	60 %	65,000	60%	104,000	100%	160,000	100%	200,000	100%	235,000	100%	255,000	100%	1.019,000	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Desa Tangguh Bencana	4%	6,98%	92,625	10,00%	469,275	13,89 %	492,738	19,35 %	517,375	28,00 %	543,244	44,44 %	570,406	44,44 %	2.685,663	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Persentase Penanganan Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan	-	25%	20.121,875	32,86%	0,000	40%	0,000	50%	0,000	65%	0,000	90%	0,000	90%	20.121,875	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
Program Penanganan Darurat	Persentase Unsur Stakholder PB dan Kebakaran	50%	62,50 %	158,875	75,00 %	132,000	87,50 %	138,600	100 %	145,530	100 %	152,806	100 %	160,446	100 %	888,257	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
	Persentase Peralatan PB dan Kebakaran	75%	50%		70%		75%		80%		85%		90%		90%		
	Persentase logistik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Program rehabilitasi dan rekonstruksi	Prosentase rehabilitasi dan rekonstruksi infrastuktur fisik dampak bencana	-	100%	35,000	100%	25,000	100%	26,250	100%	27,562	100%	28,940	100%	30,387	100%	173,139	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
SOSIAL				893,100		1.227,600		1.288,980		1.353,429		1.421,100		1.492,155		7.676,365	
Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma		100%	20,000	100%	25,000	100%	26,250	100%	27,563	100%	28,941	100%	30,388	100%	158,141	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
Program Pencegahan dan Penangganan Penyakit Menular	Persentase pencegahan Penyakit menular /HIV AIDS	33%	25%	6,000	20%	6,000	16,67 %	6,300	14,29 %	6,615	12,5%	6,946	11,11 %	7,293	99,56 %	39,154	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS yg menerima bantuan RANSTRA	54,79 %	54,79 %	120,000	54,79%	245,000	54,79 %	257,250	54,79 %	270,113	54,79 %	283,618	54,79 %	297,799	54,79 %	1.473,780	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraa n Sosial	Persentase penyandang disabilitas dan psikotik yg menerima bantuan	-	15%	145,000	10%	395,000	10%	414,750	10%	435,488	10%	457,262	10%	480,125	65%	2.327,624	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
Program Pembinaan anak terlantar	Persentase pembinaan anak terlantar	100%	100%	30,000	100%	30,000	100%	31,500	100%	33,075	100%	34,729	100%	36,465	100%	195,769	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
Program Pengelolaan areal pemakaman	Persentase pemeliharaan makam	100%	100%	40,000	100%	40,000	100%	42,000	100%	44,100	100%	46,305	100%	48,620	100%	261,025	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial	Persentase penerima manfaat program PMKS	20,93 %	20,85 %	410,500	20,78%	365,000	20,72 %	383,250	20,65 %	402,413	20,58 %	422,533	20,52 %	443,660	20,52 %	2.427,355	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
Program Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam	Persentase jumlah penerima bantuan	100%	100%	121,600	100%	121,600	100%	127,680	100%	134,064	100%	140,767	100%	147,806	100%	793,517	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				**34.668,532**		**24.275,311**		**25.519,154**		**26.750,677**		**28.413,504**		**29.992,709**		**169.619,888**	
TENAGA KERJA				**425,113**		**972,910**		**986,910**		**1.030,000**		**1.011,000**		**1.154,000**		**5.579,933**	
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	59,73 %	59,93 %	243,113	60,12%	835,910	60,29 %	835,910	60,46 %	871,000	60,61 %	838,000	60,76 %	922,000	60,76 %	4.545,933	**DINAS TENAGA KERJA , TRANSMIGRASI , KOPERASI DAN UKM**
	Tingkat pengangguran terbuka	4,6%	4,6%		4,31%		3,99%		3,71%		3,44%		3,17		3,17		
	Rasio penduduk yang bekerja	95,40 %	95,40 %		95,69%		96,00 %		96,29 %		96,56 %		96,83 %		96,83 %		
Program Peningkatan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga kerjaan	Angka penyelesaian perselisihan pengusaha pekerja per tahun (%)	100%	100%	122,000	100%	77,000	100%	87,000	100%	90,000	100%	98,000	100%	134,000	100%	608,000	**DINAS TENAGA KERJA , TRANSMIGRASI , KOPERASI DAN UKM**
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan masyarakat (%)	-	16 orang	60,000	16 orang	60,000	17 orang	64,000	18 orang	69,000	22 orang	75,000	25 orang	98,000	98 orang	426,000	**DINAS TENAGA KERJA , TRANSMIGRASI , KOPERASI DAN UKM**
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				**536,268**		**407,268**		**873,711**		**920,327**		**967,331**		**1.018,538**		**4.723,442**	
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan Penyelenggaraan Perempuan dan Perlindungan Anak	52,71 %	52,71 %	96,009	51,64%	85,009	52,14 %	141,759	52,72 %	148,847	53,25 %	156,290	53,79 %	164,104	53,79 %	792,017	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan Penyelenggaraan Perempuan dan Perlindungan Anak	52,71 %	52,71 %	355,259	51,64%	247,259	52,14 %	312,122	52,72 %	327,729	53,25 %	344,115	53,79 %	361,320	53,79 %	1.947,803	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
																	DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	0,15	0,15	20,000	0,11	40,000	0,09	147,000	0,08	154,350	0,06	162,068	0,06	170,171	0,06	693,588	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Cakupan Penyelenggaraan Perempuan dan Perlindungan Anak	52,71 %	52,71 %		51,64%		52,14 %		52,72 %		53,25 %		53,79 %		53,79 %		
	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	0,99	0,99		0,99		0,99		0,994		0,994		0,994		0,994		
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Cakupan Penyelenggaraan Perempuan dan Perlindungan Anak	52,71 %	52,71 %	65,000	51,64%	35,000	52,14 %	56,750	52,72 %	59,588	53,25 %	62,567	53,79 %	65,695	53,79 %	344,600	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	Rasio KDRT	0,15	0,15	0,000	0,11	0,000	0,09	75,000	0,08	78,750	0,06	82,688	0,06	86,822	0,06	323,259	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan Penyelenggaraan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	52,71 %	0,000	52,71%	0,000	52,14 %	100,000	52,72 %	105,000	53,25 %	110,250	53,79 %	115,763	53,79 %	431,013	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Cakupan Penyelenggaraan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	52,71 %	0,000	52,71%	0,000	52,14 %	41,080	52,72 %	46,063	53,25 %	49,354	53,79 %	54,664	53,79 %	191,161	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
PANGAN				**560,000**		**560,000**		**580,000**		**601,125**		**648,406**		**679,877**		**3.629,408**	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan utama	144,83 kg/kapita/tahun	146, 24 kg /kapita /tahun	380,000	146, 36 kg /kapita /tahun	365,000	147, 85 kg /kapita /tahun	375,250	148, 24 kg /kapita /tahun	394,013	149, 45 kg /kapita /tahun	422,313	150, 23 kg /kapita /tahun	443,179	150, 23 kg /kapita /tahun	2.379,754	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**
Program Peningkatan Katahanan Pangan (Pertanian/ perkebunan)	Persentase peningkatan mutu dan keamanan pangan	100%	100%	0,000	100%	45,000	100%	47,250	100%	49,613	100%	52,093	100%	54,698	100%	248,653	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**
Program Peningkatan Keamanan Pangan	Tingkat pemahaman tentang pentingnya keamanan pangan untuk kesehatan	60%	60%	60,000	60%	30,000	70%	31,500	70%	31,500	70%	35,000	80%	36,000	80%	224,000	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah promosi hasil produk unggulan daerah	5 kali	5 kali	120,000	5 kali	120,000	5 kali	126,000	5 kali	126,000	5 kali	139,000	5 kali	146,000	5 kali	777,000	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**
PERTANAHAN				**7.560,500**		**2.775,000**		**2.913,750**		**3.059,438**		**3.212,409**		**3.373,030**		**22.894,127**	
Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Jumlah Kebutuhan tanah untuk fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	-	2649,86 Ha	7.392,360	6 Ha	2.607,500	4 Ha	2.737,875	4 Ha	2.874,769	4 Ha	3.018,507	4 Ha	3.169,433	2674,86 Ha	21.800,443	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Penyelesaian kasus tanah	7	10	97,500	13	97,500	15	102,375	17	107,494	15	112,868	12	118,512	12	636,249	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN**
Program pengukuran dan penyelesaian tanah ulayat	Penyelesaian kasus tanah	7	10	70,640	13	70,000	15	73,500	17	77,175	15	81,034	12	85,085	12	457,434	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN**
LINGKUNGAN HIDUP				**4.368,409**		**1.779,477**		**1.868,451**		**1.961,873**		**2.059,967**		**2.162,965**		**14.201,143**	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	% kinerja pengelolaan persampahan	99,30 %	99,30 %	110,900	100%	85,900	100%	90,195	100%	94,705	100%	99,440	100%	104,412	100%	585,552	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	% pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	98,05 %	98,05 %	422,400	100%	463,160	100%	486,318	100%	510,634	100%	536,166	100%	562,974	100%	2.981,651	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	% perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	96,85 %	96,85 %	253,510	100%	117,500	100%	123,375	100%	129,544	100%	136,021	100%	142,822	100%	902,772	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
Program Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH	% akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	97,22 %	97,22 %	22,000	100%	24,000	100%	25,200	100%	26,460	100%	27,783	100%	29,172	100%	154,615	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	% Pengendalian polusi	97,69 %	97,69 %	189,054	100%	965,917	100%	1.014,213	100%	1.064,923	100%	1.118,170	100%	1.174,078	100%	5.526,355	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
Program Pengendalian kebakaran hutan	% pengendalian kebakaran hutan	100%	100%	30,000	100%	28,000	100%	29,400	100%	30,870	100%	32,414	100%	34,034	100%	184,718	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	% pengelolaan ruang terbuka hijau	100%	100%	238,000	100%	20,000	100%	21,000	100%	22,050	100%	23,153	100%	24,310	100%	348,513	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
Program Penataan Lingkungan dan Komunitas Lingkungan	% ketaatan terhadap lingkungan serta peran serta komunitas lingkungan dalam	100%	100%	85,200	100%	75,000	100%	78,750	100%	82,688	100%	86,822	100%	91,163	100%	499,622	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	% pengendalian kebakaran hutan		100%	1.420,110											100%	1.420,110	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
Program penanaman pohon pada lahan di luar kawasan	% pengelolaan ruang terbuka hijau		100%	675,000											100%	675,000	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
Program penanaman bambu pada kanan kiri sungai, sempadan danau dan daerah tangkapan air (DTA), sekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah	% pengelolaan ruang terbuka hijau		100%	922,235											100%	922,235	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**1.664,453**		**1.242,674**		**1.065,300**		**1.018,198**		**1.282,790**		**1.417,078**		**7.690,493**	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk ber KTP el per satuan penduduk	0,57	0,67	1.664,453	0,77	1.242,674	0,87	646,300	0,97	659,198	1,00	903,790	1,10	904,728	1,10	6.021,143	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
	Rasio bayi ber akta Kelahiran	0,52	0,62		0,72		0,82		0,92		1,02		1,22		1,22		
	Rasio pasangan ber akta nikah	0,12	0,32		0,52		0,72		0,92		1,12		1,32		1,32		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP el)	75,00	80,00		85,00		90,00		95,00		100,00		105,00		105,00		
	Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	55,00	65,00		70,00		75,00		80,00		95,00		100,00		100,00		
	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	14,21	14,21		20,07		40,15		50,18		80,29		100,00		100,00		
Program Peningkatan Ketersediaan Data Kependudukan	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	100%	100%	0,000	100%	0,000	100%	245,000	100%	205,000	100%	205,000	100%	205,000	100%	860,000	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
Program Peningkatan Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100%	100%	0,000	100%	0,000	100%	174,000	100%	154,000	100%	174,000	100%	307,350	100%	809,350	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase desa yg menerima bantuan CSR	5,38 %	6,45%	210,000	8,60%	90,000	9,68%	94,500	10,75 %	99,225	12,90 %	104,186	15,05 %	109,396	63,44 %	707,307	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	persentase desa yang sdh terbentuk bumdes	35%	53,92 %	280,000	59,80%	205,000	67,65 %	215,250	74,51 %	226,013	84,31 %	237,313	91,18 %	249,179	91,18 %	1.412,754	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Desa yg sudah memiliki profil desa	7,77 %	10,75 %	288,475	11,65%	240,000	13,59 %	252,000	15,53 %	264,600	17,48 %	277,830	19,42 %	291,722	88,42 %	1.614,627	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase aparatur desa yang mampu menggunakan aplikasi Siskuedes	48%	53,76 %	301,739	59,14%	208,900	64,52 %	219,345	69,89 %	230,312	75,27 %	241,828	80,65 %	253,919	80,65 %	1.456,044	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase posyandu aktif	23,39 %	23,98 %	65,000	26,32%	65,000	29,24 %	68,250	32,16 %	71,663	35,09 %	75,246	38,01 %	79,008	38,01 %	424,166	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
Program Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase desa yg memiliki RKPDEs	100%	100%	236,090	100%	211,796	100%	222,386	100%	233,505	100%	245,181	100%	257,440	100%	1.406,399	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Persentase PKK aktif	60,18 %	66,37 %	600,000	72,56%	580,000	78,76 %	609,000	82,30 %	639,450	84,95 %	671,423	88,49 %	704,994	88,49 %	3.804,866	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa	Persentase aparatur desa yg mampu menyusun PERDES	16%	21,51 %	215,000	26,88%	170,000	32,26 %	178,500	37,63 %	187,425	48,39 %	196,796	53,76 %	206,636	53,76 %	1.154,357	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	-	1 Orang tiap 93 Desa	20,000	-	-	-	-		-	-	-	-	-	93 orang	20,000	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**3.736,540**		**3.892,847**		**3.426,727**		**3.756,763**		**3.943,243**		**4.138,679**		**22.894,798**	
Program Keluarga Berencana	Contraceptive Prevalence Rate ((CPR)	60%	60%	3.360,899	61,4%	1.323,499	62,3%	1.097,174	63,3%	1.150,033	64%	1.205,534	65%	1.263,811	65%	9.400,950	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Cakupan Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera dan Kelompok Kegiatan yang ber-KB	69,2 %	69,2%		74,8%		78,72 %		83,29 %		87,7%		91,7%		91,7%		
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Contraceptive Prevalence Rate ((CPR)	60%	60%	71,600	61,4%	36,273	62,3%	58,086	63,3%	60,990	64%	64,040	65%	67,242	65%	358,231	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
	Cakupan Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera dan Kelompok Kegiatan yang ber-KB	69,2 %	69,2%		74,8%		78,72 %		83,29 %		87,7%		91,7%		91,7%		
Program pelayanan kontrasepsi	Contraceptive Prevalence Rate ((CPR)	60%	60%	20,000	61,4%	20,000	62,3%	21,000	63,3%	22,050	64%	23,153	65%	24,310	65%	130,513	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
Program promosi kesehatan ibu bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Cakupan Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera dan Kelompok Kegiatan yang ber-KB	69,2 %	69,2%	59,450	74,8%	34,450	78,72 %	36,173	83,29 %	37,981	87,7%	39,880	91,7%	41,874	91,7%	249,808	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
Program peningkatan penanggulangan narkoba PMS termasuk HIV/AIDS	Cakupan Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera dan Kelompok Kegiatan yang ber-KB	69,2 %	69,2%	20,000	74,8%	10,000	78,72 %	10,500	83,29 %	11,025	87,7%	11,576	91,7%	12,155	91,7%	75,256	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Program pengembangan bahan informas tentang pengasuhan da pembinaan tumbuh kembang anak	Cakupan Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera dan Kelompok Kegiatan yang ber-KB	69,2 %	69,2%	20,000	74,8%	20,000	78,72 %	21,000	83,29 %	22,050	87,7%	23,153	91,7%	24,310	91,7%	130,513	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera dan Kelompok Kegiatan yang ber-KB	69,2 %	69,2%	35,000	74,8%	23,450	78,72 %	24,623	83,29 %	25,854	87,7%	27,146	91,7%	28,504	91,7%	164,576	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Cakupan Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera dan Kelompok Kegiatan yang ber-KB	69,2 %	69,2%	20,000	74,8%	30,000	78,72 %	31,500	83,29 %	33,075	87,7%	34,729	91,7%	36,465	91,7%	185,769	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
Program Penyiapan Tenaga PKLK	Cakupan Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera dan Kelompok Kegiatan yang ber-KB	69,2 %	69,2%	10,000	74,8%	11,500	78,72 %	12,075	83,29 %	12,678	87,7%	13,313	91,7%	13,978	91,7%	73,544	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
Program Pengendalian Penduduk dan Informasi Kependudukan Informasi Keluarga Advokasi dan Penggerakan	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,66	0,66	119,591	0,64	99,000	0,62	103,950	0,61	109,147	0,59	114,604	0,58	120,335	0,58	666,627	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
Program Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	Contraceptive Prevalence Rate ((CPR)	60%	60%	0,000	61,4%	2.284,675	62,3%	2.010,647	63,3%	2.271,880	64%	2.386,116	65%	2.505,694	65%	11.459,012	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
																	DAN PERLINDUNGAN ANAK
PERHUBUNGAN				**1.699,130**		**1.527,500**		**1.603,875**		**1.684,069**		**1.768,272**		**1.856,686**		**10.139,532**	
Program Peningkatan Pelayanan angkutan	Jumlah arus penumpang angkutan umum	15.166	4.358	29,000	4.458	39,000	4.558	40,950	4.658	42,998	4.758	45,147	4.858	47,405	23.290	244,500	**DINAS PERHUBUNGAN**
	Jumlah uji kir angkutan umum	1.027	171		671		721		771		821		871		871		
	Persentase layanan angkutan darat	9%	30%		29%		29%		28%		27%		27%		27%		
	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	75.221	76.653		76.703		76.753		76.803		76.853		76.903		76.903		
Program Pembangunan sarana dan Prasarana perhubungan	jumlah pelabuhan udara	1	1	1.199,000	1	600,000	1	630,000	1	661,500	1	694,575	2	729,304	2	4.514,379	**DINAS PERHUBUNGAN**
Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas Jalan Darat dan Sungai	Pemasangan rambu-rambu	-	-	471,130	50	888,500	100	932,925	150	979,571	200	1.028,550	250	1.079,977	250	5.380,653	**DINAS PERHUBUNGAN**
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	-	-	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	**DINAS PERHUBUNGAN**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**5.804,990**		**3.735,270**		**3.922,034**		**4.118,135**		**4.324,042**		**4.540,244**		**26.444,715**	
Program optimalisasi penyebarluasan informasi publik dan kehumasan	Persentaase desa/ keluarahan blankspot	88,35 %	66,02 %	854,440	46,60%	842,970	27,18 %	885,119	17,48 %	929,374	7,77%	975,843	0 %	1.024,635	0 %	5.512,381	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
Program pelayanan informasi publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat ditingkat kecamatan	0%	0 %	2,000	44 %	121,325	67 %	127,391	100 %	133,761	100 %	140,449	100 %	147,471	100 %	672,397	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan Konektivitas Jaringan Komunikasi antar perangkat daerah (PD)	20 %	25%	1.735,000	28%	1.194,000	56%	1.253,700	100%	1.316,385	100%	1.382,204	100%	1.451,314	100%	8.332,604	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
Program kerjasama informasi dengan mas media	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat ditingkat kecamatan	0%	0 %	2.100,550	44 %	1.085,579	67 %	1.139,858	100 %	1.196,851	100 %	1.256,693	100 %	1.319,528	100 %	8.099,059	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentaase desa/ keluarahan blankspot	88,35 %	66,02 %	523,000	46,60%	411,396	27,18 %	431,966	17,48 %	453,564	7,77%	476,242	0 %	500,054	0 %	2.796,223	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Cakupan layanan komunikasi dan informasi daerah	30%	45%	365,000	53 %	0,000	73 %	0,000	83 %	0,000	92 %	0,000	100 %	0,000	100 %	365,000	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Cakupan layanan komunikasi dan informasi daerah	30%	45%	225,000	53 %	80,000	73 %	84,000	83 %	88,200	92 %	92,610	100%	97,241	100%	667,051	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				**472,300**		**300,000**		**441,950**		**558,958**		**749,610**		**794,245**		**3.317,063**	
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	% Melakukan penilaian penilaian koperasi yang berkualitas dan sehat (non IKU)	100%	100%	87,000	100%	31,700	100%	38,000	100%	50,000	100%	95,000	100%	97,000	100%	398,700	**DINAS TENAGA KERJA , TRANSMIGRASI , KOPERASI DAN UKM**
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Prosentase koperasi aktif	15%	15%	112,800	18%	86,900	20%	135,000	23%	147,000	25%	183,000	27%	184,000	27%	848,700	**DINAS TENAGA KERJA , TRANSMIGRASI , KOPERASI DAN UKM**
Program sosialisasi perundang-undangan penyelenggaraan perkoperasian	% Melakukan penyuluhan perkoperasian bagi anggota baru (non IKU)	100%	100%	70,000	100%	31,400	100%	45,950	100%	74,958	100%	98,610	100%	111,245	100%	432,163	**DINAS TENAGA KERJA , TRANSMIGRASI , KOPERASI DAN UKM**
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Terciptanya Iklim Usaha Kecil menengah yang kondusif (NON IKU)	100%	100%	66,300	100%	23,300	100%	28,000	100%	35,000	100%	52,000	100%	57,000	100%	261,600	**DINAS TENAGA KERJA , TRANSMIGRASI , KOPERASI DAN UKM**
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetetif Usaha Kecil Menengah	% Menciptakan wirausaha baru dan terciptanya produk unggulan pada tiap desa (NON IKU)		100%	93,400	100%	96,700	100%	140,000	100%	173,000	100%	198,000	100%	210,000	100%	911,100	**DINAS TENAGA KERJA , TRANSMIGRASI , KOPERASI DAN UKM**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Program Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Koperasi dan UKM	Persentase Usaha Mikro Kecil yang dibina	11%	11%	42,800	12%	30,000	13%	55,000	14%	79,000	16%	123,000	17%	135,000	17%	464,800	**DINAS TENAGA KERJA , TRANSMIGRASI , KOPERASI DAN UKM**
PENANAMAN MODAL				**782,550**		**338,650**		**873,650**		**746,650**		**746,650**		**786,650**		**4.274,800**	
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor PMA/PMDN (Unit)	-	47	165,050	235	116,150	231	421,150	243	331,650	120	331,650	134	331,650	134	1.697,300	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi Investasi	Jumlah Nilai Investasi (PMA/PMDN) Berkala di Kabupaten Barito Utara	-	4.566.047	52,500	4.566.047	52,500	2.768.771	117,500	3.017.960	70,000	3.289.577	70,000	3.585.638	90,000	3.585.638	452,500	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase jumlah informasi penanaman modal dan perizinan	100%	100%	425,000	100%	55,000	100%	55,000	100%	60,000	100%	60,000	100%	70,000	100%	725,000	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Program meng intensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase penangananan pengaduan masyarakat	0	90%	25,000	90%	0,000	90%	55,000	90%	60,000	90%	60,000	90%	70,000	90%	270,000	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Program pengembangan administrasi pelayanan perizinan	Persentase administrasi perizinan yang dikelola	100%	100%	115,000	100%	115,000	100%	225,000	100%	225,000	100%	225,000	100%	225,000	100%	1.130,000	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85	79,61		80		81		81		82		82		82		
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				**2.079,910**		**2.229,960**		**1.990,000**		**2.062,455**		**2.183,059**		**2.266,656**		**12.812,040**	
Program peningkatan peran serta kepemudaan	persentase organisasi pemuda yang aktip	-	-	943,720	50%	1.085,660	55%	1.280,000	60%	1.325,000	70%	1.377,500	75%	1.402,875	75%	7.414,755	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	Jumlah prestasi olahraga		-	40,000	4 Cabor	78,700	4 Cabor	150,000	5 Cabor	157,455	5 Cabor	165,328	5 Cabor	173,594	23 Cabor	765,077	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
Program Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umu yang bersumber dari APBD	Jumlah tanah untuk lapangan olah raga	-	1 bidang tanah	238,950	1 bidang tanah	523,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	2 bidang tanah	761,950	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Jumlah pemassalan olahraga	-	1 Kegiatan	25,500	2 Kegiatan	107,000	2 Kegiatan	110,000	3 Kegiatan	115,000	3 Kegiatan	120,000	3 Kegiatan	130,000	5 Kegiatan	607,500	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah Sarpras olahraga yang ditingkatkan	-	77 sapras	831,740	77 sapras	435,600	77 sapras	450,000	77 sapras	465,000	77 sapras	520,231	77 sapras	560,187	77 sapras	3.262,758	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
STATISTIK																	
PERSANDIAN																	
Program peningkatan pelayanan keamanan informasi dan persandian	Cakupan keamanan layanan informasi perangkat daerah (PD)	18%	22%	110,302	28%	100,000	50%	105,000	61%	110,250	83%	115,763	100%	121,551	100%	662,865	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
KEBUDAYAAN				**2.073,850**		**2.104,745**		**2.443,335**		**2.576,752**		**2.727,994**		**2.875,894**		**14.802,569**	
Program pengembangan nilai budaya	Pengembangan nilai budaya daerah	-	2 Kegiatan	420,000	2 Kegiatan	80,500	2 Kegiatan	50,000	3 Kegiatan	55,000	3 Kegiatan	57,750	3 Kegiatan	60,638	13 Kegiatan	723,888	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Program pengelolaan kekayaan budaya	persentase pelestarian situs dan benda cagar budaya	24%	24%	0,000	24%	47,000	24%	125,000	24%	140,000	24%	170,000	28%	190,000	28%	672,000	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
Program pengelolaan keragaman budaya	persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya	100%	100%	1.653,850	67%	1.977,245	83%	2.268,335	100%	2.381,752	100%	2.500,244	100%	2.625,256	100%	13.406,682	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
	persentase group kesenian yang aktip	63%	63%		63%		69%		69%		75%		75%		75%		
PERPUSTAKAAN				**480,746**		**463,315**		**486,480**		**510,804**		**536,345**		**563,162**		**3.040,851**	
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan		10.000 orang	480,746	11.000 orang	463,315	11.500 orang	486,480	11.750 orang	510,804	12.000 orang	536,345	12.500 orang	563,162	12.500 orang	3.040,851	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**
	Persentase Perpustakaan desa yang di bina		32%		35,9%		39,8%		43,6%		47,5%		51,4%		51,4%		
KEARSIPAN				**97,168**		**75,000**		**78,750**		**82,688**		**86,822**		**91,163**		**511,590**	
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase penataan kearsipan daerah	13,8 %	22,2%	78,668	27,7%	60,000	33,3%	63,000	38,8%	66,150	44,4%	69,458	50%	72,930	50%	410,206	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah pelayanan melalui mobil perpustakaan keliling		16	18,500	18,00	15,000	20	15,750	22	16,538	24	17,364	26	18,233	26	101,384	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
URUSAN PILIHAN				**29.018,527**		**33.928,253**		**35.136,108**		**36.796,325**		**38.743,638**		**40.789,616**		**214.412,466**	
KELAUTAN PERIKANAN				**2.473,254**		**2.172,610**		**2.274,491**		**2.369,882**		**2.514,251**		**2.640,610**		**14.445,096**	
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan (ton)	6487,07	6211,20	1.837,890	7375,72	1.629,830	8318,36	1.711,322	9403,31	1.793,638	10.559,51	1.886,969	1,765,06	1.981,524	11,765,06	10.841,173	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah (POKYAN) yang terlatih	83 Kelompok	75 Kelompok	327,388	86 Kelompok	189,550	88 Kelompok	199,028	90 Kelompok	199,028	92 Kelompok	219,000	95 Kelompok	230,000	95 Kelompok	1.363,993	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Jumlah data perikanan daerah	4 buku	4 buku	92,997	4 buku	85,000	4 buku	89,250	4 buku	93,925	4 buku	98,401	4 buku	103,315	4 buku	562,888	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Konsumsi ikan	40,85 Kg/ Kapita / Tahun	40,85 Kg/Kapita/ Tahun	79,990	47 Kg/Kapita/ Tahun	133,230	47,53 Kg/Kapita/ Tahun	139,892	48,04 Kg/Kapita/ Tahun	141,542	48,59 Kg/Kapita/ Tahun	153,880	49,02 Kg/Kapita/ Tahun	161,770	49,02 Kg/Kapita/ Tahun	810,303	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**
Program Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pangan, Perikanan dan Peternakan	% peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan	60%	60%	134,990	65%	135,000	70%	135,000	75%	141,750	80%	156,000	85%	164,000	90%	866,740	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**
PARIWISATA				**1.469,885**		**3.047,850**		**2.901,635**		**3.062,117**		**3.241,099**		**3.457,461**		**17.180,046**	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	persentase kunjungan wisata	79%	83,2%	147,885	83,2%	284,000	87,3%	392,000	91,5%	422,000	95,7%	448,386	99,8%	493,561	99,8%	2.187,832	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
Program pengembangan kemitraan	Peningkatan kemitraan	1 kegiatan	2 kegiatan	104,000	2 kegiatan	118,700	2 kegiatan	124,635	2 kegiatan	130,867	2 kegiatan	135,000	2 kegiatan	141,750	10 kegiatan	754,952	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Program pengembangan destinasi pariwisata	persentase objek wisata yang dikembangkan	5,77 %	5,77%	1.218,000	5,77%	2.645,150	7,69%	2.385,000	7,69%	2.509,250	7,69%	2.657,713	7,69%	2.822,150	7,69%	14.237,263	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
PERTANIAN				**12.324,700**		**12.256,532**		**12.684,109**		**13.216,908**		**13.930,349**		**14.684,960**		**79.097,558**	
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (%)	98,60	99,90	239,658	100	249,658	100	263,072	100	292,743	100	306,825	100	316,030	100	1.667,984	**DINAS PERTANIAN**
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	89.570	141.707	8.027,615	150.109	7.867,647	158.961	3.119,191	168.351	3.420,696	178.330	3.642,873	188.930	3.752,159	188.930	29.830,180	**DINAS PERTANIAN**
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Jumlah Prasarana dan sarana pertanian (unit)	35	33	0,000	36	0,000	37	4.644,691	39	5.166,882	40	5.483,245	41	5.647,743	41	20.942,561	**DINAS PERTANIAN**
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Cakupan bina kelompok tani (%)	28,33	44,43	481,208	45,60	749,208	44,53	1.016,225	44,07	528,712	43,48	575,293	43,92	929,252	43,92	4.279,897	**DINAS PERTANIAN**
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Fasilitasi promosi produk unggulan tanaman pangan (kegiatan)	5	5	491,000	5	461,000	5	484,050	5	498,572	5	513,529	5	528,935	5	2.977,085	**DINAS PERTANIAN**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah Produksi Perkebunan (Ton)	37.960	38.810	894,280	39.681,43	738,580	40.576,34	775,509	41.495,17	798,774	42.438,75	822,737	43.407,96	847,420	43.407,96	4.877,300	**DINAS PERTANIAN**
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Produksi Daging Ternak (Ton)	1.319,00	1.450,84	1.189,450	1.595,87	1.155,250	1.755,52	1.205,445	1.826,92	1.275,308	1.901,62	1.313,568	1.979,65	1.352,975	1.979,65	7.491,996	**DINAS PERTANIAN**
Program peningkatan produksi peternakan	Jumlah Produksi Daging Ternak (Ton)			250,200		249,900		0,000		0,000		0,000		0,000		500,100	**DINAS PERTANIAN**
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Terlaksananya sosialisasi penerapan teknologi peternakan (kelompok)	4	-	0,000	-	0,000	5	262,395	5	270,267	6	278,375	6	286,726	6	1.097,763	**DINAS PERTANIAN**
Program Pengendalian Hama Penyakit Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Persentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	96,30	97,5	701,290	99,50	735,290	100	863,530	100	913,456	100	940,860	100	969,085	100	5.123,511	**DINAS PERTANIAN**
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Data dan Statistik Perkebunan	Jumlah Dokumen Statistik Perkebunan (buku)	2 buku	2 buku	50,000	2 buku	50,000	2 buku	50,000	2 buku	51,500	2 buku	53,045	2 buku	54,636	10 buku	309,181	**DINAS PERTANIAN**
PERDAGANGAN				**12.539,766**		**14.921,586**		**15.667,665**		**16.451,049**		**17.273,601**		**18.137,281**		**94.990,948**	
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Pencapaian PAD Sektor Perdagangan	85%	85%	228,100	85%	392,675	90%	412,309	90%	432,924	95%	454,570	95%	477,299	95%	2.397,877	**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pencapaian PAD Sektor Perdagangan	85%	85%	11.808,411	85%	14.025,491	90%	14.726,766	90%	15.463,104	95%	16.236,259	95%	17.048,072	95%	89.308,102	**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Program Penguatan Institusi Pasar	Persentase Pencapaian PAD Sektor Perdagangan	85%	85%	503,255	85%	503,420	90%	528,591	90%	555,021	95%	582,772	95%	611,910	95%	3.284,968	**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
PERINDUSTRIAN				**88,360**		**1.450,675**		**1.523,209**		**1.599,369**		**1.679,338**		**1.763,305**		**8.104,255**	
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan industri pertahun		4,95%	49,310	4,95%	1.284,350	4,95%	1.348,568	4,97%	1.415,996	4,97%	1.486,796	5,45%	1.561,135	5,45%	7.146,154	**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
Program Pengembangan Industri Kerajinan dan Industri Rumah Tangga	Jumlah dan jenis produk unggulan daerah	10 produk	10 produk	39,050	10 produk	166,325	10 produk	174,641	12 produk	183,373	14 produk	192,542	15 produk	202,169	15 produk	958,101	**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
TRANSMIGRASI				**122,562**		**79,000**		**85,000**		**97,000**		**105,000**		**106,000**		**594,562**	
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Desa yang teridentifikasi dan tersosialisasi untuk calon Lokasi Transmigrasi Baru SP Pugar	-	-	122,562	10 Desa	79,000	20 desa	85,000	30 desa	97,000	40 desa	105,000	50 desa	106,000	50 desa	594,562	**DINAS TENAGA KERJA , TRANSMIGRASI , KOPERASI DAN UKM**
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				**219.911,904**		**181.530,799**		**191.244,422**		**200.805,195**		**210.352,017**		**220.512,248**		**1.224.356,584**	
PERENCANAAN				**3.027,305**		**2.321,890**		**2.362,100**		**2.480,200**		**2.582,400**		**2.809,200**		**15.583,095**	
Program pengembangan data/ informasi	Persentase ketersediaan data yang valid dan memadai sebagai bahan penentu kebijakan	100%	100%	134,150	100%	131,000	100%	153,100	100%	160,800	100%	151,900	100%	158,500	100%	889,450	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Kerjasama Pembangunan	Persentase fasilitasi kerjasama pembangunan	0	100%	18,500	100%	28,500	100%	34,100	100%	35,800	100%	33,000	100%	34,400	100%	184,300	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	2.378,655	100%	1.656,390	100%	1.543,700	100%	1.620,900	100%	1.810,700	100%	2.004,200	100%	11.014,545	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
Program perencanaan pembangunan ekonomi	Cakupan perencanaan pembangunan ekonomi	100%	100%	101,500	100%	101,500	100%	160,700	100%	168,700	100%	117,700	100%	122,800	100%	772,900	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
Program perencanaan sosial budaya	Cakupan perencanaan bidang sosial budaya	100%	100%	199,000	100%	209,000	100%	245,800	100%	258,100	100%	242,400	100%	252,800	100%	1.407,100	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Cakupan perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	100%	100%	195,500	100%	195,500	100%	224,700	100%	235,900	100%	226,700	100%	236,500	100%	1.314,800	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
KEUANGAN				**6.733,536**		**6.294,498**		**6.806,510**		**7.136,780**		**7.286,120**		**7.650,730**		**41.908,174**	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penerbitan dokumen keuangan tepat waktu	100%	100%	4.853,976	100%	3.604,398	100%	3.784,000	100%	3.973,000	100%	4.172,000	100%	4.381,000	100%	24.768,374	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tanah milik pemerintah yang bersertifikat	71,10%	73,52%	0,000	75,94%	1.142,000	78,36%	1.199,000	80,77%	1.259,000	83,19%	1.322,000	85,61%	1.388,000	85,61 %	6.310,000	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah	Peningkatan PAD	45,36 %	-15,24 %	1.879,560	13,83%	1.548,100	8,00%	1.823,510	8,00%	1.904,780	8,00%	1.792,120	8,00%	1.881,730	8,00%	10.829,800	**BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH**
	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (Desentralisasi fiskal)	7,68 %	6,27%		7,28%		7,62%		7,97%		8,33%		8,83%		8,83%		
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				**3.069,483**		**3.229,123**		**3.390,579**		**3.560,108**		**3.738,114**		**3.925,019**		**20.912,426**	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pejabat Struktural yang telah mengikuti pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	-	56	977,923	58	1.600,293	61	1.680,308	64	1.764,323	68	1.852,539	71	1.945,166	71	9.820,552	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM**
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase PNS Daerah Sesuai Kebutuhan pegawai	-	68	2.091,560	72	1.628,830	75	1.710,272	79	1.795,785	83	1.885,574	87	1.979,853	87	11.091,874	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM**
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				**304,500**		**400,000**		**373,900**		**392,600**		**479,000**		**484,000**		**2.434,000**	
Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase tingkat pemanfaatan hasil kajian/ penelitian sebagai bahan acuan pembangunan daerah	100	100	304,500	100	400,000	100	373,900	100	392,600	100	479,000	100	484,000	100	2.434,000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	80.509,555	100%	68.008,308	100%	71.492,602	100%	74.775,734	100%	78.442,950	100%	82.015,081	100%	455.244,232	**SEMUA OPD SELAIN KECAMATAN**
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana	100%	100%	87.216,030	100%	69.258,586	100%	71.708,905	100%	75.589,527	100%	79.043,946	100%	82.913,802	100%	465.730,795	**SEMUA OPD SELAIN KECAMATAN**
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase penyediaan pakaian kedinasan aparatur	100%	100%	2.741,374	100%	1.413,395	100%	1.618,505	100%	1.733,786	100%	1.772,417	100%	1.922,271	100%	11.201,749	**SEMUA OPD SELAIN KECAMATAN**
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	3.238,323	100%	3.011,250	100%	3.315,902	100%	3.454,496	100%	3.716,983	100%	3.863,825	100%	20.600,778	**SEMUA OPD SELAIN KECAMATAN**
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	100%	100%	1.669,858	100%	1.714,175	100%	1.837,361	100%	1.910,193	100%	2.026,076	100%	2.114,757	100%	11.272,420	**SEMUA OPD SELAIN KECAMATAN**
Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	862,850	C (31)	670,000	C (35)	680,165	CC (51)	713,923	CC (55)	753,269	B (61)	791,283	B (61)	4.471,491	**SEKRETARIAT DAERAH**
	Jumlah Perangkat Daerah sesuai hasil pemetaan urusan Penerintahan	36 PD	36 PD		36 PD		36 PD		36 PD		36 PD		36 PD		36 PD		
	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	C	CC (54,00)		B (60,01)		BB (70,01)		BB (70,01)		A (80,01)		A (80,01)		A (80,01)		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	B	C (75,21)		B (76,61)		B (76,70)		B (76,80)		B (76,90)		B (77,00)		B (77,00)		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Tender Pengadaan Barang/Jasa	100%	100%	176,700	100%	126,700	100%	133,035	100%	139,687	100%	146,671	100%	154,005	100%	876,797	**SEKRETARIAT DAERAH**
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat penyelesaian produk hukum daerah	533 produk hukum	600 produk hukum	595,000	600 produk hukum	595,000	650 produk hukum	624,750	700 produk hukum	655,988	750 produk hukum	688,787	800 produk hukum	723,226	800 produk hukum	3.882,751	**SEKRETARIAT DAERAH**
Program Peningkatan Kapasitas Staff Ahli KDH	Tingkat realisasi Peningkatan kapasitas Staff Ahli	100%	100%	150,000	100%	150,000	100%	157,500	100%	165,375	100%	173,644	100%	182,326	100%	978,845	**SEKRETARIAT DAERAH**
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil keoala daerah	Tingkat realisasi pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	75%	80%	1.605,470	80%	1.795,000	83%	1.884,750	85%	1.978,988	85%	2.077,937	90%	2.181,834	90%	11.523,978	**SEKRETARIAT DAERAH**
	Tingkat pancapaian penyusunan Laporan keterangan Pertang-gung jawaban (LKPJ), serta laporan Penye-lenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), & Informasi LPPD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD) hasil penilaian dari Kemendagri	Tinggi (2,7500)	Tinggi (2, 7500)		Tinggi (2, 8000)		Tinggi (2,9000)		Tinggi (2,9000)		Tinggi (2,9500)		Tinggi (2,9500)		Tinggi (2,9500)		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Program Kerja Sama Informasi Dengan Mas Media	Tingkat Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	100%	285,000	100%	265,000	100%	278,250	100%	292,163	100%	306,771	100%	322,109	100%	1.749,292	**SEKRETARIAT DAERAH**
Program Optimalisai Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tingkat pencpaian Pelaksanaan dan pengendalian pelelangan secara Elektronik (LPSE)	100%	100%	882,200	100%	882,200	100%	926,310	100%	972,626	100%	1.021,257	100%	1.072,320	100%	5.756,912	**SEKRETARIAT DAERAH**
	Nilai Indeks Kematangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dari LKPP	Level 1 (20%)	Level 1 (20%)		Level 1 (20%)		Level 2 (40%)		Level 3 (60%)		Level 4 (80%)		Level 5 (100%)		Level 5 (100%)		
Program Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah	Tingkat kerjasama dalam pembangunan dan penataan batas daerah	100%	100%	75,000	100%	100,000	100%	105,000	100.%	110,250	100%	115,763	100%	121,551	100%	627,563	**SEKRETARIAT DAERAH**
Program penataan daerah otonomi baru	Jumlah daerah otonom baru yang tertata	100%	100%	216,574	100%	375,000	100%	393,750	100%	413,438	100%	434,109	100%	455,815	100%	2.288,686	**SEKRETARIAT DAERAH**
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Tingkat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	100%	100%	95,000	100%	100,000	100%	105,000	100.%	110,250	100%	115,763	100%	121,551	100%	647,563	**SEKRETARIAT DAERAH**
Program peningkatan perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	2 dok	3 dok	45,000	4 dok	45,000	3 dok	47,250	3 dok	49,613	3 dok	52,093	3 dok	54,698	16 dok	293,653	**SEKRETARIAT DAERAH**
Program pembinaan pembangunan sosial dan perekonomian daerah	Tingkat realisasi pembinaan pembangunan sosial dan perekonomian daerah	100%	100%	646,550	100%	661,550	100%	694,628	100%	729,359	100%	765,827	100%	804,118	100%	4.302,031	**SEKRETARIAT DAERAH**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Program pembinaan pengendalian pelaksanaan pembangunan	Tingkat tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan tingkat kessuaian antara perencanaan dan pelaksanaan	100%	100%	267,800	100%	267,800	100%	281,190	100%	295,250	100%	310,012	100%	325,513	100%	1.747,564	**SEKRETARIAT DAERAH**
Program peningkatan pelayanan sosial kemasyara katan	Tingkat dukungan terhadap kegiatan kemasyarakatan yang diprogramkan	100%	100%	518,000	100%	600,500	100%	630,525	100%	662,051	100%	695,154	100%	729,912	100%	3.836,142	**SEKRETARIAT DAERAH**
Program Peningkatan Kesehatan Lansia	Tingkat dukungan terhadap kesehatan Lansia	100%	100%	30,450	100%	35,950	100%	37,748	100%	39,635	100%	41,617	100%	43,697	100%	229,096	**SEKRETARIAT DAERAH**
Program penataan tata batas kabupaten, kecamatan dan desa	tingkat kesesuaian batas wilayah	100%	100%	531,350	100%	540,000	100%	567,000	100.%	595,350	100%	625,118	100%	656,373	100%	3.515,191	**SEKRETARIAT DAERAH**
Program rapat kerja pembangunan dan pemerintahan	Tingkat berjalannya pembangunan dan tata kelola pemerintahan	100%	100%	135,000	100%	77,844	100%	81,736	100%	85,823	100%	90,114	100%	94,620	100%	565,137	**SEKRETARIAT DAERAH**
Program koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antara kecamatan/ kelurahan /desa	Tingkat Pencapaian maksimal Koordinasi dan Fasilitasi	100%	100%	35,000	100%	25,000	100%	26,250	100%	27,563	100%	28,941	100%	30,388	100%	173,141	**SEKRETARIAT DAERAH**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Peringatan Hari-hari besar	Tingkat Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Peringatan Hari-hari besar	-	-	0,000	-	0,000	100%	862,840	100%	905,982	100%	951,281	100%	998,845	100%	3.718,948	**SEKRETARIAT DAERAH**
Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Tingkat Pelayanan Keprotokolan pada Kepala Daerah	-	-	0,000	-	0,000	100%	325,000	100%	358,310	100%	376,228	100%	395,040	100%	1.454,578	**SEKRETARIAT DAERAH**
Program peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah	-	26,28	11.901,410	70%	7.890,810	72%	8.285,351	72%	8.699,618	73%	9.134,599	75%	9.591,329	75%	55.503,116	**SEKRETARIAT DPRD**
	Persentase rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	-	94,75 %		95%		95%		95%		95%		95%		95%		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	% Pengelolaan Keuangan daerah, Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	22,600	100%	22,600	100%	23,730	100%	24,917	100%	26,162	100%	27,470	100%	147,479	**SEKRETARIAT DPRD**
Program peningkatan perencanaan SKPD	% Dokumen Perencanaan SKPD	100%	100%	46,000	100%	49,000	100%	51,450	100%	54,023	100%	56,724	100%	59,560	100%	316,756	**SEKRETARIAT DPRD**
Program pelayanan administrasi perkantoran	% pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	890,010	100%	1.081,510	100%	1.135,586	100%	1.192,365	100%	1.251,983	100%	1.314,582	100%	6.866,035	**KEC. TEWEH TENGAH**
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	% penyediaan sarana dan prasarana apartur	100%	100%	492,400	100%	141,650	100%	148,733	100%	156,169	100%	163,978	100%	172,176	100%	1.275,106	**KEC. TEWEH TENGAH**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penyediaan pakaian dinas harian	100%	100%	25,990	100%	22,500	100%	23,625	100%	24,806	100%	26,047	100%	27,349	100%	150,317	**KEC. TEWEH TENGAH**
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	15,000	100%	15,000	100%	15,750	100%	16,538	100%	17,364	100%	18,233	100%	97,884	**KEC. TEWEH TENGAH**
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	25,000	100%	28,000	100%	29,400	100%	30,870	100%	32,414	100%	34,034	100%	179,718	**KEC. TEWEH TENGAH**
Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	100%	100%	21,100	100%	22,000	100%	23,100	100%	24,255	100%	25,468	100%	26,741	100	142,664	**KEC. TEWEH TENGAH**
Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	98,30 %	100 %	526,830	100%	479,500	100%	500,300	100%	518,000	100%	537,001	100%	552,000	100%	3.113,631	**KEC. TEWEH TIMUR**
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana apartur	99,44 %	100%	276,170	100%	127,500	100%	114,000	100%	117,265	100%	124,977	100%	145,527	100%	905,439	**KEC. TEWEH TIMUR**
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penyediaan pakaian dinas harian	100%	100%	10,000	100%	5,000	100%	15,000	100%	16,000	100%	20,000	100%	20,000	100%	86,000	**KEC. TEWEH TIMUR**
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	8,000	100%	10,000	100%	20,000	100%	20,000	100%	20,000	100%	20,000	100%	98,000	**KEC. TEWEH TIMUR**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	15,000	100%	14,000	100%	18,000	100%	28,000	100%	32,000	100%	32,000	100%	139,000	**KEC. TEWEH TIMUR**
Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	100%	100%	30,000	100%	30,000	100%	32,000	100%	35,000	100%	37,000	100%	40,000	100%	204,000	**KEC. TEWEH TIMUR**
Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	100%	100%	813,175	100%	727,320	100%	763,686	100%	801,873	100%	841,966	100%	884,065	100%	4.832,085	**KEC. LAHEI**
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase penyediaan sarana Dan prasarana aparatur yang menunjang Kinerja aparatur	100%	100%	213,100	100%	125,080	100%	131,334	100%	137,900	100%	144,795	100%	152,035	100%	904,244	**KEC. LAHEI**
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kualitas kinerja aparatur	100%	100%	18,125	100%	4,500	100%	4,725	100%	4,961	100%	5,209	100%	5,469	100%	42,989	**KEC. LAHEI**
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase kualitas SDM Aparatur	100%	100%	20,000	100%	20,000	100%	21,000	100%	22,050	100%	23,152	100%	24,310	100%	130,512	**KEC. LAHEI**
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	100%	12,500	100%	15,000	100%	15,750	100%	16,537	100%	17,364	100%	18,232	100%	95,383	**KEC. LAHEI**
ProgramPengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	-	100%	15,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	100%	15,000	**KEC. LAHEI**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase inventaris aset/ barang daerah	100%	100%	2,100	100%	2,100	100%	2,205	100%	2,315	100%	2,431	100%	2,552	100%	13,703	**KEC. LAHEI**
Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	100%	100%	25,000	100%	25,000	100%	26,250	100%	27,562	100%	28,940	100%	30,387	100%	163,139	**KEC. LAHEI**
Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	100%	100%	865,870	100%	747,754	100%	785,143	100%	824,401	100%	865,618	100%	908,973	100%	4.997,759	**KEC. GUNUNG TIMANG**
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	159,000	100%	85,996	100%	90,295	100%	94,810	100%	99,564	100%	104,528	100%	634,193	**KEC. GUNUNG TIMANG**
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kualitas kinerja aparatur	100%	100%	30,000	100%	15,000	100%	15,750	100%	16,537	100%	17,364	100%	18,232	100%	112,883	**KEC. GUNUNG TIMANG**
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase kualitas sumber daya aparatur	100%	100%	0,000	100%	20,000	100%	21,000	100%	22,050	100%	23,152	100%	24,310	100%	110,512	**KEC. GUNUNG TIMANG**
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	34,130	100%	23,250	100%	24,412	100%	25,633	100%	26,914	100%	28,260	100%	162,599	**KEC. GUNUNG TIMANG**
Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%	8,000	100%	5,000	100%	5,250	100%	5,512	100%	5,778	100%	6,007	100%	35,547	**KEC. GUNUNG TIMANG**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	100%	100%	25,000	100%	25,000	100%	26,250	100%	27,562	100%	28,940	100%	30,387	100%	163,139	**KEC. GUNUNG TIMANG**
Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	816,850	100%	774,950	100%	719,837	100%	761,506	100%	804,699	100%	849,438	100%	4.727,280	**KEC. MONTALLAT**
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	295,250	100%	141,150	100%	191,405	100%	195,700	100%	200,425	100%	205,623	100%	1.229,553	**KEC. MONTALLAT**
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penyediaan pakaian dinas harian dan perlengkapannya	100%	100%	33,850	100%	25,800	100%	34,532	100%	36,250	100%	38,140	100%	40,219	100%	208,791	**KEC. MONTALLAT**
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	0,000	100%	12,500	100%	46,491	100%	47,350	100%	48,295	100%	49,334	100%	203,970	**KEC. MONTALLAT**
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	21,500	100%	12,000	100%	16,473	100%	19,050	100%	21,885	100%	25,003	100%	115,911	**KEC. MONTALLAT**
Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase Peningkatan Kualitas dalam partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100%	100%	15,000	100%	15,000	100%	16,491	100%	17,350	100%	18,295	100%	19,334	100%	101,470	**KEC. MONTALLAT**
Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	100%	100%	23,950	100%	25,000	100%	31,491	100%	32,350	100%	33,295	100%	34,334	100%	180,420	**KEC. MONTALLAT**
Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	636,611	100%	667,289	100%	791,190	100%	692,790	100%	672,178	100%	673,658	100%	4.133,716	**KEC. GUNUNG PUREI**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	245,440	100%	5,560	100%	22,000	100%	51,170	100%	105,000	100%	22,000	100%	451,170	**KEC. GUNUNG PUREI**
Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah penyediaan pakaian dinas harian beserta perlengkapannya	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	23 stel	11,500	23 stel	11,500	23 stel	11,500	69 stel	34,500	**KEC. GUNUNG PUREI**
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	0,000	100%	9,201	100%	9,000	100%	9,000	100%	9,000	100%	9,000	100%	45,201	**KEC. GUNUNG PUREI**
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dikirim tepat waktu	100%	100%	2,050	100%	2,050	100%	2,050	100%	2,050	100%	2,050	100%	2,050	100%	12,300	**KEC. GUNUNG PUREI**
Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	100%	100%	18,700	100%	18,700	100%	18,700	100%	18,700	100%	18,700	100%	34,600	100%	128,100	**KEC. GUNUNG PUREI**
Program peningkatan sarana dan prasarana permukiman	Persentase pembangunan sarana dan prasarana	100%	100%	99,999	100%	100,0000	100%	0,000	100%	99,877	100%	110,913	100%	223,000	100%	633,790	**KEC. GUNUNG PUREI**
Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	848,900	100%	746,900	100%	784,245	100%	823,460	100%	864,632	100%	907,864	100%	4.976,000	**KEC. TEWEH BARU**
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	234,000	100%	135,000	100%	141,750	100%	148,837	100%	156,279	100%	164,093	100%	979,959	**KEC. TEWEH BARU**
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penyediaan pakaian dinas harian beserta perlengkapannya	100%	100%	0,000	100%	0,000	100%	0,000	100%	0,000	100%	0,000	100%	0,000	100%	0,000	**KEC. TEWEH BARU**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	34,000	100%	35,000	100%	36,750	100%	38,587	100%	40,516	100%	42,542	100%	227,395	**KEC. TEWEH BARU**
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	15,000	100%	15,000	100%	15,750	100%	16,537	100%	17,364	100%	18,232	100%	97,883	**KEC. TEWEH BARU**
Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	100%	100%	25,500	100%	25,500	100%	26,775	100%	28,113	100%	29,519	100%	30,995	100%	166,402	**KEC. TEWEH BARU**
Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	68 %	92,25 %	711,125	100%	547,925	100%	593,706	100%	623,392	100%	666,287	100%	699,600	100%	3.842,035	**KEC. TEWEH SELATAN**
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	55%	99,44 %	349,000	100%	323,700	100%	321,500	100%	337,575	100%	342,728	100%	359,865	100%	2.034,368	**KEC. TEWEH SELATAN**
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	25,875	100%	14,375	100%	15,094	100%	15,848	100%	16,641	100%	17,473	100%	105,306	**KEC. TEWEH SELATAN**
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	83,52 %	40,000	100%	40,000	100%	42,000	100%	44,100	100%	46,305	100%	48,620	100%	261,025	**KEC. TEWEH SELATAN**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	25,000	100%	25,000	100%	26,250	100%	27,563	100%	28,941	100%	30,388	100%	163,141	**KEC. TEWEH SELATAN**
Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	100%	100%	30,000	100%	30,000	100%	31,500	100%	33,075	100%	34,729	100%	36,465	100%	195,769	**KEC. TEWEH SELATAN**
Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	630,258	100%	562,220	100%	590,988	100%	620,538	100%	651,566	100%	684,143	100%	3.739,712	**KEC. LAHEI BARAT**
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	379,843	100%	242,780	100%	254,919	100%	267,665	100%	281,048	100%	295,101	100%	1.721,355	**KEC. LAHEI BARAT**
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	100%	16,100	100%	13,000	100%	15,093	100%	15,848	100%	16,640	100%	17,472	100%	94,153	**KEC. LAHEI BARAT**
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	20,000	100%	20,000	100%	21,000	100%	22,050	100%	23,153	100%	24,310	100%	130,513	**KEC. LAHEI BARAT**
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	17,000	100%	14,500	100%	26,250	100%	27,562	100%	28,940	100%	30,387	100%	144,639	**KEC. LAHEI BARAT**
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase pengelolaan keuangan	100%	100%	2,500		2,500		0,000		0,000		0,000		0,000	100%	5,000	**KEC. LAHEI BARAT**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase partisipasi masyarakat	100%	100%	10,000		10,000		0,000		0,000		0,000		0,000	100%	20,000	**KEC. LAHEI BARAT**
Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	100%	100%	19,300	100%	30,000	100%	31,500	100%	33,075	100%	34,728	100%	36,465	100%	185,068	**KEC. LAHEI BARAT**
PENGAWASAN																	
Peningkatan Sistem Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawasan	100%	100%	2.059,885	100%	1.970,360	100%	2.068,878	100%	2.172,322	100%	2.280,938	100%	2.380,985	100%	12.933,368	**INSPEKTORAT**
	Persentase peningkatan hasil pengawasan secara berkala terhadap objek pemeriksaan berdasarkan PKPT	80%	80%		90%		90%		90%		90%		90%		90%		
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIPD sesuai ketentuan	15%	15%		15%		56%		69%		83%		90%		90%		
	Persentase Perangkat daerah yang menindaklanjuti temuan pengawasan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	61%	56%		42%		42%		42%		42%		42%		42%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti : Keuangan Negara/daerah dan Administrasi	72%	100%		90%		90%		90%		90%		90%		90%		
Peningkatan Profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.	Jumlah tenaga yang memiliki Sertifikasi Auditor	-	8 orang	0,000	10 orang	174,000	15 orang	182,700	15 orang	191,835	20 orang	201,427	25 orang	211,498	25 orang	961,460	**INSPEKTORAT**
	Jumlah Perangkat Daerah hasil reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan predikat menyakinkan	30 PD	30 PD		36 PD		36 PD		36 PD		36 PD		36 PD		36 PD		
	Jumlah Perangkat Daerah hasil reviu LKIP dengan predikat baik	5 PD	15 PD		15 PD		15 PD		15 PD		15 PD		20 PD		20 PD		
JUMLAH BELANJA LANGSUNG			**635.980,955**		**598.982,693**		**628.931,827**		**660.378,419**		**693.397,339**		**728.067,206**		**3.945.738,439**		

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Barito Utara tidak semata-mata mengandalkan pendanaan dari APBD Kabupaten tetapi juga menjalin kerjasama dengan pihak lain. Secara garis besar pendanaan yang digunakan dapat berasal dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan kerjasama dengan pihak swasta.

Program kegiatan yang direncanakan dengan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat seperti pada tabel VII.3 dan tabel VII.4

Tabel VII.3
Usulan Program Bantuan Keuangan dari Pemda Provinsi Kalimantan Tengah

NO.	PROGRAM	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	-	300.000.000,00	330.000.000,00	363.000.000,00	399.300.000,00	439.230.000,00	DINAS KESEHATAN
2	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	-	300.000.000,00	330.000.000,00	363.000.000,00	399.300.000,00	439.230.000,00	
3	Program Pelayanan Kesehatan Olah Raga	-	200.000.000,00	220.000.000,00	242.000.000,00	266.200.000,00	292.820.000,00	
4	Program Pelayanan Kesehatan Kerja	-	500.000.000,00	550.000.000,00	605.000.000,00	665.500.000,00	732.050.000,00	
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	-	100.000.000,00	110.000.000,00	121.000.000,00	133.100.000,00	146.410.000,00	
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	-	400.000.000,00	440.000.000,00	484.000.000,00	532.400.000,00	585.640.000,00	
7	Program kesehatan reproduksi dan remaja	-	100.000.000,00	110.000.000,00	121.000.000,00	133.100.000,00	146.410.000,00	
8	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	-	200.000.000,00	220.000.000,00	242.000.000,00	266.200.000,00	292.820.000,00	
9	Program Penunjangan Akreditasi	-	200.000.000,00	220.000.000,00	242.000.000,00	266.200.000,00	292.820.000,00	
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	100.000.000.000	100.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000	170.000.000.000	180.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Program Perencanaan Tata Ruang	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	
1	Pengembangan perumahan	-	1.000.000.000	1.200.000.000	1.400.000.000	1.600.000.000	1.800.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	Peningkatan rehabilitasi sarana dan prasarana permukiman	1.000.000.000	5.250.000.000	5.512.500.000	5.788.125.000	6.077.531.250	6.381.407.813	
3	Pengembangan penyehatan lingkungan permukiman	500.000.000	3.885.000.000	4.079.250.000	4.283.212.500	4.497.373.125	4.722.241.781	
4	Penataan administrasi pertanahan	-	100.000.000	150.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000	

NO.	PROGRAM	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	806.000.000,-	806.000.000,-	0	0	0	0	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	Diklat Kepemimpinan Untuk Kepala Desa, Lurah	200.000.000,-	225.000.000,-	250.000.000,-	300.000.000,-	325.000.000,-	350.000.000,-	
3	Diklat Menejemen Administrasi untuk Sekdes,Seklur dan Seketraris BPD	200.000.000,-	225.000.000,-	250.000.000,-	300.000.000,-	325.000.000,-	350.000.000,-	
4	Pencetakan Pengandaan Buku Administrasi Desa dan BPD	175.000.000,-	180.000.000,	185.000.000,-	190.000.000,-	195.000.000,-	200.000.000,-	
5	Pendirian BUMDES	225.000.000,-	225.000.000,-	225.000.000,-	225.000.000,-	225.000.000,-	225.000.000,-	
1	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan keamanan Pangan	-	125.000.000	128.750.000	132.612.000	136.590.000	140.687.700	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	Layanan Dukungan Esselon I	-	149.500.000	153.985.000	158.604.550	163.362.687	168.263.568	
1	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	-	415.000.000	456.500.000	498.000.000	539.500.000	455.000.000	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH
2	Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha kecil menengah yang Kondusif	-	250.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000	450.000.000	
3	Program Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	-	50.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	250.000.000	
1	Kebijakan Pengelolaan Persampahan	-	300.000.000	500.000.000	650.000.000	600.000.000	450.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	Peingkatan Pengendalian Polusi	-	1.637.063.440	-	750.000.000	-	1.000.000.000	
3	Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA	1.420.110.000	1.650.000.000	2.775.000.000	3.330.000.000	3.996.000.000	4.795.200.000	
4	Penanaman pohon pada lahan di luar kawasan	679.000.000	2.170.000.000	3.489.000.000	4.386.800.000	5.364.160.000	6.436.992.000	

NO.	PROGRAM	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
5	Penanaman bambu pada kanan kiri sungai, sempadan danau dan daerah tangkapan air (DTA), sekitar mata air dan daerah imbuh air tanah	918.235.000	2.000.000.000	3.200.000.000	4.040.000.000	4.948.000.000	5.937.600.000	
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	-	88.000.000	96.800.000	106.480.000	117.128.000	128.840.800	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	60.000.000	66.000.000	72.600.000	79.860.000	87.846.000	
3	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	-	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500	
4	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	-	95.000.000	104.500.000	114.950.000	126.445.000	139.089.500	
5	Program Pengendalian Penduduk	-	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	161.051.000	
6	Program Ketahanan dan Keluarga Sejahtera	-	75.000.000	82.500.000	90.750.000	99.825.000	109.807.500	
7	Program Keluarga Berencana	-	92.000.000	101.200.000	111.320.000	122.452.000	134.697.200	
1	Pengembangan e-Gov (CCTV Outdoor, Video Tron)		125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	-	300.000.000	309.000.000	318.270.000	327.818.100	337.652.643	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	-	200.000.000	206.000.000	212.180.000	218.545.400	225.101.762	
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	-	200.000.000	206.000.000	212.180.000	218.545.400	225.101.762	

NO.	PROGRAM	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	-	500.000.000	550.000.000	605.000.000	665.000.000	732.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-	200.000.000	220.000.000	242.000.000	267.000.000	293.000.000	
3	Program Pengembangan Nilai Budaya	-	250.000.000	275.000.000	302.000.000	332.000.000	365.000.000	
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	-	700.000.000	770.000.000	847.000.000	932.000.000	1.025.000.000	
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	-	-	600,000,000	600,000,000	645,000,000	675,000,000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	Program Penguatan Institusi Pasar	-	-	450,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000	

Tabel VII.4
Rencana Program Dana Alokasi Khusus

NO.	PROGRAM	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Fisik)	-	375.000.000,00	393.750.000,00	413.437.500,00	434.109.375,00	455.814.843,75	DINAS PENDIDIKAN
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (DAK Fisik)	9.832.000.000,00	18.080.000.000,00	18.984.000.000,00	19.933.200.000,00	20.929.860.000,00	22.675.269.093,75	
3	Program Pendidikan Non Formal (DAK Fisik)	557.000.000,00	557.000.000,00	584.850.000,00	614.092.500,00	644.797.125,00	698.916.093,75	
4	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	19.673.000.000,00	21.640.300.000,00	23.804.300.000,00	26.184.730.000,00	28.803.203.000,00	31.683.523.000,00	
5	Tunjangan Profesi Guru (DAK Non Fisik)	56.418.532.000,00	59.239.458.600,00	62.201.431.530,00	65.311.503.106,50	68.577.078.261,83	72.005.932.174,92	
6	Tambahan Penghasilan Guru (DAK Non Fisik)	1.293.000.000,00	1.357.650.000,00	1.425.532.500,00	1.496.809.125,00	1.571.649.581,25	1.650.232.060,31	
7	Tunjangan Khusus Guru (DAK Non Fisik)	10.942.186.000,00	11.489.295.300,00	12.063.760.065,00	12.666.948.068,25	13.300.295.471,66	13.965.310.245,25	
1	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya	7.644.253.000,00	36.250.000.000,00	39.875.000.000,00	43.862.500.000,00	48.248.750.000,00	53.073.625.000,00	DINAS KESEHATAN
2	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	12.463.904.000,00	35.000.000.000,00	38.500.000.000,00	42.350.000.000,00	46.585.000.000,00	51.243.500.000,00	
3	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.594.498.000,00	3.500.000.000,00	3.850.000.000,00	4.235.000.000,00	4.658.500.000,00	5.124.350.000,00	
4	DAK NON FISIK, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jaminan Persalinan (Jampersal), Akreditasi Puskesmas	14.738.297.000,00	22.500.000.000,00	24.750.000.000,00	27.225.000.000,00	29.947.500.000,00	32.942.250.000,00	

NO.	PROGRAM	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	175.000.000.000	181.824.167.000	185.000.000.000	190.000.000.000	200.000.000.000	210.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	2.200.000.000	2.420.000.000	2.640.000.000	2.860.000.000	3.080.000.000	3.300.000.000	
3	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1.637.000.000	720.000.000	1.000.000.000	1.250.000.000	1.500.000.000	1.750.000.000	
4	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	-	9.376.000.000	10.000.000.000	12.000.000.000	15.000.000.000	17.000.000.000	
1	Bantuan stimulan perumahan swadaya	4.050.000.000	6.125.000.000	7.000.000.000	8.000.000.000	8.400.000.000	9.000.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	Penyediaan rumah khusus	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.250.000.000	1.500.000.000	
3	Penyediaan rumah susun	0	4.000.000.000	4.000.000.000	4.500.000.000	5.000.000.000	5.500.000.000	
1	Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	1.477.797.500	1.748.270.000	1.964.875.000	2.046.840.000	2.193.280.000	2.208.280.000	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH
2	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	-	415.000.000	456.500.000	498.000.000	539.500.000	581.000.000	
3	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	-	990.000.000	1.089.000.000	1.188.000.000	1.287.000.000	1.386.000.000	
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan (DAK)	1.189.000.000	1.512.500.000	1.663.750.000	1.830.125.000	2.103.137.500	2.313.451.250	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (Dekonsentrasi)	324.500.000	1.330.000.000	1.369.900.000	1.410.997.000	1.453.326.910	1.496.926.717	
1	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	-	100.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1	Pelayanan Administrasi kependudukan	861.458.000	861.458.000	861.458.000	861.458.000	861.458.000	861.458.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	PROGRAM	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Keluarga Berencana BOKB (DAK Non Fisik)	1.955.490.000	2.430.561.000	2.444.362.500	3.038.201.250	3.055.453.125	3.797.751.563	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	Keluarga Berencana DAK Fisik	1.187.000.000	4.510.263.200	1.483.750.000	5.637.829.000	1.854.687.500	7.047.286.250	
1	Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas Jalan Darat dan Sungai	12.000.000.000	13.200.000.000	14.520.000.000	15.972.000.000	17.569.200.000	19.326.120.000	DIINAS PERHUBUNGAN
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	-	425.000.000	1.000.000.000	1.250.000.000	1.500.000.000	1.750.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	-	1.500.000.000	1.750.000.000	2.000.000.000	2.250.000.000	2.500.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-	1.100.000.000	1.200.000.000	1.320.000.000	1.400.000.000	1.450.000.000	
3	Program Pengembangan Nilai Budaya	-	1.250.000.000	1.500.000.000	1.750.000.000	2.000.000.000	2.250.000.000	
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	-	1.000.000.000	2.500.000.000	2.750.000.000	3.000.000.000	3.250.000.000	
1	Pembangunan/perbaikan sumber-sumber air meliputi irigasi tanah (dangkal/dalam) embung/DAM parit/pintu air/long strorage	624.750.000	5.181.000.000	5.440.050.000	5.712.052.500	5.997.655.125	6.297.537.881	DINAS PERTANIAN
2	Pembangunan/perbaikan Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi	484.500.000	8.000.000.000	8.400.000.000	8.820.000.000	9.261.000.000	9.724.050.000	
3	Pembangunan/perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	597.350.000	400.280.000	420.294.000	441.308.700	463.374.135	486.542.842	

NO.	PROGRAM	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Pembangunan/perbaikan Balai/Instalasi pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Rumah Potong Hewan (RPH), Puskeswan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	191.400.000	4.000.000.000	4.200.000.000	4.410.000.000	4.630.500.000	4.862.025.000	
5	Lanjutan pembangunan Rumah Potong hewan (RPH)	152.000.000	-	-	-	-	-	
6	Penerapan Budidaya Padi Inbrida Lahan Sub Optimal	4.836.800.000	-	-	-	-	-	
7	Penerapan Budidaya Padi Gogo	5.344.500.000	6.224.052.000	6.535.254.600	6.862.017.330	7.205.118.197	7.565.374.106	
8	Penerapan Budidaya Jagung dan Serealia Lainnya	6.873.000.000	6.122.700.000	6.428.835.000	6.750.276.750	7.087.790.588	7.442.180.117	
9	Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	267.700.000	453.319.000	475.984.950	499.784.198	524.773.407	551.012.078	
10	Pembangunan Embung Pertanian	240.000.000	600.000.000	630.000.000	661.500.000	694.575.000	729.303.750	
11	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	405.000.000	1.120.000.000	1.176.000.000	1.234.800.000	1.296.540.000	1.361.367.000	
12	Optimasi Lahan Rawa	1.200.000.000	1.200.000.000	1.260.000.000	1.323.000.000	1.389.150.000	1.458.607.500	
13	Optimasi Lahan Menuju Organik	3.000.000.000	3.000.000.000	3.150.000.000	3.307.500.000	3.472.875.000	3.646.518.750	
14	Penyediaan Alsintan Pra Panen Tanaman Pangan	1.700.215.000	1.700.215.000	1.785.225.750	1.874.487.038	1.968.211.389	2.066.621.959	
15	Penyediaan Alsintan Pra Panen Hortikultura	327.000.000	327.000.000	343.350.000	360.517.500	378.543.375	397.470.544	
16	Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	112.600.000	112.600.000	118.230.000	124.141.500	130.348.575	136.866.004	
17	Pendampingan Kegiatan UPSUS Jagung dan Kedelai	331.720.000	331.720.000	348.306.000	365.721.300	384.007.365	403.207.733	
18	Layanan Kegiatan Asuransi UPSUS dan Swasembada Padi	35.000.000	35.000.000	36.750.000	38.587.500	40.516.875	42.542.719	
19	Pengolahan dan Pemasaran	14.340.000	14.340.000	15.057.000	15.809.850	16.600.343	17.430.360	

NO.	PROGRAM	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
20	Kegiatan Petugas PIP Barito Utara	14.700.000	14.700.000	15.435.000	16.206.750	17.017.088	17.867.942	
1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	0	5.328.000.000	6.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	Program Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan (TP)	0	6.000.000.000	65.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcomes program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcomes) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator utama Bupati tersebut,merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat outcomes yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan Perangkat Daerah merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (outputs) yang dilaksanakan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMART-C).*

Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah, yang diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan. Indikator kinerja tersebut, antara lain berupa indikator kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya

saing daerah dan daya tarik investasi. Secara komulatif hasil akhir tujuan otonomi daerah menggunakan ukuran peningkatan kualitas manusia yang digambarkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Perumusan indikator kinerja utama Bupati yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator kinerja lainnya yang digunakan Pemerintah yang diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja utama Bupati disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program Perangkat Daerah disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati dan pelayanan yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 - 2023 yang telah direncanakan, dimana tahun 2017 merupakan tahun dasar, tahun 2018 merupakan tahun transisi dan indikatornya masih angka proyeksi, tahun 2019 merupakan tahun pertama RPJMD dan tahun 2023 merupakan tahun ke lima RPJMD. Indikator-indikator kinerja tersebut dituangkan dalam tabel berikut ini. Perhitungan indikator kinerja (metada terlampir) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Tabel VIII.1 .
Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi akhir
		2017	2023
		Target	Target
Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat kota	%	66,99	92,23
Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	69,07	73,04
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,01	7,46

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi akhir
		2017	2023
		Target	Target
Indeks Gini	Nilai	0,317	0,299
Persentase Penduduk Miskin	%	5,98	4,19
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	86,85	86,94
Angka kriminalitas yang tertangani	per 10.000 penduduk	10	13
Angka Konflik	Kasus	2	4
Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	-	B

Tabel VIII.2.
Indikator Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Barito Utara
Tahun 2018-2023

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	Target Capaian KInerja					
		Awal	Transisi	I	II	III	IV	V
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target
Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	%	84,47	84,47	84,47	84,47	85,44	92,23	92,23
Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	%	49,51	60,19	66,99	74,76	81,55	88,35	95,15
Persentase desa/ kelurahan *blankspot*	%	88,35	66,02	46,60	27,18	17,48	7,77	0,00
Rata-rata lama sekolah	tahun	8,38	8,57	8,60	8,70	8,80	8,90	9,00
Angka Melek Huruf	%	97,01	98,14	98,80	99,00	99,20	99,40	99,60
Angka Harapan Hidup	tahun	71,27	71,27	71,28	71,29	71,30	71,31	71,32
Angka Kematian Ibu	per 100.000 Kelahiran Hidup	256	256	256	256	213	213	213
Angka Kematian Bayi	per 1.000 Kelahiran Hidup	3	3	3	3	3	2	2

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	Target Capaian KInerja					
		Awal	Transisi	I	II	III	IV	V
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target
Pengeluaran perkapita pertahun	Juta rupiah	9.067	9.179	9.324	9.478	9.643	9.825	10.027
PDRB sektor pertanian	Juta rupiah	281.985,4	443.932,5	447.870,3	528.7574	571.795,0	618.194,5	668.183,8
PDRB sektor perikanan	Juta rupiah	132.642,0	144.040,5	156.533,2	165.273,2	173.743,4	180.593,6	186.685,8
PDRB sektor Perkebunan	Juta rupiah	361.185,4	352.767,4	361.324,2	369.472,9	378.721,2	387.784,1	396.640,2
PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	Juta rupiah	114.111,9	111.920,3	120.314,3	129.337,9	139.038,2	149.466,1	160.676,1
PDRB sektor perdagangan	Juta rupiah	507.514,2	508.735,0	509.701,6	510.873,9	512.662,0	513.584,8	515.125,5
PDRB sektor industri	Juta rupiah	677.509,5	678.892,3	680.182,2	681.746,6	684.132,7	685.364,2	687.420,3
Angka Pengangguran terbuka	%	5,19	4,60	4,31	3,99	3,71	3,44	3,17
Pendapatan Perkapita Penduduk	Juta Rupiah	49,27	47,30	48,67	50,05	51,42	52,79	54,17
Indeks Kualitas Air	Nilai	80,00	80,01	80,02	80,03	80,04	80,05	80,05
Indeks Kualitas Udara	Nilai	96,72	96,73	96,75	96,76	96,78	96,80	96,80
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	84,59	84,61	84,62	84,63	84,65	84,68	84,70
Jumlah kunjungan wisatawan	%	79,0	83,2	83,2	87,3	91,5	95,7	99,8
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	%	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	93,75
Persentase kasus konflik yang tertangani	%	100	80	80	80	80	80	80
Persentase PMKS yang tertangani	%	23,95	26,82	42,52	62,34	83,39	80,99	100
Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (Nilai)	-	-	C (31)	C (35)	CC (51)	CC (55)	B (61)
Nilai SAKIP	Predikat (Nilai)	C	CC (53,97))	CC (54,00)	B (60,01)	BB (70,01)	BB (70,01)	A (80,01)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM	Predikat (Nilai)	B	C (75,21)	B (76,61)	B (76,70)	B (76,80)	B (76,90)	B (77,00)
Opini BPK	Predikat (Opini ke-)	WTP	WTP (1)	WTP (1)	WTP (1)	WTP (1)	WTP (1)	WTP (1)

Tabel VIII.3
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara
Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja Perengkat Daerah (PD)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Awal	Transisi	I	II	III	IV	V	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	81,43	82,17	84,00	86,00	88,00	90,00	92,00	DINAS PENDIDIKAN
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	87,91	100,71	102,00	103,00	104,00	105,00	106,00	
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	85,47	98,17	99,00	100,00	101,00	102,00	103,00	
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	73,35	89,64	91,00	93,00	95,00	97,00	99,00	
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	56,64	75,09	80,00	83,00	86,00	89,00	92,00	
6	Angka Kelulusan (AL) SD	%	97,63	97,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Angka Kelulusan (AL) SMP	%	98,30	98,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Angka rata-rata lama sekolah (RLS)	tahun	8,38	8,57	8,6	8,7	8,8	8,9	9	
9	Angka Melek Huruf (AMH)	%	97,01	98,14	98,80	99,00	99,20	99,40	99,60	
10	Guru yang bersertifikat Profesi	%	37,00	38,00	48,00	58,00	68,00	78,00	88,00	
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,27	71,27	71,28	71,29	71,30	71,31	71,32	DINAS KESEHATAN
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	3	3	3	3	3	2	2	
3	Angka kelangsungan hidup bayi	Per 1000 Kel	997	975	976	977	978	979	980	
4	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	3	3	3	3	3	2	2	
5	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	3	20	19	18	17	16	15	

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja Perengkat Daerah (PD)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Awal	Transisi	I	II	III	IV	V	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
6	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 KH	256	256	256	256	213	213	213	DINAS KESEHATAN
7	Rasio posyandu per satuan balita	Per 1000 Balita	14	10	10	10	10	10	10	
8	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	0,78	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	
9	*Bed Occupancy Rate* (BOR)	%	87,00	77,00	74,00	71,00	73,00	76,00	79,00	
10	Rasio Dokter Umum	Per 100.000 penduduk	18	21,37	21,37	21,37	20,72	20,72	20,72	
11	Rasio Perawat	Per 100.000 penduduk	170	171,59	171,59	171,59	171,59	170,94	170,94	
12	Rasio Bidan	Per 100.000 penduduk	84	88,06	88,06	88,06	88,06	88,06	88,06	
13	Rasio Dokter Spesialis	Per 100.000 penduduk	9	9,71	9,71	9,71	9,07	9,07	9,07	
14	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	41,77	35	36	37	38	39	40	
15	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	86,31	80	81	82	83	84	85	
16	Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	%	90,3	88	91	94	97	100	100	
17	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja Perengkat Daerah (PD)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Awal	Transisi	I	II	III	IV	V	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	108,1	95	95	95	95	95	95	DINAS KESEHATAN
19	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	40	35	35	30	30	25	25	
20	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	94	85	85	87	87	90	95	
21	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	162	114	135	135	123	115	93	
22	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	2	4	4	4	4	4	4	
23	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	100	100	100	100	100	100	100	
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100	
25	Penderita diare yang ditangani	%	76	70	75	75	80	80	85	
26	Angka kejadian Malaria	Per 100.000 penduduk	16	4	15	12	8	4	4	
27	Tingkat kematian akibat malaria	Per 1000 penduduk	0	0	0	0	0	0	0	
28	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	
29	Cakupan kunjungan bayi	%	99,32	80	81	82	83	84	85	
30	Cakupan puskesmas	%	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
31	Cakupan pembantu puskesmas	%	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja Perengkat Daerah (PD)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Awal	Transisi	I	II	III	IV	V	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
32	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	89,22	80	81	82	83	84	85	DINAS KESEHATAN
33	Cakupan pelayanan nifas	%	85,94	83	83,5	84	84,5	85	85,5	
34	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	26,72	25	25,1	25,3	25,5	25,6	25,8	
35	Cakupan pelayanan anak balita	%	64,1	60,1	60,2	60,3	60,4	60,5	60,6	
36	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	
37	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	
38	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	99,9	90	92	95	98	98	100	
39	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	29,75	32,78	36,11	39,77	43,82	48,25	53,13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik	%	62,82	69,82	73,86	76,91	80,64	83,83	87,43	
3	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	3,23	13,23	23,23	33,23	43,23	53,23	63,23	
4	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	
5	Persentase rumah tangga berakses air bersih	%	42,47	44,71	46,83	49,17	51,63	54,21	56,92	
6	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	58,15	61,07	64,10	67,31	70,68	74,20	77,92	

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja Perengkat Daerah (PD)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Awal	Transisi	I	II	III	IV	V	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	43,24	50	55	60	65	70	75	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	Persentase/rasio kesesuaian pemanfaatan RTRW	Rasio	0,49	0,49	0,56	0,63	0,72	0,81	0,92	
9	Persentase Timbunan Sampah yang di tangani	%	88,16	88,56	89,12	89,74	90,50	91,40	92,31	
1	Rasio rumah layak huni	%	73,11	74,28	75,71	77,29	78,86	80,49	82,20	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	Rasio lingkungan Pemukiman Kumuh	%	4,08%	3,53%	2,98%	2,43%	1,88%	1,33%	0,78%	
3	Rasio Pemukiman layak huni	%	95,92%	96,47%	97,02%	97,57%	98,12%	98,67%	99,22%	
4	Jumlah Kebutuhan tanah untuk fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	Ha	2.649,86	0	6	4	4	4	4	
5	Penyelesaian kasus tanah	kasus	7	10	13	15	17	15	12	
6	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	-	-	-	100	100	100	100	
7	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	-	-	-	100	100	100	100	
1	Angka kriminalitas yang tertangani	per 10.000 penduduk	10	10	10	11	12	12	13	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	Penanganan konflik sosial	%	80	80	80	80	80	80	80	
3	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi /Pendidikan politik	orang	450	450	450	450	450	450	450	

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja Perengkat Daerah (PD)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Awal	Transisi	I	II	III	IV	V	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
4	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi/ kegiatan Wasbang	orang	100	100	100	100	100	100	100	
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	(org/per RT)	2	2	2	2	2	2	2	SATPOL DAN DAMKAR
2	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban Ketentraman , Keindahan)	%	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	93,75	
3	Persentase Penegakan Perda dan Perbup	%	75	60	60	100	100	100	100	
4	Persentase Penanganan Bencana Kebakaran	%	75	95,83	95,83	100	100	100	100	
1	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	25%	15%	26%	41%	56%	71%	85%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	Persentase Unsur PB dan Kebakaran	%	-	43%	56%	66%	76%	86%	90%	
3	Persentase Peralatan PB dan Kebakaran	%	-	46%	56%	65%	75%	85%	95%	
4	Persentase Logistik	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	Persentase Desa yang telah terbentuk BUMDES	%	35.29%	53,92%	59,80%	67,65%	74,51%	84,31%	91.18%	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	PKK Aktif	%	60.17%	66.37%	72.57%	78.76%	82.30%	84.95%	88.50%	
3	Jumlah penerima Program perlindungan dan jaminan sosial untuk keluarga miskin	%	20.93%	20.85%	20.78%	20.72%	20.65%	20.58%	20.52%	
4	Posyandu aktif	%	23,39%	23.98%	26.32%	29.24%	32.16%	35.09%	38,01%	

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja Perengkat Daerah (PD)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Awal	Transisi	I	II	III	IV	V	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Persentase PMKS yang tertangani	%	23,95%	26,82%	42,52%	62,34%	83,39%	80,99%	100%	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
6	Persentase desa yang memiliki Profil Desa	%	7,77%	10,75%	11,65%	13,59%	15,53%	17,48%	19,42%	
7	Persentase aparatur desa yang mampu SisKeuDes (Sistem Keuangan Desa)	%	48,00%	53,76%	59,14%	64,52%	69,89%	75,27%	80,65%	
8	Persentase aparatur desa yang mampu menyusun PERDES (Peraturan Desa)	%	16,00%	21,51%	26,88%	32,26%	37,63%	48,39%	53,76%	
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	59,73 %	59,93%	60,12%	60,29%	60,46%	60,61%	60,76%	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,6%	4,6%	4,31%	3,99%	3,71%	3,44%	3,17%	
3	Rasio penduduk yang bekerja	%	95,40%	95,40%	95,69%	96,00%	96,29%	96,56%	96,83%	
4	Angka penyelesaian perselisihan pengusaha pekerja per tahun	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Jumlah Desa yang teridentifikasi dan tersosialisasi untuk calon Lokasi Transmigrasi Baru SP Pugar	Desa	-	10	10	20	30	40	50	
6	Persentase koperasi aktif	%	15%	15%	18%	20%	23%	25%	27%	
7	Persentase Usaha Mikro kecil yang dibina	%	11%	11%	12%	13%	14%	16%	17%	
1	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/ Kapita/ tahun	144,83	146,24	146,36	147,85	148,24	149,45	150,23	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	Produksi Perikanan	Ton	6487,07	6211,20	7375,72	8318,36	9403,31	10.559,51	11.765,06	
3	Konsumsi Ikan	Kg/Kapita / Tahun	47	40,85	47	47,53	48,04	48,59	49,02	

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja Perengkat Daerah (PD)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Awal	Transisi	I	II	III	IV	V	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kelompok	83	75	86	88	90	92	95	
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	80	80,01	80,02	80,03	80,04	80,05	80,05	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	96,72	96,73	96,75	96,76	96,78	96,80	6,80	
3	Indeks Kualias Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	84,59	84,61	84,62	84,63	84,65	84,68	84,70	
1	Rasio penduduk ber KTP el per satuan penduduk	%	0,57	0,67	0,77	0,87	0,97	1,00	1,10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	Rasio bayi ber akta Kelahiran	%	0,52	0,62	0,72	0,82	0,92	1,02	1,22	
3	Rasio pasangan ber akta nikah	%	0,12	0,32	0,52	0,72	0,92	1,12	1,32	
4	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP el)	%	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	
5	Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	%	55,00	65,00	70,00	75,00	80,00	95,00	100,00	
6	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	14,21	14,21	20,07	40,15	50,18	80,29	100,00	
8	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	Ada/ Tidak ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ belum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	ratio	0,69	0,66	0,64	0,62	0,61	0,59	0,58	DINAS DALDUK KB PPPA
2	Peningkatan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	%	60	60	61,4	62,3	63,3	64	65	

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja Perengkat Daerah (PD)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Awal	Transisi	I	II	III	IV	V	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Cakupan Penyelenggaraan Keluarga Sejahtera dan Kelompok Kegiatan yang ber-KB	%	65,57	69,16	74,83	78,72	83,29	87,70	91,72	DINAS DALDUK KB PPPA
4	Cakupan Penyelenggaraan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	45,80	52,71	51,64	52,14	52,72	53,25	53,79	
5	Rasio KDRT	Rasio	0,16	0,15	0,11	0,09	0,08	0,06	0,06	
6	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Ratio	0,98	0,99	0,99	0,99	0,996	0,998	1,00	
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	15.166	4.358	4.458	4.558	4.658	4.758	4.858	DINAS PERHUBUNGAN
2	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	1.027	171	671	721	771	821	871	
3	Jumlah Pelabuhan Udara	Buah	1	1	1	1	1	1	2	
4	Persentase layanan angkutan darat	%	9	30	29	29	28	27	27	
5	Pemasangan rambu-rambu	Buah	0	0	50	100	150	200	250	
6	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang/ barang	75.221	76.653	76.703	76.753	76.803	76.853	76.903	
1	Persentase Desa / Kelurahan *Blankspot*	%	88,35 %	66,02 %	46,60 %	27,18 %	17,48 %	7,77 %	0 %	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	Cakupan layanan komunikasi dan informasi daerah	%	30 %	45 %	53 %	73 %	83 %	92 %	100%	
3	Cakupan Konektivitas Jaringan Komunikasi antar Perangkat Daerah (PD)	%	20 %	25 %	28 %	56 %	100 %	100 %	100%	

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja Perengkat Daerah (PD)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Awal	Transisi	I	II	III	IV	V	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Cakupan keamanan layanan informasi Perangkat Daerah (PD)	%	18 %	22 %	28 %	50 %	61 %	83 %	100 %	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
5	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan	%	0%	0%	44%	67%	100%	100%	100%	
1	Jumlah Nilai Investasi di Kabupaten Barito Utara	Dalam juta Rupiah	-	4.566.047	2.540.157	2.768.771	3.017.960	3.289.577	3.585.638	DINAS PENANAMAN MODAL, PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	Jumlah Investor di Kabupaten Barito Utara	Investor	47	235	231	243	120	134	134	
3	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	79,61	80	81	81	82	82	
1	Persentase Penataan Kearsipan Daerah	%	13,8	22,2	27,7	33,3	38,8	44,4	50	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	11.719	10.000	11.000	11.500	11.750	12.000	12.500	
3	Jumlah Pelayanan Melalui Mobil Perpustakaan Keliling	Pelayanan	16	16	18	20	22	24	26	
4	Persentase Perpustakaan Desa yang di Bina	%		32	35,90	39,80	43,60	47,50	51,40	
1	Persentase kunjungan wisata	persentase	79%	83,2%	83,2%	87,3%	91,5%	95,7%	99,8%	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya	persentase	100%	100%	67%	83%	100%	100%	100%	
3	Persentase group kesenian yang aktif	persentase	63%	63%	63%	69%	69%	75%	75%	
4	Persentase pelestarian Situs dan Benda Cagar Budaya	persentase	24%	24%	24%	24%	24%	24%	28%	

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja Perengkat Daerah (PD)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Awal	Transisi	I	II	III	IV	V	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Persentase objek wisata yang dikembangkan	Persentase	5.77%	5.77%	5.77%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
6	Persentase organisasi pemuda yang aktip	persentase	-	-	50%	55%	60%	70%	75%	
7	Jumlah prestasi olahraga	Cabang olahraga	-	-	4 cabang olahraga	4 cabang olahraga	5 cabang olahraga	5 cabang olahraga	5 cabang olahraga	
1	Produksi Tanaman Pangan	Ton	89.570	141.707	150.109	158.961	168.351	178.330	188.930	DINAS PERTANIAN
2	Produksi Daging Ternak dan telur	Kg	-	1.771.745	1.687.870	1.823.230	1.894.774	1.969.474	2.047.462	
3	Produksi Perkebunan	Ton	37.960,17	38.809,63	39.681,43	40.576,34	41.495,17	42.438,75	43.407,96	
1	Pertumbuhan Industri pertahun	%	4,95	4,95	4,95	4,95	4,97	4,97	5,45	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	Jumlah dan jenis produk unggulan daerah	Jumlah Produk Unggulan	10	10	10	10	12	14	15	
3	Persentase pencapaian Pendapatan Asli Daerah sektor perdagangan	%	85	85	85	90	90	95	95	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	-	-	C (31)	C (35)	CC (51)	CC (55)	B (61)	SEKRETARIAT DAERAH
2	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Predikat	C	CC (54,00)	B (60,01)	BB (70,01)	BB (70,01)	A (80,01)	A (80,01)	

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja Perengkat Daerah (PD)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Awal	Transisi	I	II	III	IV	V	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD) hasil penilaian dari Kemendagri	Predikat	Tinggi (2,7500)	Tinggi (2, 7500)	Tinggi (2, 8000)	Tinggi (2,9000)	Tinggi (2,9000)	Tinggi (2,9500)	Tinggi (2,9500)	SEKRETARIAT DAERAH
4	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	Predikat	B	C (75,21)	B (76,61)	B (76,70)	B (76,80)	B (76,90)	B (77,00)	
5	Nilai Indeks Kematangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dari LKPP	Tingkatan	Level 1 (20%)	Level 1 (20%)	Level 1 (20%)	Level 2 (40%)	Level 3 (60%)	Level 4 (80%)	Level 5 (100%)	
1	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah	%	-	26,28	70	72	72	73	75	SEKRETARIAT DPRD
2	Persentase rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	%	-	94,75	95	95	95	95	95	SEKRETARIAT DPRD
1	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	-	45,20	47,28	50,82	54,35	56,84	58,29	KECAMATAN TEWEH TENGAH
1	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	-	50,00	61,11	63,89	83,33	91,67	100,00	KECAMATAN TEWEH BARU
1	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	-	40,19	54,63	66,30	81,67	93,33	100	KECAMATAN TEWEH SELATAN
1	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	-	40,19	54,63	66,30	81,67	93,33	100	KECAMATAN TEWEH TIMUR
1	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	-	38,53	38,95	48,04	57,13	65,17	66,62	KECAMATAN LAHEI
1	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	-	40,19	54,63	66,30	81,67	93,33	100,00	KECAMATAN LAHEI BARAT

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja Perengkat Daerah (PD)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Awal	Transisi	I	II	III	IV	V	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	-	54,63	66,30	81,67	54,63	66,30	81,67	KECAMATAN MONTALLAT
1	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	-	40,19	54,63	66,30	81,67	93,33	100,00	KECAMATAN GUNUNG PUREI
1	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	-	40,19	54,63	66,30	81,67	93,33	100,00	KECAMATAN GUNUNG TIMANG
1	Persentase peningkatan hasil pengawasan secara berkala terhadap objek pemeriksaan berdasarkan PKPT	%	80%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	INSPEKTORAT
2	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIPD sesuai ketentuan	%	15%	15%	15%	56%	69%	83%	90%	
3	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti temuan pengawasan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	%	61%	56%	42%	42%	42%	42%	42%	
5	Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti : Keuangan Negara/daerah dan Administrasi	%	72%	100%	90%	90%	90%	90%	90%	
6	Jumlah Perangkat Daerah hasil reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan predikat menyakinkan	Perangkat Daerah (PD)	30	30	36	36	36	36	36	

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja Perengkat Daerah (PD)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Awal	Transisi	I	II	III	IV	V	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
7	Jumlah Perangkat Daerah hasil reviu LKIP dengan predikat baik	Perangkat Daerah (PD)	5	15	15	15	15	15	20	
1	Persentase Program dalam APBD yang sesuai dengan dokumen perencanaan RPJMD	%	99,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2	Persentase Kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan dokumen perencanaan RKPD	%	86,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD	%	29,77	31,26	32,83	34,47	36,19	38,00	39,50	
4	Persentase Kajian/Penelitian yang dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan pembangunan daerah	%	0	0	19	50	50	75	100	
1	Persentase penerbitan dokumen keuangan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET
2	Persentase tanah milik pemerintah yang bersertifikat	%	71,10	73,52	75,94	78,36	80,77	83,19	85,61	

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja Perengkat Daerah (PD)						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Awal	Transisi	I	II	III	IV	V	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Peningkatan PAD	%	45,36	-15,24	13,83	8,00	8,00	8,00	8,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
2	Desentralisasi Fiskal	%	7,68	6,27	7,28	7,62	7,97	8,33	8,83	
1	Persentase pejabat Struktural yang telah mengikuti pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	%	-	56	58	61	64	68	71	BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA
2	Persentase PNS Daerah Sesuai Kebutuhan pegawai	%	-	68	72	75	79	83	87	

BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen yang menjabarkan rencana kerja Pemerintah Daerah yang akan dicapai selama masa jabatan Bupati Barito Utara periode Tahun 2018-2023. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

9.1. Pedoman Transisi

Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan serta dalam rangka mengisi kekosongan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setelah berakhirnya RPJMD periode 2018-2023, maka dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 ini akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode berikutnya. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan pembangunan yang belum dapat ditangani secara tuntas sampai dengan akhir periode RPJMD, serta untuk mencari solusi terhadap permasalahan pembangunan baru yang muncul pada tahun pertama masa pemerintahan Kepala Daerah yang baru.

Untuk target pembangunan yang telah tercapai pada periode sebelumnya, maka TAPD perlu merumuskan kembali serta menetapkan besaran target baru yang akan dicapai pada masa transisi dengan menggunakan Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya, dokumen RKPD masa transisi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD periode selanjutnya.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Dokumen ini menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Barito Utara, beserta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang dimuat dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya pada tahun 2018-2023 serta masa transisi tahun 2023;
2. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023;
3. Pemerintah Kabupaten Barito Utara wajib menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara wajib menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara;
5. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Barito Utara wajib melakukan penyelarasan antara penjabaran RPJMD Tahun 2018-2023 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan melakukan harmonisasi program dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja untuk mengukur pencapaian

target atau rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023;

6. Bagi program prioritas Pemerintah Daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun prioritas nasional, dimana terdapat kemungkinan bahwa Pemerintah Daerah tidak mampu mengalokasikan anggaran terhadap program tersebut, maka dalam hal pembiayaannya dapat dilakukan melalui berbagai macam skema, antara lain melalui kerjasama dengan Badan Usaha (*Public Private Partnership*), *Corporate Social Responbility* (CSR), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), maupun Kerjasama Kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah, baik dalam negeri maupun lembaga-lembaga internasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undanganan yang berlaku;
7. Dalam hal pelaksanaan RPJMD tersebut, apabila target kinerja yang ditetapkan telah tercapai, maka perlu dirumuskan kembali besaran target kinerja baru dan selanjutnya ditetapkan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.

Muara Teweh, 22 Maret 2019

BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH